



# PERAN MEDIA DAN KOMUNIKASI

DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK  
DAN PERILAKU SOSIAL

Novi Andayani Praptiningsih, Andys Tiara, Bayujati Prakoso, Eko Digdoyo,  
Fajar Adi, Farida Hariyati, Gilang Kumari Putra, Hendri Prasetya, Indriani,  
Magvira Yuliani, Mustiawan, Nurdin Sibaweh, Rita Pranawati, Rd. Heri  
Solehudin, Sri Mustika, Syaiful Rohim, Tellys Corliana, Vilya Dwi Agustini,  
Wininda Qusnul Khotimah, Yulia Rahmawati

# **Peran Media dan Komunikasi dalam Membentuk Opini Publik dan Perilaku Sosial**

Novi Andayani Praptiningsih, Andys Tiara, Bayujati Prakoso, Eko Digdoyo, Fajar Adi, Farida Hariyati, Gilang Kumari Putra, Hendri Prasetya, Indriani, Magvira Yuliani, Mustiawan, Nurdin Sibaweh, Rita Pranawati, Rd. Heri Solehudin, Sri Mustika, Syaiful Rohim, Tellys Corliana, Vilya Dwi Agustini, Wininda Qusnul Khotimah, Yulia Rahmawati

## **Peran Media dan Komunikasi dalam Membentuk Opini Publik dan Perilaku Sosial**

Penulis:

Novi Andayani Praptiningsih, Andys Tiara, Bayujati Prakoso, Eko Diggido, Fajar Adi, Farida Hariyati, Gilang Kumari Putra, Hendri Prasetya, Indriani, Magvira Yuliani, Mustiawan, Nurdin Sibaweh, Rita Pranawati, Rd. Heri Solehudin, Sri Mustika, Syaiful Rohim, Tellys Corliana, Vilya Dwi Agustini, Wininda Qusnul Khotimah, Yulia Rahmawati

Editor:

Novi Andayani Praptiningsih

Farida Hariyati

Andys Tiara

Layout: Durri Yatul Lumah

Desain Sampul: Jaenudin

Ukuran: 14,8 cm x 21 cm

Tebal: vi + 305 halaman

Penerbit: UHAMKA PRESS

Redaksi:

Jl. Gandaria IV, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Email: [press@uhamka.ac.id](mailto:press@uhamka.ac.id)

Anggota IKAPI: 493/DKI/VII2014



Cetakan ke-I, Juli 2025

ISBN. 978-623-7724-54-4

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul "Peran Media dan Komunikasi dalam Membentuk Opini Publik dan Perilaku Sosial" ini dapat disusun dan disajikan kepada pembaca sekalian.

Dalam era digital yang ditandai dengan arus informasi yang masif dan cepat, media dan komunikasi telah menjadi elemen kunci dalam pembentukan opini publik dan perilaku sosial. Peran ini menjadi semakin signifikan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, media sosial, dan platform digital lainnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bagaimana media dan komunikasi memengaruhi pola pikir dan tindakan sosial menjadi sangat penting, tidak hanya bagi para akademisi, tetapi juga bagi para pengambil kebijakan, jurnalis, aktivis, dan masyarakat luas.

Media dan komunikasi tidak hanya menjadi alat tukar informasi, tetapi juga sarana yang kuat dalam memengaruhi pola pikir, membentuk opini publik, dan mengarahkan perilaku sosial masyarakat. Dalam konteks global yang terus berubah dan semakin terhubung, kemampuan media dan komunikasi untuk mempengaruhi arah pembangunan sosial dan budaya menjadi sangat penting untuk dicermati secara kritis dan konstruktif.

Buku ini menghimpun berbagai pemikiran dan perspektif dari sejumlah topik yang saling berkaitan, serta disusun sebagai bentuk kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Media dan komunikasi memiliki peran strategis dalam mendidik masyarakat, memperluas akses informasi yang inklusif, serta membangun kesadaran kolektif terhadap isu-isu sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Lebih dari itu, media dapat menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan, transparansi, dan partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi.

Buku ini mengkaji hubungan antara media, komunikasi, dan perilaku sosial dalam berbagai konteks modern. Setiap bab terhubung dengan 14 tema besar yang merefleksikan tantangan dan dinamika komunikasi di era digital dan globalisasi. Tema

digitalisasi dan perilaku sosial membahas perubahan interaksi generasi muda serta fenomena baru di dunia maya. Tema pelestarian budaya lokal dan kearifan budaya mengangkat strategi komunikasi dalam mempertahankan identitas budaya di tengah modernisasi. Komunikasi keluarga dan pembentukan karakter anak menjadi sorotan penting, mengingat perubahan pola asuh di era digital. Di sisi lain, media massa dan opini publik dianalisis sebagai kekuatan dalam membentuk persepsi sosial dan dinamika politik. Buku ini juga membahas komunikasi politik dan antarbudaya dalam menjaga persatuan bangsa, penyelesaian konflik sosial, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan demokrasi. Tema tentang keragaman budaya dan komunikasi keagamaan memperkuat nilai toleransi dan karakter bangsa. Selain itu, perhatian terhadap kesetaraan gender, transformasi sosial berbasis gerakan Islam, serta modernitas dalam diskursus kebangsaan memperkaya analisis dalam buku ini. Tema tentang pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam, buku ini menawarkan refleksi kritis atas pentingnya komunikasi dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berperadaban.

Buku ini diharapkan dapat memperluas perspektif pembaca tentang bagaimana komunikasi, baik dalam bentuk interpersonal, sosial, digital, maupun strategis, berkontribusi nyata terhadap transformasi sosial yang berkeadilan, isu digitalisasi, pelestarian budaya lokal, komunikasi dalam keluarga, hingga peran komunikasi keagamaan dan antarbudaya, serta inklusif, dan berkelanjutan.

Melalui buku ini, kami berharap dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai dinamika media dan komunikasi dalam membentuk opini publik, serta dampaknya terhadap perubahan sosial. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi, rujukan akademik, serta alat refleksi untuk membangun masyarakat yang lebih sadar, terbuka, dan berdaya.

Jakarta, 25 April 2025

Tim editor

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 .....</b>	<b>1</b>
Dari Einar ke Lili': Representasi Identitas Seksual Transgender dalam Film The Danish Girl .....	1
<b>BAB 2 .....</b>	<b>10</b>
Lorong Toleransi: Peran dan Tanggung Jawab Sosial Media dalam Membangun dan Menguatkan Nilai Perdamaian di Tengah Keragaman Etnis, Agama, Budaya .....	10
<b>BAB 3 .....</b>	<b>35</b>
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyuluhan Pembangunan.....	35
<b>BAB 4 .....</b>	<b>52</b>
Komunikasi Internasional Dalam Pembangunan: Tinjauan Teoritis Dan Konseptual .....	52
<b>BAB 5 .....</b>	<b>75</b>
Komunikasi Humor dalam Telaah Sosiologis .....	75
<b>BAB 6 .....</b>	<b>98</b>
Media sosial, Media Massa dan Pembentukan Opini Publik .....	98
<b>BAB 7 .....</b>	<b>107</b>
Generasi Alpha Dan Dinamika Komunikasi Digital: Pergeseran Makna, Pola Interaksi, Dan Tantangan Sosial .....	107
<b>BAB 8 .....</b>	<b>115</b>
Hiperrealitas Kemenangan Judi Online pada Konten Media Sosial dengan Normalisasi Perilaku Judi di Masyarakat .....	115

<b>BAB 9 .....</b>	<b>130</b>
FoMO Sebagai Lifestyle Mahasiswa di Dunia Maya .....	130
<b>BAB 10 .....</b>	<b>140</b>
Organized Interests dan Tanggapan Masyarakat Madani dalam Penanganan Radikalisme Agama Di Indonesia .....	140
<b>BAB 11 .....</b>	<b>162</b>
Strategi Partai Politik di Indonesia dalam Mempengaruhi Perilaku Pemilih Muda Melalui Media Sosial .....	162
<b>BAB 12 .....</b>	<b>181</b>
Komunikasi Keluarga di Era Digital dalam Pembentukan Karakter Anak .....	181
<b>BAB 13 .....</b>	<b>192</b>
Peran Komunikasi Keluarga dalam Mencegah Kenakalan Remaja pada Era Digital .....	192
<b>BAB 14 .....</b>	<b>209</b>
Media Dan Opini Publik dalam Membentuk Propoganda Politik	209
<b>BAB 15 .....</b>	<b>226</b>
Peneguhan Peran Domestik Perempuan melalui Meme Internet Berbasis Gender .....	226
<b>BAB 16 .....</b>	<b>239</b>
Cyberkids: Penggunaan Media Digital dalam Kajian Komunikasi Keluarga .....	239
<b>BAB 17 .....</b>	<b>252</b>
Komunikasi Partisipatoris Dalam Penguatan Modal Sosial Masyarakat Adat Untuk Pelestarian Lingkungan.....	252
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>263</b>

**BAB 1**  
**Dari Einar ke Lili': Representasi Identitas Seksual**  
**Transgender dalam Film The Danish Girl**  
Bayujati Prakoso

## **Abstrak**

Film merupakan medium dalam menyampaikan pesan, termasuk pesan-pesan berbasis gender. Film The Danish Girl mengisahkan Einar untuk menjadi transgender. Film ini dikaji dengan mengidentifikasi representasi identitas transgender. Pada ulasan ini, terlihat bahwa fenomena transgender yang muncul dalam film ini tervisualisasi melalui pakaian, serta penampilan dan perilaku yang berbeda dengan gender aslinya sebagai laki-laki menjadi seperti perempuan. Terdapat konstruksi gender pada sikap yang berpenampilan seperti perempuan. Hal ini menandai bahwa terdapat pembentukan identitas sosial transgender. Namun, dalam pandangan Islam, Islam sangat tegas menolak transgender. Islam memandang bahwa laki-laki yang berperilaku seperti perempuan, dan perempuan yang berperilaku seperti laki-laki adalah hukumnya haram. Pada konteks ini, bahwa Islam mengajarkan manusia untuk saling menghargai kodrat penciptaan, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Dengan bersyukur dan menjalankan peran masing-masing sesuai fitrah merupakan jalan tepat untuk kehidupan lebih baik dan bermakna.

Kata kunci: representasi transgender; identitas seksual; komunikasi gender; komunikasi islami

## **PENDAHULUAN**

### **Sinopsis Film The Danish Girl**

The Danish Girl yaitu film yang mengisahkan sosok laki-laki bernama Einar Wegener yang memutuskan menjadi transgender usai berperan sebagai model wanita untuk lukisan sang istri, Gerda. Pada suatu acara, acara yang mengundang Gerda dan

Einar, tatkala dia (Einar) tidak mau pergi karena orang-orang membanjirinya sebagai artis. Gerda menyadari bahwa dia bisa menyamar sebagai Lili. Gerda merias wajah Einar dan mencariwig untuknya.

Gerda sekarang telah menemukan subjeknya: dia melukis Einar sebagai Lili. Ketika dia menyajikan lukisan-lukisan ini kepada kolektor seni, dia menyukainya dan ingin mengadakan pertunjukan dengannya. Singkat cerita, Einar sebagai Lili berperan lebih mendalam. Einar operasi ingin seperti layaknya menjadi wanita. Tatkala, Lili mengatur untuk menjalani bagian kedua dari operasinya meskipun Gerda mengatakan kepadanya bahwa itu terlalu dini. Tetapi dokter setuju sehingga dia kembali ke rumah sakit dan menjalani prosedur tersebut. Baik Gerda dan Hans ada di sana untuk memberikan dukungan tetapi dokter memberi tahu mereka bahwa operasinya tidak berjalan dengan baik dan prognosisnya tidak terlihat baik.

Seiring berjalan, Gerda, sang istri melihat bahwa ada suara lemah, dari ruang pemulihan. Lili merasa senang, dan merasa seperti apa dia seharusnya. Dia menambahkan bahwa Tuhan menjadikannya seorang gadis tetapi ada beberapa kesalahan dalam fisiknya. Kemudian, Gerda dengan teguhnya membawa Lili untuk keluar dengan kursi roda rumah sakit. Dari situ muncul dialog kembali. Walau Lili sakit, tapi ia tetap bahagia. Dan akhirnya, Lili meninggal.

Dikutip dari Imdb, ketika sesi film terakhir, Hans dan Gerda berjalan-jalan di Denmark dan berhenti di lima pohon, pohon yang telah dilukis Einar di awal film. Syal yang dikenakan Gerda tertutup angin. Hans pergi untuk mengambilnya tapi dia menyuruhnya untuk membiarkannya. Tampaknya potongan pakaian wanita mengapung di langit, di atas pemandangan indah yang pernah dilukis oleh Einar, melambangkan makna bahwa Lili akhirnya bebas.

## **Feminisme Radikal Kultural**

Dalam bahasa latin, 'feminisme' adalah *femina*, diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah *feminine* yang artinya mempunyai sifat-sifat keperempuanan. Penambahan akhiran *-isme* jadi feminism yang menandai tentang paham keperempuanan (Izziyana, 2017). Kemudian, term *radical* diartikan *down to the roots*, atau kembali ke akar permasalahan. Tujuan daripada feminism radikal adalah melakukan penggalian penyebab mendasar ketaksetaraan power (kekuasaan) antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, gerakan ini bersifat kultural dilakukan dalam rangka memunculkan sensitif atau kepekaan gender pada lanskap praktik sosial (Wardatun, 2006; Dandy, 2019).

Aliran ini terbagi menjadi dua bagian, (Nihayah & Suharto, 2020) yakni feminism radikal-libertarian dan feminism radikal-kultural. Gender yang membuat rugi para wanita menjadi pendapat dari feminism radikal-libertarian. Sebab, hal ini menjadikan keharusan bagi laki-laki menjadi maskulin (androgini), dan perempuan jadi feminim. Sementara, paham yang merujuk lebih baik jadi feminim perempuan daripada menjadi maskulin laki-laki adalah pandangan bagi feminism radikal-kultural. Gerakan feminis radikal kultural mengaksentuasi pada sifat seperti laki-laki secara kultural, otonomi, serta menghapuskan sifat layaknya laki-laki secara intelektual, kultural, hierarkis, dan lain sebagainya (Nihayah & Suharto, 2020). Gerakan feminis radikal ini, menolak sebuah institusi keluarga, dan menekankan bahaya heteroseksual, dan membangun opsi pada homoseksualitas (Kholil, 2016; Umar, 2005).

## **PEMBAHASAN**

### **Representasi Identitas Seksual Transgender: Kajian Feminis Radikal Kultural**

Einer dimintai oleh Gerda untuk menjadi seorang Lili yang menggunakan baju balet yang lengkap dengan memakai atribut, make up dengan tujuan untuk dibuat sebuah gambar lukisan itu,

dari situ Einer setuju, dan berperan sebagai Lili, yakni Lili yang memerankan menjadi wanita penari balet. Sampai pada titik bahwa, dirinya mengalami rasa nyaman untuk berperan layaknya sebagai perempuan. Sehingga, pada beberapa adegan, Einar bertindak sebagai Lili dan berperan ketemu banyak laki-laki dan senang berhubungan dengan laki-laki. Tidak sedikit adegan ciuman muncul antara Lili dengan laki-laki. Hal itu sejalan dengan kaum feminis radikal, homoseksual sebagai sebuah jalan, heteroseksual merupakan praktik patriarkis yang tidak sesuai dengan spirit feminis radikal. Dengan pilihan homoseksualitas, menurut Umar (2005), mereka, para feminis radikal menganggap akan ada kemungkinan melenyapkan penindasan melalui spirit homoseksualitas.

Peran Einer sebagai Lili yang digambarkan seorang perempuan seolah menjadi diri seutuhnya. Ia tampak menyadari bahwa ada sisi feminism dalam dirinya, dengan ia mencoba berpenampilan seperti perempuan, menjadi seolah dirinya bebas dan menikmati kehidupan. Hal ini merupakan krisis identitas. Krisis identitas dalam diri Einar muncul.

Kerangka tersebut, hal ini senada dengan misi feminis radikal kultural yang menghadirkan bahwa hubungan seks heteroseksual sebagaimana adanya adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Harus lenyap relasi seks heteroseksual, termasuk relasi keluarga untuk menciptakan tatanan baru dan menghilangkan patriarki. Dalam bahasa Daly (dalam Rahadian, 2019) menyebutnya hidup sebagai wild female.

Dia (Einer) telah berubah dan dia senang bisa menghuni sebagai identitas seorang wanita menjadi Lili. Dan dia ingin memperjuangkan bahwa identitas perempuan adalah bisa dilakukannya dengan cara merubah jenis kelamin dan semua penampilan serba perempuan. Beberapa kali, ketika hendak pergi, Einar mencari baju-baju perempuan, dan berpose layak perempuan, dan mengganti pakaian layaknya perempuan. Penggambaran ini, sejalan dengan misi bagi para feminis radikal (Izziyana, 2017) adalah bagaimana perempuan memutus relasi

dengan laki-laki, jika tidak maka sulit atau/ tidak mungkin untuk berjuang melawan laki-laki. Sistem patriarkis harus disingkirkan.

Laki-laki yang digambarkan pada film ini, bahwa adrogini merupakan keinginan Einar dengan tujuan bisa mengambil segala yang berkaitan perihal perempuan, dengan ia semakin tertarik pada perempuan dan ingin menjadi perempuan seutuhnya dalam pikiran dan tindakan sebagai layaknya perempuan dengan usahanya operasi, namun gagal. Einar merasa seperti ada sosok lain yang dulu seperti ada dalam dirinya. Ia tidak bisa membendung lagi jiwa perempuan dalam diri nya.

Akhirnya, Einar seringkali memakai pakaian-pakaian perempuan, dan ketidaktinginan dipanggil dengan sebutan Einar. Einar ingin menjadi seorang perempuan, dan diwujudkan dengan perannya seperti layak perempuan dengan nama Lili. Inilah representasi transgender yang dimediasi dalam film ini. Adegan diatas, yang Einar berperan jadi Lili ketika berpakaian ala wanita, melakukan diskusi terhadap laki-laki dan berciuman, menandakan ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa jadi wanita seutuhnya. Jelas, Einar tengah hilang identitas seksual laki-lakinya (Siregar & Suyanto, 2017). Lili ingin sekali punya rahim, dan melahirkan. Hal ini selaras kaum feminis radikal. Mereka ingin menjelma jadi perempuan bangga & puas ketika dapat melahirkan generasi berikutnya. Mereka ingin hamil, menjelma menjadi ibu, dan menjadi perempuan sempurna (Nihayah & Suharto, 2020).

Film ini bernuansa isu gender. Isu transgender yang ditampilkan oleh seorang Einer tampak kentara adanya. Transgender merupakan orang yang berpenampilan tidak layak/sesuai dengan pada umumnya peran gender. Film tersebut yang mengangkat fenomena transgender ini. Perjuangan hak-hak asasi LGBT kerap muncul dalam film ini. Bahwa, misi transgender yang diimpikan oleh Einar penuh dengan lika-liku perjuangan demi kebebasan individu untuk memilih. Representasi transgender ini ditampilkan melalui pakaian, mackup, penampilan dan tingkah laku dari Lili (Jaya & Prawiradiredja, 2017). Hal ini terbukti ketika bagaimana Lili merupakan hasil konstruksi/produk sosial, yang

diajak olehistrinya untuk berpenampilan perempuan, dan diperkuat pada ketika ia melihat bahwa dirinya dulu memiliki dua jiwa, yang akhirnya menjadi kebiasaan, dan merasa nyaman. Proses pembentukan identitas sosial ini membentuk bagaimana muncul persepsi dalam diri dan di masyarakat.

### **Islam Memandang Transgender**

Islam sudah sangat jelas bahwa hukum transgender adalah haram. Islam tidak memperbolehkan laki-laki menyerupai perempuan, begitu sebaliknya. Artinya, laki-laki tetaplah laki-laki, begitu juga perempuan tetap menjadi perempuan. Kodrat menjadi laki-laki dan perempuan berarti patut disyukuri sebagai anugerah dari Allah Swt. Oleh karena itu, tidaklah boleh berpenampilan dan berperilaku yang tidak sesuai, laki-laki ingin menjadi perempuan, begitu sebaliknya, perempuan ingin menjadi laki-laki. Bahkan, tidaklah bisa pula mengubah jenis kelamin, dari jenis kelamin laki-laki ke perempuan, begitu sebaliknya. Maka, dalam konteks ini, setiap insan manusia mesti berperilaku dan bertindak sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya.

Pemahaman LGBT kerap disosialisasikan atau muncul di berbagai medium. Maka, sebagai Muslim, penting untuk senantiasa menolak LGBT karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi, penting bagi setiap individu, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt., dan senantiasa melakukan tugas kebaikan-kebaikan. Seruan untuk berbuat baik (amar ma'ruf) dan mencegah kemungkaran (nahi munkar) adalah ikhtiar yang tepat bagi setiap individu. Hal tersebut termaktub dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka lah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Ali-Imran: 104)

Allah Swt., memerintahkan umat manusia agar selalu berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berperilaku baik adalah dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Swt., atas segala yang telah diberikan-Nya kepada hamba-Nya. Selain itu, perbuatan baik adalah dengan senantiasa meningkatkan ibadah dan iman serta berakhhlak baik kepada semua orang. Lalu, bentuk mencegah hal yang mungkar adalah dengan tidak melakukan transgender, memahami bahwa transgender perbuatan mungkar, karena menyalahi kodrat yang telah Allah berikan kepada manusia.

Maka dari itu, dalam rangka terus memantaskan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berikut usaha-usaha yang dapat dilakukan adalah; 1) Mensyukuri atas segala apa yang telah Allah Swt., berikan kepada kita, termasuk mensyukuri diri bahwa individu sebagai laki-laki dan individu sebagai perempuan; 2) senantiasa berperilaku bagi laki-laki layaknya laki-laki, dan perempuan berperilaku sebagai seorang perempuan; 3) beramal dalam kebaikan dimanapun dan kepada siapapun; 3) menjaga kehormatan diri dengan baik; 4) mencegah perbuatan munkar (nahi munkar); 4) senantiasa berdoa untuk terhindar dari perbuatan tercela. Selain kita melakukan perbuatan baik dan mencegah kemungkaran, adalah senantiasa beriman kepada Allah Swt. Hal tersebut Allah sampaikan dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 110 yang berbunyi,

كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أَخْرَجْتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِيُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْلَا إِيمَانَ أَهْلِ الْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثُرُهُمُ الْفَسِيقُونَ

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (Q.S. Ali-Imran: 110).

Allah Swt. menganjurkan kepada seluruh manusia untuk dapat menjadi manusia terbaik (khoiru ummah) adalah dengan

senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Swt. Praktik beriman kepada Allah Swt., adalah penting seraya kita berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebab, semua usaha kebaikan dan mencegah kemungkaran harus dilandasi dengan iman kepada Allah Swt. Dengan begitu, iman dapat meningkat, kekuatan untuk senantiasa menjalankan kebaikan dan kemungkaran.

Setiap individu penting juga untuk senantiasa berilmu. Mempelajari ilmu, utamanya ilmu agama menjadi penting untuk kehidupan yang lebih damai dan ketenteraman hidup. Manfaat lainnya, jika berilmu, maka dapat memahami segala landasan dan aturan yang harus dan tidak harus dilakukan. Dengan berilmu, kita senantiasa bisa menjaga diri karena punya landasan ilmu yang baik. Allah Swt. memberikan ganjaran meningkatkan derajat untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Hal itu diterangkan dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi,

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقْسِحُوا فِي الْمَجَلِسِ  
فَأَفْسَحُوا يَقْسِحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أُنْشِرُوا فَأَنْشِرُوا يَرْفَعَ  
الَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
مَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ

Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Mujadalah: 11)

Dari surah Al-Mujadalah ayat 11 dapat kita pelajari bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk hadir dalam majlis-majlis ilmu. Allah Swt., memberikan ganjaran meninggikan derajat bagi orang yang beriman dan berilmu. Maka dari itu, ilmu adalah kebutuhan yang harus dimiliki setiap individu, maka, umat Muslim,

penting untuk senantiasa berilmu. Dengan ilmu juga akan membuka kebenaran. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang berilmu dan terus belajar untuk meningkatkan ilmu yang dimiliki dengan proses yang baik.

## **SIMPULAN**

The Danish Girl, adalah film ini menggambarkan isu transgender. Transgender tervisualisasi dari Einar. Film ini menggambarkan kepribadian dan perilaku Einar yang berperilaku seperti perempuan. Konstruksi gender yang ditampilkan adalah peran Einar (laki-laki) yang kerap memakai pakaian-pakaian layaknya perempuan, dan bertindak juga seperti perempuan ini menunjukkan identitas sosial yang baru dengan menjadi seperti perempuan. Identitas seksual sebagai laki-laki menjadi hilang, Einar menginginkan seperti perempuan, memiliki rahim dan melahirkan. Kondisi demikian merepresentasi perilaku transgender. Namun, dalam sisi Islam, Islam memandang perbuatan transgender adalah hukumnya haram. Laki-laki tidak boleh berperilaku seperti halnya perempuan, dan perempuan tidak boleh juga berperilaku seperti halnya laki-laki. Islam sangat menganjurkan kepada manusia untuk senantiasa berperilaku sesuai kodratnya masing-masing, kodrat laki-laki, dan kodrat perempuan. Lalu, Islam mengajarkan untuk senantiasa menjalankan kebijakan, dan mencegah yang mungkar, serta beriman kepada Allah Swt. Maka, yang demikian (menjalankan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Swt.) mengantarkan pada kehidupan lebih baik.

## BAB 2

### **Lorong Toleransi: Peran dan Tanggung Jawab Sosial Media dalam Membangun dan Menguatkan Nilai Perdamaian di Tengah Keragaman Etnis, Agama, Budaya**

Eko Digdoyo, Gilang Kumari Putra

#### **Abstrak**

Melalui kajian ini penulis ingin berkontribusi dalam bentuk khasanah akademik terkait menyikapi keragaman dan kemajemukan yang sering menjadi akar polemik bagi masyarakat Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman dan dapat dikatakan menjadi miniatur dunia. Selanjutnya perkembangan teknologi informasi saat ini, eksistensi media turut berkontribusi dalam membangun kearifan toleransi. Melalui pendekatan teori tanggungjawab sosial, eksistensi teknologi dalam bentuk media saat ini memiliki peran dan tanggungjawab kepada seluruh komponen masyarakat dalam menguatkan kearifan toleransi di tengah permasalahan kebebasan dan perlindungan beragama atau religious freedom. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa, kebebasan beragama bagi warga negara memang dijamin oleh Pancasila (sila pertama) dan Undang-Undang Dasar (pasal 29) untuk dianut dan diimplementasikan. Namun dalam mengimplementasikan ajaran agama masing-masing perlu menjunjung nilai kearifan toleransi serta menjaga keteraturan sosial yang memang menjadi tanggungjawab bersama, sehingga konflik sosial yang berlatarbelakang agama atau religi dapat diminimalisir.

Kata Kunci: toleransi; tanggung jawab sosial; media; perdamaian; keberagaman

## PENDAHULUAN

Sebagai makluk religious manusia perlu menyadari eksistensi dirinya di hadapan Tuhan, tetapi juga perlu menyadari bahwa dalam mengamalkan agama perlu mempertimbangkan nilai kemanusiaan yang berifat humanis dengan sesama dan perlu menjunjung tinggi nilai toleransi, sebab dalam beragama adalah memotivasi manusia dalam rangka menguatkan prinsip memanusiakan manusia dan tidak merendahkan atau menyinggung orang lain. Sebab tujuan dalam menjalankan beragama adalah agar kehidupan manusia menjadi lebih baik, teratur, terarah, terkontrol, dan terjaga nilai toleransi, sehingga manusia mendapat ridho dari sang pencipta (Tuhan) melalui kegiatan ritual ibadahnya. Sebab ritual ibadah bagi manusia bermakna untuk membangun relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Dengan demikian, dalam rangka membangun kerukunan hidup antar umat beragama telah diatur dalam ideologi dan konstitusi serta peraturan turunan lainnya.

Kemudian ditinjau dari aspek geografis, sosiologis, maupun antropologis harus diakui bahwa tingkat keragaman di Indonesia tinggi, baik keragaman etnis, agama, bahasa, maupun budaya, sehingga sering disebut masyarakat multikultural (Achmad, 2001). Namun keragaman tersebut dapat diorganisasi dalam nilai-nilai persatuan dan kesatuan sosial.

Terkait konsep di atas, sebagaimana pernah ditegaskan oleh Koentjaraningrat (1975), bahwa Indonesia yang memiliki keragaman etnis, bahasa, religi (agama, kepercayaan) dan budaya (adat-tradisi), sehingga dapat menjadi identitas serta khasanah kekayaan atas keragaman tersebut. Akan tetapi keragaman tersebut dapat menjadi "salah satu penyebab terjadinya konflik sosial" apabila kurang dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Sebagai contoh adalah kegiatan ritual yang sering diperaktekkan secara sentimen (fanatisme) yang berlebihan, sehingga fanatisme tersebut seringkali mengakibatkan konflik sosial di masyarakat.

Oleh karena itu dalam menyikapi khasanah keragaman atau pluralitas di Indonesia diperlukan prinsip toleransi. Toleransi sebagaimana ditegaskan oleh (Kuntowijoyo, 1985) telah menjadi identitas ke-Indonesiaan juga telah menjadi kesaksian bagi dunia internasional betapa arifnya bangsa Indonesia dalam menyikapi keragaman tersebut. Untuk itu, membangun sikap toleransi perlu terus ditingkatkan dan dilanjutkan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial.

Berdasarkan catatan perjalanan bangsa Indonesia menunjukkan mengalami konflik sosial yang berlatarbelakang oleh faktor agama, misalnya; di wilayah Tasik (1996), Karawang (1997), serta wilayah lain seperti; Jakarta, Solo, Surabaya, Situbondo, Palembang, Medan, Temanggung, Yogjakarta, Cirebon-Indramayu, Banten, Ambon, Maluku, Sampit, Nusa Tenggara (BPS Kabupaten Maluku Tengah, 1999). Berbagai kerusuhan tersebut umumnya dipicu masalah sentimen sosial-ekonomi-politik, dan agama.

Sependapat dengan pendapat Halim (2021), bahwa jika ditinjau dari sudut pandang peranannya, agama apapun dipastikan mengajarkan pesan perdamian, kemanusiaan, kerukunan dan kerjasama. Sebaliknya agama apapun dipastikan tidak mengajarkan perpecahan, permusuhan, dan pembunuhan, serta konflik sosial lainnya. Namun apabila agama diperaktekan terlalu fanatis, maka yang terjadi mengakibatkan terjadinya pemicu kerenggangan dan kekeluargaan.

Menyikapi berbagai studi kasus yang sering terjadi, maka para ilmuwan sosial turut menegaskan bahwa agama mestinya menjadi fasilitas membangun perdamian, namun jika tidak bijak dalam menyikapinya dapat menimbulkan efek yang jauh dari nilai perdamian, persatuan dan kesatuan. Artinya jika para penganutnya terlalu fanatis atau egois. Oleh karena itu tidak sedikit isu-isu keagamaan sering menjadikan penyebab terjadinya perpeperangan, akibat tidak terbangun nilai toleransi (intoleran) (Majid, 1992). Artinya apabila para loyalis agama dalam menjalankan ritual agamanya tidak menerima keragaman, maka

dipastikan hanya dapat menyatukan kelompok orang tertentu yang sealiran atau sepemikiran saja. Praktek seperti inilah yang mesti diantisipasi agar peran agama bagi manusia berdampak pada perdamaian.

Oleh karena itu baik secara ideologis, sosiologis, maupun antropologis dapat ditegaskan bahwa konflik atas keragaman agama dan lainnya di Indonesia memang sering terjadi, namun diperlukan strategi dan konsensus bersama, sehingga stabilitas sosial dan perdamaian di tengah masyarakat sangat penting sebagai upaya mendukung pembangunan nasional (Ishamudin, 1996).

Maulani, dkk. (2024), mengemukakan bahwa nilai kerukunan antar umat beragama, perlu terus didukung secara berkesinambungan. Artinya upaya dalam mewujudkan masyarakat yang penuh dengan perdamaian perlu kerjasama dan melibatkan semua pihak. Sebab, apabila di masyarakat sering terjadi konflik tanpa upaya penyelesaian, maka yang terjadi adalah kehancuran nilai-nilai dan sendi-sendi kehidupan. Untuk itu kita harus menyadari bahwa seluruh agama apapun yang dianut oleh umat beragama dipastikan tidak menghendaki terjadinya konflik yang mengakibatkan kehancuran.

Namun demikian jika mencermati dari berbagai pemberitaan media berbagai kasus-kasus konflik yang dilatarbelakangi keragaman sering mengemuka, sehingga nilai kerukunan antar umat beragama mengalami guncangan, meskipun sesungguhnya dalam kitab suci agama apapun dipastikan mengajarkan kepada umatnya untuk selalu hidup rukun, damai, bersatu, dan bekerjasama dengan semua kalangan masyarakat (Fatwa, 2007). Untuk itu, diperlukan strategi dengan melibatkan semua pihak dan pelibatan media yang berimbang setiap upaya menyelesaikan masalah konflik sosial keagamaan.

Untuk itu posisi media saat ini menjadi sangat strategis dalam mempengaruhi berbagai pemberitaan kasus-kasus keragaman di Indonesia, baik keragaman etnis, agama, dan

budaya. Meskipun media menawarkan pilihan materi pemberitaan kepada khalayak, namun apabila pemberitaan tidak berimbang maka bisa mengakibatkan terjadinya persepsi atau pertentangan di masyarakat (Eriyanto, 2007).

Merujuk pandangan tersebut, maka baik penyaji berita maupun penerima berita perlu menyikapi secara kritis dan bijaksana. Sebab jika tidak mempertimbangkan kebijakan, maka bisa membentuk informasi yang keliru dan mengakibatkan pertentangan-pertentangan (misalnya Islam dengan non-Islam). Oleh karena itu, Sudibyo, Hamad, dan Qodari (2001) turut penjelasan bahwa eksistensi media memiliki peluang besar dalam menanamkan prasangka antar agama di tengah masyarakat.

Kemudian Basya (2004) turut menguatkan bahwa pemberitaan yang berimbang atau tidak bertangungjawab dapat memunculkan konotasi dan radikalisme (misalnya Islam tidak modernisasi dan tidak demokrasi), meskipun dalam implementasi demokrasi sesungguhnya Islam telah memiliki cara tersendiri. Oleh karena itu Noer (1996) dan M. Marhaeni Saleh (2020) sebelumnya telah mengemukakan bahwa pada ajaran agama tertentu seringkali belum bisa menjawab berbagai tantangan aktual, sebab di dalamnya selalu terjadi konflik perbedaan pandangan, maka perlu terus dicari solusi atas permasalahan tersebut.

Penulis sepandapat dengan pandangan Enginer (2004) yang mengemukakan bagi sebagian orang, masalah keagamaan dianggap "terlalu berat" untuk dibicarakan sebab selama ini sering diapresiasi dengan ibadah, halal, haram dan segala bentuk peraturan yang mengikat dan baku. Padahal dimensi keagamaan tidak hanya mencakup permasalahan ibadah dan ritual saja, atau bahkan masalah kehidupan akhirat yang cenderung melupakan permasalahan sosial dan kehidupan dunia. Sesuai dengan kondisi masyarakat modern saat ini, yang dibutuhkan adalah suatu pemahaman agama yang mampu menjawab permasalahan kehidupan yang semakin kompleks, namun tetap tidak meninggalkan essensi dari keberagamaan tersebut dalam hubungannya dengan Tuhan. Dengan demikian penulis juga

sependapat bahwa nilai kesalehan tidak hanya serta merta manusia dengan Tuhan, namun perlu kesalehan sosial terhadap sesama dan lingkungan sekitar.

Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini eksistensi media turut berkontribusi dalam membangun kearifan toleransi. Artinya eksistensi media memiliki andil dan tanggungjawab dalam memberikan pemberitaan kepada masyarakat khususnya dalam menyikapi kebebasan menjalankan agama atau peribadatan (religious freedom). Sebab kebebasan sering disalahpahami kebebasan berpikir (freedom of thought), meskipun pengaruh kebebasan berpikir belum pasti sepakat dengan kebebasan dalam beragama (Nasution, 2021). Artinya dalam konteks kebebasan berpikir dapat dipahami sebagai dasar filsafat bahwa pada diri seseorang memiliki kebenaran mutlak, sedangkan kebebasan beragama sering dipahami mengatur hubungan individu dengan kelompok (Ma'arif, 1987). Artinya bebas juga tidak bisa dipahami bebas segalanya, namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan etika yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa kebebasan beragama meliputi tiga aspek, yaitu otonomi individu pada agama yang dipilih, otonomi kelompok agama untuk kehidupan di masyarakat, otonomi persamaan hak beragama dimata hukum dan pemerintah, dan otonomi yang menegaskan bahwa agama apapun dipastikan seluruh umat penganutnya untuk hidup berdampingan secara damai dan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Oleh sebab itu, sebagai bangsa yang memiliki dan mengimplementasikan falsafah hidup untuk terus menjunjung tinggi perdamaian dan keteraturan sosial berdasarkan ideologi dan konstitusi, maka kebebasan di atas keragaman di Indonesia perlu dikembangkan serta dipublikasikan melalui media, namun tidak perlu bersandar pada kebebasan mutlak (bebas segalanya) tanpa memikirkan hak orang lain, sebab nilai-nilai kebebasan

sesungguhnya telah diatur dalam ideologi dan konstitusi (Pancasila dan UUD 1945).

Untuk itu kajian ini lebih menekankan bahwa kebebasan tetap harus dijunjung tinggi tetapi tidak segalanya, sebab kebebasan di Indonesia juga terdapat hak dan kewajiban yang saling mengikat untuk hal-hal positif. Dengan demikian makna dari kebebasan perlu mempertimbangkan nilai-nilai karakter budaya yang dianut. Atas dasar itulah perlu kiranya dilakukan kajian dalam menyikapi keragaman melalui pendekatan kearifan toleransi serta tanggungjawab sosia media dalam upaya menangani kasus gerakan sosial berlatarbelakang agama.

### **Pokok Permasalahan**

Sebagai upaya untuk memperdalam hasil kajian, pokok permasalahan yang perlu dijawab adalah:

1. Bagaimana menyikapi keragaman di Indonesia bagaimana upaya pemerintah dalam membangun lorong toleransi sebagai fasilitas dalam menguatkan nilai kearifan atas keragaman agama, etnis, dan budaya, sehingga turut mendukung nilai-nilai peradaban dan perdamaian di tengah kemajemukan?
2. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, bagaimana peran media dalam menjalankan tanggungjawab sosial dalam membangun persepsi masyarakat, sehingga dapat berkontribusi dalam menyikapi keragaman, sehingga dapat mengantisipasi gerakan anarkisme yang mengarah ke gerakan intoleransi?

### **Tujuan dan Manfaat Kajian**

Melalui kajian ini secara akademis diharapkan dapat menggali dan menguatkan kajian ilmu sosial kemasyarakatan, sehingga penulis dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun dan menguatkan nilai kearifan toleransi atas keragaman etnis, agama, dan budaya, sehingga hasil kajian ini dapat memperkaya khasanah kepustakaan baik penulis maupun para pembaca, serta penulis berikutnya.

Kemudian secara praktis, jika kita cermati selama ini meskipun dalam ajaran agama tidak mengajurkan untuk melakukan konflik, namun berbagai kasus sering mengemuka. Oleh karena itu pengembangan kajian yang serupa sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut. Selanjutnya hasil kajian ini juga diharapkan menjadi pertimbangan menatap masa depan menjadi lebih baik dalam menyelesaikan dinamika konflik sosial dengan cara melibatkan berbagai macam unsur atau komponen masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai budaya khususnya nilai kebebasan dan perlindungan dalam menjalankan toleransi beragama. Hasil kajian juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pembinaan masyarakat, khususnya menyikapi keragaman bahwa media punya peran serta andil besar bagi masyarakat.

Selanjutnya secara sosial, hasil kajian diharapkan dapat berkontribusi seluruh kalangan masyarakat melalui tanggungjawab sosial media sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadi konflik masyarakat yang disebabkan adanya keragaman etnis, agama, serta budaya, sehingga seluruh komponen bangsa memiliki andil besar dan berkontribusi positif melalui kearifan toleransi.

## **Pendekatan Teori dan Kajian Pustaka**

### **1. Pendekatan Teori**

Pendekatan teori dalam mengembangkan kajian ini menggunakan teori tanggungjawab sosial. Teori ini telah dikembangkan oleh Wridgh (1985) bahwa posisi media seiring dengan perkembangan teknologi informasi sebagai salah satu tanda modernisasi sangat menentukan dalam pemberitaan dan dipastikan membentuk opini publik, sehingga diperlukan tanggungjawab dalam hal pemberitaan agar tidak menimbulkan kegaduhan di Masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Wridgh, bahwa media perlu meningkatkan standar secara mandiri, obyektif, dan bertangung jawab.

Teori tersebut dikembangkan khususnya setelah pemerintahan Roosevelt, sebab pada waktu itu publik sangat curiga terhadap pers dengan aturan baru, meskipun aturan

sebelumnya pada tahun 1923 sesungguhnya telah memiliki kode etik yang dianggap relevan, sebagai contoh adalah televisi pada saat itu sudah sangat populer.

Seiring dengan perjalanan waktu, pada tahun 1970-an terbit Four Theories, eksistensi media mulai melakukan pembaharuan, terutama pelibatan profesional wanita serta para golongan minoritas. Oleh karena itu para jurnalis mulai menawarkan perspektif baru, sehingga kaum minoritas mendapatkan peran secara adil. Dengan bergabungnya kaum minoritas tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam mengantisipasi dinamika keragaman untuk dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan dalam rangka mengambil keputusan.

Mengkritisi para kaum neoliberal yang menjadikan media sebagai tumpuan, maka Peterson mulai melalukan kritik pers melalui tulisannya, sebab pers telah menggunakan kekuatannya besar untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu pers memiliki andil serta tanggungjawab sosial, sehingga prosesnya harus sejalan dengan seluruh pihak (Wridgh, 1985).

Pada sisi lain teori tanggungjawab sosial juga dianggap dapat menjembatani ranah moral dan ranah hukum menjadi lebih logis, meskipun teori ini dianggap "liberal". Artinya pemikiran pasar (marketplace of ideas) mesti berada pada suatu medium, sebab saat ini media bersaing dengan pasar, dan pasar saat ini berada dalam media.

Saat ini dapat dikatakan bahwa media selalu terdepan dalam mengambil bentuk dan warna struktur sosial dimanapun. Artinya media saat ini mencerminkan sistem pengawasan sosial antara orang tertentu dengan institusi yang diaturnya. Sebagai pendekatan teori, maka teori tanggungjawab sosial ini perlu diperkuat eksistensi pers yang bersifat libertarian. Dalam pandangan ini libertarian dianggap mengubah posisi konsumen dengan negara, maka negara

dianggap menguasai atau melakukan penekanan. Dalam berbagai kasus manusia kurang mendapatkan apresiasi sebagai makluk berakal dan mampu membedakan benar-salah. Sebab pada kasus tertentu kebenaran tidak lagi dianggap sebagai solusi bagi pengambil kebijakan, melainkan hak mencari kebenaran adalah salah satu hak azasi manusia, maka media dianggap sebagai mitra dalam mencari kebenaran (Nasution, 1983).

Kemudian dalam pemikiran libertarian, media dianggap bukan komponen pemerintah, namun dianggap sebagai sarana untuk menyajikan bukti dan argumen yang akan menjadi landasan bagi orang banyak untuk mengawasi pemerintah dalam menentukan kebijakan. Oleh sebab itu eksistensi media pers mestinya tidak terkungkung oleh pemerintah, tujuannya supaya muncul kebebasan dan kebenaran yang sesungguhnya (Sardar, 1988). Artinya baik kaum minoritas maupun mayoritas perlu pers atau media agar tidak terjadi penekanan yang tidak adil, sehingga media diperlukan eksistensinya secara seimbang untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi-fungsinya.

## 2. Kajian Pustaka

Indonesia merupakan negara multi etnis, multi religi, multi linguistik, serta multi kultural, sehingga mendapat sebutan negara miniatur dunia dari sisi keragaman. Oleh karena itu keragaman tersebut diatur dalam baik dalam ideologi maupun konstitusi. Menyikapi keragaman yang sangat tinggi, maka negara melalui pendekatan hak azasi manusia menawarkan nilai kebebasan dalam menjalankan ritual keagamaan. Artinya kebebasan dalam menjalankan ritual peribadatan tidak boleh mencampuri urusan orang lain, agar tidak terjadi konflik (Dahrendof, 1986).

Merujuk pada uraian di atas, ketika kita memberikan kebebasan orang lain dalam ibadah merupakan bagian dari pendidikan moral perlu terus dipertahankan dan tingkatkan,

agar karakter individu di tengah masyarakat dapat dengan mudah menentukan dirinya, namun tetap harus memikirkan orang lain.

Jika kembali kepada makna konsep kebebasan, maka kata bebas biasanya banyak disukai banyak orang. Sebab bebas dianggap “modernisasi”, dan modernisasi identik dengan kemajuan. Jadi kata maju, maka harus dimulai dengan kebebasan yang harus dikembangkan. Namun demikian dalam kontek Indonesia, bebas bukan segalanya. Artinya bebas tetap menjaga nilai, etika, agama, dan budaya tanpa merendahkan atau meremehkan orang lain. Sebab kata bebas memiliki banyak makna dan penafsiran bagi banyak orang.

Oleh karena itu, sebagai bangsa yang memiliki falsafah kebebasan, namun kebebasan yang didasari oleh Pancasila dan UUD 1945 bukan bermakna bebas mutlak, tetapi bebas yang tetap harus menjunjung nilai, etika, dan budaya sebagaimana tema kajian yang kita kembangkan ini. Sebab di Indonesia juga tidak cokok apabila mempergunakan pemikiran kebebasan mutlak, namun kebebasan yang tetap diatur melalui identitas ideologi (Departemen Agama Republik Indonesia, 2003).

Berdasarkan uraian tersebut konsep kebebasan tidak bisa dianggap bebas berbuat apa saja, sebab bebas dalam tatanan kehidupan bangsa perlu memikirkan hak dan kewajiban orang lain. Sebagai contoh adalah kesukaan memutar music, memutar musik adalah hak setiap individu, namun meskipun kesukaan tetap harus memikirkan orang lain, sehingga musik tidak mengganggu orang lain, sebab orang lain juga perlu bebas dalam beristirahan dalam suasana keheningan. Sependapat dengan Colleman (1998) yang menegaskan bahwa setiap orang juga punya tanggungjawab untuk tidak saling mengganggu. Sependapat dengan Colleman, bahwa setiap orang memang bebas terkait urusan ritual keagamaannya, namun tetap memiliki tanggungjawab sosial

serta berada pada koridor peraturan perundangan yang berlaku.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Musdah Mulia yang menegaskan bahwa kebebasan dalam agama maupun budaya sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri, tetapi terikat bahwa kebebasan perlu memikirkan orang lain dengan pertimbangan hati nurani. Penegasan selanjutnya adalah khusus terkait kebebasan agama bersifat mutlak untuk setiap individu untuk memenuhi tanpa gangguan serta ancaman dari orang lain.

Dengan demikian, mengatur kehidupan beragama dengan memberikan batasan agar lebih teratur merupakan tindakan yang positif dari pada memberikan pembebasan tanpa kontrol, sehingga dalam mewujudkan keteraturan sosial dalam kehidupan beragama diperlukan pedoman atau aturan untuk dipedomani bersama.

Sebagai bentuk implementasi kebebasan beragama di Indonesia memang telah diatur secara konstitusional, maka seluruh warga negara memiliki kebebasan untuk menimplementasikan, namun tetap harus berjiwa toleran terhadap sesama. Oleh karena itu, bagaimanapun dalam menjalankan agama perlu mentaati ketertiban sebagaimana diatur dalam konstitusi, tujuannya adalah mewujudkan perdamaian. Apabila terjadi penodaan atau penistaan agama tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebab dapat berakibat terganggunya keteraturan dan kedamaian di masyarakat.

Jika dikaitkan dengan makna pluralisme, Fitriani (2020) turut menegaskan bahwa kearifan toletansi dalam menyikapi keragaman agama menjadi hak dasar bagi seluruh warga. Sependapat dengan Fitriani bahwa menyikapi kebebasan dalam beragama dikelompokkan menjadi empat, yaitu; kebebasan Nurani (freedom of conscience), kebebasan mengekspresikan keyakinan agama (freedom of religious expression), kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan (freedom of religious association), dan kebebasan

melembagakan keyakinan keagamaan (freedom of religious institution). Mencermati pengelompokan kebebasan tersebut tentunya harus diterima dan disikapi secara arif, sebab Indonesia realitasnya harus demikian.

Menyikapi pengelompokan kebebasan tersebut maka Nasir (2008) turut menguatkan khususnya kebebasan nurani. Kebebasan ini sangat otentik dan mendasar bagi setiap manusia. Artinya bebas untuk menentukan keyakinan tanpa paksaan, sebab keyakinan merupakan bentuk kesadaran pribadi yang hakiki dan perlu dihargai. Dengan demikian makna dari kebebasan pribadi termasuk nilai luhur (supreme value), untuk itu memerlukan komitmen serta tanggungjawab pribadi, namun tetap harus menghargai bagian dari individu, kelompok, organisasi, dan kemasyarakatan.

Oleh karena itu perlu di sadari bahwa Indonesia merupakan negara yang plural (majemuk), kemajemukan Indonesia ini ditandai dengan adanya berbagai agama yang dianut oleh penduduk, suku bangsa, golongan, dan ras. Letak geografis Indonesia yang berada di tengah-tengah dua benua, menjadikan negara ini terdiri dari berbagai ras, suku bangsa, dan agama. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia mengalami proses sejarah yang panjang, dan memiliki ciri khas yang pluralitas yang telah diakui oleh dunia internasional.

Dengan demikian pluralitas tersebut menandakan Indonesia sebagai negara yang besar dan menjadi miniatur dunia dari sisi ragam agama. Dengan adanya pluralitas agama tersebut dapat menjadi potensi tersendiri dalam mendukung proses pembangunan. Meskipun dari sudut pandang yang lain, apabila tidak disikapi secara bijak dinamika keragaman agama dapat menjadi salah satu penyebab konflik sosial di masyarakat (Robert, 1993). Pernyataan tersebut diperkuat oleh C. Geertz sebagai antropolog Indonesianis. Oleh sebab itu dalam upaya mengantisipasi terjadi konflik antar umat beragama tidak cukup diajarkan nilai kebaikan dalam

kehidupan, namun perlu diajarkan nilai kebenaran. Menyikapi pandangan tersebut Abdullah (1983) menguatkan bahwa ajaran yang baik perlu dikuatkan ajaran agama yang benar untuk mencapai keselamatan hidup manusia. Untuk itu keragaman agama yang ada mestinya tidak perlu dimaknai sebagai sumber perselisihan, namun sebaliknya.

Berangkat dari fakta empirik, bahwa kota-kota besar seperti; Bandung, Medan, Semarang, Surabaya, Jakarta, Bali, Makasar, serta kota lainnya memiliki tingkat keragaman yang tinggi serta tantangan terjadinya konflik sosial dalam implementasi kebebasan beragama. Misalnya studi yang dihasilkan oleh Budi Radjab (2006) menunjukkan bahwa keragaman di Kota Bandung sudah terjadi sejak lama, artinya sejak era kolonial Belanda sudah terjadi seiring dengan pendirian sekolah berbasis kolonial, sehingga secara otomatis seiring dengan perkembangannya berbagai suku bangsa dengan latarbelakang agama yang beragam mulai hadir dalam rangka studi lanjut, dan berbagai aktifitas perniagaan lainnya.

Sebagaimana ditegaskan oleh Radjab bahwa meskipun etnis Sunda umumnya menjadi mayoritas di Jawa Barat khususnya wilayah Bandung, namun mayoritas etnis tersebut pada umumnya mengalami asimilasi dengan etnis pendatang secara dimanis. Menguatkan studi Radjab tersebut, sebelumnya juga telah dilakukan riset oleh Bruner sekitar tahun 1970-an.

Seiring dengan terjadinya datangnya berbagai etnis ke wilayah tertentu, maka dapat ditegaskan tidak menutup kemungkinan resiko konflik keragaman etnis, agama, budaya, hingga pemicu lainnya. Oleh karena itu salah satu penyebab terjadinya konflik yang dilatarbelakangi oleh keyakinan beragama. Sebagaimana hasil riset dari Centre of Strategic and International Studies (CSIS) tahun 2012 menunjukkan tingkat toleransi yang sedang hingga baik. Data menunjukkan 59,5% responden menerima hidup berdampingan secara

damai, dan sebanyak 33,7% yang menyatakan kurang menerima pluralitas.

Data tersebut dikuatkan hasil riset CSIS (2012) di 23 provinsi dengan menggunakan 2.213 responden, ketika dilontarkan pertanyaan yang berkaitan dengan adanya pembangunan fasilitas ibadah dengan mengambil latarbelakang pendidikan responden, maka sekitar 20% berlatarbelakang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi memilih tidak keberatan apabila di wilayahnya dibangun rumah ibadah bagi umat lain apabila diproses secara legal. Kajian ini menunjukkan bahwa responden yang berlatar pendidikan telah memiliki kearifan toleransi yang cukup baik, namun tetap harus ditingkatkan.

Namun demikian, sedikit berbeda dengan hasil riset Aulia (2023) yang menunjukkan bahwa masyarakat dengan latarbelakang pendidikan SMA/sederajat ke atas 38,1% menyatakan setuju adanya pembangunan rumah ibadah di masyarakat. Data yang dihasilkan oleh Aulia tersebut menunjukkan bahwa sikap toleransi dalam agama kurang berkorelasi dengan jenjang pendidikan seseorang.

Selanjutnya PUSLITBANGDIKLAT KEMENAG RI tahun 2009 juga melakukan risert terkait kerukunan umat beragama di provinsi Jawa Barat, dan tahun 2010 di Jawa Timur, dan 2011 di wilayah Lampung. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat variasi tingkat kerukunan dan keharmonisan dalam beragama.

Selanjutnya pada tahun 2012 hasil riset di seluruh provinsi dengan melibatkan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga menunjukkan bahwa implementasi toleransi di Indonesia masih cukup tinggi (42%). Kemudian hasil Survey Nasional (2013) menyimpulkan bahwa toleransi kerukunan umat beragama berada pada level baik hingga sangat baik. Artinya tergolong tinggi (75,2), skor rata-rata atau sedang (75,2); dan skor rendah (71,9).

Kemudian skor kesediaan kerjasama antarumat beragama (72).

Berdasarkan hasil Survey Nasional oleh Kementerian Agama tersebut menunjukkan hasil yang moderat diantara hasil riset lembaga non pemerintah. Memang terdapat perbedaan hasil, namun perbedaan hasil perlu disikapi secara bijak dalam praktek toleransi di Indonesia. Dengan demikian konflik sosial berlatarbelakang agama masih sangat berpotensi terjadi, maka perlu upaya secara berkelanjutan dalam menangani masalah tersebut.

Belajar dari hasil riset sebelumnya dapat ditegaskan bahwa sebagai bangsa yang besar kerukunan umat beragama sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia. Aulia (2023) menegaskan bahwa tingkat toleransi di berbagai daerah mengalami keragaman, sedangkan dalam menangani permasalahan tidak dapat diseragamkan.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Toleransi Beragama**

Disamping sebagai makluk Tuhan (religius), manusia dikenal sebagai makhluk individu dan sosial. Sebab dalam proses menjalani kehidupannya manusia dipastikan berhadapan dengan kelompok lain yang berbeda, baik perbedaan etnis, agama, maupun budaya, sehingga manusia dituntut untuk menerima dinamika keragaman tersebut. Selanjutnya konsep toleransi dalam kajian ini dapat disimak uraian berikut ini.

Istilah toleransi dalam bahasa Arab tasamuh atau samanah artinya sikap lapang dada, terbuka, menerima dan menghargai keragaman, hidup berdampingan dengan damai meskipun banyak perbedaan, serta menyadari perbedaan adalah karunia Tuhan. Makna kata tasamuh adalah memiliki keutamaan, memulaian, dan keiklasan diri dalam menerima perbedaan. Selanjutnya dalam konteks kehidupan sosial, toleransi dimaknai sebagai sikap atau perbuatan mendeskriminasikan kelompok lain (Bakar, 2015).

Merujuk konsep tersebut penulis menggarisbawahi bahwa toleransi dapat dimaknai hidup berdampingan secara damai tanpa mendiskritikan atau meremehkan orang lain, kelompok atau golongan lain, etnis, budaya, serta agama lain. Dalam konteks beragama, toleransi merupakan sikap manusia untuk menghargai manusia lainnya, sehingga manusia bersikap egois merasa paling baik.

Selanjutnya dalam bahasa latin "Tolerare" sabar memberikan kesempatan orang lain untuk memilih dan bersikap (Ihsan, 2009). Dalam pengertian lebih luas toleransi adalah perilaku atau sikap manusia untuk menerima dan menghargai orang lain dengan mengedepankan perdamaian, melarang orang lain untuk tidak merendahkan atau mendiskriminasikan orang atau kelompok lain yang berbeda.

Terkait konsep dan implementasi toleransi penulis menegaskan bahwa manusia hidup yang dihadapkan dengan berbagai keragaman perlu tenggangrasa, perlu menerima perbedaan dengan prinsip hidup berdampingan secara damai. Sebab damai merupakan ajaran setiap agama atau keyakinan yang dianut oleh umatnya untuk sama-sama dipraktekkan.

Oleh karena itu dalam Pancasila khususnya sila pertama ditegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna secara umum (universal), namun ideologi kita mengajarkan agar warga negara menganut agama dan kepercayaan masing-masing tanpa pemaksaan. Untuk itu perlu saling menghargai dan hidup berdampingan secara damai dalam berbagai aspek kehidupan. Artinya agar tidak menimbulkan konflik, maka dalam menjalankan kehidupan beragama tidak perlu menyinggung keyakinan bagi pemeluk agama lain, sehingga kearifan toleransi perlu menjadi prinsip bersama agar hidup lebih damai.

### **Penguatan Sikap Toleransi Melalui Lorong Toleransi**

Sebagai upaya untuk mewujudkan sikap toleransi di Indonesia bukan hanya melibatkan orang, kelompok, atau pejabat tertentu, namun perlu semua pihak. Oleh sebab itu, apabila terjadi

konflik agama, maka terdapat beberapa indikator yang perlu disikapi, yaitu; a). Sempitnya wawasan para pemeluk agama baik internal maupun eksternal, b). Terbatasnya sikap tenggangrasa dalam kehidupan masyarakat. c). Perlunya sikap tanggungjawab dalam arti luas pada setiap misi keagamaan d). Terbatasnya wawasan dalam arti luas dalam menjalani ibadah agama. e). Fanatisme yang berlebihan dalam misi keagamaan, sehingga kurang menghargai atau merendahkan agama lain. f). Adanya prasangka yang kurang baik terhadap kelompok lain, dan g). Eksistensi media serta teknologi informasi mestinya sebagai sarana untuk mendukung dan membangun kearifan toleransi, justru sering disalahgunakan dalam menyampaikan informasi yang salah dan tidak utuh, sehingga sering menjadi pemicu konflik dan kesalahpahaman.

Merujuk indikator tersebut, maka Rosana (2015) menegaskan bahwa sikap toleransi dalam beragama dapat dicapai apabila setiap individu berjiwa besar menerima secara arif dan bijaksana, seluruh komponen bangsa turut menjaga pentingnya perdamaian.

Jadi, praktek toleransi dapat diimplementasikan di masyarakat apabila sama-sama berkomitmen, misalnya pembangunan lorong toleransi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral diharapkan dapat menguatkan hubungan antar umat beragama dengan baik. Lorong yang telah berhasil dibangun sebagai penghubung merupakan simbol fisik dari kebijakan pemerintah untuk mempererat kerjasama sekaligus fasilitas untuk melakukan pembinaan kerukunan umat beragama. Di samping itu pembangunan kampung toleransi juga telah berhasil di Solo penghubung pemeluk agama Islam Masjid Al Hikmah dengan Gerja Kristen Jawa (GKJ), serta pembangunan tempat ibadah yang lain dan mengutamakan nilai toleransi telah diinisiasi di wilayah Yogyakarta, Surabaya, Bali, serta kota besar lainnya.

Belajar dari beberapa pembangunan komunitas kampung toleransi di Indonesia, pada akhirnya perbedaan keyakinan

sebetulnya tidak mengurangi semangat untuk saling menjaga kerukunan dan mengembangkan kerukunan kerukunan secara lebih luas. Oleh karena itu diperlukan lorong toleransi untuk dijadikan lorong-lorong penghubung dalam rangka membina dan membangun kearifan toleransi bagi umat.

### **Menguatkan Kerukunan Umat Beragama Melalui Lorong Toleransi**

Sebagai upaya menguatkan kerukunan umat beragama di Indonesia, tentunya pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menyediakan fasilitas atau lorong-lorong penghubung dalam membangun dan membina kerukunan umat beragama, kerukunan etnis, dan kerukunan berbudaya. Tanggung jawab dalam memfasilitasi terbentuknya kerukunan, keharmonisan, kerjasama yang baik tentunya menjadi harapan bersama sebagai upaya menanggulangi berbagai konflik.

Sebagai upaya untuk menguatkan terbentuknya kerukunan bersama, beberapa kunci utama meliputi; a) Menjaga tenggang rasa dan berjiwa toleran bagi seluruh umat beragama, b) Mengantisipasi agar tidak memakasakan kehendak kepada orang lain untuk menganut agama tertentu. c) Menjalankan ritual keagamaan atau keyakinan secara independen tanpa pemaksaan, d) Mentaati kaidah keagamaan merujuk hukum ketatanegaraan yang berlaku, dan mengisiasi terbangunnya fasilitas publik sebagai sarana untuk membangun dialog antar umat beragama, sehingga relasi kearifan sosial dalam konteks kerukunan beragama dapat terbangun dengan baik dan penuh tenggangrasa.

Apabila merujuk pernyataan di atas, maka sikap tenggang rasa, berusaha untuk saling menghargai, dan berjiwa toleran merupakan konsep tiga kerukunan. Sebab kerukunan hidup dalam beragama adalah ejawantah dari implementasi ideologi Pancasila, khususnya sila pertama. Dalam konteks Hak Azasi Manusia (HAM) kebebasan menganut agama juga telah menjadi konsensus bersama. Jadi kerukunan umat beragama dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa berkomitmen dan konsensus menaati aturan beragama dan konstitusi bernegara. Selanjutnya, sebagai

upaya untuk mendorong terwujudnya kerukunan umat beragama beberapa indikator penting adalah;

1. Menguatkan fondasi kerukunan beragama secara internal dan eksternal.
2. Menguatkan keharmonisan dalam bingkai persatuan nasional bahwa toleransi untuk Indonesia adalah dapat menguatkan identitas nasional.
3. Mengupayakan terciptanya situasi hidup rukun, damai, dan harmonis dalam kehidupan beragama sebagai bentuk pengamalan dan pembinaan antar umat bergama.
4. Senantiasa mengembangkan nilai kemanusiaan di tengah keragaman etnis, agama dan budaya untuk menjadi pedoman bersama sebagai bentuk sikap keteladanan secara berkesinambungan.
5. Menguatkan dan memperdalam nilai-nilai spiritual bagi kemanusiaan yang berketuhanan, tujuannya adalah untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan ajaran agama.
6. Menguatkan prinsip cinta dan kasih sayang terhadap sesama umat ciptaan-Nya, sehingga tidak mudah terhasut oleh orang lain, sehingga tidak muncul berbagai kecurigaan antar pemeluk agama lain.
7. Secara komitmen terus membangun kesadaran bahwa keragaman di masyarakat adalah realita yang harus diterima dan dihadapi sebagai bagian dari nilai seni kehidupan.
8. Praktek dalam menjalankan nilai Ketuhanan yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan, persatuan, kebebasan berdemokrasi, dan prinsip keadilan.

Merujuk indikator tersebut, sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan atas keragaman yang ada, maka diperlukan eksistensi para tokoh masyarakat dan pemuka agama sebagai figur yang perlu ditauladani dan dianggap menjadi perekat sosial. Kemudian dalam mewujudkan kerukunan tersebut pemerintah turut andil dan bertanggungjawab. Pernyataan tersebut menjadi bukti bahwa kerukunan beragama di Indonesia perlu pembinaan dan dukungan dari pemerintah yang memiliki

tugas pokok dan fungsinya dalam upaya turut membentuk kualitas kehidupan umat beragama yang lebih baik dan bijaksana.

Selanjutnya sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan beragama dan menjaga persatuan, strategi lain yang perlu terus dibangun adalah; a) Peningkatan fungsi institusi sosial yang lebih efektif dengan mempertimbangkan nilai kearifan religius, b) Terus berupaya meningkatkan wawasan keagamaan di masyarakat, c) Membentuk mitra kerjasama sosial kemanusiaan lintas agama, budaya, etnis, dan keprofesian, d) Membangun dan meningkatkan wawasan pentingnya kerukunan dan keragaman melalui program kemasyarakatan melalui institusi pendidikan, dan e) Pentingnya pelibatan organisasi sosial keagamaan serta institusi pendidikan sesuai ranahnya secara profesional agar tugas pokok dan fungsinya tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

## **Implementasi Toleransi di Tengah Keragaman Agama dan Budaya**

Melalui kajian ini penulis meyakini bahwa setiap agama apapun pasti mengajarkan umatnya untuk memiliki sikap yang toleran dalam beragama. Misalnya dalam ajaran agama Kristen dipesankan “kasihanklah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama tidak hanya tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi juga mengasihi terhadap sesama. Kemudian ditegaskan kembali bahwa semua ciptaan Tuhan baik itu binatang, tumbuhan, tanah, air, batuan dan bahkan terhadap musuh harus mengasihi (Matius 5:44-45). Dengan terwujudnya ajaran cinta kasih, maka akan menciptakan kerukunan hidup dengan tidak memandang perbedaan latar belakang agama, budaya maupun strata sosial.

Kemudian dalam ajaran agama Islam juga telah diatur terkait pentingnya toleransi antara umat beragama. Dalam Surat Al-Kafirun ayat 6 ditegaskan “Lakum Diinukum Waliyaddin” artinya untukku maha agamamu, dan untukkulah agamaku”. Maknanya bahwa sebagai umat-Nya manusia harus beragama secara totalitas namun tetap harus berbesar hati menyikapi berbagai

keragaman. Makna toleransi dalam Islam adalah tidak seorangpun memaksakan kehendak dalam agama atau memaksakan kehendak untuk meninggalkan agama, maka setiap manusia diajarkan untuk beribadah menurut keyakinannya.

Di samping itu, dalam Islam mengajarkan manusia sebagai makluk ciptaan-Nya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, berinteraksi, dan membangun komunikasi yang baik antar sesama dengan penuh kearifan toleransi. Tujuannya adalah agar setiap manusia saling menghargai eksistensi orang lain, kemudian membudayakan hidup secara gotong-royong dengan penuh kerukunan, kebersamaan di tengah keragaman. Dengan demikian prinsip hidup gotong-royong tersebut tidak perlu memandang orang lain berdasarkan agama, ras, jabatan, namun menekankan kesetaraan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, maka perlu memaknai prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memaknai Nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan

Artinya manusia ditakdirkan oleh Tuhan menjadi makhluk individu, namun juga makhluk sosial yang beragama. Artinya meskipun eksistensi manusia bisa melakukan aktifitas diri, namun tetap saja membutuhkan bantuan manusia sekitarnya untuk memenuhi kebutuhannya yang meliputi; pangan, papan, dan sandang serta tuntutan lain dengan cara bekerjasama antara satu dengan yang lain.

Untuk itu, dorongan untuk terus membangun persaudaraan perlu terus dikuatkan. Kemudian agar tidak muncul gejolak sosial, maka sikap mengejek, menghina dan meremehkan orang lain perlu dihentikan. Sebab dalam mengerjakan sesuatu yang besar dipastikan memerlukan orang lain. Seperti dalam menanggulangi peristiwa kebencanaan, kemiskinan, perperangan, mengatasi berbagai pandemi (misalnya Covid-19). Beberapa studi kasus tersebut nilai kemanusiaan dapat terimplementasi melalui sikap saling menghargai terhadap sesama.

2. Memaknai Nilai Nasionalisme dan Persatuan dalam Bingkai Toleransi.

Bagi masyarakat Indonesia, semangat nasionalisme dan persatuan dalam bingkai toleransi mutlak diperlukan. Melalui semangat nasionalisme dan persatuan sebagaimana ditegaskan dalam sila ketiga Pancasila sebagai upaya mewujudkan perdamaian, sebab perdamaian perlu dinikmati untuk semua. Oleh karena itu nilai persatuan menunjukkan adanya perbedaan dan keragaman untuk disikapi bukan untuk menjadi sama, tetapi perlu bersatu.

3. Memaknai nilai historis

Pada dasarnya sejak dahulu masyarakat Indonesia telah memiliki kesadaran yang tinggi dalam menghargai keragaman. Artinya secara historis hubungan lintas agama dapat terjalin dengan baik, bahkan tidak pernah terjadi konflik agama berkepanjangan. Hingga saat ini lima falsafah; Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan telah menjadi sejarah ideologi dan menguatkan nilai kehidupan bermasyarakat, sehingga jika terjadi perbedaan pandangan dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang wajar.

4. Memaknai nilai keteladanan tokoh agama di masyarakat.

Keberadaan tokoh agama maupun tokoh masyarakat turut mengajarkan keteladanan dalam menguatkan nilai toleransi. Sebagai tokoh agama tentunya diharapkan menjadi tauladan baik ucapan, tindakan, maupun perbuatan, khususnya dalam menghargai keragaman agama.

Diantara upaya yang perlu dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam mengembangkan sikap toleransi beragama misalnya pesan-pesan moral disampaikan pada saat pertemuan tingkat RT, RW, Kelurahan, PKK, Kepemudaan, Keagamaan dan forum sosial lainnya. Melalui proses

pengarahan pada saat pemberian sambutan-sambutan oleh para tokoh agama maupun tokoh masyarakat, diharapkan memiliki andil dalam menguatkan nilai toleransi.

#### 5. Menguatkan prinsip nilai kesabaran.

Bagi seluruh komponen bangsa, nilai kesabaran sangat diperlukan sebagai upaya membangkitkan kesadaran dan kebebasan yang terukur. Sikap sabar perlu diwujudkan misalnya tidak cepat menghina orang lain yang belum menyadari pentingnya menjalankan ibadah agama. Sikap yang perlu dijalankan semestinya adalah memberikan waktu dan kesempatan untuk sadar menjalankan kewajiban agamanya. Jadi, prinsip yang tepat adalah mengajak, mengingatkan, serta memotivasi kepada masyarakat untuk menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana di syariatkan dalam agama.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam membangun lorong toleransi sebagai fasilitas dalam menguatkan nilai keragaman agama, etnis, dan budaya telah dilakukan, sehingga turut mendukung nilai-nilai peradaban, pembangunan, dan perdamaian di tengah kemajemukan di kota-kota besar yang memiliki tingkat keragaman tinggi telah dilakukan, meskipun studi kasus konflik sosial yang berlatarbelakang agama di Indonesia masih tinggi dan sering terjadi. Penulis menegaskan kasus tersebut bukan hanya berada pada satu masalah agama saja, namun berkaitan dengan masalah sosial yang lain seperti; politik, ekonomi, edukasi, hukum, media dan teknologi. Memang secara konseptual seluruh agama dan keyakinan apapun di Indonesia mengajarkan kehidupan yang penuh dengan perdamaian, namun ketika para pemeluk agama kurang atau tidak mempertimbangkan nilai kearifan toleransi, maka “agama masih terus menjadi pemicu konflik”.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, eksistensi media menjadi sangat tinggi sebab memiliki

tanggungjawab sosial dalam menyampaikan atau pemberitaan yang berkaitan dengan upaya membangun dan menguatkan nilai perdamaian di tengah keragaman etnis, agama, dan budaya. Namun demikian semua itu tergantung masyarakat sebagai pengguna media, untuk itu perlu mempertimbangkan dengan cara memilih dan memilih informasi yang penting dan urgensi untuk disampaikan kepada publik, agar tidak menjadi pemicu konflik.

Secara akademis kajian serupa perlu terus dikembangkan sebagai upaya memberikan andil, sehingga dapat memperkuat kajian referensi bagi para pengkaji dan pengembang keilmuan sosial. Kemudian secara praktis, baik pemerintah, institusi pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan, industri media perlu terus mendorong dalam membangun dan menguatkan nilai perdamaian dan kearifan toleransi, sehingga melalui lima pesan ideologi dapat terimplementasi di tengah keragaman etnis, bahasa, agama, dan budaya sebagai identitas ke-Indonesiaan. Kepada para aparat negara terkait dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu berimbang dengan tetap mempertimbangkan nilai humanis, begitu juga bagi masyarakat bahwa sebagai negara hukum dan negara beragama tetap harus menjunjung tinggi nilai hukum dan nilai agama, agar kasus-kasus anarkisme dapat diantisipasi. Terimakasih semoga bermanfaat bagi semua pihak.

## **BAB 3**

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyuluhan Pembangunan**

Fajar Adi

#### **Abstrak**

Proses pembangunan melalui penyuluhan pembangunan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi strategi dalam meningkatkan efektivitas penyuluhan dan mempercepat proses perubahan perilaku sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan TIK yang terdiri dari perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) dalam penyuluhan pembangunan, khususnya penyuluhan program Bangga Kencana di balai penyuluhan Keluarga Berencana (KB). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, menggunakan analisis statistik dan desain survei dengan total sampel sebanyak 430 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga lini lapangan telah tersedia perangkat keras dan selalu memanfaatkan internet untuk melaksanakan pekerjaan, didukung dengan kualitas jaringan internet yang bagus di seluruh wilayah kerja, sehingga sebagian tenaga lini lapangan sering memanfaatkan aplikasi pengirim pesan berbasis internet dan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi. Disimpulkan bahwa ada komitmen yang sangat baik dari tenaga lini lapangan dan BKKBN dalam memanfaatkan TIK untuk penyuluhan pembangunan melalui penyuluhan program Bangga Kencana.

Kata kunci: pemanfaatan TIK, penyuluhan pembangunan, perangkat keras, perangkat lunak.

#### **PENDAHULUAN**

Kesenjangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terjadi antara daerah pedesaan dan perkotaan di Indonesia menjadi salah satu tantangan terbesar dalam proses pembangunan di Indonesia. Menurut Jayanthi dan Dinaseviani (2022) kesenjangan akses TIK dapat berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat,

terutama di daerah pedesaan. Koswara (2024) mengungkapkan beberapa hal yang menjadi penyebab masyarakat di wilayah pedesaan masih tertinggal dalam adopsi teknologi digital yang mendukung aktivitas ekonomi mereka, antara lain yaitu keterbatasan infrastruktur TIK, rendahnya literasi digital masyarakat pedesaan, dan biaya akses internet yang dirasa masih cukup tinggi.

Proses pembangunan melalui penyuluhan pembangunan dengan pemanfaatan TIK telah menjadi strategi yang semakin penting dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas serta dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan dan mempercepat proses perubahan perilaku sosial dan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan. Pemanfaatan TIK dalam penyuluhan pembangunan di Indonesia memiliki berbagai manfaat, namun juga menghadapi tantangan tertentu. Sugihono et al. (2024) menjelaskan bahwa optimalisasi TIK dan media sosial dapat mengatasi hambatan yang terjadi dalam penyuluhan pembangunan, khususnya di sektor pertanian, seperti konektivitas buruk dan literasi digital rendah, hal ini memberikan implikasi peran TIK dalam transformasi penyuluhan, dari yang terpusat menjadi sistem responsif, serta diperkuat oleh teknologi digital.

Salah satu penyuluhan pembangunan di sektor pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah penyuluhan program Keluarga Berencana (KB). Program KB dilaksanakan melalui program-program terpadu yang ditujukan untuk menunjang upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, taraf hidup, kesejahteraan dan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya (Alfian et al., 2021). Program KB pada awalnya dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1970. Melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN kemudian bertransformasi menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. BKKBN sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun

2009, memiliki tugas untuk melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Pada akhir tahun 2019, BKKBN melakukan rebranding, salah satunya melalui perubahan nama program KKBPK menjadi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, yang disingkat program Bangga Kencana (BKKBN, 2020).

Penyuluhan program Bangga Kencana dilaksanakan di balai penyuluhan KB, oleh karena itu balai penyuluhan KB memiliki peranan strategis dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis program Bangga Kencana tersebut, karena balai penyuluhan KB merupakan pengendali program Bangga Kencana di tingkat lini lapangan (Rezillah et al., 2018; Hakim 2018; Inayah et al., 2021). Balai penyuluhan KB berfungsi sebagai tempat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program Bangga Kencana, serta untuk mengendalikan dan membina tenaga lini lapangan (BKKBN, 2020).

Perkembangan TIK saat ini mendukung penyuluhan pembangunan melalui penyuluhan program Bangga Kencana di balai penyuluhan KB. Mengutip pernyataan Servaes, Lubis (2010) menyatakan bahwa perkembangan TIK seperti komputer dan teknologi komunikasi, khususnya internet digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan di antara yang menguasai informasi dan yang tidak. Zacharias (2019) menyatakan bahwa teknologi informasi mengacu pada ketersediaan jaringan, data base, sistem software, serta sistem online. Wiratama et al. (2017) menjelaskan bahwa dimensi pembentuk teknologi informasi erat kaitannya dengan kemampuan penggunaan teknologi informasi, dilain sisi, adaptasi terhadap peggunaan TIK berbeda-beda. Menurut Praptiningsih (2021), terdapat individu yang cepat beradaptasi dengan digital dan terdapat individu yang lambat beradaptasi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan digital.

Budiana et al. (2015) mengungkapkan bahwa TIK meliputi dua aspek, yaitu aspek teknologi informasi dan aspek teknologi

komunikasi. Perbedaan teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah: teknologi informasi merupakan hal-hal yang terkait dengan manajemen informasi, yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, serta penggunaan informasi, sedangkan teknologi komunikasi merupakan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi komunikasi merupakan perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, proses dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi.

Sarana TIK dapat dikategorikan berdasarkan perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Kedua perangkat tersebut dapat membantu dalam proses pelaksanaan penyuluhan program Bangga Kencana yang efisien dan tanpa menggunakan kertas (paperless). Adapun perangkat lunak (software) merupakan aplikasi berbasis World Wide Web, sistem pengirim pesan berbasis internet, dan media sosial, sedangkan perangkat keras (hardware) yaitu ponsel (smartphone), komputer dan laptop, dimana ketiganya berbasis internet agar dapat beroperasi dan berhubungan satu sama lain.

Berdasarkan hal tersebut, dimensi pemanfaatan TIK yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimensi pemanfaatan perangkat keras (hardware) mengacu pada ketersediaan perangkat keras yang tersedia dan telah dimanfaatkan oleh anggota organisasi balai penyuluhan KB, yaitu ponsel (smartphone), komputer dan laptop, dimana ketiga perangkat tersebut berbasis daring (internet) serta dimensi pemanfaatan perangkat lunak (software) berbasis daring (internet) yang terdiri dari intensitas pemanfaatan akses jaringan internet, kualitas jaringan internet, intensitas pemanfaatan akses aplikasi teknologi informasi BKKBN berbasis daring (internet), dan intensitas pemanfaatan aplikasi pengirim pesan berbasis daring (internet).

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk berkontribusi terhadap kajian pemanfaatan TIK dalam penyuluhan pembangunan, khususnya penyuluhan program Bangga Kencana di balai penyuluhan KB. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan pedesaan melalui peran TIK dalam penyuluhan program Bangga Kencana yang berdampak terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat pedesaan.

## **Rumusan Masalah**

Seiring dengan perkembangan TIK, tenaga lini lapangan di balai penyuluhan KB dituntut untuk memberikan pelayanan penyuluhan pembangunan melalui penyuluhan program Bangga Kencana dengan memanfaatkan sarana TIK. Hanya tenaga lini lapangan yang terus belajar untuk meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan sarana TIK yang dapat menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Kemampuan tersebut erat kaitannya dengan kemampuan individu tenaga lini lapangan di balai penyuluhan KB dalam pemanfaatan akses jaringan internet, pemanfaatan aplikasi teknologi informasi, pemanfaatan pengiriman pesan berbasis internet, dan pemanfaatan perangkat keras (hardware). Berdasarkan uraian tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) permasalahan yang terkait dengan pemanfaatan TIK dalam penyuluhan pembangunan, yaitu:

1. Bagaimana pemanfaatan perangkat keras (hardware) dalam mendukung penyuluhan pembangunan, khususnya penyuluhan program Bangga Kencana di balai penyuluhan KB?
2. Bagaimana pemanfaatan perangkat lunak (software) berbasis daring (internet) dalam mendukung penyuluhan pembangunan, khususnya penyuluhan program Bangga Kencana di balai penyuluhan KB?

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pemanfaatan perangkat keras (hardware) dalam mendukung penyuluhan pembangunan, khususnya penyuluhan program Bangga Kencana di balai penyuluhan KB.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pemanfaatan perangkat lunak (software) berbasis daring (internet) dalam mendukung penyuluhan pembangunan, khususnya penyuluhan program Bangga Kencana di balai penyuluhan KB.

## **METODOLOGI**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif didukung dengan data sekunder yang tersedia dan bersifat descriptive explanatory. Penelitian kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan (Muljono, 2012). Penelitian ini menggunakan analisis statistik dan desain survei, dengan horison waktu satu kali dalam satu periode (cross sectional studies) yang dilakukan berdasarkan data primer dengan menggunakan instrumen dan didukung dengan data sekunder yang tersedia.

Neuman (2018) menyatakan bahwa paradigma positivistik menekankan penemuan hubungan sebab akibat, observasi empiris yang cermat, dan penelitian yang bebas nilai. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma positivistik, yang dicirikan bahwa penelitian ini merupakan sesuatu yang empiris dan dapat diamati secara objektif, dengan penekanan pada penjelasan yang empiris pada hubungan antar peubah, jenis penelitian bersifat eksplanasi, dan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik dan desain survei.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi balai penyuluhan KB pada penelitian ini secara total adalah 63 balai penyuluhan KB terdiri dari 32 balai penyuluhan KB yang berada di 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur, dan 31 balai penyuluhan KB yang berada di 31 kecamatan di Kabupaten

Indramayu (BKKBN, 2023). Sampel untuk balai penyuluhan KB ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan total sebanyak 10 sampel, yang terdiri dari 5 sampel di Kabupaten Cianjur dan 5 sampel di Kabupaten Indramayu. Sesuai dengan namanya, sampel balai penyuluhan KB ditentukan berdasarkan maksud dan tujuan tertentu (Cooper dan Schindler, 2008). Balai penyuluhan KB yang ditentukan menjadi sampel penelitian memiliki informasi yang dibutuhkan bagi penelitian.

Populasi tenaga lini lapangan diambil dari total 10 balai penyuluhan KB yang menjadi sampel, yang terdiri dari di Kabupaten Cianjur sebanyak 525 orang dan di Kabupaten Indramayu sebanyak 405 orang, sehingga total populasi tenaga lini lapangan adalah 930 orang. Penelitian ini menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Setiawan, 2007), sehingga diperoleh total sampel sebanyak 430 sampel, dengan rincian sebanyak 228 sampel di Kabupaten Cianjur dan 202 sampel di Kabupaten Indramayu. Teknik penentuan sampel tenaga lini lapangan menggunakan teknik stratified random sampling atau pengambilan sampel acak bertingkat. yaitu pengambilan sampel yang melibatkan proses stratifikasi atas dasar berbagai faktor, serta diketahui bahwa suatu strata homogen dari dalam tetapi heterogen dengan strata lain, kemudian sampel secara acak diambil dari setiap strata (Sekaran dan Bougie, 2010).

### **Jenis Data dan Analisis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sekaran dan Bougie (2010), data primer adalah informasi yang diperoleh peneliti dari responden dengan menggunakan instrumen, yang digunakan untuk mencapai tujuan spesifik penelitian. Pengumpulan data primer dilaksanakan pada balai penyuluhan KB di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Indramayu, diperoleh melalui instrumen kuesioner.

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deksriptif dari variabel yang diamati. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam bentuk tabel, dengan teknik

tabel frekuensi. Untuk menguji analisis deskriptif, digunakan aplikasi Microsoft Excel dan software SPSS version 26 for Windows.

### **Validitas dan Reliabilitas**

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, diketahui bahwa instrumen penelitian ini secara umum adalah valid dan reliabel. Nilai validitas instrumen berada pada rentang 0,850 hingga 0,983 (signifikan pada  $\alpha$  0,01), maknanya bahwa alat ukur yang digunakan adalah valid atau dipercaya dapat mengukur variabel yang digunakan pada penelitian ini. Nilai reliabilitas juga menunjukkan nilai yang reliabel, hal ini ditunjukkan dengan nilai Cronbach's alpha yang melebihi nilai minimal yang ditetapkan yaitu 0,700, berada pada kisaran 0,856 hingga 0,967, yang artinya bahwa instrumen penelitian ini reliabel atau dapat diandalkan. Dengan demikian seluruh variabel pada instrumen penelitian menunjukkan hasil valid dan reliabel, artinya instrumen dapat digunakan lebih lanjut untuk mendapatkan data lapangan yang tepat dan akurat.

## **PEMBAHASAN**

### **Pemanfaatan Perangkat Keras (Hardware) dalam Mendukung Penyuluhan Pembangunan**

Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah sangat praktis dan banyak digunakan oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat telah memanfaatkan TIK untuk kehidupan sehari-hari. Demikian juga dengan anggota organisasi balai penyuluhan KB, pemanfaatan TIK sudah menjadi bagian dalam penyuluhan program Bangga Kencana. Pemanfaatan TIK dalam penyuluhan program Bangga Kencana di balai penyuluhan KB, salah satunya dapat diamati melalui ketersediaan perangkat keras.

Pada dasarnya, pelaksanaan penyuluhan program Bangga Kencana yang dilakukan oleh anggota organisasi balai penyuluhan KB adalah penyampaian pesan kepada masyarakat, baik dengan memanfaatkan TIK maupun dilaksanakan secara konvensional. Dengan adanya TIK terdapat potensi untuk pengembangan kinerja

penyuluhan di balai penyuluhan KB. Potensi tersebut tentu perlu didukung oleh ketersediaan dari TIK di balai penyuluhan KB tersebut. Ketersediaan perangkat keras yaitu ketersediaan sarana perangkat keras TIK (smartphone, komputer, laptop) untuk melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga lini lapangan, mendukung komunikasi organisasi di balai penyuluhan KB dan untuk memberikan layanan organisasi kepada masyarakat.

Ketersediaan perangkat keras yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga lini lapangan, mengacu pada Tabel 1, diketahui bahwa sebesar 46 persen responden menyatakan perangkat keras tersedia dan hanya 10 persen responden yang menyatakan tidak tersedia, untuk mendukung komunikasi organisasi di balai penyuluhan KB diketahui lebih dari 50 persen responden menyatakan perangkat keras tersedia dan hanya 4,7 persen menyatakan tidak tersedia, sedangkan untuk memberikan layanan organisasi kepada masyarakat 41,9 persen responden menyatakan tersedia dan hanya 7,2 persen yang menyatakan tidak tersedia.

Meskipun perangkat keras telah tersedia, namun kapasitas kader dalam mengoperasikan laptop perlu ditingkatkan. Penyuluhan KB yang berusia muda di Kabupaten Cianjur menuturkan bahwa kapasitas kader dalam mengoperasikan laptop sebagai berikut:

*“...laptop yang biasa dipakai kader yang sepuh itu biasanya punya anaknya, dan belum tentu mereka lancar mengoperasikannya, sehingga perlu orientasi bagi kader untuk meningkatkan kapasitas dalam mengoperasikan laptop secara sederhana...”*

Tabel 1. Ketersediaan perangkat keras pada pemanfaatan TIK

Pemanfaatan TIK	Kategori	Frekuensi			Percentase Total (persen)
		Cianjur	Indramayu	Total	
Ketersediaan perangkat keras ( <i>smartphone</i> , komputer, laptop)					
- untuk melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga lini lapangan	1.Tidak tersedia 2.Kurang 3.Cukup 4.Tersedia Total	19 42 56 111 228	24 51 40 87 202	43 93 96 108 430	10,0 21,6 22,4 46,0 100,0
- untuk mendukung peyuluhan program Bangga Kencana di balai penyuluhan KB	1.Tidak tersedia 2.Kurang 3.Cukup 4.Tersedia Total	6 36 63 123 228	14 48 42 98 202	20 84 105 221 430	4,7 19,5 24,4 51,4 100,0
- untuk memberikan layanan organisasi kepada masyarakat	1.Tidak tersedia 2.Kurang 3.Cukup 4.Tersedia Total	14 38 79 97 228	17 47 55 83 202	31 85 134 180 430	7,2 19,8 31,1 41,9 100,0

(Sumber: diolah dari data lapangan, 2023)

BKKBN Pusat melalui dana transfer ke daerah mendukung tersedianya sarana TIK di balai penyuluhan KB. Berdasarkan data basis dana transfer ke daerah yang diunduh melalui aplikasi MORENA BKKBN (Tabel 2), diketahui bahwa di Kabupaten Cianjur telah tersedia komputer sebanyak 48 unit dan laptop sebanyak 34 unit untuk seluruh balai penyuluhan KB. Sarana TIK di Kabupaten Indramayu diketahui bahwa tersedia komputer sebanyak 16 unit, laptop sebanyak 8 unit dan smartphone sebanyak 124 unit untuk seluruh balai penyuluhan KB (BKKBN, 2023).

Tabel 2. Sarana TIK di balai penyuluhan KB

Sarana TIK	Jumlah		
	Cianjur	Indramayu	Total
Komputer	48	16	64
Laptop	34	8	42
Smartphone	0	124	124

(Sumber: morena.bkkbn.go.id, 2023)

## **Pemanfaatan Perangkat Lunak (Software) Berbasis Daring (Internet) dalam Mendukung Penyuluhan Pembangunan**

Pemanfaatan TIK untuk penyuluhan program Bangga Kencana di balai penyuluhan KB juga dapat diamati melalui pemanfaatan perangkat lunak (software) berbasis daring (internet) yang terdiri dari intensitas pemanfaatan internet oleh anggota organisasi balai penyuluhan KB, kualitas jaringan internet, intensitas pemanfaatan akses aplikasi teknologi informasi BKKBN berbasis daring (internet), dan intensitas pemanfaatan aplikasi pengirim pesan berbasis daring (internet).

Intensitas pemanfaatan internet terdiri dari frekuensi pemanfaatan internet untuk melaksanakan pekerjaan, mendukung komunikasi dan memberikan layanan. Diketahui bahwa pemanfaatan internet yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga lini lapangan sebanyak 47,9 persen responden menyatakan selalu memanfaatkan internet, dan hanya 1,4 persen responden yang menyatakan tidak pernah. Untuk mendukung penyuluhan program Bangga Kencana di balai penyuluhan KB, 53,7 persen responden menyatakan selalu memanfaatkan internet dan hanya 1,2 persen responden yang menyatakan tidak pernah. Pemanfaatan internet yang digunakan untuk memberikan layanan penyuluhan kepada masyarakat diketahui sebesar 47,4 persen responden menyatakan selalu memanfaatkan internet, dan hanya 1,4 persen responden yang menyatakan tidak pernah (Tabel 3).

Tabel 3. Intensitas pemanfaatan *internet* pada pemanfaatan TIK

Pemanfaatan TIK	Kategori	Frekuensi			Percentase Total (persen)		
		Cianjur	Indramayu	Total			
Intensitas pemanfaatan <i>internet</i>							
- untuk melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga lini lapangan							
1.Tidak pernah	2	4	6	1,4			
2.Jarang	17	18	35	8,1			
3.Sering	96	87	183	42,6			
4.Selalu	113	93	206	47,9			
Total	228	202	430	100,0			
- untuk mendukung penyuluhan program Bangga Kencana di balai penyuluhan KB							
1.Tidak pernah	2	3	5	1,2			
2.Jarang	10	10	20	4,6			
3.Sering	91	83	174	40,5			
4.Selalu	125	106	231	53,7			
Total	228	202	430	100,0			
- untuk memberikan layanan organisasi kepada masyarakat							
1.Tidak pernah	3	3	6	1,4			
2.Jarang	23	19	42	9,8			
3.Sering	93	85	178	41,4			
4.Selalu	109	95	204	47,4			
Total	228	202	430	100,0			

(Sumber: diolah dari data lapangan, 2023)

Selain intensitas pemanfaatan *internet* dalam pemanfaatan TIK oleh tenaga lini lapangan di balai penyuluhan KB, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kualitas jaringan *internet*. Secara umum, kualitas jaringan *internet* adalah bagus di seluruh wilayah kerja (69,0 persen), di balai penyuluhan KB (53,7 persen) dan di sekitar lokasi tempat tinggal (68,2 persen) (Tabel 4). Hal ini senada dengan temuan intensitas pemanfaatan *internet*, dimana tenaga lini lapangan menyatakan selalu memanfaatkan *internet*.

Tabel 4. Kualitas jaringan *internet* pada pemanfaatan TIK

Pemanfaatan TIK	Kategori	Frekuensi			Percentase Total (persen)		
		Cianjur	Indramayu	Total			
Kualitas jaringan <i>internet</i>							
- di seluruh wilayah kerja							
1.Buruk	4	1	5	1,2			
2.Cukup	16	9	25	5,8			
3.Bagus	156	141	297	69,0			
4.Sangat Bagus	52	51	103	24,0			
Total	228	202	430	100,0			
- di balai penyuluhan KB							
1.Buruk	0	0	0	0,0			
2.Cukup	1	7	8	1,9			
3.Bagus	124	107	231	53,7			
4.Sangat Bagus	103	88	191	44,4			
Total	228	202	430	100,0			
- di sekitar lokasi tempat tinggal							
1.Buruk	0	0	0	0,0			
2.Cukup	16	9	25	5,8			
3.Bagus	152	141	293	68,2			
4.Sangat Bagus	60	52	112	26,0			
Total	228	202	430	100,0			

(Sumber: diolah dari data lapangan, 2023)

Aplikasi teknologi informasi BKKBN telah dibangun untuk dapat dimanfaatkan oleh tenaga lini lapangan di balai penyuluhan KB dalam rangka mendukung penyuluhan program Bangga Kencana. Pemanfaatan aplikasi teknologi informasi BKKBN secara umum digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan serta melaporkan hasil kegiatan penyuluhan.

Untuk merencanakan kegiatan penyuluhan, sebanyak 58,1 persen responden menyatakan sering dan hanya 0,7 persen yang menyatakan tidak pernah. Diketahui bahwa 55,4 persen responden menyatakan sering memanfaatkan aplikasi teknologi informasi BKKBN untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, dan hanya 0,2 persen responden yang tidak pernah. Untuk melaporkan hasil kegiatan penyuluhan, terdapat 48,8 persen responden yang selalu memanfaatkan aplikasi teknologi informasi BKKBN, dan hanya 0,2 persen responden yang tidak pernah (Tabel 5). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga lini lapangan memahami aplikasi teknologi informasi BKKBN yang digunakan untuk merencanakan

dan melaksanakan kegiatan penyuluhan serta melaporkan hasil kegiatan penyuluhan.

Tabel 5. Intensitas pemanfaatan aplikasi teknologi informasi BKKBN pada pemanfaatan TIK

Pemanfaatan TIK	Kategori	Frekuensi			Percentase Total (persen)
		Cianjur	Indramayu	Total	
<b>Intensitas pemanfaatan aplikasi teknologi informasi BKKBN</b>					
- untuk merencanakan kegiatan penyuluhan	1.Tidak pernah 2.Jarang 3.Sering 4.Selalu	2 23 128 75	1 19 122 60	3 42 250 135	0,7 9,8 58,1 31,4
	Total	228	202	430	100,0
- untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan	1.Tidak pernah 2.Jarang 3.Sering 4.Selalu	1 19 118 90	0 18 120 64	1 37 238 154	0,2 8,6 55,4 35,8
	Total	228	202	430	100,0
- untuk melaporkan hasil kegiatan penyuluhan	1.Tidak pernah 2.Jarang 3.Sering 4.Selalu	1 12 97 118	0 12 98 92	1 24 195 210	0,2 5,6 45,4 48,8
	Total	228	202	430	100,0

(Sumber: diolah dari data lapangan, 2023)

Aplikasi teknologi informasi BKKBN dibangun dan dikembangkan atas koordinasi yang dilakukan Direktorat Teknologi Informasi dan Data (DITTEKDA) BKKBN. Pemanfaatan aplikasi tersebut juga didukung dengan orientasi dan pelatihan kepada tenaga lini lapangan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) BKKBN.

Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa aplikasi teknologi informasi BKKBN terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu: aplikasi yang terkait dengan pengelolaan data dan pengelolaan kepegawaian (aplikasi.bkkbn.go.id, 2023). Salah satu aplikasi teknologi informasi BKKBN yaitu asyar informasi keluarga, yang dipublikasikan melalui pendataan keluarga, menjadi basis asyarakat keluarga Indonesia. Pada Tahun 2022, BKKBN berhasil memutakhirkkan data keluarga Indonesia sebanyak 69.894.542 keluarga. Hasil pemutakhiran data

keluarga tersebut dapat dimanfaatkan oleh tenaga lini lapangan sebagai basis data dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan di balai penyuluhan KB (BKKBN, 2023).



Gambar 1. Aplikasi teknologi informasi BKKBN  
(Sumber: [aplikasi.bkkbn.go.id](http://aplikasi.bkkbn.go.id), 2023)

Pemanfaatan TIK yang dilakukan oleh tenaga lini lapangan di balai penyuluhan KB juga dapat diamati melalui proses berkirim pesan berbasis internet. Diketahui bahwa intensitas pemanfaatan aplikasi pengirim pesan berbasis internet, untuk berkomunikasi dengan pimpinan balai penyuluhan KB adalah selalu sebesar 52,8 persen, dengan asyar tenaga lini lapangan adalah selalu sebesar 54,7 persen, dengan asyarakat umum adalah sering sebesar 53,5 persen, dengan mitra kerja bidan adalah selalu sebesar 55,8 persen, dengan mitra kerja kades selalu sebesar 46,3 persen, mitra kerja camat sering sebesar 32,8 persen, mitra kerja babinsa sering sebesar 35,3 persen, dan mitra kerja KUA sering sebesar 35,6

persen (Tabel 6). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga lini lapangan selalu berkomunikasi secara internal dan sering berkomunikasi dengan asyarakat serta juga sering berkomunikasi secara eksternal dengan mitra dalam mendukung penyuluhan program Bangga Kencana.

Tabel 6. Intensitas pemanfaatan aplikasi pengirim pesan berbasis *internet* pada pemanfaatan TIK

Pemanfaatan TIK	Kategori	Frekuensi			Percentase Total (persen)
		Cianjur	Indramayu	Total	
Intensitas pemanfaatan aplikasi pengirim pesan berbasis <i>internet</i> , untuk berkomunikasi dengan:					
- pimpinan balai penyuluhan KB	1.Tidak pernah	2	0	2	0,5
	2.Jarang	5	5	10	2,3
	3.Sering	96	95	191	44,4
	4.Selalu	125	102	227	52,8
	Total	228	202	430	100,0
- lasyarakat tenaga lini lapangan	1.Tidak pernah	1	0	1	0,2
	2.Jarang	4	6	10	2,3
	3.Sering	90	94	184	42,8
	4.Selalu	133	102	235	54,7
	Total	228	202	430	100,0
- lasyarakat umum (sasaran)	1.Tidak pernah	2	1	3	0,7
	2.Jarang	22	24	46	10,7
	3.Sering	113	117	230	53,5
	4.Selalu	91	60	151	35,1
	Total	228	202	430	100,0
- mitra kerja (bidan)	1.Tidak pernah	1	0	1	0,2
	2.Jarang	6	8	14	3,3
	3.Sering	84	91	175	40,7
	4.Selalu	137	103	240	55,8
	Total	228	202	430	100,0
- mitra kerja (kades)	1.Tidak pernah	3	1	4	0,9
	2.Jarang	30	25	55	12,8
	3.Sering	88	84	172	40,0
	4.Selalu	107	92	199	46,3
	Total	228	202	430	100,0
- mitra kerja (camat)	1.Tidak pernah	14	11	25	5,8
	2.Jarang	73	55	128	29,8
	3.Sering	70	71	141	32,8
	4.Selalu	71	65	136	31,6
	Total	228	202	430	100,0
- mitra kerja (babinsa)	1.Tidak pernah	14	11	25	5,8
	2.Jarang	73	61	134	31,2

## **SIMPULAN**

Penyuluhan pembangunan melalui penyuluhan program Bangga Kencana merupakan isu strategis yang penting untuk mendukung pembangunan Indonesia. Dalam menghadapi era globalisasi, pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui program Bangga Kencana yang dicanangkan oleh BKKBN tidak terlepas dari pengaruh pesatnya perkembangan TIK. BKKBN pusat juga telah membangun berbagai aplikasi teknologi informasi untuk mencapai sasaran strategis Program Bangga Kencana.

Pemanfaatan TIK dalam penyuluhan program Bangga Kencana terdiri dari pemanfaatan perangkat keras dan pemanfaatan perangkat lunak yang terdiri dari pemanfaatan akses jaringan internet, kualitas jaringan internet, pemanfaatan aplikasi teknologi informasi yang dibangun BKKBN, dan pemanfaatan pengiriman pesan berbasis internet. Berdasarkan analisis deskriptif disimpulkan bahwa, sebagian besar tenaga lini lapangan telah tersedia perangkat keras dan selalu memanfaatkan internet untuk melaksanakan pekerjaan, didukung dengan kualitas jaringan internet yang bagus di seluruh wilayah kerja, sehingga sebagian tenaga lini lapangan sering memanfaatkan aplikasi pengirim pesan berbasis internet dan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi BKKBN.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa ada komitmen yang sangat baik dari tenaga lini lapangan dan BKKBN dalam memanfaatkan TIK untuk penyuluhan pembangunan melalui penyuluhan program Bangga Kencana. Namun demikian, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai pengembangan model pemanfaatan TIK untuk mendukung penyuluhan pembangunan. Pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya agar memperhatikan dan mendukung strategi pemanfaatan TIK dalam mendukung penyuluhan program Bangga Kencana melalui peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan, yaitu dengan kegiatan pelatihan atau seminar-seminar pemanfaatan TIK yang dapat meningkatkan kemampuan anggota organisasi balai penyuluhan KB.

## **BAB 4**

# **Komunikasi Internasional Dalam Pembangunan: Tinjauan Teoritis Dan Konseptual**

Farida Hariyati

### **Abstrak**

Komunikasi internasional adalah bidang kajian multidisiplin yang mencakup interaksi global melalui media, diplomasi, kebijakan telekomunikasi, dan hubungan antar budaya. Artikel ini mengkaji teori-teori utama dalam komunikasi internasional, termasuk paradigma internasionalisme, Marxis, representasi, penerimaan, dan identitas. Studi ini juga membahas bagaimana komunikasi internasional berperan dalam pembangunan global, terutama dalam konteks teori modernisasi, dependensi, dan sistem dunia. Perkembangan teknologi informasi dan media transnasional semakin mempercepat arus informasi antarnegara, tetapi juga menghadirkan tantangan seperti ketimpangan akses informasi, regulasi media global, dan disinformasi. Dalam konteks pembangunan, komunikasi internasional menjadi instrumen strategis dalam menyebarkan informasi, membangun pemahaman lintas budaya, serta mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Di Indonesia, tantangan komunikasi internasional dalam pembangunan mencakup kesenjangan digital, dominasi narasi negara maju, serta polarisasi informasi global. Dengan pendekatan multidisiplin yang melibatkan akademisi, pemerintah, dan sektor swasta, komunikasi internasional dapat berkontribusi pada penciptaan tatanan informasi global yang lebih adil dan setara.

Kata kunci: komunikasi internasional; pembangunan; media global; teori komunikasi; informasi transnasional

## PENDAHULUAN

Komunikasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses berbagi informasi dimana dua atau lebih partisipan mencapai pemahaman bersama (mutual understanding). Pemahaman Bersama ini dapat dicapai dengan berhasilnya terjadi informasi tambahan (feedback). Biasanya, siklus pertukaran informasi diperlukan untuk merubah perbedaan-perbedaan sebelumnya untuk mempertahankan pengertian tersebut (Kamalipour 2021). Komunikasi internasional merupakan bagian dari Komunikasi internasional adalah istilah yang diberikan untuk bidang penelitian yang mencakup studi berbagai macam interaksi global, seperti komunikasi global via media, komunikasi lintas budaya, dan kebijakan telekomunikasi. Oleh karena itu, berdasarkan sifatnya, komunikasi internasional adalah bidang studi lintas-disiplin, menggunakan konsep, metode riset, dan data dari berbagai bidang seperti ilmu politik, sosiologi, ekonomi, sasatra, dan sejarah. Bidang ini memiliki dua dimensi umum yaitu (1) studi kebijakan dan (2) studi kultural. Studi kebijakan berkaitan dengan analisis mengenai Tindakan badan pemerintah (organisasi pemerintah dan antarpemerintah) yang mempengaruhi sifat komunikasi. Sementara pendekatan studi kultural untuk komunikasi internasional meneliti relasi antara kultur dan komunikasi internasional (Littlejohn et al. 2017).

Komunikasi internasional merupakan salah satu bidang riset yang penting dalam dunia yang telah terglobalisasi. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, aliran informasi lebih didominasi oleh kekuatan Barat dan Timur yang kemudian terefleksikan pada bidang kajian komunikasi internasional seperti pembangunan, modernisasi dalam perspektif pasca-kolonial yang memegang asumsi bahwa gaya modernisasi barat merupakan model utama bagi dunia. Mendalamnya globalisasi juga memperdalam keterikatan pada pelaku dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Tren ini memberikan kesempatan kepada masyarakat ataupun sector-sektor untuk melakukan komunikasi di dalam

konteks lokal dan memberikan peluang untuk melakukan ikatan dengan dunia luar (Li 2020).

### **Definisi**

Gerhard Maletzke (2016) menyatakan bahwa komunikasi internasional adalah proses komunikasi antara berbagai negara dan bangsa yang melintasi batas-batas negara. Dalam pandangan Maletzke, komunikasi ini tercermin dalam diplomasi dan propaganda, seringkali berhubungan dengan situasi antarbudaya (intercultural). Sementara itu, McPhail (2014) mengatakan bahwa 'komunikasi internasional merujuk pada analisis komunikasi budaya, ekonomi, politik, sosial dan teknis dan pola-pola media serta efek yang terjadi diantara bangsa-bangsa. Komunikasi internasional focus pada aspek global dari media dan system komunikasi dan teknologi, dan pada aspek atau isu nasional/lokal'

Studi tentang komunikasi internasional seringkali diinspirasi oleh pandangan nation-state sebagai konsep kunci. Hal ini secara serius dihadapkan pada perkembangan diaspora komunitas di dunia: adanya upaya 'de-territorialized' "imagined" communities yang dilakukan oleh sejumlah besar imigran yang terus bergerak. Tarik menarik diantara kekuatan negara asal dan atau negara yang ditempati. Komunitas diaspora juga berperan dalam mengembangkan media yang memproduksi dan mendistribusikan konten yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman mereka (Hamelink 2015).

Selanjutnya Hamelink (2015) juga mengatakan bahwa komunikasi internasional merupakan fakta adanya komunikasi diantara bangsa dan komunikasi antarnegara dengan berbagai alternatif istilah yang dapat diterapkan:

1. Komunikasi dunia (World Communication): terminologi ini memiliki makna yang lebih luas dibanding komunikasi internasional. Namun demikian istilah ini masih agak kabur meskipun dikaitkan dengan munculnya hubungan romantic, dimana komunikasi dunia ini dikaitkan dengan "keluarga manusia" (family of man).

2. Komunikasi Lintasbatas (Transborder Communication). Istilah ini terdengar agak canggung namun mendorong adanya fenomena inti dari eksplorasi yang akan berjalan. Bentuk komunikasi yang akan dikaji adalah sebuah proses "glocal" yang mana "pesan-pesan" mengalir melintasi batas-batas.
3. Komunikasi Global. Frase ini merupakan istilah yang lebih sesuai untuk situasi dan kondisi saat ini. Global merepresentasikan sebuah aspirasi dibanding sebuah realitas. Komunikasi dapat mengglobal namun juga tetap bersifat lokal. Berbagai produksi TV dan Film yang sebenarnya tidak bersifat global namun berasal dari lokal. Global dan lokal saling memiliki satu sama lain (global and local belong together). Pada dasarnya, kita tidak sedang berada di dalam situasi atau tempat secara global, namun di dalam lokasi-lokasi tertentu saja. Namun demikian, dalam pandangan cosmopolitan bisa saja bahwa identitas seseorang secara utama ditunjukkan oleh "lokalitas" (locality) yaitu: asal kelahiran, keluarga, bahasa, candaan (jokes). Kelekatan pada tempat dimana kita mengalami kenyamanan ('comfort') budaya yang paling besar seringkali disebut dengan kedekatan budaya (cultural proximity), dan hal ini merupakan pengalaman yang esensial. Kita semua adalah warga global dan local dan komunikasi yang berjalan dapat dikatakan sebagai "glocal". Istilah ini berkaitan dengan global (misalnya produk untuk pemasaran global) dengan lokal (misalnya rasa dan pengalaman).

Saat ini, komunikasi dapat dilihat sebagai "agen" dalam proses globalisasi bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya yang saling menghubungkan sejumlah orang di seluruh dunia, dan sejalan dengan hal tersebut, sebagai sebuah proses (insitusionalisasi), komunikasi global pun dipengaruhi oleh proses tersebut.

## **Premis Dasar dan Asumsi**

Komunikasi internasional bukanlah sebuah teori yang mandiri atau berdiri sendiri, karena teori ini bersifat multidisiplin. Kajian ini bisa juga dipahami sebagai sebuah konteks yang tetap mendasarkan pada definisi dan unsur-unsur komunikasi secara universal, yaitu komunikator, pesan, komunikan, saluran (media), dan efek. Untuk membangun presmis-premis dalam teori, maka kita dapat merujuk dari gagasan Littlejohn dan Foss (2009), bahwa teori komunikasi internasional dapat dipilah menjadi lima paradigma teori, yaitu teori internasionalisme, komunikasi internasional Marxis, Teori Representasi, Teori Penerimaan, dan Teori Identitas.

### **1. Teori Internasionalisme**

Pandangan paradigma teori ini bersifat deterministik secara teknologis, yang menegaskan bahwa 'semakin terkoneksi sistem internasional via teknologi baru, maka semakin demokratis dan damai dunia'. Internasionalisme didasarkan pada sejumlah asumsi utama. Diantaranya adalah pandangan bahwa manusia memiliki sejumlah nilai inti yang sama yang dapat dijumpai di seluruh dunia, terlepas dari kultur dan geografinya; asumsi bahwa ada entitas yang disebut masyarakat internasional, ide bahwa meningkatnya peluang untuk berkomunikasi akan membangkitkan nilai-nilai ini jika selama ini belum aktif, keyakinan bahwa opini public selalu mendukung perdamaian, dan ide bahwa proyek komunikasi internasional instrumentaslis dapat dilakukan untuk mempropandakan kebutuhan etis demi dunia yang damai.

### **2. Komunikasi Internasional Marxis**

Proposisi utama dari komunikasi internasional Marxis adalah cara sistem internasional berkomunikasi merupakan fungsi dari mode produksi ekonomi. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, teori komunikasi internasional yang popular lebih banyak diilhami oleh Teori Ketergantungan yang menyatakan bahwa ada struktur komunikasi internasional yang merefleksikan

ketidakseimbangan kekuatan antara negara 'pusat' dan 'pinggiran'. Seluruh dunia dibayangkan sebagai tempat perjuangan kelas global. Komunikasi massa internasional didominasi oleh kepentingan kapitalis transnasional, khususnya perusahaan.

### 3. Teori Representasi

Teori ini merupakan skema interpretif yang memberikan cara untuk memahami tendensi dalam komunikasi internasional, khususnya relasi komunikasi komunikasi internasional yang tidak seimbang. Beberapa asumsi dasarnya antara lain: Budaya Populer (seperti cerita fiksi, film, acara televisi, komik, dan sebagainya) harus dipertimbangkan secara serius manfaatnya dalam memberikan pemahaman tentang relasi politik internasional, teknis dari linguistic dan studi literatur dapat digunakan untuk membaca media internasional senahoo teks, makna bersifat tidak tetap, sehingga selalu ada perseteruan untuk mempertahankan ideologi dominan, tendensi diskursif dalam media popular seringkali mencerminkan agenda kebijakan internasional.

### 4. Teori Penerimaan

Kritik strukturalis Marxis terhadap system komunikasi internasional mengilhami gagasan di United Nations for a New World Information and Communication Order pada 1970-an dan 1980-an, namun perdebatan intelektual ini memicu penyusunan teori yang berusaha menjelaskan ketidakseimbangan komunikasi internasional dengan tidak menggunakan gagasan mode produksi. Para pemikir teori ini berpendapat bahwa aliran media internasional adalah tidak seimbang karena alasan yang ada di dalam teks, bukan karena imperialisme kultural. Oleh karena itu, teori ini sejalan dengan teori representasi yang berfokus pada analisis teks. Ilustrasi dari teori penerimaan ini adalah adanya model transparansi naratif dari Scott Robert Olson, yang mencontohkan produk audiovisual Amerika Serikat seperti acara televisi dai film, yang merupakan teks transparan karena dapat dipahami

dengan mudah oleh orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda. Teks transparan ini menggunakan 'mitotypes' yang ada dalam sistem mitos di seluruh dunia, dan mitotypes ini mencakup emosi, kekaguman, partisipasi, dan rasa heran. Gagasan ini menolak pandangan Marxis dan Representasi yang menyatakan bahwa struktur material dari sistem komunikasi transnasional atau teks bermuatan ideologi.

##### 5. Teori Identitas

Paradigma identitas adalah paradigma yang paling mendalam akarnya dalam tradisi intelektual postmodern. Salah satu kunci postmodernisme yang berbeda dari modernisme adalah kesediaanya untuk mengasumsikan bahwa kontur utama dari bentuk identitas manusia tidak berada di sepanjang garis kelas, namun berdasarkan penanda identitas. Inilah yang disebut Gerakan sosial baru dan mencakup konfigurasi identitas di seputar gender, ras, etnis, status ketidakmampuan, dan orientasi seksual. Paradigma identitas merepresentasikan perubahan besar dalam hal sifat dasar komunikasi internasional yang dikonseptualisasikan, karena paradigma ini tidak selalu mengasumsikan pentingnya negara. Paradigma ini menekankan pada elemen aktor yang menjadi agensi tertentu yang dapat melemahkan dan melampaui kekuatan negara. Paradigm aini membahas problem yang sering menimpa upaya-upaya teorisasi internasional yang cenderung tidak mampu memberikan ekologi kepentingan.

Tren yang jelas dapat diamati dalam teori komunikasi internasional adalah 'menjauh' dari ilmu sosial menuju kepada ilmu kemanusiaan. Paradigma internasionalis dan Marxis adalah teori besar komunikasi internasional karena berusaha mendeskripsikan dan memberikan aturan normative untuk memahami seluruh sistem komunikasi internasional. Sebaliknya, tiga paradigma lainnya berusaha memberikan petunjuk untuk memahami komunikasi internasional melalui poin intervensi tertentu dalam proses komunikatif.

Dalam term komunikasi internasional terdapat asumsi bahwa negara-bangsa (nation-state) adalah aktor utama dalam interaksi global. Hal ini diambil dari fakta bahwa sistem negara Westphalia (kedaulatan negara bangsa) adalah basis dari tatanan politik internasional. Sistem ini mengasumsikan bahwa negara adalah actor utama dan bahwa prinsip kedaulatan negara itu sangat penting. Oleh karena ini, internasional adalah arena yang didominasi oleh negara-negara yang merupakan sumber utama sebagai agen. Oleh karena itu, teori komunikasi internasional dalam perspektif ini pada dasarnya adalah teori tentang bagaimana negara berinteraksi satu sama lain. Bahkan ketika prinsip kedaulatan negara dan agensi diperumit dengan hadirnya pemain transnasional, seperti perusahaan transnasional, para pemain ini masih diasumsikan sebagai pelengkap dari negara yang merupakan satu-satunya aktor yang memiliki legitimasi untuk menciptakan hukum nasional dan internasional yang mengontrol perilaku para aktor tersebut.

Sebagaimana dijabarkan dalam pendahuluan dan definisi di atas, komunikasi internasional merupakan teori yang bersifat terapan yang dipengaruhi oleh beberapa teori besar yang saling berhubungan, sehingga untuk membangun asumsi-asumsi, perlu dikaitkan dengan teori-teori yang mendasarinya.

### 1. Aliran Informasi Bebas (Free Flow of Information)

Doktrin aliran informasi bebas dipandang oleh banyak sarjana sebagai bagian dari gagasan liberal AS (Thussu 2000; Schiller 2016). Inti dari doktrin ini adalah perhatian nyata dari pembuat kebijakan dan peneliti AS tentang peran yang harus dimainkan komunikasi dalam masyarakat. Pada tahun-tahun awal penelitian komunikasi, pendekatan arus utama disebut sebagai positivisme. Di bawah model ini, komunikasi dipahami sebagai transmisi informasi linier dari pengirim ke penerima. Salah satu pelopor terkemuka dari model ini adalah Harold Dwight Lasswell, penulis *The Structure and Function of communication in Society*, sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 1948 di mana ia bertemu model komunikasi verbal berdasarkan pertanyaan: WHO said WHAT in WHICH channel

kepada SIAPA dengan efek WHAT. Model ini tentang proses komunikasi dan fungsi yang dimainkannya dalam masyarakat. Dalam analisis Lasswell, komunikasi memainkan tiga fungsi utama: pengawasan lingkungan, korelasi komponen masyarakat, dan transmisi budaya antar generasi.

Bagi Lasswell, komunikasi memungkinkan pengawasan lingkungan dalam arti bahwa proses tersebut memungkinkan pemantauan perilaku orang dan objek dalam sistem untuk kesesuaian dengan norma yang diharapkan. Gagasan tentang korelasi komponen masyarakat berarti bahwa proses komunikasi memungkinkan orang untuk memahami lingkungan dan kejadiannya. Adapun fungsi transmisi budaya antargenerasi adalah sebagai media yang mendidik masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik dan untuk pelestarian ritual, nilai, dan tradisi. Karena fungsi ini, Lasswell mendukung arus informasi yang bebas. Dia menyarankan bahwa informasi harus mengalir dalam masyarakat multikultural dengan banyak khalayak.

## 2. Determinisme Teknologi (Technology Determinism)

Pemahaman mendasari dari teori ini adalah adanya keyakinan bahwa perubahan dalam teknologi dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Kritik determinisme teknologi berargumen bahwa sebuah teknologi biasanya akan menyatu dalam sebuah struktur sosial yang mempengaruhi intervensi, pembangunan, difusi, dan dampak sosial dalam masyarakat. Konstruksi sosial teknologi dapat sering berlangsung dan bahkan selalu terjadi. Namun, menyatunya teknologi dalam lingkup sosial tidak mengurangi fakta bahwa teknologi dapat menjadi sebuah dorongan bagi perubahan sosial (Rogers dan Kincaid 1982). Determinisme teknologi merupakan konsep yang digagas oleh Marshal McLuhan dengan membagi sejarah manusia dalam empat periode atau ephos: tribal age, literate age, a print age, dan electronic age. McLuhan mengklaim bahwa transisi antar periode tidak bersifat gradual ataupun evolusioner, namun dalam setiap masa tersebut, dunia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi terbaru dari satu era ke

era berikutnya. McLuhan merasa yakin bahwa cara kita hidup merupakan sebuah fungsi bagaimana kita memproses informasi, dan McLuhan mempertegas dengan pernyataan bahwa 'media adalah pesan itu sendiri" atau "the medium is the message". Dalam tahap electronic age muncullah apa yang disebut oleh McLuhan sebagai Kampung Global (Global Village), dimana masa kekuatan media cetak telah berakhir, dan kita semua merupakan anggota dari sebuah kampung global. (Griffin et al. 2018).

## **PEMBAHASAN**

### **Keunikan Komunikasi Internasional**

Sebagaimana dijabarkan bahwa teori komunikasi bukanlah sebuah grand theory yang memiliki asumsi atau premis secara tersendiri, namun lebih sebagai teori yang bersifat aplikatif dan multidisiplin sehingga dapat ditarikatau dikaitkan dengan perspektif dari teori lain yang relevan. Dengan sifat aplikatif dan multidisiplin inilah maka teori komunikasi memiliki distingsi atau keunikan, dimana perspektif teori komunikasi dikaitkan dengan berbagai isu atau bidang ilmu, seperti komunikasi massa dan hubungan internasional.

Komunikasi internasional yang berasal dari pemikiran Barat kemudian berhasil menembus kepada pemikir-pemikir di blok timur dan belahan bumi selatan, melihat faktor geopolitik ini melalui lensa komunikasi dan persuasi politik. Perhatian Lasswellian pasca-Perang Dunia I dengan propaganda dan keseriusan kelompok Lernerian pasca Perang Dunia II dengan pembangunan diserap ke dalam bidang komunikasi internasional yang muncul untuk mengatasi persaingan yang dihasilkan Perang Dingin. Sebagaimana berikut bahwa para pemikir Asia termasuk di antara penantang awal paradigma modernisasi dalam komunikasi internasional, berpartisipasi dalam memberikan pemikiran-pemikiran perubahan. Bidang komunikasi internasional terus berubah sebagaimana lingkungan internasional dan global juga berubah. Tiga pemicu perubahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut (Chitty 2010):

1. Pemikir non-barat telah memasukkan perspektif mereka ke dalam kajian komunikasi internasional.
2. Transformasi geopolitik, ekonomi, demografis, teknologi, dan lainnya yang penting telah terjadi pada paruh kedua abad ke-20.
3. Bidang kajian baru yang menyajikan berbagai isu terkait dengan kepentingan komunikasi internasional mulai banyak bermunculan.

Definisi aliran informasi dari Mowlana (1996) menjadi isu perhatian utama dalam beberapa decade sebelumnya, menjadi 'pergerakan pesan melintasi batas-batas nasional antara dan diantara dua atau lebih sistem budaya dan jaringan'. Definisi bersifat sementara karena komunikasi internasional sangat terkait erat dengan respon terhadap aspek geopolitik, teknologi, dan perubahan sosial. Sebagaimana teori sosial dari barat, teori komunikasi internasional memiliki batasan-batasan. Konstelasi kondisi-kondisi obyektif disekeliling perubahan dalam bidang ini berubah sebagaimana teori sosial barat, dimana aliran informasi ini kemudian saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh teori sosial yang juga berkembang (Chitty 2010).

### **Akar Dan Tokoh Penting**

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa komunikasi internasional merupakan kajian yang tidak berdiri sendiri karena bersifat multidisiplin dengan ilmu lain, maka kajian komunikasi internasional berakar pada beberapa teori dan para tokoh yang menggagasnya (McPhail 2014):

1. Teori Kolonialisme Elektronik (Electronic Colonialism Theory - ECT)

Teori ini dikemukakan oleh Thomas L. McPhail (2014), dimana budaya disampaikan didalam sebuah dunia multimedia. ECT adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan ketergantungan daerah yang lebih miskin (poor regions) kepada daerah yang lebih kaya (post-industrial nations) dengan membangun perangkat keras dan perangkat lunak yang menghasilkan nilai dan informasi asing yang

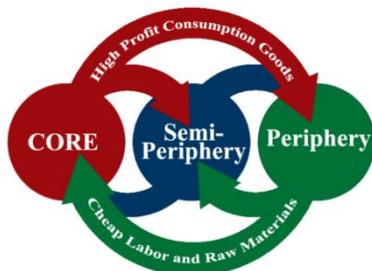
mengubah budaya, adat, kebiasaan, dan nilai-nilai lokal. Mulai dari komik, satelit, komputer, mesin faks, CD/DVD merupakan media yang digunakan oleh Electronic Colonialism (McPhail 2009). Persoalan utamanya adalah bahwa informasi asing tersebut akan mengubah, menolak dan melupakan budaya dan sejarah lokal. Tujuan dari ECT adalah untuk mengukur bagaimana media massa mempengaruhi pemikiran (mind). Dalam hal ini pemerintah dari masyarakat dunia ketiga risau terhadap Electronic Colonialism ini yang dianggap lebih besar dampaknya dari ekspansi militer dan ekonomi yang pernah dilakukan negara-negara Barat di masa lalu. Jika pada zaman sebelumnya yang dijajah adalah bahan mentah dan buruh, maka Electronic Colonialism menguasai dan mengendalikan pemikiran Negara Dunia Ketiga (Empire of The Mind). Hasilnya sikap, keinginan, kepercayaan, gaya hidup dan perilaku konsumsi negara tersebut berubah yang semuanya akan menguntungkan perusahaan multinasional Barat (Irawan, 2014).

## 2. Teori Sistem Dunia (World System Theory - WST)

Teori Sistem Dunia (World-Systems Theory/WST), yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein, menawarkan konsep, ide, dan terminologi dalam memahami struktur komunikasi internasional. Teori ini berkaitan erat dengan teori dependensi (ketergantungan) dan sering dikritisi dalam diskusi yang melibatkan retorika serta pemikiran para akademisi kritis dan scholar media. Dalam pandangan teori ini, ekspansi ekonomi global terjadi melalui interaksi antara tiga kelompok negara: Core (inti), Semi-Periphery (semi-periferal), dan Periphery (periferal) (McPhail 2014). Negara-negara Core memiliki modal besar, teknologi canggih, serta tenaga kerja yang terampil. Sebaliknya, negara-negara Periphery umumnya memiliki tenaga kerja dalam jumlah besar tetapi kurang terampil, serta keterbatasan modal dan teknologi. Meskipun sering kali kaya akan sumber daya alam, negara-negara Periphery mengalami kesulitan dalam mengolahnya secara mandiri. Sementara itu, negara-negara Semi-Periphery berada di antara dua kategori tersebut.

Beberapa memiliki karakteristik yang mendekati negara Core, tetapi dalam aspek tertentu masih memiliki keterbatasan layaknya negara Periphery. Hubungan antara ketiga kelompok negara ini bersifat saling terhubung dan saling bergantung. Namun, dalam praktiknya, keuntungan terbesar dari sistem ekonomi global lebih banyak dinikmati oleh negara-negara Core. Beberapa catatan penting dari pandangan teori WST adalah sebagai berikut:

- Pengelompokan bangsa-negara ini memiliki tingkat interaksi yang berbeda pada ekonomi, politik, budaya, media, teknik, buruh, modal dan sosial. Prinsip ekonomi dunia membagi bangsa-bangsa menjadi bangsa yang pemenang dan kalah dari tingkat individu, perusahaan sampai bangsa.
- Teori ini memiliki asumsi bahwa terjadi ketidakseimbangan/ ketidaksetaraan di mana bangsa dominan mengendalikan ekonomi. Bangsa dominan adalah bangsa Barat (Amerika Serikat sebagai salah satu contohnya) dan bangsa semiperiphery dan periphery yang menjadi subordinatnya. Dominasi Barat mengendalikan negara-negara berkembang mulai dari teknologi, perangkat keras, pengetahuan, produk, jasa melalui konsep pasar (pembeli dan penjual). Negara berkembang menyediakan buruh murah, bahan mentah, pasar massal, biaya impor film barat yang murah, dan lain sebagainya (Irawan 2014).



Wallerstein's World System Theory Model

Gambar 1. Model Teori Sistem Dunia Immanuel Wallerstein

## **Kaitan Dengan Ilmu Lain**

Penyusunan teori dalam komunikasi internasional banyak meminjam dari disiplin akademik di luar komunikasi. Paradigma yang lebih menekankan actor biasanya menggunakan bidang hubungan internasional sebagai ide dasar tentang apa yang disebut actor internasional. Paradigma deterministic dalam komunikasi internasional menggunakan dasar ilmu pasti/eksak seperti teknik dan komputer, untuk menyusun asumsi tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Demikian pula ilmu ekonomi dan studi ekonomi politik mempengaruhi cara para pemikir untuk menyusun konfigurasi teori komunikasi internasional.

## ***Sosiologi & Psikologi***

Bidang kajian komunikasi internasional sebenarnya berkembang dalam sebuah setting kelembagaan yang berbeda untuk tujuan yang berbeda, mengambil dua lintasan paralel namun agak terpisah. Satu aliran silsilah akademis dapat ditelusuri kembali ke Universitas Chicago pada tahun 1930-an dan 1940-an, di mana sosiolog perkotaan (seperti Robert Park dan Herbert Blumer) di bawah pengaruh pragmatisme (John Dewey) dan interaksiisme simbolik (George Herbert Mead) menunjukkan ketertarikan pada peran integratif media dalam membangun komunitas di tengah transformasi sosial skala besar yang dihasilkan oleh industrialisasi, urbanisasi, dan imigrasi. Keunggulan sosiologi Chicago dalam studi komunikasi massa di AS digantikan pada tahun 1950-an oleh sekolah sosiologi dan psikologi sosial fungsional-struktural yang dipimpin oleh Robert K. Merton dan Paul Lazarsfeld di Universitas Columbia. Pada titik ini, penelitian komunikasi domestik mendapatkan karakter, prinsip, dan arahan lain ketika para peneliti Columbia mengalihkan perhatian utama mereka untuk menyelidiki bagaimana media secara instrumental mengubah niat pemilih atau perilaku konsumen (Lee 2011).

### ***Sistem Ekonomi***

Sistem ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa, lapangan kerja, hubungan dagang, dan menghasilkan pola penciptaan kekayaan dan investasi telah menjadi elemen dalam penyusunan teori komunikasi internasional. Para teoritis cenderung memandang moda produksi sebagai bagian dari pola komunikasi internasional. Ini khususnya tampak dalam paradigma Marxis yang sangat popular dalam awal sejarah bidang ini, yang kemudian menarik lagi setelah munculnya neoliberalisme transnasional. Para teoritis cenderung memandang komunikasi internasional merefleksikan, adanya tendensi relasi ekonomi yang mencerminkan pola perdagangan global (Littlejohn dan Foss 2009).

Pada pertengahan abad ke-20, suatu industri komunikasi global mulai berkembang dan di awal abad ke-21 menjadi salah satu segmen penting dalam ekonomi dunia. Pada awal 1950-an, produksi industri Barat mulai bergerak menuju negara-negara di belahan Selatan untuk mencari buruh murah dan pasar baru. Dengan kombinasi munculnya upah buruh dan perkembangan teknologi sebagai komunikasi satelit dan kontainerisasi, maka transnasionalisasi industry ini menjadi sebuah kebutuhan dan kemungkinan. Perkembangan selanjutnya, selama tahun 1970-an banyak perusahaan transnasional terkemuka mulai menyusun ketentuan-ketentuan informasi untuk mendukung pemasaran, periklanan, dan kehumasan yang dibutuhkan di seluruh dunia (Hamelink 2015).

### ***Bidang Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya***

Menurut Mowlana (dalam Li, 2020), salah satu tokoh penting dalam perkembangan bidang komunikasi internasional yang memprakarsai pembentukan program pengajaran pascasarjana komunikasi internasional pertama di dunia di American University; komunikasi internasional mampu melampaui pesan media, antropologi budaya, dan teknologi komunikasi,

melainkan mencakup penelitian bidang bisnis dan ekonomi, ilmu politik, sosiologi, antropologi budaya dan hubungan internasional (Mowlana 1997). Hal ini mencakup arus informasi dalam interaksi negara, warga negara dan bisnis yang mencakup distribusi sumber daya berwujud seperti teknologi, politik, kebijakan, produk budaya, dan lain-lain; serta aset tidak berwujud seperti kepercayaan, ideologi, pengetahuan, dan agama. Ia mengkategorikan semua interaksi manusia atas informasi, opini, dan gagasan antara atau di antara berbagai negara, budaya, dan masyarakat, serta struktur dan proses di mana interaksi terjadi di bawah tenda komunikasi internasional.

Sub-bidang dalam komunikasi internasional juga diidentifikasi meliputi komunikasi dan pembangunan, komunikasi lintas budaya, komunikasi pembangunan, komunikasi diaspora, komunikasi antar budaya, ekonomi politik dan komunikasi internasional, hubungan masyarakat internasional, kebijakan telekomunikasi internasional, jurnalisme internasional, media dan kebijakan luar negeri, diplomasi publik, dan komunikasi transnasional. Mowlana melihat antarbudaya dan komunikasi internasional sebagai identik (Mowlana 1997; Mowlana & Wang 2018).

Ada bidang paralel dan nama lain di dalam komunikasi internasional, dimana para ahli berupaya untuk membuat perbedaan, dan aspek yang paling banyak dibicarakan adalah komunikasi antar budaya dan komunikasi global. Menurut para pakar komunikasi antarbudaya memfokuskan pada tingkat komunikasi antarpribadi dan pakar komunikasi internasional berfokus pada tingkat makro dari pertukaran informasi antar negara. Untuk menambah dimensi lebih lanjut, Gary Weaver (dalam Li 2020) menyatakan bahwa: *Komunikasi lintas budaya dan antar budaya sering digunakan secara bergantian, namun keduanya agak berbeda dalam hal bidang penyelidikan, kedalaman analisis, dan ruang lingkup. Studi komunikasi lintas budaya dimulai dengan pemeriksaan dampak teknologi dan komunikasi massa*

*pada budaya dan interaksi dari apa yang disebut negara 'maju' dan 'berkembang' ... banyak sarjana mulai menggunakan istilah hubungan antar budaya untuk memasukkan kedua istilah penyelidikan ".*

## **Perkembangan Dalam Riset Dan Praktek Pembangunan Aliran Informasi dan Pendekatan Pembangunan**

Perdebatan yang telah lama menentang pengamat aliran informasi bebas dan pendukung regulasi negara tentang media dan komunikasi tidak hanya terdiri dari yang filosofis dan oposisi konseptual antara pendukung pasar bebas dan pendukung regulasi negara. Inti dari perdebatan tersebut adalah peran yang dimainkan oleh komunikasi dan media secara umum memainkan peran dalam proses pembangunan. Amerika Serikat yang memperjuangkan arus informasi yang bebas menganggap media sebagai pilar sentral untuk modernisasi masyarakat. Pandangan ini ditentang oleh teori ketergantungan, teori sistem dunia dan teologi pembebasan yang menyerukan adanya perjuangan melawan imperialisme budaya yang berasal dari arus informasi yang bebas (Diop 2016).

### ***Pembangunan sebagai Modernisasi***

Meskipun pembangunan bukanlah hal baru, intervensi pembangunan dalam bentuk modern telah dimulai periode pasca Perang Dunia II. Pembangunan sebagaimana dipahami oleh Amerika Serikat dipandang sebagai suatu proses linier yang mengerucut dengan tahapan yang dicapai oleh negara-negara Barat. Konsepsi ini menyusun teori bahwa pembangunan sebagai modernisasi yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, sains, dan penyesuaian dengan sains dan teknologi dari Barat. Paradigma modernisasi ini berakar pada gagasan Rostow (1960) yang berpendapat bahwa ekonomi terjadi melalui lima tahap yang dimulai dengan masyarakat tradisional, prasyarat untuk lepas landas (*take-off*) dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, lepas landas (*take-off*) dengan adanya akumulasi dan

industrialisasi awal, menuju kematangan (*drive to maturity*), dimana industrialisasi tinggi di mana standar hidup masyarakat tetap rendah, dan tahap terakhir adalah zaman masyarakat dengan konsumsi tinggi (Diop 2016).

Selain fokus pada industrialisasi, paradigma modernisasi juga ditandai dengan bias pro-media. Para pengamat pendekatan ini percaya pada kapasitas media untuk menyebarkan nilai-nilai Barat dan pesan modernitas (Lerner 1958; Schramm 1964; Melkote dan Steeves 2015).. Dalam bukunya *The Passing of Traditional Society*, Lerner (1958) menekankan pada kapasitas media untuk mendorong transisi menuju modernitas. Dengan mengekspos individu ke ide-ide dan realitas baru dari Utara, media mendorong orang-orang di negara Dunia Ketiga untuk memutuskan hubungan mereka dengan nilai-nilai tradisional. Lerner juga meyakini perkembangan itu dari kepribadian yang bersifat *mobile* yang memanifestasikan empati terhadap pengaruh modernisasi dapat berkontribusi pada penerimaan nilai-nilai Barat di negara berkembang. Bagi Lerner, media juga bersifat indikatif terhadap tingkat perkembangan ekonomi di suatu negara. Dia berpendapat bahwa urbanisasi berjalan seiring kebangkitan literasi, dan industrialisasi negara-negara akan mempermudah penciptaan ruang-ruang bagi media. Bagi Lerner, media adalah agen dan indeks modernisasi. Paradigma Modernisasi juga terinspirasi Wilbur Schramm yang berpendapat berpendapat bahwa media memungkinkan terjadinya transfer ide negara maju ke negara berkembang. Bagi Schramm, bahkan di Dunia Ketiga, media berkontribusi untuk mentransfer informasi dan pengetahuan dari daerah perkotaan menuju pedesaan. Teori modernisasi ini juga mencakup adanya elemen determinisme ekonomi seiring dengan adanya gagasan tentang konsep dan praktik demokratisasi seperti perlunya menyampaikan suara atau aspirasi (McPhail 2009).

### ***Transisi Pemikiran tentang Pembangunan***

Wilbur Schramm (1964) adalah orang yang dianggap memperkenalkan dan mengakui bahwa komunikasi dapat berperan penting dalam pembangunan terutama di negara-negara dunia ketiga. Ia percaya bahwa media massa dapat memperbaiki kehidupan orang-orang dengan menambah sumber daya informasi dan mengekspos setiap orang untuk memiliki kesempatan belajar. Schramm memperhatikan bahwa perkembangan komunikasi dapat berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan politik, ekonomi, dan sosial; terlebih dari itu, komunikasi membantu dalam pemahaman public dan penerimaan tujuan nasional dan tanggung jawab individu untuk mencapainya (Cangara 2020).

Selama kurun waktu tahun 1980-an, beberapa faktor bermunculan terkait dengan Gerakan-gerakan yang mempertanyakan bantuan dari Barat, globalisasi, nilai pasar bebas, liberalisasi, dan dampak dari media luar negeri. Di antara diskursus tersebut, adanya kegagalan dan penolakan terhadap teori modernisasi yang dinyatakan oleh bangsa-bangsa yang terindustrialisasi dan agen-agen bantuan, bersamaan dengan para akademisi sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Dengan lahirnya era informasi dan globalisasi sistem ekonomi, para sarjana yang tertarik pada komunikasi massa mulai meneliti isu-isu yang berhubungan dengan aliran informasi, marketing sosial, dan pengaruh produk dan strategi lintas batas negara. Menurut para pemikir komunikasi internasional, budaya dipandang sebagai bagian dari terminologi informasi, dimana pesan media terus mengalir dan mempengaruhi berbagai kelompok, serta produk multinasional yang dipasarkan secara internasional. Para pemikir ini juga mempelajari peran informasi dan komunikasi di negara berkembang dan tertarik mempelajari karena dalam negara berkembang, budaya merupakan bagian dari seperangkat kondisi kehidupan yang dicirikan oleh kemiskinan atau kurangnya inovasi teknologi serta sikap, nilai, dan keyakinan yang mempengaruhi hidup mereka (Littlejohn, 2016).

Salah satu tokoh yang mempelopori dalam bidang ini adalah Everett Rogers yang mengagas model **Difusi Inovasi** dengan tahapan perubahan sosial yang dimulai dari akuisisi pengetahuan, persuasi, pencapaian keputusan, implementasi inovasi baru, dan konfirmasi penggunaan. Seiring berjalananya waktu, sarjana lain mengarahkan perhatiannya pada pendekatan **tindakan partisipatif** berbasis komunitas yang berpusat pada penguatan keadilan sosial, mendefinisikan apa yang dibutuhkan komunitas dan bagaimana memperkenalkan perubahan, serta pengembangan strategi kerjasama yang berkelanjutan. Dalam pendekatan terhadap pembangunan yang lebih baru, budaya dipandang sebagai seperangkat tindakan komunikatif dan identitas yang dikonstruksi oleh komunitas, serta seperangkat struktur kontekstual seperti kebijakan pemerintah dan sistem ekonomi yang memampukan dan membataasi kehidupan serta relasi anggota komunitas (Littlejohn dan Foss 2009).

Didorong oleh adanya rasa frustasi terhadap dominasi model pembangunan Barat selama bertahun-tahun, negara-negara Dunia Ketiga mulai melihat dominasi Barat dalam sistem ekonomi dan komunikasi internasional sebagai penyebabnya dari "keterbelakangan" (*underdevelopment*) yang mereka alami. Rasa frustrasi ini menghasilkan seruan untuk membentuk Tata Informasi dan Komunikasi Dunia Baru (*New World Information and Communication Order-NWICO*) dan pendirian Komisi MacBride serta masuknya organisasi internasional seperti UNESCO menjadi bagian dari wacana komunikasi internasional. Munculnya akselerasi konferensi internasional; ekspansi lembaga pendidikan internasional, kongres dan seminar; pertukaran pelajar antar negara; popularisasi perjalanan internasional; dan perluasan olahraga pada tingkat internasional lebih jauh meningkatkan kontak dan komunikasi antara orang-orang di seluruh dunia (Mowlana 1996).

## ***Tantangan dan Masa Depan Komunikasi Internasional dalam Pembangunan***

Meskipun komunikasi internasional terus berkembang, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktik dan risetnya, antara lain:

- 1) Ketimpangan akses informasi: Tidak semua negara memiliki akses yang sama terhadap teknologi komunikasi dan informasi, yang dapat memperburuk ketimpangan pembangunan global.
- 2) Regulasi media global: Isu terkait kebebasan pers, sensor internet, dan monopoli media oleh korporasi besar menjadi tantangan dalam komunikasi internasional.
- 3) Disinformasi dan kepercayaan publik: Penyebaran hoaks dan propaganda digital dapat mempengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap informasi global.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada pendekatan multidisipliner dalam riset dan praktik komunikasi internasional, termasuk kolaborasi antara akademisi, pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta.

Terkait komunikasi internasional dalam konteks pembangunan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, tantangan-tantangan ke depan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perbedaan budaya, ekonomi, politik, dan teknologi:

- 1) Perbedaan budaya dan Bahasa; dimana Indonesia memiliki keragaman budaya dan Bahasa yang luas, sementara dalam komunikasi global, perbedaan nilai, norma, dan cara berkomunikasi seringkali menjadi hambatan dalam memahami pesan Pembangunan, misalnya dari organisasi internasional atau negara pemberi modal (negara maju)
- 2) Ketimpangan akses dan infrastruktur teknologi; meskipun teknologi komunikasi berkembang pesat, namun masih kita jumpai adanya kesenjangan digital di berbagai wilayah

di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan pulau-pulau terluar; juga terbatasnya akses internet dan biaya komunikasi yang tinggi sehingga menghambat partisipasi dalam inisiasi global.

- 3) Ketergantungan pada narasi negara maju; dimana wacana Pembangunan di Tingkat global masih didominasi oleh Perspektif negara maju yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal di Indonesia
- 4) Tantangan politik dan regulasi; dimana regulasi komunikasi dan kebijakan media di Indonesia dapat membatasi aliran informasi dari atau ke luar negeri, terutama terkait dengan isu-isu sensitive seperti politik, hak asasi manusia, dan lingkungan
- 5) Polarisasi informasi dan disinformasi; globalisasi informasi mendorong Indonesia rentan terhadap penyebaran berita palsu (*fake news*) atau propaganda internasional yang dapat menghambat Pembangunan
- 6) Kompetisi dalam Media global; media-media global (seperti CNN, BBC, Al Jazeera) memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini public, termasuk mengenai Pembangunan di Indonesia

## **SIMPULAN**

Komunikasi internasional terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan teknologi dan dinamika global. Dalam konteks pembangunan, komunikasi internasional berperan sebagai alat strategis dalam diplomasi, media, teknologi, dan komunikasi budaya untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Komunikasi internasional juga memiliki dimensi multidisipliner yang dapat melibatkan berbagai disiplin ilmu lain yang dapat menjadikannya sebagai bidang kajian yang terus berkembang dan kontekstual.

Perkembangan globalisasi dan teknologi mengubah pola komunikasi internasional – Munculnya digitalisasi dan media

transnasional telah mengubah cara negara dan masyarakat berkomunikasi serta mempengaruhi kebijakan komunikasi global. Paradigma komunikasi internasional terus berkembang, dari paradigma internasionalisme, marxis, representasi, penerimaan, hingga identitas, masing-masing memberikan sudut pandang berbeda dalam memahami hubungan komunikasi antar negara dan budaya. Terjadinya ketimpangan akses informasi, regulasi media global, serta maraknya disinformasi menjadi hambatan utama dalam menciptakan komunikasi internasional yang adil dan inklusif. Pada akhirnya, dalam konteks pembangunan, komunikasi internasional sebagai alat diplomasi dan pembangunan dan memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi, membangun pemahaman lintas budaya, serta mempercepat perubahan sosial.

## **BAB 5**

### **Komunikasi Humor dalam Telaah Sosiologis**

Hendri Prasetya

#### **Abstrak**

Tulisan membahas mengenai komunikasi humor dalam perspektif psikologi sosial. Humor sebagai salah satu elemen penting dalam interaksi antar Manusia menyentuh beragam aspek seperti fisik, psikologi, sosiologi dan antropologi. Humor sebagai perilaku komunikasi dan tindakan sosial tidak terlepas dari proses pemaknaan dan pembentukan pemahaman bersama (shared meaning) dalam lingkungan kehidupannya. Tidak hanya sebagai ruang hiburan, humor dimanfaatkan dalam serbagai setting sosial dan konteks komunikasi Manusia. Melalui beberapa perspektif teori humor, tulisan ini memberikan penjelasan mengenai karakteristik dan pemanfaatan humor dalam realitas keseharian, serta implikasi sosial dan dilematika yang muncul dari pemanfaatan humor. Humor memberikan ruang ekspresi dalam menanggapi situasi krisis, namun di sisi lain juga memunculkan fenomena pendangkalan pemaknaan pada pesan humor yang hanya dipahami sebagai narasi kekonyolan dan kejenaakaan belaka.

Kata kunci: humor; telaah; sosiologi; shared meaning

#### **PENDAHULUAN**

Humor adalah bagian dari kehidupan manusia, dalam interaksi sehari-hari humor ditemukan dalam bentuk joke, lawakan, cerita lucu, komik, guyongan, dagelan, plesetan, parodi, memetic, karikatur dan berbagai ungkapan dan perilaku lainnya yang mengundang kelucuan dan membuat orang tertawa. Humor dapat berupa perkataan, perilaku, gambar atau tulisan yang dipersepsi sebagai kelucuan dan membuat orang tertawa, maka humor melibatkan proses pengemasan, penyampaian dan interpretasi pesan yang dipandang sebagai keganjilan hingga menciptakan kelucuan. Istilah “humor” memiliki beragam pemahaman melingkupi berbagai pemaknaan yang kesemuanya berkaitan dengan sesuatu yang membuat orang tertawa atau anggapan sebagai kelucuan (percieved to be funny).

Definisi lain mengatakan, humor sebagai kemampuan mentalitas dalam memahami, mengeskpresikan, dan menerima sesuatu sebagai kekonyolan (Audrieth, 1998). Dari beberapa definisi dipahami humor adalah ekspresi atas kekonyolan dalam bentuk perkataan, tulisan, bentuk dan perilaku yang dianggap sebagai sebuah kelucuan dan membuat orang tertawa – termasuk juga proses pemaknaan yang terjadi dalam diri individu untuk menerima hal tersebut sebagai kelucuan dan pantas ditertawai.

Dalam kilasan sejarah, humor dipahami sebagai sebagai ekspresi manusia atas kelucuan dikaitkan dengan motivasi mengapa manusia tertawa. Plato memahami humor dan jokes sebagai perilaku individu ketika mentertawai kekalahan orang lain. Sementara Aristoteles menggunakan terminologi “comedy” sebagai peniruan manusia dalam bentukan yang buruk dan konyol, demikian halnya dengan pandangan Cicero yang memaknai humor sebagai suatu hal yang tidak biasa dan keburukan orang lain (dalam Raskin, 2008).

Humor selalu ada dalam setiap interaksi manusia, terselip diantara interaksi bersama teman, keluarga, bersama keluarga, rekan kerja dan interaksi keseharian lainnya. Humor juga terdapat dalam beragam isi media dengan beragam bentukan. Rubrikasi dan program tayangan humor menjadi bagian penting dari isi media cetak, elektronik dan ruang-ruang media digital. Sebagai hiburan, sindiran, parodi dan sebagainya humor dikemas sebagai sarana hiburan dan ekspresi yang luas. “Humorous” sendiri dapat dimaknai sebagai tindakan atau respon mengenai apa yang dianggap kelucuan dalam beragam situasi.

Dalam interaksi manusia, humor digunakan dalam beragam bentuk interaksi baik formal maupun non formal, humor tersampaikan dalam pidato, seremonial, dalam retoris politik, dalam pesan motivasi bahkan khotbah keagamaan humor terselip sebagai pencair suasana (ice breaking) dan membangun keakraban. Humor mampu memfasilitasi komunikasi manusia dalam situasi yang sulit, canggung, dan menegangkan. Bahkan ditemukan humor hadir dalam situsai krisis sekalipun! Humor

mampu menjadi lubrikasi social (social lubrication) sehingga mampu menyampaikan kritikan, kekecewaan, sindiran tajam hingga pemikiran yang radikal sekalipun dengan cara yang aman. Sindiran social berbalut cerita lucu adalah salah satu bentuk humor yang mampu memfasilitasi komunikasi manusia ketika menyampaikan pesan pada situasi yang sensitif. Humor mengurangi ketegangan social, menyuguhkan kita sisi lain pemaknaan pesan dan membangun keterhubungan dengan caranya yang luwes.

Melalui cerita lucu, parody atau bentukan humor lainnya pesan-pesan yang sensitive dan tabu dapat “terselundupkan” dengan aman sehingga berhasil menjadi wacana social. Banyak Cerita lucu yang berusaha mentertawakan diri sendiri atau kondisi Masyarakat, tak mengherankan humor berkembang menjadi salah satu cara berkomunikasi yang kerap dimanfaatkan diberbagai bidang saat menyampaikan pesan dengan lebih nyaman dan aman. Tidak hanya dalam komunikasi keseharian, humor juga menjadi bagian penting dalam media massa dan industri hiburan. Di Industri media humor dikemas ke dalam beragam bentuk hiburan popular yang disajikan di berbagai ruang public, panggung humor, rubrikasi media cetak, program televisi, film, teatrikal, komik dan ragam lainnya. Perkembangan humor bahkan mengikuti perkembangan media komunikasi manusia itu sendiri hingga kita bisa menemukan beragam bentuk baru humor di media media digital saat ini.

Di ruang media massa, humor hadir mewarnai dinamika isi media tidak hanya sebagai hiburan semata, tapi juga bentukan kritik sosial, sindiran dan sinisme. “Di era 80 an. Sosok kartun fenomenal “Doyok” dan “Ali Oncom” di Harian Pos Kota atau karikatur “Oom Pasikom” Di koran Kompas menyampaikan sentilan kritik social melalui kisah jenaka melalui karikaturnya. Di layar TVRI kala itu terdapat tayangan “Ria Jenaka” yang juga tayang pada tahun 80-an, menampilkan hiburan yang berisi nilai-nilai sosial dan hingga sindiran melalui tokoh-tokoh pewayangan yang jenaka. Medio 90-an serial komedi Pepesan Kosong hadir di stasiun TPI

yang memunculkan tokoh “Bolot Budeg” yang diperankan sebagai ketua RT yang jenaka namun menyebalkan, tidak bisa mendengar namun sok tahu. Tayangan ini merupakan representasi kondisi pemerintah yang dinilai sering kali kurang dapat mendengar suara rakyatnya.

Humor sebagai sarana hiburan dan kritik social terus berlanjut di Industri televisi melalui beragam program tayangan dan menjadi “menu” yang harus ada di setiap stasiun televisi. Humor mempu menjadi daya pikat pemirsa, bahkan tayangan humor mendapatkan rating yang cukup tinggi dan mendatangkan keuntungan bagi stasiun televisi, contohnya beberapa tayangan humor yang menuai keberhasilan seperti stand up comedy (Kompas TV), Facebooker (ANTV), Ketoprak Humor dan Empat Mata (Trans TV), Ini Talkshow (Net TV) dan berbagai tayangan lainnya. Setiap tayangan menampilkan genre humor yang berbeda-beda. Humor menjadi program tayangan paling komersil dan pelakon humor pun melambung menjadi selebriti. Pelawak menemukan tempatnya dan menjadi profesi yang cukup menjanjikan. Program Audisi menjadi pelawak pun menjadi tayangan yang tak kalah hebat menuai rating pemirsa. Saat ini tak terhitung lagi ragam program tayangan humor yang terus bermunculan di Layar televisi dan di berbagai platform media sosial.

Secara tradisi humor menjadi bagian penting dari kesenian rakyat (folklore), di Indonesia humor lekat dengan hiburan rakyat yang sangat berperan dalam pewarisan nilai kebudayaan, beragam suku bangsa di Indonesia memiliki beragam tokoh atau kisah jenaka yang dijadikan sebagai role model dalam penyampaian nilai dan identitas kesukuan nya, seperti lenong pada masyarakat Betawi, ketoprak pada masyarakat Jawa, Ludruk, wayang golek dan lainnya. Humor menjadi sarana penyampaian nilai kebudayaan dengan cara yang mudah diterima dan diingat oleh masyarakatnya. Melalui tokoh-tokoh dan cerita jenaka Masyarakat budaya, humor menyampaikan nilai-nilai kearifan lokal, petuah dan

metafora yang di dalamnya Masyarakat mampu memahami dan mempelajari etika hingga falsafah hidup.

Kajian humor yang bersifat interdisipliner, multidisipliner semakin memikat banyak peneliti dan pengamat baik secara telaah ilmu maupun pemanfaatan praktisnya dalam kehidupan. Apte (1988) menjelaskan, humor adalah bagian dari kebudayaan mansuai dan hadir di berbagai realitas kehidupan dalam beragam bentukan dan digunakan untuk beragam tujuan. (dalam Carrell,Raskin 2008).

Kajian humor semakin meluas dan dipahami dalam beragam perspektif kelimuan. Sebuah konferensi humor internasional yang banyak menyedot perhatian banyak ilmuwan kala itu diselenggarakan di Cardiff, Wales pada tahun 1976, untuk kemudian diselenggarakan secara rutin hingga pada 1989 didirikanlah International Society for Humor Studies (ISHS) saat diselenggarkan konferensi humor internasional di Laie, Hawaii, Setelah pada tahun 1984 Mahadev L. Apte memperkenalkan sebuah bidang keilmuan yang disebutnya sebagai "Humorology" – sebuah kajian yang melihat fenomena humor dilihat dari beragam dimensi seperti kemunculan, bentukan dan isi substansinya (Carrell,Raskin 2008).

## **PEMBAHASAN**

### **Mengapa Manusia Tertawa**

"Laughter is a phenomenon confined to human beings" (Hertzler, 1970). Humor selalu terkait dengan manusia dan aspek kemanusiaannya, sebagai bentukan ekspresi Manusia humor melibatkan aspek internal individu dan melibatkan situasi eksternal Dimana humor tersebut dimaknai, artinya humor selalu terikat dengan aspek kognitif dan sosial individu. Konsepsi mengenai humor adalah sebuah payung besar yang menaungi berbagai aspek pembahasan yang terkait dengan bagaimana keberadaan humor dalam kehidupan manusia. Lalu bagaimana Bagaimana humor diciptakan, digunakan dan tanggapan yang muncul atas humor berupa tersenyum dan tertawa. Satu hal yang terkait

dengan pembahasan humor dalam kehidupan manusia adalah perilaku tertawa (laughter behavior).

Tertawa sebagai salah satu ekspresi dasar manusia menjadi kajian penting yang memberikan pemahaman mengenai humor. Mengapa dan bagaimana manusia tertawa? Apa motivasi manusia tertawa? Pada situasi seperti apa saja manusia tertawa? Humor, tertawa, permainan, kebahagiaan bahkan kekuasaan dan superioritas menjadi aspek-aspek penting yang ada disebut dalam pembahasan mengenai humor dalam kehidupan manusia. Meskipun humor tidak selalu terkait dengan tertawa dan tertawa tidak selalu ada dalam konteks humor, namun pemahaman atas humor tidak dapat dipisahkan dengan konsepsi mengenai perilaku tertawa. "the language of humor" - "laughter as a marker of the shift of humorous mode and the acceptance of joke" (Bakhtin, dalam Kuipers, 2008)

Tersenyum dan tertawa adalah salah satu bentuk ekspresi dasar manusia. Tertawa, mentertawakan dan ditertawakan adalah fenomena kemanusiaan dan melibatkan proses perceptual secara kognitif individu dan peta pemaknaan secara sosial. Kemanusiaan adalah elemen utama humor karena nilai-nilai kemanusiaan selalu terlibat dalam humor dan konsepsi kelucuan. Manusia mendefinisikan kelucuan dan kekonyolan hanya melalui sudut pandang dan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Kemampuan tersenyum dan tertawa sudah dimiliki manusia sejak masa awal kelahirannya, kemampuan bayi tersenyum dan tertawa tidak dipelajari dari lingkungan eksternalnya namun lebih bersifat instingtif dan sudah dimiliki sejak berusia empat bulan, bahkan pada satu bulan pertama bayi sudah mengembangkan senyuman sebagai respon atas stimuli eksternal (Camras, Malesta and Izard, 1991, Martin, 2007). Meskipun konsepsi kelucuan akan berbeda-beda secara kebudayaan namun perilaku tertawa dipercaya merupakan perilaku ekspresif manusia yang universal. Provine (2000) bahkan menjelaskan, "even children born deaf and blind have been reported to laugh appropriately without ever having perceived the laughter of other" (Martin, 2007).

Di sisi lain, Primatologis menemukan manusia bukan satunya spesies yang tertawa, kemampuan ini juga dimiliki oleh primata lain yaitu simpanse, orang utan, baboon dan gorila (Preushoff dan Van Hoof, 1997, dalam Martin 2007). Primata-primata tersebut yang mengembangkan bentuk mimik muka yang hampir serupa dengan manusia saat mereka bermain (Darwin, dalam Glenn, 2003:15). Mereka (primata) mengekspresikan tertawa saat mereka berinteraksi dalam suasana permainan "playfulness", mereka juga tertawa sebagai bentuk keterhubungan sosial dalam komunitasnya. Selain karena memiliki struktur tengkorak yang menyerupai Manusia sehingga mereka mampu membentuk mimic muka yang serupa manusia, primate juga dikenal sebagai hewan yang memiliki kemampuan social tinggi, hal ini sekaligus menjelaskan bahwa tertawa merupakan perilaku social yang muncul dalam dan melalui proses interaksi.

Meskipun secara umum terdapat banyak kemiripan dalam kemampuan tertawa manusia dan beberapa hewan primata, namun kemampuan tertawa dan mengembangkan ekspresi kelucuan yang dimiliki manusia berkembang jauh lebih kompleks, para sosiolog menegaskan kembali bahwa kemampuan tertawa dan menciptakan humor hanya dimiliki Manusia. Humor, jokes sebagai respon atas sebuah ketidak sesuaian situasi atau objek yang teramat jelas membutuhkan proses kognisi dan konstruksi sosial yang secara spesifik hanya dimiliki manusia.

Proses kognisi sosial dan nilai norma kemanusiaan mempengaruhi pemanfaatan humor dan bentukan-bentukan penyampaiannya – "the complexity of human language and imagination enable us to create humor in seemingly endless variety of forms" (Martin, 2007), dengan kemampuan yang lebih inilah manusia mampu menciptakan beragam genre dan cara penyampaian humor. Manusia tertawa dengan beragam motivasi dan pemaknaan, berbagai tujuan dan bentukan ekspresi. Pada bagian selanjutnya buku ini, akan dipaparkan tinjauan teoritis mengenai perilaku tertawa manusia dari aspek psikologis.

Berdasarkan sejarah etimologi kata, "humor" sendiri berasal dari bahasa latin "humorem" yang berarti "cair" (liquid). Dalam literatur ilmu kesehatan Yunani, Hipocrates, pada abad ke-empat sebelum masehi mengatakan bahwa kesehatan manusia dipengaruhi oleh keseimbangan dari empat jenis cairan yang ada dalam tubuh manusia "body fluids; blood, phlegm, black bile and yellow bile" (Martin, 2007). Hal ini sejalan dengan anggapan terkini yang mempercayai humor sebagai mekanisme self healing yang dimiliki individu untuk menghadapi berbagai tekanan dan gangguan kesehatan. Tidak hanya mengontrol kesehatan, keseimbangan cairan tubuh ini yang selanjutnya akan mempengaruhi kondisi temperamen dan karakteristik individu, termasuk di dalamnya sebagai pengatur perubahan suasana hati (temporary mood states). Kondisi temperamen dan suasana hati inilah yang dalam perkembangannya kemudian dikaitkan dengan istilah "good humored person" dan "bad humored", yang secara psikologis terkonotasikan sebagai gambaran suasana hati individu.

Tertawa membangun kesegaran tubuh dengan melepaskan hormon endorphin yang mampu menekan inflamasi dan meningkatkan relaksasi. Bahkan tertawa ditemukan mendorong produksi sel natural Killer, sel ini dipercaya mampu menjaga imun tubuh dalam melawan virus, bakteri, dan tumor (Bennet, Parreira, Thorson & Allwardt, 2007). Humor dipercaya dapat memberikan energi dengan mengaktifkan hormon-hormon yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh (self-healing). Beberapa literature menunjukkan tertawa dapat meningkatkan produksi imun tubuh dan menghilangkan resiko kecemasan yang berlebihan, itulah mengapa kita sering merasa bugar setelah tertawa lepas. Dalam sisi Kesehatan mental humor mampu memelihara kekuatan mental dengan membangun self-esteem, disebut sebagai humor adaptif, sebaliknya, humor mal-adaptive ketika suasana kelucuan justru memunculkan rasa kecemasan dan lunturnya kepercayaan diri. (Yue, Hao, Goldman, 2010, Fajriani, 2016).

Sebuah penelitian juga menemukan korelasi positif antara sense of humor dan tertawa dengan kehagiaan sebuah hubungan

pasangan. Setidaknya, kemampuan menikmati humor dan tertawa bersama mengindikasikan pasangan tersebut memiliki pemaknaan yang sama dalam memahami sesuatu, ini yang mengarahkan pada situasi penerimaan dan kebahagiaan diantara mereka individu akan cenderung memilih pasangan jangka panjang dengan orang lain yang memiliki sense of humor yang bagus, yaitu mampu membuat humor dan menghargai humor. Para psikolog sosial juga percaya bahwa humor memudahkan proses adaptasi dikalangan remaja dalam pergaulan sosial barunya, menyediakan ruang sosialisasi yang ringan namun intrusif.

Dengan demikian, tertawa selalu melibatkan tiga aspek, fisiologis, psikologis dan aspek social. Sebagai aktifitas aktivitas fisikal yang berkaitan dengan perubahan raut muka sebagai akibat dari pergerakan otot muka dan juga suara, Secara psikologis tertawa menjadi mekanisme alamiah pelepasan ketegangan dan emosional. Dalam dimensi social, sebagaimana perilaku social lainnya tertawa adalah aktivitas yang tidak pernah hampa social, tertawa merupakan perilaku sosial yang akan mencerminkan beragam aspek dalam realitas kehidupan social individu atau kelompok.

Dalam keseharian tertawa bukan hanya disebabkan oleh humor, namun beragam sebab dan fungsi lainnya melatarikan mengapa orang tertawa dan mentertawai. Menurut fungsinya Foot (dalam Glenn,2003) membaginya menjadi: Humorous laughter, social laughter, ignorance laughter, evasion laughter, apologetic laughter, anxiety laughter, derision laughter, joyous laughter.

### **Komunikasi Humor**

“All humor is fundamentally a communication activity” (Lynch, 2002). Sense of humor adalah kemampuan individual mampu membangun keterhubungan sosial melalui suasana kenyamanan diantara individu ketika berinteraksi, memenangkan ketertarikan lawan bicara dengan menyuguhkan situasi keakraban. Humor dapat digunakan untuk menghadapi situasi konflikual dan mampu mengurangi ketegangan yang terjadi. Humor berkaitan dengan penciptaan hubungan interpersonal yang lebih berkualitas,

seseorang dengan sense of humor yang baik biasanya akan menarik banyak perhatian lawan bicara. Sense of humor yang dimunculkan dalam interaksi interpersonal mampu mengurangi risiko terjadinya permusuhan atau rasa dendam antar individu (Fajriani, 2016). Itulah mengapa kita sering menyukai rekan kerja atau pimpinan yang memiliki selera humor yang dengannya individu lain merasa lebih santai dan nyaman.

Ben Johnson dalam bukunya "Man Out of His Humor" memaknai humor sebagai gambaran seseorang yang dianggap "nyentrik" atau eksentrik (dalam Martin, 2007). Orang-orang seperti ini dilihat sebagai sosok yang aneh, konyol dan menggelikan (redicule). Individu dengan karakteristik konyol dan mengundang tawa ini lalu juga dilabelkan dengan sebutan "humorist" – "man of humor". Dalam perkembangannya kemampuan membuat orang lain tertawa menjadi sebuah keterampilan dan kebiasaan tersendiri hingga kata "humorist" diartikan sebagai "someone who creates a product called "humor" in order to amuse others" (Wickberg, 1988 dalam Martin, 2008). Thorson dan Powell (1997) mengidentifikasi beberapa aspek-aspek dari sense of humor:

1. Humor Production, kemampuan menghasilkan humor dari buah pikiran sendiri, bukan mencontoh atau meniru.
2. Coping Humor kemampuan mengatasi masalah dengan humor, yaitu penggunaan humor sebagai salah satu cara pandang dalam memahami permasalahan.
3. Humor Appreciation kemampuan memberikan perhatian lebih terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan humor.
4. Humor Tolerance memiliki sikap dan kemampuan menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan humor.

Di dunia kerja atau dilingkungan social pada umumnya, humor merupakan keterampilan potensial yang bisa menguntungkan jika dapat memanfaatkannya dengan tepat. Humor dapat menjadi katup pelepas dari tekanan-tekanan dan ketegangan, dan menjadi upaya cerdas mencairkan suasana diantara sesama rekan kerja ataupun antara pimpinan dan sub

ordinat. Dalam situasi konflikual humor dapat difungsikan sebagai pengalihan “face saving behavior” dalam proses perdebatan, negosiasi atau penanaman kepercayaan diantara kolega kerja. Kohesi interpersonal dapat dengan mudah terbangun melalui sense of humor yang dimiliki seseorang dalam sebuah kelompok atau organisasi. Lebih jauh, humor dan jokes juga memberikan Gambaran realitas budaya organisasi dan identitas individu dalam kelompok, status dan peran sosial yang terdapat di lingkungan organisasi, termasuk di dalamnya situasi dominasi serta beragam ketimpangan yang berlangsung di dalamnya.

Dalam kancah politik yang penuh dengan strategi dan kompetisi humor menjadi bagian dari manuver politik itu sendiri, melalui sindiran atau ungkapan lucu. Banyak politikus kerap menyampaikan pernyataan politiknya, dalam menghadapi situasi politik yang berkembang atau tangapan atas serangan dari lawan politiknya kerap dibalas dengan serangkaian strategi “guyongan” sebagai suasana ketenangannya dalam menghadapi situasi. Sindiran atau bahkan kecaman pada lawan politik dapat tersampaikan dengan suasana kejenakaan. Spier (1988) menyebutnya dengan agressive joking dan defensive joking, kedua jenis humor ini kerap digunakan oleh politisi dalam menyampaikan pesan politiknya.

Dalam komunikasi politik, humor digunakan untuk mengurangi ketegangan situasi, pengalihan perhatian atau sebagai penyampaian pesan dalam situasi yang sensitif. Bahkan humor digunakan sebagai “tameng” saat melontarkan serangan verbal pada lawan politik. Tak kurang pejabat negara atau Presiden di negeri yang ini menjadikan humor sebagai bagian dari manuver politik ataupun pencitraan dirinya. Situasi politik penuh dinamika, kejutan dan kekonyolan justru sering kali memunculkan kelucuan tersendiri, maka tak heran panggung politik justru kerap menjadi bagian dari humor itu sendiri.

Media massa pun ikut memanfaatkan situasi politik ini sebagai komoditas dalam tayangan humor politik. Humor politik berkembang menjadi komoditas media massa dalam berbagai

bentuk rubrikasi dan program tayangan. Parody politik, talkshow politik yang berisi sindiran-sindiran politik bertebaran dalam berbagai program tayangan televisi dan rubrikasi di surat kabar. , seperti Republik BBM dan Republik Mimpi (Metro TV) arahan Effendi Ghazali, melalui parodi tokoh politik program tayangan ini mengedepankan sentimen dan kritikan politik atas berbagai langkah dan kebijakan pemerintah saat itu. Tayangan serupa muncul seperti program tayangan Sentilan Sentilun yang juga mengedepankan kritikan social politik melalui lakon obrolan juragan dan jongosnya yang diperankan oleh Butet Kertarajasa. Kini, beragam tayangan humor sering menyelipkan sindiran politik atas berbagai situasi yang berkembang.

Dalam kerangka tindakan komunikatif (communicative act) humor dapat menjadi tindakan agresif yang berusaha melawan dan merendahkan seseorang, pada sisi lain humor juga menjadi ekspresi pelampiasan melalui cara yang ringan tanpa memunculkan ketegangan. Sebagai sebuah fenomena social, humor tidak hampa sosial. Humor selalu terikat dengan nilai-nilai sosial budaya – konteks dan waktu dimana humor itu diciptakan dan dimaknai. Topik, tema, bentuk dan cara-cara humor disampaikan selalu mencerminkan norma nilai dan realitas sosial budaya masyarakat. Mellaui sebuah humor dapat tergambaran struktur sosial sebuah masyarakat, ketimpangan gender, realitas kehidupan anak, dinamika remaja hingga situasi keagamaan yang melatarinya. Pendeknya, humor menampilkan realitas sosial budaya masyarakatnya. Kuipers mengungkapkan “humor are socially and culturally shaped, and often quite particular to a specific time and place” (Raskin, 2008).

Humor membangun keterhubungan dan keterikatan sosial melalui nilai-nilai kelompok yang terungkap dalam cerita-cerita lucu, humor mengukuhkan solidaritas sosial dan pemahaman nilai-nilai bersama. Membangun keeratan sosial dengan mentertawai hal-hal yang secara bersama-sama disepakati sebagai sebuah kekonyolan atau kelucuan. Seorang antropolog, Mahadev L. Apte menampilkan fenomena ini dengan istilah “joking relationship”,

yaitu bentukan manifestasi kesadaran akan identitas dan solidaritas kelompok melalui jokes dan humor. Melalui joking relationship mereka tertawa bersama, memaknai dunia yang mereka kenali dengan peta pemaknaan yang sama (shared meaning)

Dalam pandangan psikologi social, humor tidak hanya dipahami sebagai ruang pelepasan berbagai kekecewaan dan frustasi sosial dengan caranya yang cerdas, tapi juga mampu menjadi kontrol sosial dimana melalui masyarakat bercermin atas realitas dalam lingkungan sosialnya, membuat kita berfikir mengenai kenyataan yang ada dengan membawa kita pada sudut pandang yang ringan namun meninggalkan makna Selain sebagai salah satu cara untuk menyampaikan kritik, humor juga merupakan bagian dari proses menjalin komunikasi sosial antara manusia. Humor menjadi sarana manusia menyesuaikan diri dan menjadi satu dengan lingkungan sosialnya “humor enable us to cope with the daily, hourly, inescapable difficulty of being” tegas Bentley (1971).

Dalam realitas sosial, humor dikelompokkan dalam tiga kategori besar, yakni; Jokes, Spontaneous conversational humor dan accidental or unintentional humor (Martin , 2008). Jokes merupakan humor yang disampaikan melalui cerita yang mengundang kelucuan, kita sebut sebagai “cerita lucu”. Jokes seperti ini memiliki jalan alur pengkisahan dan sejak awal dan kelucuan di akhir cerita (punch line). Jokes dan cerita lucu seperti ini sering muncul diantara percakapan keseharian, panggung komedi dan melalui posting-an di berbagai media sosial.

Kedua, Spontaneous Conversational Humor, muncul dalam setting alamiah berlangsungnya percakapan, biasanya terkait dengan konteks pembicaraan dan melibatkan unsur non verbal seperti kerlingan mata, mimik muka dan gerakan yang mendukung munculnya kelucuan. Bentuknya dapat berupa sindiran singkat, celetukan, permainan kata-kata yang lucu dan irony, yang dinilai sebagai kelucuan. Ketiga, Unintentional Humor - lebih melihat

kelucuan yang terbangun secara tidak sengaja, termaknai sebagai kekonyolan yang membuat tertawa.

Humor dan tertawa dalam interaksi antar individu menunjukkan perasaan afiliasi, ketertarikan antar individu dan membantu mengatur jalannya sebuah percakapan dan membangun pemahaman bersama dengan lebih dinamis. Lebih lajut dalam arena interaksi sosial, perilaku tertawa juga memainkan peran metakomunikasi (metacommunication) dengan kemampuannya untuk mendefinisikan situasi dan menempatkan diri pada kodisi percakapan yang diinginkan

Dalam situasi yang canggung dan kurang menyenangkan humor dapat berfungsi untuk mencairkan suasana dan menyelamatkan muka lawan bicara, ini mengukuhkan bahwa tanpa kita sadari humor dan perilaku tertawa menjadi bagian yang tidak dapat untuk dipisahkan dalam interaksi social. Sebagai sebuah kekonyolan (ingcongruity), humor berkaitan dengan pemaknaan sebagai sebuah kelucuan tas apa yang orang lain katakan atau lakukan. Gurauan, anekdot dan cerita lucu hampir seluruhnya terkait dengan objek manusia, kalaupun objeknya hewan atau mahluk lainnya, namun selalu dilihat dari sudut pandang manusia, hal ini mengukuhkan kembali bahwa humor tercipta dari sistem pemaknaan individu atas sebuah stimuli/pesan/tindakan, dan pemakaan ini merupakan elemen utama dalam komunikasi manusia.

### **Komunikasi Humor sebagai Tindakan Sosial**

“Humor is fundamentally a social phenomenon. We laugh and joke much more frequently when we are with other people than when we are alone”. (Rod A. Martin). Tertawa dan mentertawai menjadi karakteristik khas manusia yang mengukuhkan perannya sebagai makhluk sosial. Mentertawai membutuhkan sebuah proses perceptual atas objek yang berlanjut pada pemetaan pada ruang referensi kognisi yang sebelumnya telah terakumulasi melalui proses sosial hingga berujung pada persepsi incongruity, superioritas ataupun ketenangan hingga memunculkan tawa. Humor menjadi salah satu bentuk narasi sosial

yang mampu menghadirkan proses itu dalam ruang pemaknaan individ, itulah alasan seorang individu harus tersosialisasi terlebih dahulu untuk memaknai sebuah humor, atau setidaknya mendefinisikan sebuah situasi sebagai sesuatu yang layak ditertawakan. Ini menggambarkan sebuah rangkaian proses sosial yang terorganisir secara sistematik, sekuensial dan cultural bounded.

Tertawa dan tertawa bersama menjadi bentuk penciptaan dan pemeliharaan keterhubungan dengan realitas sekaligus mengukuhkan identitas diri dalam lingkungan sosial. Individu tertawa lebih banyak saat menikmati humor secara bersama sama. Perilaku tertawa bukan hanya mensyaratkan kehadiran individu lain dalam sebuah situasi interaktif, namun secara sosiologis juga mampu mengindikasikan stratifikasi sosial yang berlaku dalam sebuah setting kebudayaan. Posisi laki-laki dan perempuan dalam arena sosial dipercaya terkait dengan perilaku tertawa, mentertawai serta respon perilaku terhadap humor. Komunikasi Humor sebagai sebuah tindakan sosial dapat terjelaskan melalui pemahaman mengenai perspektif teoritis humor.

Humor dalam perspektif Superioritas (Superiority theory), Tertawa bisa menjadi dorongan primitive manusia untuk menyatakan superioritasnya pada lingkungan sekitar. Tertawa dan mentertawai merupakan bentuk kepuasan diri atas kemenangan atau keunggulan diri atas kelemahan orang lain. Seseorang akan tertawa saat mengungguli lawannya sebagai ungkapan kegembiraan dan kepuasan, tertawa sebagai pelepasan ekspresi dalam situasi kompetisi dan persaingan. Pemahaman ini yang muncul pada masa-masa awal pemahaman manusia mengenai perilaku tertawai dan mentertawai.

Seorang filsuf abad 17, Thomas Hobbes mengatakan, "laughter as being based on feeling of superiority, or sudden glory, resulting from some perception of inferiority on another person" (Martin, 2008).. Motivasi tertawa dan mentertawai dalam konsepsi superioritas ini adalah ketika individu menemukan dirinya menjadi lebih unggul, lebih mujur, atau lebih berhasil dalam sebuah situasi

persaingan. Saat itulah tertawa menjadi seperti kanalisasi pelepasan emosional akan keunggulan pribadi atas orang lain. Bentukan humor seperti ini oleh plato dan Aristoteles dikatakan sebagai “mockery and disdain” atau ungkapan atas keburukan orang lain. Perilaku tertawa teramat sebagai ungkapan kemenangan (superioritas) atau sebagai bentuk kelicikan.

Selanjutnya, humor sebagai bentuk ekspresi superioritas terlihat saat individu mentertawai kelucuan, keanehan dan keganjilan yang ada pada individu lain “expression of superior adaptation” ungkapan superioritas humor pada situasi sosial dapat berupa ejekan, cemoohan (labelling) dengan berbagai cara dan gaya bahasa penyampaiannya yang kemudian dijadikan bahan tertawaan.

Dalam perkembangannya di Eropa hingga abad 18, pemahaman mengenai dorongan manusia tertawa dan menikmati kelucuan didasari oleh istilah “redicule” yang berasal dari istilah latin “ridiculum” yang berarti “candaan” (joke) atau “ridiculu” yang bermakna “dapat ditertawai” (laughable). Dalam pemahaman ini humor lebih berkonotasi negatif, sebagai bentuk agresivitas individu dalam memermalukan seseorang (humiliating) sehingga menjadi bahan tertawaan. Humor dalam pemahaman “rudiculum” ini pun masih terus berkembang dalam berbagai bentukannya. Komedi Slapstick ala Charlie Chaplin, Dumb and Dumber atau Warkop DKI dan beberapa episode dalam Srimulat adalah beberapa bentukan humor dalam sudut pandang ini. Meskipun demikian, di satu sisi kemampuan komedai slapstick seperti ini menciptakan situasi untuk mentertawai orang lain dan kerap menjadi keterampilan dalam menghibur dan eksistensi mereka di lingkungan sosial.

Ungkapan superioritas ini dapat kita temukan pada jokes atau narasi humor yang menampilkan stereotypes atau penjulukan pada pihak lain. “Humor may contribute to perpetuating negative attitudes, stereotypes, and temptations to denigrate or dismiss individuals or entire groups of people” (Basso’s 1979, dalam Glenn, 2003:45). Dalam pemahaman ini humor dapat menjadi pemersatu

sekaligus dapat berperan secara subversive mensubordinatkan sebuah kelompok “strengthen boundaries and group identity against outsiders”

Pada beberapa setting sosial di masyarakat, perempuan dipercaya tertawa lebih sering ketimbang laki-laki, mengindikasikan perbedaan kadar ekspresivitas diantara keduanya. Demikian halnya pada beberapa norma budaya yang berbeda kita mendapati tertawa lepas sebagai ketabuan bagi kaum perempuannya, tidak menunjukkan ke-eleganan dan terkesan tidak sopan, sebaliknya superioritas maskulin ter tampakkan melalui tertawa yang lepas terbahak sebagai sebuah kewajaran. Perbedaan status sosial juga memperlihatkan perilaku tertawa yang berbeda, sebuah penelitian menemukan bahwa status superior lebih menampakkan perilaku tertawa yang lebih dibandingkan sub ordinatnya (Rose Coser 1960). Subordinate lebih menggunakan tertawa sebagai bentuk respek pada status yang lebih tinggi “this affiliative social function of laughter involves not only a display of mutual understanding, but also mutual closeness or affinity (Hertzler, 1970)

Perspektif Teori Superioritas humor mendapatkan kritikan dalam pemahaman humor selanjutnya. Humor tidak melulu dimaknai sebagai bentuk cercaan dan cemoohan, sebaliknya tertawa atau menjadi lucu adalah sebagai bentuk kecerdasan tersendiri dalam memaknai sebuah situasi atau objek. Humor lebih melibatkan aspek intelektual dan pemaknaan simbolik alih-alih sekedar aspek emosional dan ekspresi dominasi.

Pemaknaan manusia pada kelucuan bergeser, humor dipahami sebagai bentuk ketidak sesuaian “Incongruity” (Incongruity theory) yang memunculkan kelucuan dan membuat tawa. Didasari pemikiran Immanuel Kant yang memaknai humor dan alasan manusia tertawa tidak semata-mata sebagai respon pada kekonyolan, namun Kant lebih memahaminya sebagai bentuk permainan fikiran - “play of thought” – keanehan yang terjadi karena suatu ketidaksesuaian dan ketidakcocokan yang ditemukan melalui proses pemikiran dan pembandingan dengan realitas yang

sesungguhnya. Sejalan dengan Kant, pendapat lain juga melihat humor sebagai ketidak cocokan antara konsep dan realitas yang sebenarnya setelah mengalami proses persepsi (Schopenhauer, 1957 dalam Raskin ed. Carrel, 2008).

Pandangan ini menilai, alasan dan motivasi tertawa adalah ketika individu menemukan ketidak sesuaian dan ketidak cocokan perceptual dalam memahami objek. Teori ini lebih menfokuskan pada aspek kognitif alih alih emosional. Pemaknaan dan persepsi pada keanehan inilah yang membuat orang tertawa dan termaknai sebagai bentukan humor dan kekonyolan. Singkatnya, "humor involves the bringing together of two normally desperate ideas, concepts, or situation in a surprising or unexpected manner" ungkap Raskin (2008). Dengan pandangan tersebut, maka individu-lah yang akan menentukan apakah sesuatu ini bernilai humor atau kelucuan, berdasarkan konsepsi fikiran yang dibangunnya.

"The essence of the laughable is the incongruous" (Wickberg, 1998). Disponsori oleh para pembaharu - kelas menengah di Inggris abad 19, Perilaku tertawa dan kenikmatan manusia dalam menghadapi kelucuan lebih ter- "humanisasi". Tertawa lebih bersifat pengungkapan simpati bukan lagi bentuk superioritas atas kekalahan dan kekonyolan orang lain. Membuat orang lain tertawa tidak melulu dengan merendahkan kekonyolan orang lain, tetapi lebih berupa kemampuan intelaktual dalam menemukan sebuah ironi dan ketidaksesuaian, sehingga menciptakan kelucuan.

Kelucuan diciptakan melalui menyusun jalinan cerita yang berujung pada ketidak sesuaian harapan atau hal yang semestinya "laughing as result from experiencing the unexpected – perceiving the unthinking response as out of its situation", seperti anda menemukan bola basket dalam closet misalnya, atau seekor Kanguru yang tengah membaca Koran di sebuah halte Busway. Dalam kosepsi incongruity dikenal istilah "bisocation", yaitu suatu rangkaian cerita atau situasi yang dibangun di dalam dua kerangka pemaknaan, yaitu kerangka logika normative yang rasional dan

sebaliknya, jalinan cerita itu kemudian akan mempertemukan kedua kerangka pemahaman tersebut dalam satu pemaknaan, sehingga munculah kelucuan/kekonyolan. Seperti yang terdapat pada jalinan cerita lucu kekinian yang saat ini tengah hits dikalangan anak muda,

*"kemarin gue naik gojek,...  
terus..?  
terus abang gojeknya yang bayar gue.."*

Ada rangkain cerita yang berlangsung dengan tidak semestinya menurut pemaknaan logika normative, sebaliknya justru keadaan yang tidak diharapkan muncul, dan itulah punch line yang melahirkan kelucuan. Beberapa jokes dan guyongan mengikuti premis dengan susunan ; set-up creates expectation – punch line – shift frames. Model struktur jokes seperti ini juga yang digunakan dalam comicus stand up comedy yang marak belakangan ini;

Set up adalah bagian yang tidak mengandung kelucuan yang berfungsi untuk memancing penonton mengikuti jalan cerita. Melalui bagian inilah penonton akan berfikir dan mereka apa yang akan terjadi selanjutnya, membangun pemikiran normatif yang selanjutnya akan diruntuhkan pada bagian punch line.

Punch line adalah bagian berfungsi untuk menyodorkan kejutan kepada pendengarnya. Pada bagian inilah pendengar akan disuguhi ketidak sesuaian (incongruity) sehingga memunculkan kelucuan.

*"menyaksikan timnas sepakbola bertanding, selalu ada tiga yel-yel yang perlu dihapal oleh para supporter. Yang pertama "garuda di dadaku..garuda kebanggaanku, kuyakin hari ini pasti menang...".*

*Yel-yel yang kedua yang perlu dihapal "yoo yo ayoo Indonesia...ku yakin kita harus menang!!" dan yel-yel ketiga yang harus dihapal supoter Indonesia adalah : "woooi...wasit..goblok!!..wasit guobloookkk!!!!"*

Pemahaman humor melalui kaca mata teori inkongruitas juga dapat terjelaskan melalui penjelasan teori skema kognitif. Saat seseorang mendengarkan sebuah rangkaian cerita, maka segera akan terbangun sebuah urutan skematik yang menuntunnya memahami skrip tersebut sebagai sebuah kewajaran atau kekonyolan. Dalam rangkaian skema individu akan terbangun dua skema yang mencoba memahami konteks cerita atau ucapan, kontradiksi diantara dua sekema pemahaman inilah yang kemudian memunculkan interpretasi kekonyolan. Mengarahkan pemaknanya pada skema alternatif dan memposisikannya pada kerangka perceptual "humorous event".

"Dalam sebuah penelitian terungkap bahwa di dunia perdagangan gelap organ tubuh manusia ternyata organ manusia Indonesia memiliki harga yang cukup tinggi, khususnya organ otak manusia!. Hal ini tentu mengejutkan, membuat kita bertanya tanya mengapa bukan otak orang Jerman yang terkenal mampu berpikir detail dan efisien, mengapa bukan otak orang Jepang yang terbukti cerdas menciptakan teknologi canggih? Atau mengapa bukan otak orang Cina yang mahir mencari peluang dan berhitung? Jawabannya ternyata karena otak orang Indonesia rata-rata berada dalam kondisi yang masih mulus-irisinil lantaran jarang sekali dipakai!"

Teori Relief (Relief Theory), Tertawa adalah respon alamiah saat individu merasa terbebas dari tekanan atau kecemasan yang dialami. Teori ini melihat bahwa perilaku tertawa merupakan Upaya pengurangan ketegangan (tension release) yang dirasakan individu dalam lingkungan sosialnya. Tertawa menjadi bentukan pelepasan ketegangan yang nampak secara fisik melalui raut muka, suara dan gerakan lainnya. Pelepasan perasaan tekanan itu bisa disebabkan oleh macam-macam hal, seperti ketidak-adilan sosial, persaingan politik, ekonomi, ketimpangan seks, atau kebebasan mengeluarkan pendapat,

humor menjadi pelepasan dan ekspresi dalam ketegangan melalui bentuk kelucuan.

Sebagai pelepas ketegangan humor mengambil peran dalam berbagai situasi yang penuh tekanan sekalipun, ketidak adilan, bencana, krisis ekonomi dan termasuk juga pada situasi yang merugikan masyarakat seperti kasus korupsi. Humor pelepasan ketegangan ini menjadi bagian dari kemampuan individu atau masyarakat mengekspresikan respon mereka atas kemalangan yang dialaminya. Kemampuan mentertawai diri sendiri pada sebuah situasi krisis dapat menjadi indicator kemampuan tension release. Tertawa dalam duka dan kekecewaan menjadi bagian dari ruang ekspresi pelepasan ketegangan.

Dalam sebuah panggung stand-up comedy di media sosial seorang comica bercerita,

*"suatu hari gue disuruh buat surat keterangan kelakuan baik atau dikenal dengan SKCK untuk keperluan nglamar kerja di pabrik, nah temen gue bilang Surat keterangan kelakuan baik itu bikinnya di kepolisian. Terus gue jawab, lah emang yang bikin udah baik ...!?"*

Di Indonesia, berbagai peristiwa kemalangan atau ketidak-adilan yang dialami masyarakat kerap muncul dalam bentukan jokes, parodi atau meme yang tampil di berbagai jenis media, termasuk media sosial. Saat pandemi covid melanda kita banyak menemukan beragam cerita, komentar, jokes atau meme lucu di berbagai media, demikian juga saat terjadi ketidak adilan yang berlangsung di masyarakat lainnya, seperti kasus pembunuhan polisi oleh Sambo, kinerja aparat yang penuh kecurangan, mega korupsi timah, banjir hingga kasus pengoplosan Pertamax dan takaran MinyaKita yang disunat oleh distributor dan sebagainya, Semua fenomena itu sering kali mendapatkan respon public berupa sindiran, rasa frustasi sosial, kekecewaan dan kecaman yang disampaikan dalam bentuk humor. Kita diajak untuk melihat berbagai peristiwa tersebut dalam bingkai kekonyolan dan absurditas, kemalangan yang berujung tertawa dan mentertawai

diri sendiri. Semua tersampaikan secara jenaka, menggunakan beragam metafora, parodi cerita dan narasi narasi kekonyolannya, humor mampu mengekspresikan kritikan pedas dan ungkapan kemarahan dengan caranya sendiri.

Banyaknya humor bertemakan kemalangan, ketidak-adilan sekaligus menjadi indikator banyaknya kekonyolan dan absurditas yang berlangsung dalam realitas sosial. Humor satire dan perlawanan sosial banyak muncul sebagai tema stand-up comedy di berbagai media, dalam bentukan karikatur pada cover majalah, jokes di kanal youtube, reels di Instagram dan beragam ruang ekspresi lainnya. Saat ini humor dan jokes menjadi sarana ekspresi kritis dan provokatif yang dinilai “aman” terbebas dari “represi” utamanya dari pihak berwajib karena mengatas-namakan lawakan, guyongan dan candaan. “Humor is used to disclose difficult information, help ease tension, allows unmentioned topic to be discussed” Civikly (1986). Pada sisi ini humor dapat dimaknai sebagai bentuk penyampaian komunikasi krisis.

## **SIMPULAN**

Di antara banyak ruang ekspresi kritis seperti seminar, symposium, ruang teatrikal, pameran Lukis, film dan lirik lagu yang semakin terhimpit oleh beragam tekanan dan konsekwensi pencekalan, ekspresi humor justru mampu menyampaikan semua kekesalan, dan kritikan itu dengan luwes dan aman, karena dipandang sebagai ekspresi kekonyolan belaka, meskipun humor yang disampaikan dalam situasi ketidak seriusan (playfulness) sesungguhnya justru menyampaikan pesan kekecewaan dan kemarahan.

Pada sisi lain situasi seperti ini ini tentu memunculkan kekwatiran sendiri, dimana ekspresi kritis dan kebebasan bersuara kini hanya mampu terfasilitasi melalui bentukan narasi jenaka yang penuh kekonyolan, sehingga hanya dianggap sebagai guyongan tanpa keseriusan. Seolah hanya kelucuan tanpa esensi yang perlu difikirkan. Tentu saja ini menggambarkan pendangkalan makna pesan humor itu sendiri, Apakah kebebasan bersuara yang lugas

dan aman hanya dapat disampaikan melalui candaan jenaka dan cerita konyol yang direspon sebatas tawa. Tentu saja, sisi ini memberikan gambaran berlangsungnya krisis komunikasi.

## **BAB 6**

### **Media sosial, Media Massa dan Pembentukan Opini Publik**

Indriani

#### **Abstrak**

Media sosial dan media massa memainkan peranan penting dalam pembentukan opini publik yang berpengaruh pada pengambilan kebijakan oleh pemangku kepentingan. Media sosial telah menggeser dominasi media massa dan menjadi wadah alternatif bagi publik dalam memunculkan suatu gagasan. Akan tetapi media massa masih memiliki peranan yang kuat dalam pembentukan opini publik. Perpaduan kedua kategori media ini dapat mempercepat viralitas suatu isu sehingga dapat meningkatkan tekanan terhadap pembuat kebijakan dalam mengambil suatu keputusan. Tulisan ini menyoroti bagaimana perdebatan beberapa waktu terakhir di media sosial yang berkembang menjadi tekanan publik yang akhirnya memengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kata kunci: media sosial; media massa; opini publik; agenda setting; kebijakan publik

#### **PENDAHULUAN**

Penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai bergema di media sosial pada pekan ketiga November 2024. Kementerian Keuangan berencana akan memberlakukan PPN 12 persen pada Januari 2025, atau naik dari PPN 11 persen yang sudah diberlakukan sejak 1 April 2022. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Rencana tersebut mendapat respon penolakan oleh masyarakat di dunia maya karena dianggap akan semakin membebani masyarakat yang sedang bergelut dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Poster burung Garuda dengan latar belakang berwarna biru dan bertuliskan "Peringatan Darurat" kembali memenuhi ruang maya

diberbagai pelantar media sosial. Mulai dari X (dulu Twitter), Instagram, Tiktok, hingga Youtube.

Analisis yang dilakukan Drone Emprit yang dipublikasi pada akun X nya , mencatat 79 persen masyarakat memberikan respon negatif terhadap isu itu. Selain itu muncul ajakan boikot untuk tidak membayar pajak juga muncul petisi penolakan.Tagar #TolakPPN12Persen menjadi trending topic yang diperbincangkan di media maya seiring dengan wacana pemberlakuan yang akan dimulai pada 1 Januari 2025. Garuda biru merupakan poster maupun video yang awalnya digunakan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan jalannya Pilkada 2024 (Tempo.co, 2024). Selain itu pemberitaan secara masif terkait penolakan wacana pemberlakukan tarif baru itu, juga terjadi di media massa arus utama.

Hasil pemantauan Kompas menyebut dalam rentang 17 Desember hingga 23 Desember 2024, setidaknya tagar #TolakPPN12 Persen ada dalam 570.200-an percakapan dan membangun keterlibatan 2,4 juta pengguna di media sosial (Kompas.id, 2024). Gelombang protes yang awalnya hanya bergaung di media sosial terus menjalar dengan dilakukan aksi unjuk rasa yang dilakukan secara langsung. Penolakan akan wacana penerapan tarif baru itu terus menggema hingga akhir tahun.



Unggahan penolakan wacana pemberlakukannya PPN 12 persen  
(Sumber : X)

Puncaknya dari aksi penolakan yang bermula dari media sosial itu, Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat tertutup dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelang pergantian tahun. Usai rapat tertutup, Prabowo memutuskan tarif PPN 12 persen tidak dikenakan untuk semua barang, melainkan hanya khusus terhadap barang dan jasa mewah. Sementara barang dan jasa yang tidak termasuk dalam kategori barang dan jasa mewah, masih menggunakan tarif PPN 1 persen (Antaranews.com, 2024).

Di Indonesia, viralitas memainkan peranan penting dalam pengambil kebijakan oleh pemangku kepentingan. Sebulan pasca dihebohkan dengan wacana pemberlakukannya PPN 12 persen, jagat maya kembali dihebohkan dengan kelangkaan gas tiga kilogram. Media sosial dipenuhi foto masyarakat yang sedang mengantre panjang, bahkan kata kunci LPG 3 Kg menduduki daftar trending di media sosial. Kelangkaan itu terjadi akibat keputusan pemerintah untuk melakukan penataan distribusi LPG dengan tidak lagi memberikan LPG 3 Kg kepada pengecer. Pemerintah beralasan harga yang diterima masyarakat sesuai dengan batasan yang

ditetapkan pemerintah. Tak bertahan lama, pemerintah akhirnya kembali memutuskan agar gas dengan tabung berwarna hijau melon itu kembali dijual ke pengecer, sehingga masyarakat tak sulit mendapatkannya.



Ilustrasi media sosial (Sumber : Freepik)

Secara umum, Kaplan & Haenlein (2010) mendefinisikan media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi dari Web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran dari konten yang dibuat oleh pengguna. Sementara Bertot dkk (2010) menyebut media sosial sebagai alat yang digunakan untuk tujuan interaksi dan keterlibatan sosial. Berbeda dengan media tradisional yang hanya bersifat satu arah, media sosial memiliki struktur yang memungkinkan untuk melakukan kontak ke berbagai arah atau multi way) termasuk dengan pemerintah dengan publik maupun sebaliknya (Lim dkk., 2022). Sifat media sosial yang terbuka, partisipatif dan forum untuk berbagi dapat memudahkan interaksi banyak pihak. Keterhubungan antara satu pengguna dengan pengguna lainnya, membuat informasi di dalam media sosial berkembang dan menyebar dengan cepat hingga ke tingkat global (Grant & Meadows, 2022). Karakteristik media sosial yang mana

pengguna dapat dengan mudah menyampaikan pandangannya, membuat opini publik tidak lagi semata didominasi media massa.

Sebelum penggunaan media sosial yang semakin masif, media massa konvensional seperti koran, televisi dan radio memainkan peran sentral dalam menciptakan opini publik. Apalagi dengan jangkauannya yang luas, kemampuan melipatgandakan pesan dengan jumlah yang besar dan mampu menciptakan wacana politik pada khalayak. Dalam bukunya yang berjudul *Public Opinion*, Water Lippman (1922) menjelaskan pemberitaan media menjadi sumber utama dari citra yang ada di benak masyarakat tentang permasalahan publik yang di dunia, atau dengan kata lain apa yang diketahui masyarakat tentang dunia hanya berdasarkan pada apa yang media putuskan untuk diceritakan pada masyarakat. Media massa berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan antara “dunia luar” dengan apa yang ada di pikiran masyarakat.

Pembentukan opini publik dimulai dari penentuan agenda (agenda setting), membingkainya dan menonjolkan isu-isu tertentu (McCombs, 2014). Penentuan agenda menggambarkan kekuatan pengaruh media yang sangat kuat terhadap pembentukan opini masyarakat. Hal itu dikarenakan media memberi tekanan-tekanan pada suatu peristiwa maka media akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Sebelum menentukan agenda yang dianggap penting bagi publik, langkah awal adalah media massa terlebih dahulu menjalankan tugasnya sebagai gatekeeper atau penjaga gawang. Dalam hal ini, media massa melakukan kegiatan gatekeeping, yang merupakan proses pemilihan dan penyusunan informasi yang tak terhitung jumlahnya ke dalam pesan-pesan dalam jumlah terbatas yang kemudian diterima oleh masyarakat setiap harinya (Shoemaker & Vos, 2009).

## PEMBAHASAN

Dalam komunikasi modern, media sosial memiliki peranan yang memungkinkan interaksi yang dilakukan lebih cepat, luas dan lebih interaktif dibandingkan media tradisional. Laporan We are Social menyebut jumlah pengguna internet di Indonesia pada Januari 2025 sebanyak 212 juta atau penetrasi internet yang mencapai 74,6 persen. Dalam laporan itu disebutkan pengguna internet di Indonesia meningkat 17 juta atau tumbuh 8,7 persen dari periode yang sama pada tahun lalu. Sedangkan jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 143 juta pengguna atau sekitar 50,2 persen dari total populasi. Pengguna media sosial mengalami peningkatan sebanyak 4 juta pengguna dibandingkan Januari 2024(We are Social, 2025).



Ilustrasi Media Massa (Sumber : Feepik)

Setelah menentukan isu apa yang disampaikan ke publik, media massa konvensional kemudian melakukan penekanan melalui agenda setting dengan menentukan seberapa sering dan bagaimana isu tersebut dilaporkan. Memang media tidak secara langsung mengubah pendapat orang, tetapi mengarahkan perhatian mereka ke isu-isu tertentu. Pada era kejayaan surat kabar, dengan mudah kita bisa menemukan agenda setting suatu media massa dengan melihat headline yang ditampilkan secara berulang pada koran tersebut. Pemberitaan yang dilakukan secara berulang akan berdampak pada penilaian publik terhadap suatu

isu. Opini publik tersebut pada akhirnya memberi tekanan pada pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan.

Hadirnya media sosial menjadi saluran alternatif dalam pembentukan agenda, yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan agendanya sendiri (McCombs, 2014). Maka tak bisa dipungkiri lagi, platform media sosial seperti X maupun Facebook menjadi wadah munculnya isu-isu penting sebelum disorot oleh media massa konvensional. Kehadiran media sosial berdampak pada berkurangnya monopoli dari media massa. Meski demikian, media massa masih memiliki dampak kuat pada opini publik.

Algoritma yang dimiliki media sosial pun turut membantu dalam pembentuk opini. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang menarik perhatian dan sesuai dengan preferensi pengguna atau yang dikenal dengan istilah filter bubble (Pariser, 2011). Filter bubble memiliki kemampuan untuk mengisolasi informasi dan membuat penggunanya berada di dalam gelembung informasi. Tanpa disadari, kondisi itu menyebabkan pengguna media sosial mendapat pengalaman informasi yang unik dan tertutup, serta tersaring dari sudut pandang yang berbeda.

McCombs (2014) memperkenalkan dengan apa yang disebut dengan konsep agenda melding, yakni proses individu menggabungkan berbagai agenda dari media dan komunitas sosial dalam membentuk pemahaman pribadi terkait isu tertentu. Terdapat setidaknya tiga agenda yang memengaruhi pemahaman individu terhadap suatu isu yakni agenda vertikal yang berasal dari media arus utama, media horizontal atau media yang secara spesifik dan tersegmentasi seperti media sosial dan komunitas atau pengaruh dari teman, keluarga maupun lingkungan sosial. Dari pemahaman individu tersebut berkembang menjadi pemahaman kolektif atau opini publik. Bogardus (1952) menyebut bahwa opini publik sendiri adalah hasil pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan dalam masyarakat demokratis.

## **SIMPULAN**

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pemerintah hendaknya tidak boleh jauh dari kehendak rakyat. Oleh karenanya pengambilan kebijakan juga mengacu pada apa yang dibutuhkan oleh rakyat atau publik. Terdapat setidaknya tiga komponen penting dalam kebijakan publik yakni kepentingan publik, moralitas publik dan juga keamanan publik (Farshad Ghodoosi, 2016). Meskipun bukan satu-satunya yang menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah, opini publik yang kemudian berkembang menjadi wacana atau diskursus menjadi salah satu komponen penting dalam pengambilan kebijakan.

Media sosial dapat menjadi salah satu alternatif dalam pembentukan opini publik, menggantikan dominasi media massa. Media sosial menjadi ruang bagi publik untuk dapat berbagi pendapat, memunculkan gagasan hingga dan memobilisasi dukungan terhadap isu tertentu tanpa perantara media tradisional. Media sosial memungkinkan individu untuk menyebarkan opini tanpa lagi harus bergantung pada proses gatekeeping media massa atau yang dikenal dengan konsep connective action (Bennett & Segerberg, 2012). Konsep connective action berbeda dengan konsep collective action yang bergantung pada identitas atau organisasi kolektif. Pada konsep connective action, fokus pada saling berbagi pemikiran melalui konten yang disebarluaskan melalui jaringan media sosial. Misalnya saja pada gerakan Arab Spring yang terjadi di Timur Tengah yang berawal dari media sosial. Dalam hal ini, media massa dapat digunakan memperkuat dampak dan memperluas jangkauan dari opini publik yang ada di media sosial.

Meskipun demikian, seperti yang disampaikan oleh McCombs, media massa masih memiliki dampak kuat dalam pembentukan opini publik. Pasalnya, media massa masih memiliki kredibilitas yang tinggi karena apa yang disampaikan terlebih dahulu melewati proses verifikasi. Sehingga apa yang disampaikan media massa sudah terverifikasi kebenarannya. Perpaduan media massa dan media sosial dapat digunakan untuk mempercepat

viralitas suatu isu sehingga dapat meningkatkan tekanan terhadap pembuat kebijakan. Perpaduan tersebut juga dapat menjaga keseimbangan informasi di kedua kategori media tersebut. Sejumlah peristiwa yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, menunjukkan perpaduan antara media sosial dan media massa dapat menekan pengambil kebijakan, seperti yang terjadi pada aksi protes penolakan PPN 12 persen hingga protes kebijakan pendistribusian tabung gas 3 kilogram.

## **BAB 7**

### **Generasi Alpha Dan Dinamika Komunikasi Digital: Pergeseran Makna, Pola Interaksi, Dan Tantangan Sosial**

Magvira Yuliani

#### **Abstrak**

Generasi Alpha lahir setelah tahun 2010, dibesarkan di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi, seperti media sosial, aplikasi komunikasi, dan berbagai alat komunikasi digital lainnya telah mengubah cara generasi ini dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Artikel membahas tentang pengaruh teknologi terhadap gaya komunikasi Generasi Alpha, yakni bagaimana interaksi berbasis teknologi membentuk komunikasi mereka dan berdampak pada gaya komunikasi, pergeseran makna kata serta pola komunikasi mereka sehari-hari dengan menggunakan perspektif teori komunikasi.

Kata kunci: generasi alpha; teknologi; gaya komunikasi; media sosial

#### **PENDAHULUAN**

Teknologi digital terus berkembang pesat, membentuk cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Generasi Alpha, yang lahir setelah tahun 2010, adalah generasi pertama yang sepenuhnya tumbuh dalam lingkungan digital. Mereka terbiasa dengan komunikasi berbasis media sosial, emoji, video pendek, dan berbagai aplikasi interaktif lainnya. Namun, perubahan ini juga membawa dampak signifikan terhadap gaya bahasa, pergeseran makna kata, serta pola komunikasi mereka dalam kehidupan sehari-hari. McCrindle (Dini, 2020) menyebutkan bahwa anak-anak dalam kategori Generasi Alpha mempunyai beberapa karakteristik seperti kreativitas yang kurang terolah, sikap individualis yang cenderung dominan, memiliki keterbatasan waktu untuk bersosialisasi, dan sulit melepaskan diri dari gadget. Sejak kecil, generasi ini sudah terpapar dengan pola komunikasi berbasis teknologi seperti penggunaan teks singkat, emoji, simbol

visual, hingga interaksi melalui video pendek di platform seperti TikTok dan YouTube.

Generasi Alpha, menurut beberapa penelitian menyebutkan bahwa mereka merasa lebih nyaman berkomunikasi melalui media digital daripada kontak langsung secara face to face dikehidupan nyata, dan ini memberikan dampak pada gaya komunikasi mereka, yakni baik dalam interaksi sosial maupun dalam cara mereka memahami dunia. Bahasa, seperti yang kita ketahui merupakan alat utama dalam berkomunikasi, akan tetapi penggunaannya mengalami perubahan seiring waktu. Generasi Alpha sering menggunakan istilah baru yang muncul di media sosial dalam bahasa pergaulan mereka dan menyebabkan pergeseran makna kata. Studi menunjukkan bahwa pergeseran makna terjadi dalam bentuk peyorasi, yaitu degradasi makna kata karena penggunaan yang lebih santai dan cenderung informal (Maulida, 2022). Misalnya, kata "santuy" yang berasal dari kata "santai"; kata "sigma" dari konsep sigma male yang menggambarkan seseorang yang cool, mandiri dan tidak memerlukan pengakuan sosial; atau kata "rizz" yang dipopulerkan oleh streamer Kai Cenat yang merupakan kependekan dari Charisma, yang berarti daya tarik atau kemampuan seseorang untuk menarik perhatian orang lain. Pada Generasi Alpha penggunaan kata rizz dikombinasikan dengan kata lain seperti "W rizz" dimana huruf W diambil dari kata Win (menang) yang memiliki arti baik atau "Unspoken rizz" yang artinya seseorang dapat menarik perhatian hanya dengan gestur atau karisma alami. Kata-kata tersebut telah menjadi bentuk komunikasi khas yang mencerminkan gaya bahasa Generasi Alpha.

Selain pergeseran makna dalam bahasa, pola interaksi dan komunikasi generasi ini pun lebih visual dan instan. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi tetapi juga sebagai ruang untuk mengekspresikan identitas diri. Platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan aplikasi permainan online menjadi tempat utama bagi mereka untuk berinteraksi, membentuk jaringan sosial, dan memperoleh informasi. Sebagian besar komunikasi dilakukan dalam bentuk video pendek, gambar,

dan emoji, menggantikan interaksi verbal konvensional. Meskipun teknologi memberikan kemudahan akses informasi, namun tidak dipungkiri ada dampak yang menyertainya, seperti studi yang menunjukkan Generasi Alpha yang bergantung pada perangkat teknologi mengalami paparan atau ekspor berlebih terhadap media sosial dapat mengurangi kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara tatap muka, mempengaruhi perkembangan sosial dan juga emosional mereka. (Sahara et al., 2024).

## **PEMBAHASAN**

Jika ada satu hal yang membedakan Generasi Alpha dari generasi sebelumnya, itu adalah bagaimana mereka tumbuh dengan teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya menggunakan internet untuk mencari informasi, tetapi juga untuk membangun hubungan sosial, belajar, dan bahkan mengembangkan identitas diri. Bagaimana cara mereka berkomunikasi di era digital ini? Mari kita bahas lebih lanjut.

### **Teknologi sebagai Mediator dalam Perkembangan Sosial**

Generasi Alpha sangat dipengaruhi oleh teknologi dalam cara mereka belajar dan bersosialisasi. Beberapa teori komunikasi ini dapat membantu kita memahami bagaimana mereka membangun hubungan dan makna di era digital: Teori Mediasi Sosial (Valkenburg & Peter, 2013), teori ini menjelaskan bagaimana teknologi digital bukan hanya alat, tetapi juga perantara dalam perkembangan sosial anak-anak dan remaja. Misalnya, interaksi dengan teman sebaya lebih banyak dilakukan melalui platform seperti WhatsApp, Instagram, atau TikTok dibandingkan pertemuan langsung. Teori Konektivitas (Siemens, 2005; Downes, 2012), dalam dunia yang serba digital, belajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Generasi Alpha memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber online, seperti video tutorial, podcast, dan diskusi di forum digital. Mereka menghubungkan berbagai informasi dari banyak platform untuk membentuk pemahaman mereka sendiri.

Teori Kultivasi (Gerbner & Gross, 1976; Morgan et al., 2015), paparan yang terus-menerus terhadap media digital membentuk cara Generasi Alpha melihat dunia. Misalnya, mereka yang sering menonton konten bertema kecantikan di media sosial bisa jadi memiliki standar kecantikan yang lebih tinggi atau bahkan tidak realistik. Teori Interaktivitas Media (Sundar, 2008), salah satu ciri khas teknologi digital adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan penggunanya. Generasi Alpha tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga kreator konten. Mereka bisa berkomunikasi dengan dunia luar melalui vlog, unggahan media sosial, atau bahkan kecerdasan buatan seperti chatbot. Selain teori-teori tersebut, Teori Identitas Sosial (Tajfel & Turner, 1986; Reicher et al., 2010) dan Teori Pengaruh Sosial (Cialdini, 2001; Berger, 2016) juga dapat menjelaskan bagaimana Generasi Alpha membentuk identitas mereka berdasarkan interaksi digital dan pengaruh dari komunitas daring. Teori Identitas Sosial menjelaskan bahwa individu mendefinisikan diri mereka berdasarkan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu dimana identitas sosial seseorang terbentuk dari proses kategorisasi sosial, yaitu:

- a) Kategorisasi: Generasi Alpha mengelompokkan diri mereka ke dalam kategori tertentu, misalnya sebagai gamer, penggemar K-pop, atau pengikut tren digital tertentu.
- b) Identifikasi: Mereka menginternalisasi karakteristik kelompok tersebut sebagai bagian dari identitas diri mereka.
- c) Perbandingan Sosial: Generasi ini membandingkan kelompok mereka dengan kelompok lain yang dapat memperkuat loyalitas dan rasa kebersamaan.

Untuk Generasi Alpha yang tumbuh kembang di dalam lingkungan digital, identitas mereka tidak hanya terbentuk dari interaksi langsung, tetapi juga dari komunitas daring di media sosial, game online, dan platform digital lainnya. Mereka mengidentifikasi diri dengan kelompok tertentu berdasarkan algoritma yang merekomendasikan konten yang relevan dengan minat mereka, sehingga memperkuat perasaan keterikatan dan

kebersamaan, salah satu contohnya adalah melalui platform game Roblox.

Teori Pengaruh Sosial berfokus pada bagaimana individu dipengaruhi oleh norma sosial, tren, dan opini orang lain dalam membentuk sikap dan perilaku mereka. Cialdini (2001) mengidentifikasi enam prinsip pengaruh sosial sebagaimana berikut:

- a) Persuasi Sosial: Generasi Alpha lebih mudah dipengaruhi oleh influencer dan komunitas digital dalam membentuk preferensi dan nilai mereka.
- b) Konsensus Sosial (Social Proof): Generasi Alpha cenderung mengikuti tren yang populer di komunitas daring, misalnya mengikuti tantangan viral di TikTok atau membeli produk yang sering diulas oleh figur publik.
- c) Kedekatan Sosial (Liking): Keterhubungan emosional dengan tokoh digital seperti YouTuber atau streamer dapat membentuk aspirasi dan gaya hidup mereka, contohnya seperti streamer YouTube dengan pengikut terbesar di dunia, Mr. Beast.

Berger (2016) juga menekankan bahwa faktor sosial seperti keterlibatan dalam komunitas daring dapat mempercepat penyebaran ide dan tren, yang pada akhirnya membentuk identitas sosial Generasi Alpha. Mereka tidak hanya menerima pengaruh dari lingkungan fisik, tetapi juga dari "ruang sosial virtual" yang mereka ikuti secara aktif. Kombinasi dari kedua teori ini memperjelas bagaimana sebenarnya identitas Generasi Alpha, yakni dimana interaksi daring memainkan peran dominan dalam membentuk siapa mereka dan bagaimana mereka memandang dunia.

### **Pergeseran Makna dalam Komunikasi Digital**

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari Generasi Alpha dengan generasi sebelumnya dalam pemanfaatan komunikasi digital, beberapa perubahan tersebut seperti: a). Kepercayaan Beralih dari Institusi ke Influencer (Livingstone & Blum-Ross, 2020), dahulu orang tua dan guru adalah sumber utama informasi dan nilai-nilai.

Sekarang, banyak anak lebih percaya pada influencer YouTube atau TikTok yang mereka anggap relatable dan autentik; b). Bahasa Digital yang Semakin Visual (Danesi, 2017), jika generasi sebelumnya banyak berkomunikasi lewat teks, Generasi Alpha lebih suka menggunakan emoji, meme, GIF, dan video pendek untuk menyampaikan pesan mereka. Mereka lebih ekspresif dalam komunikasi digital daripada dalam percakapan langsung; c). Privasi yang Semakin Kabur (boyd, 2014), dengan kebiasaan membagikan kehidupan mereka secara online sejak dulu, batasan antara ruang pribadi dan publik menjadi lebih kabur.

Banyak Generasi Alpha tidak sadar bahwa informasi yang mereka unggah bisa berdampak jangka panjang. Ini menunjukkan betapa minimnya literasi digital generasi ini terhadap etika dan keamanan data pribadi dalam komunikasi digital.

### **Pola Interaksi Generasi Alpha dalam Dunia Digital**

Cara Generasi Alpha bersosialisasi dipengaruhi oleh teknologi, oleh karenanya pola interaksi yang mereka lakukan adalah dengan mengutamakan a). Platform Digital sebagai Ruang Sosial (Anderson & Jiang, 2018), jika generasi sebelumnya bermain di taman atau lapangan, Generasi Alpha menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial dan game online. TikTok, Roblox, dan Discord menjadi tempat mereka berinteraksi dengan teman-teman sebayanya; b). Berkomunikasi Secara Virtual Lebih dari Tatap Muka (Turkle, 2015), interaksi digital yang terus meningkat membuat mereka lebih nyaman berbicara melalui chat atau video call dibandingkan bertemu langsung. Hal ini bisa berdampak pada keterampilan sosial mereka di dunia nyata; c). Interaksi dengan AI (West, 2018), Generasi Alpha tumbuh dengan asisten digital seperti Alexa, Siri, dan Gemini yang menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari.

Hal ini mengubah cara mereka memahami komunikasi karena mereka terbiasa dengan respons otomatis dari mesin. Otomatisasi dan kemudahan ini membiasakan generasi ini

memperoleh informasi secara cepat dan singkat, bahkan mungkin mengabaikan proses analitik bagaimana dan mengapa. Apakah ini berpengaruh pada mentalitas dan emosional mereka?, jawabannya sangat mungkin... karena kecepatan dan kemudahan dapat menjadikan mereka Generasi yang tidak sabaran atau menginginkan hasil instan. Generasi Alpha tumbuh di era di mana mereka dapat memperoleh content on-demand, dimana Generasi ini tidak perlu menunggu acara TV favorit karena bisa langsung menontonnya di YouTube atau platform streaming. Mereka bisa merasa sangat gelisah atau kesal ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, seperti koneksi internet yang lambat atau aplikasi yang buffering. Generasi ini tidak terbiasa menunggu, sehingga bisa mengalami kecemasan atau stres saat harus menghadapi situasi yang memerlukan kesabaran, seperti antrian atau tugas-tugas.

### **Tantangan yang Dihadapi Generasi Alpha**

Di Indonesia, banyak anak-anak Generasi Alpha menghabiskan waktu berjam-jam bermain game online seperti Roblox, Free Fire, dan Mobile Legends atau menonton video di YouTube dan TikTok. Hal ini diperkuat melalui studi dan laporan kesehatan mental oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan meningkatkan kecemasan dan gangguan tidur pada anak-anak. Selain itu, fenomena FOMO (Fear of Missing Out) juga meningkat, di mana generasi ini merasa cemas jika tidak bisa mengikuti tren terbaru di media sosial. Tingginya intensitas interaksi digital menimbulkan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, diantaranya yakni: a). Ketergantungan pada Dunia Digital dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental (Twenge et al., 2018), terlalu banyak waktu di depan layar dapat meningkatkan risiko kecemasan dan depresi pada anak-anak dan remaja.

Generasi Alpha menghadapi tekanan sosial dari media digital yang selalu menampilkan kehidupan yang tampak sempurna; b). Polarisasi Akibat Algoritma Media Sosial (Pariser, 2011), algoritma

platform digital sering kali hanya menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi penggunanya. Hal ini menciptakan 'filter bubble' yang mempersempit wawasan mereka dan membuat mereka rentan terhadap informasi yang bias; c). Kurangnya Interaksi Sosial di Dunia Nyata (Goleman, 2006), meskipun mereka sangat mahir dalam komunikasi digital, Generasi Alpha mungkin mengalami kesulitan dalam membaca ekspresi wajah atau memahami bahasa tubuh saat berinteraksi langsung. Ini dapat berdampak pada kemampuan mereka dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat.

## **KESIMPULAN**

Generasi Alpha adalah generasi yang lahir dan besar dalam era digital. Teknologi bukan hanya alat bagi mereka, tetapi juga bagian dari identitas dan cara mereka berkomunikasi. Namun, seiring dengan keunggulan teknologi yang mereka manfaatkan, ada juga tantangan besar yang perlu mereka hadapi, mulai dari ketergantungan digital hingga perubahan pola sosialisasi. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk memahami dinamika ini dan membantu mereka menemukan keseimbangan dalam berkomunikasi di dunia digital dan dunia nyata.

## **BAB 8**

# **Hiperrealitas Kemenangan Judi Online pada Konten Media Sosial dengan Normalisasi Perilaku Judi di Masyarakat**

Mustiawan

### **Abstrak**

Kemajuan teknologi di digital dan media sosial kini telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat, termasuk dalam mempengaruhi persepsi terhadap perjudian online. Fenomena hiperrealitas kemenangan judi berbasis online yang tersebar luas di media sosial telah membentuk persepsi yang bias terhadap perjudian, di mana kemenangan diperlihatkan secara berlebihan dan risiko finansial yang tinggi sering kali disembunyikan. Studi ini mengkaji bagaimana strategi komunikasi dalam media sosial menciptakan ilusi keberhasilan judi serta dampaknya terhadap normalisasi perilaku perjudian di masyarakat. Penulis menyoroti bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana promosi judi online, tetapi juga alat manipulatif yang membentuk pemahaman masyarakat tentang perjudian sebagai aktivitas yang menguntungkan dan normalisasi judi online. Normalisasi perilaku judi di masyarakat semakin meningkat seiring dengan masifnya eksposur terhadap konten perjudian. Dampaknya meliputi peningkatan angka kecanduan judi, peningkatan masalah kesehatan mental, kerugian ekonomi, hingga kerusakan hubungan sosial dalam keluarga, meningkatnya angka kriminalitas dan dampak sosial lainnya.

Kata kunci: hiperrealitas; kemenangan; konten media sosial; normalisasi perilaku.

### **PENDAHULUAN**

Judi dipandang sebagai perilaku masyarakat merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma, etika, dan hukum yang ada. Menurut pasal 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974,

perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana yang harus diberantas karena dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Maraknya praktik perjudian menyebabkan gangguan dalam kehidupan sosial, seperti kerugian ekonomi, kehancuran keluarga, dan peningkatan kriminalitas. Selain itu, perjudian dapat menciptakan ketidakadilan sosial karena seringkali merugikan individu atau kelompok yang terlibat, bahkan mengarah pada ketergantungan yang merusak kualitas hidup. Tidak hanya melanggar hukum positif, perjudian juga dilarang dalam ajaran agama, khususnya dalam Islam, yang menganggapnya sebagai perbuatan haram yang merusak moral dan kehidupan manusia.

Praktek Judi dalam Islam merupakan godaan dari setan yang mengajak manusia untuk mengabaikan perintah Tuhan dan terjerumus dalam perbuatan dosa. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung" (QS. Al-Maidah Ayat 90). Ayat tersebut memperingatkan umat Islam untuk menjauhi segala bentuk perjudian, karena hal tersebut dapat membawa keburukan, baik dalam kehidupan dunia maupun ukhrawi. Islam mengajarkan bahwa menjauhi judi adalah langkah yang akan membawa keberuntungan dan kebahagiaan sejati, serta menjauhkan umat dari kerusakan moral dan spiritual. Oleh karena itu, dalam konteks agama dan sosial, perjudian dalam bentuk apapun baik offline maupun online merupakan tindakan illegal yang dapat merusak masyarakat secara keseluruhan.

Fenomena judi berbasis online di Indonesia terus menunjukkan progress peningkatan yang sangat signifikan dalam tujug tahun terakhir ini. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga kuartal pertama 2024, total perputaran dana transaksi judi berbasi online terlah mencapai nilai yang sangat fantastik

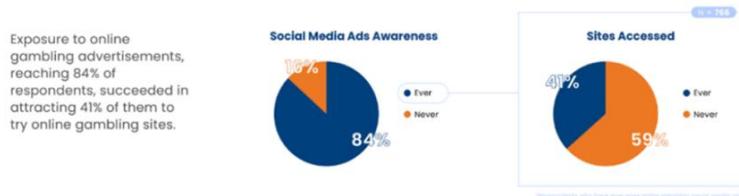
yaitu Rp 517 triliun dengan rincian perputaran dana tersebut adalah sebagai berikut pada tahun 2017 sebesar Rp 2,1 triliun dan 2018 (Rp 3,9 triliun). Sedangkan tahun 2021 mencapai Rp 57 triliun, dan selanjutnya pada tahun 2022 sebesar Rp 104 triliun. Terus mengalami peningkatan pada tahun 2023 mencapai Rp 327 triliun dan Kuartal I di tahun 2024 menembus Rp 101 triliun (Wardah, 2024). Realitas ini memperlihatkan bahwa aktivitas judi online di Masyarakat Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat hal ini merupakan ancaman bagi masyarakat dan negara.

Pesatnya perkembangan teknologi dan tingginya tingkat penggunaan internet di Indonesia, juga mendorong aktivitas perjudian berbasis online juga mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu faktor yang mendorong pesatnya pertumbuhan judi online di Indonesia adalah perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan internet dan kemudahan akses yang semakin berkembang. Semakin terjangkaunya harga smartphone serta meluasnya layanan internet hingga ke daerah terpencil memungkinkan pengguna internet di Indonesia mengakses dunia maya melalui perangkat seluler. Data dari Hootsuite (We are Social) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, pengguna internet di Indonesia mencapai 77% dari jumlah total penduduk, yaitu sekitar 212,9 juta orang. Pengguna media sosial aktif mencapai 60,4% atau sekitar 167 juta jiwa, sementara jumlah perangkat mobile yang terhubung dengan internet mencapai 353,8 juta, yang lebih besar daripada jumlah total penduduk Indonesia (Riyanto, 2024). Angka-angka ini menggambarkan besarnya potensi masyarakat Indonesia untuk terpapar konten perjudian melalui platform online.

Perkembangan teknologi ini tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga membuat situs-situs judi online dapat dengan mudah diakses. Hanya dengan menggunakan gadget yang terhubung ke internet, masyarakat dapat memainkan permainan judi online. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pada 2024, hampir 80% dari populasi Indonesia terhubung ke internet, menjadikannya

kelompok yang rentan terhadap konten judi online (Jalin, 2024). Operator judi online memanfaatkan kemudahan ini untuk menargetkan pengguna melalui media sosial, iklan pop-up, dan aplikasi yang sering menyamar sebagai platform investasi. Judi online, yang menggunakan platform digital seperti situs web atau aplikasi untuk melakukan taruhan, menawarkan berbagai permainan mulai dari poker, roulette, hingga taruhan olahraga.

Perjudian online semakin menjadi permasalahan serius di Indonesia, terutama dengan akses internet yang semakin mudah, sehingga masyarakat lebih rentan terhadap paparan iklan judi yang sering kali disamarkan sebagai aplikasi permainan yang tampak tidak berbahaya. Awalnya, pengguna mungkin hanya mencoba sekadar iseng, namun permainan yang menawarkan kemenangan instan ini dapat menyebabkan ketergantungan seiring berjalanannya waktu. Hasil survei mengungkapkan bahwa 84% pengguna internet di Indonesia sering melihat iklan judi online di media sosial dipromosikan oleh influencer dengan jangkauan audiens yang luas dan 41% membuka situs judi online tersebut yang sehingga sulit dihindari dan meningkatkan risiko kecanduan (populix, 2024).



Gambar 1. Eksposur Iklan Judi Online  
Sumber (populix, 2024)

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengenai pemblokiran situs yang terindikasi aktivitas judi online menegaskan bahwa praktik perjudian daring telah menyebar luas di media sosial. Dalam periode 5 Oktober 2023 hingga 22 Mei 2024, terdapat 555 akun dompet digital yang diajukan untuk pemblokiran karena terhubung dengan judi online.

Selain itu, sebanyak 19 juta konten bermuatan judi online telah diblokir sejak 17 Juli 2023 hingga 22 Mei 2024 (Andayani, 2024). Namun, masih banyak konten serupa yang beredar di media sosial, seperti video pola gacor di YouTube serta iklan-iklan judi online di berbagai platform lainnya.

Judi online mengakibatkan Bencana Sosial di Indonesia, hal ini dikarenakan judi online telah menyebabkan berbagai tindakan kriminal yang meresahkan di Indonesia, seperti bunuh diri, pembunuhan, perampukan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa kasus kriminalitas yang diakibatkan oleh aktivitas judi online yang berhasil dirangkum oleh penulis adalah sebagai berikut: pertama, seorang pria di Sambas Kalimantan Barat, tegah membunuh pegawai koperasi akibat utang judi online. Kedua, Kasus serupa terjadi di Mojokerto, Jawa Timur, di mana seorang polisi wanita membakar suaminya karena kecanduan judi online. Ketiga, seorang ibu di Kalimantan Timur rela membunuh anaknya yang telah menghabiskan uang keluarga untuk berjudi. Keempat, pembunuhan oleh seorang pria di Morowali yang membunuh ibunya demi uang untuk judi dan narkoba, serta perampukan yang dilakukan anggota Densus 88 untuk membayar utang judi (Muhid & Juliansyah, 2024). Berbagai kejadian ini menggambarkan dampak destruktif judi online yang tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga menghancurkan kehidupan keluarga dan Masyarakat. Hal ini menjadikan judi online sebagai masalah nasional yang mendesak, dengan dampak yang tidak hanya merusak keuangan individu, tetapi juga dapat mengganggu struktur sosial dan ekonomi masyarakat, yang memerlukan solusi cepat dan komprehensif untuk menanggulanginya.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara masyarakat mengkonsumsi informasi, termasuk dalam mempengaruhi pola pikir dan perilaku. Salah satu fenomena yang muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah maraknya konten kemenangan judi online yang beredar di media sosial, yang menciptakan ilusi hiperrealitas bagi para pengguna. Hiperrealitas, sebagaimana dikonsepkan oleh Jean Baudrillard, merujuk pada

realitas yang telah direduksi menjadi simulasi sehingga sulit dibedakan antara yang nyata dan yang direkayasa (Baudrillard, 1994). Konteks kemenangan judi online, media sosial menyajikan narasi kemenangan yang berulang-ulang dan diperbesar, sehingga menciptakan kesan bahwa judi adalah aktivitas yang selalu menguntungkan dan dapat menjadi jalan pintas menuju kesuksesan finansial.

Fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika melihat bagaimana algoritma media sosial mempromosikan konten-konten tersebut kepada pengguna yang rentan, termasuk kelompok muda dan masyarakat kelas menengah ke bawah yang secara ekonomi lebih mudah tergoda oleh janji keuntungan instan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa paparan iklan dan konten perjudian di media sosial berkorelasi dengan peningkatan partisipasi perjudian, terutama di kalangan anak muda (Alfian K, 2024). Konten-konten ini sering kali dikemas dengan strategi pemasaran yang canggih, menggunakan testimoni, influencer, dan gimmick visual yang menarik untuk memperkuat daya tarik perjudian.

Di sisi lain, normalisasi perilaku judi di masyarakat juga semakin meningkat. Normalisasi ini terjadi ketika perjudian tidak lagi dianggap sebagai aktivitas berisiko atau ilegal, tetapi sebagai bagian dari gaya hidup yang wajar dan bahkan menguntungkan. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa eksposur media terhadap perjudian online menciptakan persepsi bahwa aktivitas tersebut adalah hal yang lumrah dan diterima secara sosial (Mustiawan, 2024). Hal ini diperparah dengan narasi yang dibangun di media sosial yang menampilkan individu-individu yang sukses karena judi online, tanpa menampilkan risiko atau konsekuensi negatifnya seperti kecanduan, kerugian finansial, atau dampak psikologis bagi pelakunya.

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas dampak perjudian online terhadap individu dan Masyarakat masih terdapat celah dalam kajian mengenai bagaimana hiperrealitas kemenangan judi online berkontribusi pada normalisasi perilaku judi di masyarakat. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada

aspek kecanduan judi atau strategi pemasaran perjudian, namun belum secara spesifik mengkaji bagaimana hiperrealitas yang diciptakan di media sosial membentuk persepsi publik terhadap perjudian.

Secara fenomenologis, ada kesenjangan antara realitas perjudian dengan narasi yang disajikan di media sosial. Di dunia nyata, mayoritas pemain judi mengalami kerugian finansial yang signifikan. Sementara di media sosial, hanya kemenangan yang diekspos secara masif. Fenomena ini menciptakan bias persepsi, di mana masyarakat lebih cenderung melihat perjudian sebagai peluang emas daripada sebagai aktivitas berisiko tinggi. Hasil penelitian terdahulu menegaskan bahwa eksposur terhadap konten perjudian di media sosial dapat memicu perilaku berjudi yang impulsif dan meningkatkan partisipasi dalam perjudian online, terutama di kalangan anak muda (King et al., 2010).

Dari perspektif kritis, perlu ada kajian yang lebih dalam mengenai bagaimana strategi komunikasi dan manipulasi media sosial menciptakan hiperrealitas kemenangan judi online, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada normalisasi perilaku judi di masyarakat. Kajian ini juga menjadi penting dalam konteks regulasi dan kebijakan publik, mengingat meningkatnya jumlah pemain judi online di Indonesia, termasuk di kalangan remaja dan mahasiswa.

## **PEMBAHASAN**

### **Simulacra dan Hiperrealitas Kemenangan Judi Online di Media Sosial**

Penggunaan elemen-elemen visual dan teks yang kuat telah membentuk realitas yang tampak menarik dan menggoda, namun sebenarnya jauh dari kenyataan asli, suatu kondisi yang dikenal sebagai hiperrealitas. Hiperrealitas merujuk pada situasi di mana masyarakat hidup dalam dunia yang dipenuhi simulakra atau representasi dari sesuatu yang tidak memiliki referensi nyata (Baudrillard, 1994; Maharani et al., 2022). Pada era modern yang

didukung oleh perkembangan teknologi informasi, simulasi dan representasi menjadi lebih dominan dibandingkan dengan realitas itu sendiri. Hiperrealitas menciptakan kondisi di mana batas antara kepalsuan dan keaslian menjadi kabur; masa lalu dan masa kini bercampur; fakta berbaur dengan rekayasa; tanda melebur dengan realitas; serta kebohongan dan kebenaran saling menyatu (Rajagukguk & Sofianto, 2020).

Hiperrealitas kemenangan judi online di media sosial diciptakan melalui berbagai strategi komunikasi yang membentuk ilusi tentang kemudahan dan keuntungan dalam berjudi. Media sosial berperan sebagai ruang simulasi yang merepresentasikan kemenangan judi secara berlebihan dan tidak proporsional terhadap kenyataan. Penggunaan elemen visual dan teks pada konten kemenangan judi online di media sosial berperan signifikan dalam membentuk hiperrealitas kemenangan di benak penonton. Elemen-elemen ini dibawah ini menjadi sebuah alat simulasi untuk mengelebuhui penonton.

Tabel 1. Elemen Simulasi Hiperrealitas Kemenangan Judi Online

---

Visual :

- Menampilkan sejumlah angka dan nilai perkalian besar.
  - Menggunakan warna-warna yang cerah sehingga menarik perhatian
  - Menampilkan Nilai statistika permainan sebagai bentuk transparansi
  - Penggunaan Animasi, elemen visual dan sound yang menarik perhatian audien
  - Penampilan Ekspresi konten creator yang eksperif penuh dengan emosional seperti tertawa, teriak, ekspresi kegembiraan dan ekspresi optimis akan ada kemenangan.
- 

Teks :

- Pemilihan kata-kata yang profokatif pada thumbnail sehingga judul konten semakin membuat audien ingin mencoba seperti “pola gacor”, “pola daging” “pola *maxwin*” “*auto maxwin*”, “trik *maxwin*”, “JP Paus”, “Pola Slot Gacor”
- 

Teks

- Keterlibatan audien dalam kolom komentar menguatkan pengalaman keberhasilan menggunakan trik yang sama, menjadikan konten ini menjadi sebuah realitas yang seakan nyata.
- 

Sumber : Olahan Penulis, 2025

Penggunaan elemen visual dan tekstual yang kuat membentuk realitas yang tampak lebih menarik dibandingkan kenyataan sebenarnya. Hal ini menyebabkan batas antara realitas dan representasi menjadi kabur, sehingga penonton kesulitan membedakan keduanya. Mereka tidak menyadari bahwa tayangan, konten, atau iklan yang mereka lihat telah melalui proses simulasi dan penyuntingan. Teknik editing ini dapat menciptakan ilusi bahwa kemenangan lebih mudah atau lebih sering terjadi daripada kondisi sesungguhnya, didukung oleh tutorial atau panduan yang menjanjikan hasil pasti. Video-video semacam ini membangun persepsi bahwa judi online adalah cara cepat dan efektif untuk memperoleh uang. Hiperrealitas yang terbentuk membuat penonton percaya bahwa kemenangan besar merupakan hal yang lumrah dan dapat diraih dengan mudah.

Selain itu, peran influencer dalam mempromosikan judi online semakin memperkuat hiperrealitas ini. Banyak selebgram dan content creator yang memanfaatkan platform mereka untuk membagikan pengalaman mereka dalam memenangkan judi, sehingga membangun kepercayaan dengan audiensnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemasaran melalui influencer dapat mempengaruhi perilaku penonton (Evelina & Handayani, 2018). Hal ini juga berlaku pada konten judi online di media sosial yang dilakukan oleh influencer atau konten kreator, karena penonton melihat para influencer ini sebagai contoh nyata bahwa judi dapat membawa keuntungan besar.

Penyajian narasi kemenangan yang berulang dan ditingkatkan menjadi salah satu faktor utama dalam membentuk ilusi ini. Platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram sering kali menampilkan unggahan yang memperlihatkan seseorang memenangkan judi dalam jumlah besar dengan ekspresi kebahagiaan yang berlebihan. Hal ini menciptakan kesan bahwa judi adalah cara cepat untuk memperoleh keuntungan, apalagi dengan tambahan efek visual seperti suara kemenangan, animasi uang, serta testimoni yang membangun ilusi keberhasilan (Mustiawan & Pranawukir, 2024).

Algoritma media sosial berperan penting dalam membentuk hiperrealitas kemenangan judi. Dengan mendistribusikan konten berdasarkan minat pengguna, algoritma memastikan bahwa seseorang yang pernah melihat atau berinteraksi dengan konten terkait judi akan semakin sering diperlihatkan ungahan serupa. Akibatnya, individu yang sudah memiliki ketertarikan terhadap judi akan terus terpapar konten kemenangan tanpa mendapatkan gambaran mengenai konsekuensi negatifnya. Dampak dari paparan konten semacam ini tidak dapat dianggap remeh. Studi menunjukkan bahwa melihat kemenangan besar dalam judi online dapat meningkatkan minat serta partisipasi dalam aktivitas perjudian (Hing et al., 2015; King et al., 2010). Konsekuensinya, penonton yang sering melihat konten ini mungkin terdorong untuk mencoba judi online dengan harapan mendapatkan kemenangan besar seperti yang ditampilkan dalam video. Mereka cenderung mengabaikan kenyataan bahwa judi merupakan aktivitas berisiko tinggi yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Hiperrealitas kemenangan ini berpotensi meningkatkan jumlah individu yang terlibat dalam judi online, yang pada akhirnya dapat memicu peningkatan tingkat kecanduan judi serta memperburuk permasalahan ekonomi di masyarakat.

Manipulasi realitas juga terjadi melalui penggunaan data kemenangan yang tidak akurat dan testimoni palsu. Banyak platform judi online yang menggunakan bot atau akun palsu untuk memberikan kesan bahwa banyak orang berhasil memenangkan taruhan dalam jumlah besar. Melalui cara ini, mereka menciptakan ilusi bahwa judi adalah aktivitas yang hampir selalu menguntungkan. Ini selaras dengan konsep hiperrealitas Baudrillard, di mana realitas direduksi menjadi simulasi yang lebih menarik daripada kenyataan sebenarnya (Rajagukguk & Sofianto, 2020). Simulasi kemenangan judi online di media sosial bukan sekadar fenomena pemasaran, tetapi juga bentuk manipulasi realitas atau realitas semu (hiperrealitas) yang mempengaruhi perilaku sosial. Fenomena ini membutuhkan perhatian lebih dari semua kalangan untuk memahami dampaknya lebih dalam dan merancang strategi mitigasi yang efektif.

Dampak sosial dan psikologis dari hiperrealitas kemenangan judi ini sangat signifikan. Paparan berulang terhadap narasi kemenangan dapat mengubah cara berpikir masyarakat tentang judi, dari yang awalnya dianggap sebagai aktivitas berisiko menjadi sesuatu yang lumrah dan menguntungkan. Individu yang terus-menerus melihat konten ini lebih mungkin mengembangkan bias kognitif yang membuat mereka percaya bahwa mereka juga bisa menang dengan mudah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa normalisasi perjudian online melalui media sosial berkorelasi dengan peningkatan jumlah pemain judi pemula (Mustiawan & Pranawukir, 2024).

### **Normalisasi Perilaku Judi di Masyarakat**

Konten kemenangan judi online ini juga dapat menjadi sebuah tontonan yang dapat menormalisasikan perilaku Judi Online. Hal ini dapat mengarah pada masalah perilaku perjudian, terutama di masyarakat awam yang minim literasi digital sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh konten yang mereka konsumsi di media sosial (Delfabbro et al., 2014). Efek psikologis dari kemenangan yang berulang dalam video pola gacor juga penting untuk dipertimbangkan. Mengingat, paparan konten sosial media secara terus-menerus tentang kemenangan besar dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistik dan mendorong perilaku berjudi yang berisiko (Auer & Griffiths, 2022; Wood & Griffiths, 2007). Konten ini dapat menormalisasi praktik judi online dan menjadikannya sebagai aktivitas yang diterima dan diidamkan oleh masyarakat. Ini berpotensi mengubah persepsi publik tentang judi, membuatnya tampak sebagai cara yang sah, legal, halal dan efektif untuk mendapatkan uang. Penonton mungkin menjadi lebih permisif terhadap judi online dan menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, tanpa mempertimbangkan konsekuensi negatif yang mungkin ditimbulkan.

Normalisasi perilaku judi di masyarakat terjadi ketika perjudian tidak lagi dipandang sebagai aktivitas ilegal atau berisiko tinggi, melainkan sebagai bagian dari budaya hiburan dan bahkan sumber penghasilan yang wajar. Media sosial memainkan peran

besar dalam proses normalisasi ini dengan terus menyajikan narasi kemenangan, promosi judi, dan gaya hidup mewah yang dikaitkan dengan hasil dari perjudian. Semakin sering seseorang terpapar dengan konten semacam ini, semakin tinggi kemungkinan mereka melihat judi sebagai hal yang biasa dan tidak berbahaya.

Salah satu faktor utama dalam normalisasi perjudian adalah perubahan persepsi masyarakat akibat eksposur media. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa eksposur terhadap konten perjudian di media sosial berkorelasi dengan peningkatan keterlibatan dalam aktivitas judi, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda (Hidayat et al., 2024). Faktor lain yang mendukung normalisasi adalah penggunaan istilah yang lebih halus dalam promosi judi, seperti menyebutnya sebagai "games", "trading", atau "investasi" alih-alih perjudian. Strategi semacam ini mengaburkan batas antara perjudian dan aktivitas keuangan yang sah, membuatnya lebih dapat diterima oleh masyarakat luas.

Selain itu, norma sosial juga berperan dalam normalisasi perjudian. Ketika semakin banyak orang di sekitar terlibat dalam perjudian dan membicarakannya secara terbuka tanpa stigma negatif, aktivitas ini menjadi semakin diterima dalam lingkungan sosial. Fenomena ini diperparah dengan keterlibatan selebriti dan influencer yang sering kali menunjukkan gaya hidup glamor yang dikaitkan dengan judi, membuat pengikut mereka merasa bahwa berjudi adalah cara yang sah untuk mencapai kesuksesan finansial.

Normalisasi perjudian juga membawa dampak negatif yang signifikan. Individu yang percaya bahwa judi adalah aktivitas normal lebih mungkin untuk mengabaikan risiko yang terkait, seperti kecanduan, kerugian finansial, dan dampak sosial yang lebih luas. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa normalisasi perjudian melalui media sosial dapat menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah pemain judi, termasuk di kalangan pemula yang awalnya tidak memiliki minat pada perjudian (Ginting & Ginting, 2023). Normalisasi perilaku judi di masyarakat bukan

hanya hasil dari tren media sosial, tetapi juga konsekuensi dari strategi komunikasi dan pemasaran yang secara sistematis membentuk persepsi publik terhadap perjudian. Fenomena ini memerlukan perhatian lebih dalam hal regulasi dan edukasi publik untuk mengurangi dampak negatifnya.

### **Dampak dan Implikasi Sosial**

Hiperrealitas Kemenangan Judi Online Melalui Media Sosial berakibat normalisasi perilaku judi online di Masyarakat. Fenomena judi online yang dinormalisasi oleh media sosial memiliki dampak sosial yang luas, terutama dalam membentuk pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya angka kecanduan judi di berbagai kelompok usia. Normalisasi perilaku judi online ini memiliki berbagai dampak yang signifikan, mulai dari psikologis, keluarga, ekonomi dan sosial. Dampak psikologis ini mengacu pada individu yang kecanduan judi online.

Secara psikologis ketergantungan terhadap judi online juga memicu masalah kesehatan mental yang lebih luas. Individu yang mengalami kekalahan berulang dalam judi cenderung mengalami gangguan emosional, yang berujung pada perasaan putus asa, stres kronis, dan bahkan tindakan bunuh diri. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa perjudian online dapat menyebabkan kecanduan, kecemasan, depresi, dan gangguan hubungan sosial (Sari et al., 2023).

Dari perspektif keluarga judi online juga berkontribusi terhadap rusaknya hubungan dalam keluarga dan komunitas. Banyak kasus perceraian dan konflik keluarga yang dipicu oleh kebiasaan berjudi yang tidak terkendali. Individu yang kecanduan judi cenderung mengabaikan tanggung jawab keluarga, yang pada akhirnya memicu ketidakstabilan rumah tangga dan masalah sosial lainnya seperti kekerasan dalam rumah tangga. Kecanduan judi bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga. Studi terdahulu menyebutkan bahwa kecanduan judi online tidak

hanya merugikan diri sendiri tetapi juga mengganggu keharmonisan keluarga khususnya pada ketahanan ekonomi keluarga (Rafiqah & Rasyid, 2023).

Dampak ekonomi dan sosial juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Individu yang terjerat judi online sering kali mengalami kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, dan terlilit utang yang sulit dibayar. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan kriminalitas. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa judi online yang tidak terkontrol berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kasus kejahatan ekonomi, termasuk penipuan, pencurian, dan penggelapan dana demi menutupi kerugian akibat judi (Dewi et al., 2024).

Implikasi sosial lainnya adalah perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Ketika judi online dianggap sebagai hal yang wajar dan diterima, norma sosial yang sebelumnya menolak perjudian perlahan-lahan mengalami pergeseran. Hal ini dapat mengarah pada masyarakat yang lebih permisif terhadap praktik perjudian dan mengurangi stigma terhadap aktivitas yang sebelumnya dianggap negatif. Implikasi hukum juga menjadi perhatian penting. Banyak negara mulai mempertimbangkan regulasi yang lebih ketat terhadap perjudian online untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Di Indonesia, regulasi terkait judi online masih belum cukup efektif untuk menekan angka partisipasi masyarakat dalam perjudian, mengingat banyaknya situs judi ilegal yang masih dapat diakses dengan mudah.

Dari perspektif kebijakan publik, fenomena ini memerlukan intervensi serius dari pemerintah dan institusi terkait. Diperlukan strategi edukasi dan kampanye yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online. Selain itu, penguatan regulasi serta peningkatan pengawasan terhadap platform media sosial yang memfasilitasi promosi perjudian menjadi langkah yang harus segera dilakukan. Dampak dan implikasi sosial dari judi online tidak dapat diabaikan.

Diperlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari regulasi, edukasi, hingga intervensi sosial, untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh fenomena ini.

## **SIMPULAN**

Hiperrealitas kemenangan judi online yang tersebar di media sosial telah menciptakan persepsi yang bias terhadap perjudian. Representasi kemenangan yang berlebihan dan pengabaian terhadap risiko keuangan yang nyata telah mendorong masyarakat untuk melihat perjudian sebagai peluang mudah untuk meraih keuntungan. Fenomena ini diperkuat oleh algoritma media sosial yang terus menampilkan konten-konten serupa, sehingga memperkuat normalisasi perilaku perjudian di masyarakat. Akibatnya, perjudian yang dahulu dianggap sebagai aktivitas berisiko kini semakin diterima secara sosial dan bahkan menjadi bagian dari gaya hidup banyak individu.

Dampak dari fenomena ini sangat luas, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Meningkatnya angka kecanduan judi, kebangkrutan finansial, serta kehancuran hubungan sosial menjadi dampak nyata yang dirasakan oleh individu dan komunitas. Selain itu, perubahan norma sosial akibat normalisasi perjudian turut memperburuk situasi dengan menghilangkan stigma negatif terhadap praktik judi online. Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap fenomena ini, mengingat eksposur mereka terhadap media sosial yang tinggi dan kurangnya edukasi mengenai risiko perjudian.

Perlu adanya langkah-langkah yang lebih tegas dalam regulasi promosi judi online, edukasi Masyarakat tentang bahwa judi online, serta kebijakan yang melindungi kelompok rentan dari dampak negatif perjudian. Pemerintah, akademisi, serta platform media sosial memiliki peran krusial dalam membatasi penyebaran konten yang mempromosikan perjudian dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkannya. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan dampak negatif dari judi online dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi narasi yang disajikan oleh media sosial.

## **BAB 9**

### **FoMO Sebagai Lifestyle Mahasiswa di Dunia Maya**

Novi Andayani Praptiningsih, Rd. Heri Solehudin, Wininda Qusnul  
Khotimah

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menelusik fenomena FoMO sebagai lifestyle mahasiswa di era digital. Penelitian ini bermetode kualitatif, dilakukan pada mahasiswa sebanyak 5 partisipan. Melalui wawancara mendalam dan pengamatan, penelitian ini berusaha menggali pengalaman pribadi mereka terkait FOMO, menelusuri pengaruh fenomena ini terhadap keputusan, aktivitas sehari-hari, dan interaksi sosial. Hasil penelitian menunjukkan seluruh partisipan yang rata-rata mengakses media sosial 5 hingga 8 jam sehari, memiliki dua akun sosial media instagram. Akun kedua digunakan dengan identitas tersembunyi untuk memantau serta mengintip kehidupan serta postingan teman tanpa diketahui yang bersangkutan, yang membuat dirinya menjadi FoMO. Penggunaan akun kedua di dunia maya lainnya adalah untuk memfollow influencer, selebriti, grup band kpop yang didolakan, serta postingan yang hanya bisa dilihat teman terdekat.

Kata kunci: FoMO; lifestyle; mahasiswa; dunia maya

#### **PENDAHULUAN**

Fenomena Fear of Missing Out (FoMO) semakin marak di kalangan mahasiswa, terutama dengan perkembangan dunia maya yang semakin pesat. FoMO merupakan fenomena yang sangat relevan di kalangan mahasiswa, terutama dalam konteks dunia maya. Meskipun dapat memberikan manfaat dalam hal keterhubungan sosial dan akses informasi, FoMO juga memiliki risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas mahasiswa (Nolan, 2021; Li et al, 2020). Penggunaan media sosial berlebihan oleh mahasiswa juga dapat memperburuk

fenomena ini jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk mengelola FoMO dengan bijak agar tetap dapat menjalani kehidupan akademik dan sosial dengan seimbang (Babiker et al, 2023).

FoMO merupakan perasaan cemas atau takut tertinggal informasi, pengalaman, atau momen berharga yang dialami orang lain, terutama yang ditampilkan di media sosial. FoMO dapat memicu dorongan untuk terus memantau aktivitas orang lain secara online, merasa kurang puas dengan kehidupan sendiri, serta mengalami kecemasan social (Yaputri et al, 2022; Franchina et al, 2018; Mao & Zhang, 2023). Fenomena ini berkaitan dengan faktor psikologis seperti harga diri, kesejahteraan subjektif, kecemasan, dan tipe kepribadian (Harrigan et al, 2021; Risdyanti et al, 2019; Elhai et al, 2016).

Dengan mengadopsi kerangka perilaku konsumen, perilaku media sosial dapat dipahami sebagai bentuk kompensasi, yaitu mekanisme penanggulangan untuk menghadapi masalah-masalah utama dalam kehidupan perilaku media sosial (Ehrenberg et al, 2008; Kircaburun et al, 2018; Dwivedi & Lewis, 2020). FoMO dapat berdampak positif pada kesejahteraan jika mengarah pada penggunaan media sosial yang mendorong hubungan sosial bervibes positif (Roberts & David, 2019; Shi et al, 2024). Kesepian memengaruhi seberapa banyak orang menggunakan media sosial (Buglass et al, 2017; Azad & Sing, 2024). Ajaran agama dan budaya yang berlaku di Indonesia memegang peranan penting dalam membentuk dan mengantisipasi sikap tersebut (Praptiningsih et al, 2024).

FoMO mengacu pada dampak FOMO terhadap gaya hidup dan perilaku kaum muda, dimana sering kali sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial dan hubungan teman sebaya, kerap mengalami FOMO dalam berbagai aspek kehidupannya. Berikut beberapa pengaruh FOMO terhadap gaya hidup:

- 1) Acara Sosial: merasa terdorong untuk menghadiri pesta, pertemuan, atau acara sosial meskipun mereka tidak terlalu

- tertarik, hanya untuk menghindari ketinggalan pengalaman sosial atau ditinggalkan.
- 2) Media Sosial: dengan maraknya platform media sosial, remaja terus-menerus memeriksa feed mereka untuk terus mendapatkan informasi terbaru tentang apa yang dilakukan teman-temannya. Rasa takut ketinggalan acara menarik atau populer yang dibagikan di media sosial dapat memengaruhi perilaku online mereka.
  - 3) Tren dan Fesyen: FOMO juga dapat memengaruhi pilihan remaja terhadap fesyen, musik, dan tren budaya lainnya. Mereka merasa tertekan untuk mengikuti tren terkini agar tidak merasa ketinggalan zaman.
  - 4) Teknologi dan Gadget: remaja mengalami FOMO terkait dengan gadget, aplikasi, atau kemajuan teknologi terkini. Ketakutan akan ketertinggalan dalam hal adopsi teknologi dapat mendorong pilihan mereka dalam hal perangkat dan platform online.
  - 5) Pengalaman dan Aktivitas: FOMO dapat memengaruhi remaja untuk terlibat dalam berbagai aktivitas atau mencoba pengalaman baru, meskipun aktivitas tersebut mungkin tidak sejalan dengan minat pribadinya, hanya untuk menghindari ketinggalan apa yang dilakukan teman-temannya.

Beberapa kaum muda menghindari FoMO dengan menyendiri. Perilaku menyendiri dalam interaksi sosial menimbulkan rasa takut ketinggalan dan mengganggu kesehatan mental. Penghindaran sosial dan kesepian sebagai kesendirian yang tidak ditentukan sendiri dapat mengaktifkan rasa takut tertinggal, yang dapat memengaruhi kesehatan mental (Liu et al, 2023; Bloeman & De Coninck, 2020; Przybylski et al, 2013; O'Day & Heimberg, 2021). Individu yang mengalami FoMO rentan terhadap berita, yang menyebabkan mereka memprioritaskan perlindungan terhadap informasi, sehingga memengaruhi individu yang terinformasi (Wu-Ouyang, 2024; Xu et al, 2024; Li et al, 2024). Cara ampuh untuk mengantisipasi tak terperangkap hubungan beracun adalah dengan mencintai diri sendiri (Praptiningsh & Putra, 2021; Praptiningsih et al, 2024).

Banyak penelitian tentang FOMO, namun penelitian ini fokus membahas gaya hidup mahasiswa di dunia maya yang mengalami FOMO. Fashion dan cara berpakaian dapat berfungsi sebagai alat komunikasi bagi remaja dan dewasa muda dalam mengekspresikan identitas sosial mereka. Melalui pilihan gaya berpakaian, seseorang dapat menunjukkan kepribadian, status sosial, nilai-nilai, serta afiliasi dengan kelompok tertentu (Agasta & Praptiningsih, 2025). FoMO sejatinya hanya memengaruhi sebagian orang akibat aktivitas orang lain yang membuatnya merasa iri karena postingan di media sosial (Oberst et al, 2017; Andreassen et al, 2016; Fuster et al, 2017; Barry & Wong, 2020). Oleh karena itu, perlu peningkatan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan pendidikan yang efektif agar mahasiswa mampu memilih kecanduan yang merugikan secara finansial (Solehudin et al, 2024).

Penelitian lain tentang FoMO Scale versi Indonesia memiliki sifat psikometrik yang memadai untuk mengukur perilaku daring remaja Indonesia (Kim, Seo & David, 2015; Odaci & Çirkırçlı, 2014; Kaloeti et al, 2021). Saat ini marak fenomena di mana orang ingin memiliki barang yang mirip dengan teman sebayanya agar dapat mengikuti perkembangan sosial (Wegmann et al, 2017; Scott & Woods, 2018; Siegel & Wang, 2018). Generasi muda memainkan peran penting dalam pembuatan konten kreatif, pemasaran digital, dan industri kreatif lainnya yang mendapatkan momentum di pasar global. Dengan menggunakan media sosial dan platform online, generasi muda dapat menciptakan merek, memasarkan produk atau layanan, dan menjalin hubungan bisnis di seluruh dunia (Mil & Praptiningsih, 2025). Memanfaatkan pendidikan digital, konten kreatif, dan diskusi yang bermakna dapat membantu membentuk kembali persepsi sosial, menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dan realistik (Nabilah, Praptiningsih et al, 2024). Banyak anak muda secara tak sadar menjadi toksik dengan melakukan stereotip dan generalisasi. Oleh karena itu, kemampuan kepemimpinan harus dievaluasi berdasarkan pengalaman dan kompetensi individu, bukan berdasarkan prasangka (Lisnawati, Praptiningsih et al, 2024). Orang toksik

adalah orang yang memiliki kecenderungan untuk mengatur kehidupan orang lain agar menuruti kemauannya, bahkan mengatur kehidupan orang lain (Praptiningsih, Mil, & Hayat, 2024).

## **METODOLOGI**

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan melibatkan lima mahasiswa sebagai partisipan. Melalui wawancara mendalam dan pengamatan, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi pengalaman individu terkait FOMO, serta menelisik keterkaitan fenomena ini pada aktivitas sehari-hari dan interaksi sosial mereka.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan wawancara mendalam dengan para informan, bahwa seluruh informan memiliki dua akun instagram yang berbeda dengan tujuan posting kegiatan, dan akun satunya untuk stalking.

Media sosial berguna menelisik kehidupan aktor idola dan influencer. Ilmu dari influencer yang berbeda, sehingga mampu explore pengetahuan yang berbeda, sehingga saya dapat ilmu yang lumayan. Selain itu juga, digunakan untuk media berbisnis, serta info isu sosial politik dan olahraga. Penggunaan media sosial para informan rata-rata lima hingga delapan jam sehari. Bahkan ada informan IR yang aktif bermedia sosial sejak duduk di bangku SD. Konten yang sering diakses adalah olahraga, politik, kuliner, gunung, dan hiburan (tiktok). Selain instagram, juga aktif di twitter, facebook. IR yang jarang menonton televisi kecuali acara pertandingan bola ini, pernah membuat konten video naik gunung di dua gunung populer di Indonesia.

Media sosial sangat bermanfaat bagi NZ, karena dapat menghibur. Informan yang mengakses media sosial rata-rata selama 12 jam sehari ini, memiliki dua akun instagram. Akun utama membagikan hal-hal seru dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan akun kedua hanya terdiri dari teman dekat saja. Informan N mengaku menggunakan media sosial selama ia memegang handphone, kapanpun bisa akses media sosial. Alasan aktif bermedsos karena ingin tahu berita viral infotainment dan kabar

yang terjadi di Palestina. N juga sering membuat konten tiktok tentang a day ini my life dan dance. N memiliki dua akun, akun kedua hanya terbatas para sahabat yang jumlahnya tidak lebih dari 50 orang.

Informan AT merasa FoMO saat selalu fokus dengan pemikiran orang lain, misal saat posting insta story, berkali kali cek dan recheck takut ada yang salah, karena khawatir jadi bahan pembicaraan orang lain. Sedangkan di second account, dirinya merasa lebih bebas. Mengaku FoMO jika melihat teman-temannya ikut seminar. AT tertarik postingan potong poni ala korea, update BTS, sehingga menjadikan Instagram sebagai referensi. Sedangkan FH mengaku rutin upload konten tiga kali seminggu tentang keluarga. Berbanding terbalik dengan pernyataan FH, IR justru menganggap postingan keluarga merupakan masalah pribadi yang tidak ingin diumbar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima informan mahasiswa, sebagian besar mahasiswa merasakan tekanan sosial untuk selalu up-to-date dan mengikuti tren di dunia maya, yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan, yakni: 1) Merasa cemas jika tidak mengakses media sosial selama lebih dari 6 jam. 2) Sering mengecek notifikasi meskipun sedang dalam kegiatan akademik. 3) Media sosial mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih kegiatan akademik atau sosial. 4) Merasa perlu membagikan pengalaman mereka di media sosial agar tidak merasa tertinggal. Sedangkan kegelisahan yang dialami akibat FoMO dalam bermedia sosial, muncul dalam berbagai bentuk, seperti: pertama, tekanan untuk selalu online, agar tetap terlihat aktif dan up-to-date. Kedua, takut ketinggalan tren akademik, seperti seminar, kursus online, atau kompetisi. Dan ketiga, kecemasan sosial, terutama takut tertinggal informasi tentang aktivitas teman-teman di media sosial.

Di era digital FoMO telah berkembang menjadi gaya hidup bagi sebagian mahasiswa. Para informan merasakan vibes positif ketika bermedia sosial, bahkan telah menjadi gaya hidup dengan mengadopsi kebiasaan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. FoMO sebagai lifestyle

<b>FoMO sebagai lifestyle</b> (Jawaban Informan)	<b>Tujuan &amp; Cara</b> (Jawaban Informan)
Selalu memperbarui status media sosial	untuk menunjukkan keikutsertaan dalam suatu tren atau acara
Mengikuti berbagai komunitas online	agar tidak tertinggal dari berita atau event penting
<b>FoMO sebagai lifestyle</b> (Jawaban Informan)	<b>Tujuan &amp; Cara</b> (Jawaban Informan)
Memonitor notifikasi secara terus-menerus	untuk memastikan selalu mendapatkan informasi terbaru
Membagikan aktivitas sehari-hari	<i>update</i> aktivitas akademik maupun sosial
Mengikuti akun edukatif dan inspiratif	untuk mendapatkan informasi terbaru
Menjaga koneksi dengan teman dan komunitas	melalui fitur <i>story</i> dan <i>direct message</i>

Sumber: olahan penulis, 2025

Media sosial meskipun mampu memberikan manfaat seperti memperluas wawasan dan meningkatkan koneksi sosial, juga dapat berdampak negatif jika tidak dikendalikan dengan baik. Para informan juga mengakui bahaya FoMO yang berakibat negatif bagi mahasiswa cukup signifikan, baik secara psikologis maupun sosial, meliputi:

Tabel 2. Bahaya FoMO Akibat Media Sosial

<b>Bahaya FoMO Akibat Medsos</b> (Jawaban Informan)	<b>Penyebab &amp; Akibat</b> (Jawaban Informan)
Stres dan kecemasan	akibat tekanan untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru

Gangguan konsentrasi akademik	karena terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial
Penurunan kualitas interaksi sosial di dunia nyata	karena lebih fokus pada interaksi digital
Membandingkan diri dengan orang lain	pencapaian akademik, sosial, atau gaya hidup <i>hedon</i>
Merasa tekanan untuk selalu mengunggah konten	agar tetap relevan di lingkungan sosial
Menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial	mengurangi produktivitas akademik
Selalu memonitor tren dan gaya hidup orang lain	suburnya tren di kalangan teman sebaya

Sumber: olahan penulis, 2025

Berdasarkan wawancara dengan informan AT, FH, IR, NZ, dan N, dapat disimpulkan bahwa pertama, ada kesadaran terhadap FoMO terutama terkait dengan eksistensi, namun beberapa informan tidak terlalu terpengaruh dan mengatasi dengan cara tertentu. Kedua, konsep Self terkait identitas diri diekspresikan melalui media sosial, dengan beberapa informan menciptakan dua akun untuk mengekspresikan dua sisi dari diri mereka. Pemikiran tentang diri sendiri juga tercermin dalam pemilihan konten dan interaksi di media sosial. Ketiga, konsep Society, terjadi interaksi dengan followers, dan fitur close friends diaktifkan oleh beberapa informan untuk berbagi konten yang lebih personal. Pemilihan akun yang diikuti didasarkan pada minat pribadi, edukasi, dan kebutuhan konten tertentu. Keempat, interaksi dengan followers cenderung positif, dan beberapa informan aktif dalam merespon komentar dan menyukai konten followers. FoMO tidak hanya menjadi fenomena psikologis tetapi juga berpengaruh pada pola perilaku dan gaya hidup pengguna media sosial. Penelitian ini

mendukung temuan sebelumnya tentang hubungan FoMO dengan penggunaan media sosial yang bermasalah.

## **SIMPULAN**

Semua partisipan memiliki dua akun Instagram. Akun kedua mereka digunakan secara anonim untuk memantau unggahan teman yang memicu perasaan FoMO. Di dunia maya, terdapat dua kategori mahasiswa. Kategori pertama menggunakan akun kedua untuk diam-diam mengamati kehidupan teman tanpa diketahui. Sementara itu, kategori kedua memanfaatkannya untuk mengikuti selebriti serta melihat unggahan yang hanya dapat diakses oleh lingkaran pertemanan terdekat. Untuk menghindari bahaya negatif FoMO, mahasiswa dapat menerapkan beberapa strategi berikut: 1) Membatasi waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu produktivitas akademik dan sosial. 2) Fokus pada pengalaman nyata dengan lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan teman dan lingkungan sekitar. 3) Menentukan prioritas agar tidak merasa harus mengikuti semua tren atau acara yang ada di dunia maya. 4) Lebih peka akan kebutuhan dan kesejahteraan diri sendiri dengan cara self-love atau mencintai diri sendiri.

Pentingnya peran media sosial dalam membentuk gaya hidup kaum muda tercermin dalam ketergantungan yang diakui oleh partisipan. Penggunaan media sosial yang rutin, bahkan setiap hari dalam hitungan jam, dapat membentuk kebiasaan yang disebut ketergantungan. Kondisi ini memunculkan keresahan ketika akses terhadap media sosial terhenti, menciptakan lingkungan yang mendukung timbulnya FoMO.

Implementasi solusi yang bijak dapat membantu mengurangi dampak negatif dan memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan mental kaum muda pengguna media sosial di Indonesia, sehingga menghadapi tekanan sosial ini dengan cara yang sehat. Orang tua, pendidik, dan mentor dapat berperan dalam membina komunikasi terbuka dan membantu mengembangkan rasa identitas dan kepercayaan diri yang melampaui pengaruh eksternal. Mendorong pendekatan yang

seimbang dalam interaksi sosial dan meningkatkan kesadaran diri dapat membantu mengurangi dampak negatif FoMO.

## **BAB 10**

### **Organized Interests dan Tanggapan Masyarakat Madani dalam Penanganan Radikalisme Agama Di Indonesia**

Nurdin Sibaweh

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis organized interests dan tanggapan masyarakat madani dalam penanganan radikalisme agama di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka, dengan menjadikan teori organized interests dari Aeron Davis sebagai kerangka teoritis yang menawarkan kerangka kerja untuk menganalisis dan membandingkan kepentingan terorganisir dalam kekuasaan dan proses kebijakannya. Penelitian ini juga menekankan pada aspek pengamatan berbagai informasi di media yang mendukung penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan penanganan radikalisme agama di Indonesia masih dilakukan secara parsial, dan memiliki kecenderungan memperkuat posisi negara atas tafsir radikalisme agama, serta cenderung mengabaikan pandangan masyarakat madani.

Kata kunci: radikalisme agama; masyarakat madani; negara; kebijakan.

#### **PENDAHULUAN**

Fenomena radikalisme agama di Indonesia menjadi wacana tersendiri yang banyak menarik perhatian pakar, peneliti, media, dan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat madani. Pemerintah sendiri dalam beberapa kebijakannya memberikan perhatian serius terhadap fenomena radikalisme agama. Dalam hal ini, Pemerintah melalui Joko Widodo, saat menjadi Presiden menegaskan untuk meningkatkan keseriusan menangani radikalisme agama di Indonesia dengan melibatkan banyak pihak dari unsur masyarakat dan melibatkan lintas kementerian dalam upaya melakukan deradikalisasi. Selain itu, Mahfud MD sebagai

Menkopolhukam, dalam konteks ini mengatakan bahwa paham dan gerakan radikalisme ingin mengganti ideologi dan dasar negara melalui gerakan melawan aturan, dan mengacaukan konstruksi berpikir dari generasi baru masyarakat Indonesia ([www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id), 15/11/2019).

Terkait fenomena radikalisme ini, sejak era reformasi sampai saat ini, keyakinan masyarakat Indonesia terhadap adekuasi dan relevansi Pancasila dirasakan terus berkurang, karena dinamika perubahan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, terjadinya perubahan adanya keyakinan yang menurun karena adanya kesenjangan yang lebar antara idealitas Pancasila dengan realitas kehidupan. Sementara secara eksternal, menurunnya keyakinan tersebut karena intensitas dan ekstensivitas gelombang deras globalisasi yang memperkuat impact nilai-nilai budaya dari luar, yang kemudian membawa dampak pluralisasi, polarisasi, dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan (BPIP, 2019).

Diantara fenomena terkini mengenai radikalisme agama dalam lima tahun terakhir, yaitu aksi pelaku bom bunuh diri yang terjadi di gerbang Gereja Katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Maret 2021. Aksi ini dipandang sebagai peristiwa yang menandakan masih berkembangnya radikalisme agama dan eksisnya kelompok-kelompok gerakan radikal di Indonesia. Beberapa media nasional, pasca terjadinya bom bunuh diri Gereja Katedral Makassar tersebut, memberitakan cukup intensif dengan ragam daksi judul dan isi beritanya.

Headline koran Kompas tanggal 29 Maret 2021 menyajikan judul berita 'Usut Tuntas Jaringan Teroris Bom Makasar' (Kompas 29/3/2021), dan halaman duanya, menyajikan berita dengan judul 'JAD dan Bom Bunuh Diri di Makasar' (Kompas 29/3/2021). Sementara pada tanggal 30 Maret 2021, halaman pertama koran Kompas menyajikan berita dengan judul 'Jaringan Teroris Sasar Keluarga Muda' (Kompas 30/3/2021), dan halaman tiga, menyajikan berita dengan judul 'Terorisme Tak Surut Saat Pandemi' (Kompas 30/3/2021). Di tanggal berikutnya, 31 Maret 2021, halaman pertama koran Kompas menyajikan berita

'Pemberantasan Terorisme, Lemahnya Ketahanan Ideologi Jadi Pemicu' (Koran Kompas 31/3/2021). Adapun headline koran Republika, dengan diksi yang berbeda juga menyajikan berita tanggal 29 Maret 2021 dengan judul 'Gereja Diamankan' (Republika 29/3/2021), dan tanggal 30 Maret 2021, dihalaman pertama, namun bukan headline, koran Republika menyajikan berita dengan judul 'Kelindan Jolo-Makasar' (Republika 30/3/2021).

Beberapa pemberitaan tersebut, hanya untuk menunjukkan kondisi fenomena terkini yang disorot sebagai radikalisme agama di Indonesia. Penelitian Sibaweh dan Rusadi (2021) mengenai analisis resepsi terhadap pemberitaan mengenai aksi bom bunuh diri Gereja Katedral Makasar pada koran Kompas, menunjukkan khalayak berada di oppositional position terhadap pelakunya sebagai teroris dan kelompok Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bunuh diri, tidak bisa langsung dialamatkan kepada agama tertentu.

Mengenai fenomena radikalisme agama ini dan memperkuat resepsi oppositional position khalayak, kajian mengenai hal ini menunjukkan terdapat ragam alasan pemantik gerakan radikal, dimana ada faktor sosial, budaya, ekonomi dan bahkan aliran tertentu dalam pemikiran politik, baik skala nasional maupun skala yang lebih luas di tingkat global dimana mulai menunjukkan gerakan respon terhadap ketidakadilan. Dalam kerangka politik, lahirnya gerakan radikalisme yang menjadikan agama sebagai tameng merupakan efek dari terbuka lebarnya kran demokratisasi setelah reformasi yang kemudian memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu gerakan radikal (Fealy dan Hooker, 2006; Sibaweh dan Rusadi, 2021).

Dalam menangani radikalisme agama, Pemerintah Indonesia antara lain membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dimana tugas utamanya melakukan pembinaan ideologi Pancasila dan menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian regulasi atau kebijakan yang tidak sesuai dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga,

pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Akan tetapi, kebijakan BPIP belum membumi dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila, termasuk dalam upaya menangani radikalisme agama. Bahkan ada kecenderungan menyudutkan agama tertentu, seperti dalam kasus tim Paskibraka tahun 2024 yang diminta melepaskan Jilbab (metronews.com, 15/8/2024).

Diantara tugas BPIP yaitu membantu Presiden untuk merumuskan arah kebijakan dalam hal pembinaan ideologi Pancasila. Dalam konteks merumuskan arah kebijakan tersebut, BPIP perlu memperhatikan aspirasi dan pandangan dari kelompok masyarakat madani. Selain itu, arah kebijakan perlu memperhatikan aspek kesetaraan, dan isu-isu kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, dalam konteks komunikasi, perlu dilihat juga bagaimana media memberikan perhatian dan memberitakan kebijakan-kebijakan serta kegiatan BPIP, khususnya mengenai penanganan radikalisme agama. Hal ini, dikarenakan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, sering dikaitkan dengan radikalisme agama dan upaya pemerintah untuk menanganinya.

Peristiwa bom bunuh diri Gereja Katedral Makassar mengonfirmasi memudarnya keyakinan warga terhadap relevansi Pancasila. Hal ini tentu menjadi tantangan pemerintah, khususnya BPIP dalam penanganan radikalisme agama. Terorisme, yang dilakukan oleh penganut agama apapun tentu saja tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara, yang sangat menghargai kebinaaan. Tambunan dan Bakti (2016) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara multikultural dengan kelompok etnis yang telah berkembang identitas budayanya selama berabad-abad yang lalu.

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mayor, bagaimana organized interests dan tanggapan masyarakat madani dalam kebijakan penanganan radikalisme agama di Indonesia? Adapun pertanyaan minornya, mengapa masyarakat madani melakukan reaksi terhadap kebijakan penanganan radikalisme

agama? Apakah kebijakan penanganan radikalisme agama memiliki keberpihakan terhadap kesetaraan dan mengurangi kesenjangan?

Dalam menganalisis suatu kebijakan, di tengah periode ketidakpastian dan demokrasi saat ini, Davis (2019) menawarkan kerangka kerja untuk menganalisis dan membandingkan organized interests dalam kekuasaan dan proses pembuatan kebijakan. Davis menekankan kekuatan civil society dalam melakukan komunikasi politik. Di sisi lain, terdapat kelompok status quo memiliki akses yang mudah kepada kekuasaan dan mendapatkan porsi pemberitaan yang memadai, dibandingkan kelompok luar yang sulit memengaruhi kebijakan dan mendapatkan porsi liputan media. Namun, kondisi terkini, potensi organized interests dari luar tampak kuat membawa perubahan secara progresif. Dalam hal ini, Davis menyajikan mengenai gerakan sosial dalam bentuk media baru berbasis teknologi sebagai gerakan berpengaruh dalam mendorong suatu kebijakan.

Davis (2019) menjelaskan setidaknya ada dua alasan mengenai adanya komunikasi politik oleh kelompok civil society, di luar lembaga formal dan pemerintahan. Pertama, negara dan partai politik tidak beroperasi dalam kekosongan sosial tetapi muncul dan mengembangkan kebijakan dalam menanggapi kepentingan terorganisir yang lebih luas dan opini publik. Kedua, organisasi tradisional dan media politik telah kehilangan legitimasi, dukungan dan kekuasaan di masyarakat. Hal ini, pada akhirnya menyebabkan berkembangnya organized interests yang mampu mengintervensi kebijakan, dan berdampak terhadap politik di semua tingkatan.

Dari aspek bisnis pada abad kedua puluh, kelompok organized interests menyadari kebutuhan untuk lebih proaktif secara politik mengelola citra publik dan mengembangkan strategi lobi, serta campur tangan memanfaatkan akses politik (Marchand, 1998; Mirowski dan Plehwe, 2009; Mizruchi, 2013). Di sisi lain, berbagai kelompok kepentingan non-corporate muncul untuk menempatkan kasus mereka sendiri (Amoore, 2005; Jordan dan

Moloney, 2007; Beyers et al., 2008). Dengan demikian, banyak organisasi dalam masyarakat sipil telah datang untuk bersaing dalam 'public relations democracy' (Davis, 2002). Pada saat yang sama organized interests berkembang, sementara lembaga tradisional dan formal kehilangan koneksi publik, kepercayaan dan pengaruh (Putnam, 2000; Hay, 2007; Mair, 2013). Selain itu, partai-partai kehilangan basis pendukung setia mereka, dan pemerintah kehilangan kepercayaan. Demikian juga media yang telah berusaha mengelola berita karena pendapatan dan konsumen turun secara signifikan, sementara persaingan meningkat di beberapa media (Anderson et al, 2015; Davis, 2017b; Reuters, 2017). Menurut Davis (2019) kerangka kerja yang ditetapkan di sini berfokus pada dua pertanyaan. Pertama, jenis organized interests apa yang mendominasi politik dan pembuatan kebijakan. Kedua, jenis dan kombinasi sumber daya apa yang memungkinkan organized interests melakukannya?

Dalam pluralist political theory (Dunleavy dan O'Leary, 1987; Held, 2006), negara diasumsikan sebagai arbiter netral yang menyeimbangkan kepentingan sosial yang bersaing. Dalam studi Dahl (1961) tentang pemerintahan, ia menemukan bahwa kelompok-kelompok kuat lebih dihargai tapi tidak ada yang dapat terus mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian, kepemimpinan tunduk pada pembaruan, dan perubahan substansial diberlakukan dari waktu ke waktu. Kondisi sosial-politik kekuasaan saat ini berada dalam demokrasi yang matang, dan potensi kepentingan luar yang terorganisir untuk terus membawa perubahan progresif tampak kuat. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya konflik di beberapa bidang kepemimpinan, dari politik dan bisnis hingga media dan budaya (Naim, 2013). Untuk menjelaskan hal ini, Davis (2019) mengemukakan bahwa partai politik mapan mengalami perpecahan, baik perpecahan internal, maupun dalam bentuk lahirnya partai baru. Dalam era keterbukaan, interest groups telah berkembang, ada yang menyusup ke partai politik dan ada juga yang membentuk lembaga politik formal, seperti demonstrasi Gerakan 15-M di Spanyol, suatu gerakan melawan kesenjangan pendapatan dan korupsi, dimana

gerakan ini kemudian membentuk partai politik dan bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Dengan memperhatikan fenomena menguatnya kepentingan luar yang terorganisir dan interest groups yang telah dijelaskan sebelumnya, Davis (2019) menjelaskan mengenai pandangan sarjana kritis yang melihat organized interests dari status quo juga menguat pada beberapa dekade terakhir. Kecenderungan ini disebut Schattsneider (1961) sebagai 'mobilization of bias', yang telah menghentikan jalur perubahan kemajuan. Lebih lanjut, Davis (2019) mengurai tiga pandangan mengenai bagaimana organized interests dari status quo beroperasi. Pertama, pandangan (pos) Marxis, dari Miliband (1969) dan Poulantzas (1975) ke Crouch (2011) dan Streek (2017), bahwa negara tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi arbiter netral menyeimbangkan berbagai kepentingan, tetapi justru sebaliknya, mengakuisisi tuntutan kelas kapitalis. Kapitalisme membawa investasi, pekerjaan, dan penerimaan pajak. Bahkan para pemimpin politik mencoba menarik perusahaan besar dengan pajak dan rezim peraturan yang menguntungkan (Lindblom, 1977; Offe, 1984; Cerny et al., 2005). Kedua, pandangan mengenai dua dimensi 'faces of power', yaitu membuat keputusan akhir dan memutuskan apa yang masuk ke agenda politik (Bachrach dan Baratz, 1962). Kemudian, Lukes (2005) berpendapat bahwa ada dimensi ketiga kekuasaan, yaitu cultural atau ideological. Ketiga, pandangan yang berfokus pada kelompok elit (cooperative and self-serving elites) yang bekerja sama untuk memajukan kepentingan mereka.

Davis (2019) mengemukakan bahwa akses dan representasi media sepenuhnya condong ke arah organized interests yang kuat. Pada konteks ini, berbagai literatur sangat konsisten menyebutkan hampir semua survei konten berita mengungkapkan bahwa powerful sources, baik dari lembaga pemerintah maupun sektor korporasi, lebih dominan dalam berita arus utama. Mereka adalah sumber yang paling banyak dikutip, dan yang paling banyak dibahas dalam berita, serta cenderung memberikan kontribusi

terbesar siaran pers dan konten berita lainnya (Bennet, 1990; Philo, 1995; Tiffen et al, 2014; Konwles et al, 2017). Sampai disini, Davis (2019) mengajukan pertanyaan, mengapa sumber-sumber seperti itu mendominasi news agendas dan story frames? dan mengajukan pandangan mengenai akses dan sumberdaya interest group dalam sumber daya organisasi, ekonomi, dan simbolik. Pertama, sumber daya organisasi atau lembaga besar, dimana mereka sebagai perusahaan publik, menurut Fishman (dalam Davis, 2019) memiliki 'bureaucratic affinity' dengan organisasi media. Pembuatan berita secara tradisional telah dikelola melalui berita dan rutinitas yang telah ditetapkan. Praktik semacam itu jelas menguntungkan institusi besar yang berorientasi media. Kedua, sumber daya ekonomi, dalam hal ini Pemerintah dan kelompok bisnis besar memiliki sarana ekonomi yang cukup besar untuk mendapatkan liputan media. Mereka memiliki operasi komunikasi yang luas dengan anggaran dan staf profesional, yang dapat membanjiri media dengan konten berita yang telah disiapkan setiap hari. Perusahaan multinasional terbesar menghabiskan ratusan juta setiap tahun untuk kegiatan promosi mereka, termasuk pada 'advocacy advertising' sebagaimana diungkapkan Miller dan Dinan (2008) dan Sussman (2011) dalam Davis (2019). Ketiga, sumber daya simbolis, yang memisahkan kepentingan yang kuat dan lebih lemah. Davis (2019) menyajikan karya Hall et al (1978) yang menjelaskan bahwa wartawan, dalam pencarian mereka untuk interview 'objektif' dan 'otoritatif', secara otomatis mencari tokoh-tokoh dan organisasi yang kalah,

Menurut Davis (2019), kelompok-kelompok yang terorganisir yang lebih lemah dan lebih periferal dalam masyarakat telah beradaptasi untuk menemukan cara-cara menyalurkan kekurangan sumber daya mereka. Mulai dengan organisasi dan konsolidasi untuk memungkinkan kelompok-kelompok progresif lebih lemah bisa berkompetisi. Selanjutnya, Davis (2002) melanjutkan bahwa kelompok miskin sumber daya bisa meningkatkan kekurangan keuangan mereka dengan penggunaan yang ekstensif akan sumber daya manusia. Persatuan-persatuan, kelompok-kelompok kepentingan, dan gerakan-gerakan sosial,

memiliki sejumlah besar anggota sukarela yang termotivasi yang bersedia bekerja dengan gratis untuk kampanye.

Dalam pandangan Davis (2019) pada dekade terakhir, organized interests mengikuti dua cara komunikasi yang berbeda. Pada satu sisi, menggunakan gerakan sosial baru yang dinamis terbentang untuk menantang status quo, dimana kampanye mereka bisa terlihat, menggunakan jaringan media sosial yang besar dan menggerakkan pemberitaan media yang luas. Mereka membuat pengaruh yang signifikan pada diskursus publik tetapi puncaknya banyak gagal untuk mencapai perubahan politis yang substansial yang mereka harapkan. Pada sisi lain, kepentingan-kepentingan mapan menjadi lebih mengakar dan sukses dalam memelihara kepentingan-kepentingan mereka. Mereka mengeksplorasi jaringan-jaringan swasta mereka dan mempekerjakan perantara ahli untuk mengerjakan sistem politik di luar pandangan publik. Dalam masa naiknya krisis finansial dan resesi ekonomi global 2007-2008, sejumlah gerakan protes baru menjamur di mana-mana.

Gerakan protes ini erat dikaitkan dengan ketidakadilan, eksplorasi, dan represi. Meski masa ekonomi buruk bagi banyak sektor, korporasi transnasional dan pemberi modal muncul lebih berkuasa dan lebih makmur daripada sebelumnya. Dalam hal ini, Piketty (2014) dan Streeck (2017) dalam Davis (2019) mengatakan ketidakadilan menganga dan gap antara konglomerat dan yang lainnya melebar. Bahkan dewan internasional seperti Davos, PBB dan OECD, mengakui bahwa sistem kapitalis global tidak lagi stabil atau fair. Serangan media pada bankir, sektor finansial dan CEO berbayar-lebih adalah biasa. Di Islandia, teriakan publik berubah dalam 'pots and pans revolution' (2009-2011) yang membawa pada mundurnya pemerintah, dan pengadilan serta pemerjaraan beberapa pemimpin korporasi. Kemudian, Davis (2019) menjelaskan mengenai beberapa gerakan organized interests setelah 2011, seperti the anti-capitalist Indignados di Spanyol, gerakan The OWS (Occupy Wall Street di New York, Arab Spring

di Tunisia, Syiria, Libya dan Yaman, serta Umbrella Revolution di Hongkong.

## **METODOLOGI**

Pendekatan kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu suatu penelitian yang mendalam, berorientasi pada kasus dari sejumlah kasus kecil yang berupaya menemukan data secara terperinci atau menemukan bagaimana sesuatu terjadi yang bertujuan membuat suatu fakta dapat dipahami (Ragin dan White, 2004; Morisan, 2019). Penelitian ini bersifat studi kepustakaan, yang memfokuskan pada pengumpulan data dan melakukan analisis secara kritis terhadap literatur yang sesuai, baik artikel jurnal, buku, laporan, berita media maupun publikasi ilmiah lainnya (Turcios et al., 2012), sehingga sumber data dilakukan dengan kajian literatur dari buku, laporan, dokumen, artikel jurnal dan pemberitaan di media. Rincian kegiatan dalam studi kepustakaan ini meliputi pengumpulan data pustaka dari berbagai sumber, kemudian membaca dan mencatatnya, dilanjutkan dengan mengolah data serta informasi yang dipandang sesuai dan dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan mayor dan minor penelitian.

Penelitian ini menggunakan teori organized interests dari Aeron Davis dengan beberapa konsepnya, yaitu political communication in civil society, politics and policy-making, dan the growing gap between public and private (Davis, 2019). Penelitian ini juga menekankan pada aspek pengamatan berbagai informasi di media yang mendukung penelitian. Dalam operasionalisasinya, penelitian ini menjadikan teori organized interests sebagai kerangka teoritis yang memandu menganalisis kebijakan penanganan radikalisme agama di Indonesia. Studi kepustakaan yang ada menjadi data untuk mendukung penggunaan teori tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **Organized Interests dalam Kebijakan Penanganan Radikalisme Agama**

Penanganan radikalisme agama telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan membentuk lembaga atau badan yang tugas dan fungsinya diarahkan kepada hal tersebut. Diantara badan negara yang menangani radikalisme agama di Indonesia, yaitu BPIP. Badan ini dibentuk untuk merevisi dan menyempurnakan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang dibentuk pada tahun 2017 karena dinilai bekerja tidak efektif yang disebabkan kewenangan UKP-PIP masih sangat terbatas, dan cenderung sulit untuk bekerja serta berkoordinasi dengan lembaga lain, khususnya lembaga setingkat kementerian. Kesulitan ini sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan fungsi, tugas dan wewenang yang harus dijalankan UKP-PIP. Setelah terjadinya perubahan dari UKP-PIP menjadi BPIP, tugas BPIP mengalami revisi dan penambahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Tugas yang ditekankan kepada BPIP sesuai Perpres No. 7 tahun 2018 bukan hanya membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang menyeluruh dan berkelanjutan. Melainkan ada penambahan tugas, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta mampu memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila, baik itu kepada lembaga tinggi negara kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, maupun komponen masyarakat lainnya.

Dengan adanya pergeseran sekaligus penambahan tugas kepada BPIP, maka terjadi penguatan kelembagaan. Pada konteks inilah, BPIP memiliki kekuatan sekaligus tantangan terhadap masuknya kepentingan tertentu, dalam bentuk organized interests yang berkepentingan terhadap isu radikalisme yang sering disematkan kepada agama tertentu, seperti Islam, dan sering dihadapkan dengan Pancasila dan anti Pancasila. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, karena nilai-nilai luhur Pancasila memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan ajaran Islam. Bahkan para

pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila suatu ideologi bangsa umumnya mayoritas beragama Islam. Tentunya nilai-nilai Alquran dan alhadits serta As-Sunnah yang merupakan sumber ajaran Islam tersebut telah menjadi akar dan sumber inspirasi lahirnya Pancasila. Oleh karena itu, upaya membumikkan nilai-nilai filosofis Pancasila dalam perspektif agama Islam merupakan suatu hal yang niscaya dan strategis. Hal ini agar terjadi sinergi yang harmonis antara ideologi bangsa dengan sumber ajaran Islam yang dianut oleh penduduk mayoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bakti, 2018).

Dengan demikian, apabila ada yang mengemukakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila tidak selaras dengan Islam tentulah sesuatu yang tidak memiliki argumentasi secara fundamental dan cenderung melakukan tafsir suka-suka atau secara parsial. Dalam sejarah jelas dituliskan bahwa Pancasila dihasilkan dari dialektika Panjang dan bernal dari para ulama pendiri bangsa dengan tokoh-tokoh lainnya yang memiliki pemahaman secara nasionalis maupun pemahaman lainnya. Rumusan relasi antara Islam dan Pancasila telah final berdasarkan kesepakatan dari para pendiri bangsa ini. Oleh karena itu, tidak dapat ditentang bahwa rumusan Pancasila yang ada saat ini merupakan puncak kompromi antara keindonesiaan dan Islam (Bakti, 2018).

Penguatan kelembagaan BPIP, yang memberikan rekomendasi terhadap regulasi atau kebijakan yang tidak sesuai dengan Pancasila, harus menjadikan BPIP betul-betul memahami Pancasila atas nilai-nilai yang terkandung di dalam butir-butirnya, sehingga kebijakan yang dirumuskannya tepat. BPIP sebagai lembaga negara juga harus netral dan tidak boleh ada keberpihakan kepada kelompok tertentu. Apabila ada keberpihakan, maka tentu saja akan menodai nilai-nilai Pancasila dan dapat mengganggu orientasi negara, dimana Pancasila merupakan ideologi sekaligus falsafah negara, dan BPIP merupakan lembaga yang melakukan pembinaan terhadap ideologi tersebut. Dalam konteks ini, relevan untuk menyampaikan

pandangan Suseno (2016) mengenai empat prinsip orientasi bagi negara, yaitu kesamaan, kebebasan, solidaritas dan manfaat. Empat prinsip ini bersifat material karena menyangkut hal-hal yang harus tercapai melalui tindakan negara. Prinsip-prinsip ini juga merupakan orientasi normatif untuk menentukan tujuan negara.

Dari keempat prinsip tersebut, BPIP juga harus obyektif dan netral dalam merespon organized interests yang dapat memengaruhi lahirnya kebijakan yang salah, khususnya organized interests status quo. Dalam konteks ini, Davis (2019) telah menjelaskan mengenai pandangan sarjana kritis yang melihat organized interests dari status quo yang menguat pada beberapa dekade terakhir, dan beroperasi melalui tiga cara: Pertama, organized interests pemilik modal dan bisnis atau disebut juga kelompok kapitalisme, membawa investasi, pekerjaan, dan penerimaan pajak; Kedua, memanfaatkan kekuasaan yang memiliki dua dimensi 'faces of power', yaitu membuat keputusan akhir dan memutuskan apa yang masuk ke agenda politik, dan dimensi satu lagi yaitu cultural atau ideological; Ketiga, melalui kelompok elit (cooperative and self-serving elites) yang bekerja sama untuk mengusung kepentingan mereka.

Terkait organized interests status quo sebagaimana disebutkan Davis di atas, setidaknya terdapat dua fenomena yang menarik untuk dianalisa. Pertama, RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dibatalkan, dan kemudian diganti dengan RUU Badan Ideologi Pancasila. RUU HIP merupakan usulan DPR RI dan telah masuk dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020, serta telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2020. Dalam dokumen Renstra BPIP (2020:21) disebutkan dukungan RUU HIP masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020 disampaikan oleh Komisi II DPR RI. Akan tetapi dalam perkembangannya RUU HIP ini kemudian mendapat penolakan dari kelompok masyarakat madani, diantaranya Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad, yang menilai bahwa RUU HIP ini disusun dengan cara

sembrono, dan kurang sensitif dengan pertarungan ideologi. Sementara itu, Pengurus Pusat Muhammadiyah menyampaikan sikap agar RUU HIP tidak dilanjutkan pembahasannya. Hal ini, karena tidak ada urgensi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri secara tegas mendesak DPR RI mencabut RUU HIP karena dianggap dapat mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri Mayjen TNI (Purn) Soekarno mengungkapkan, bahwa apabila RUU HIP disahkan maka berpotensi menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 24/6/2020). Diantara isu krusial penolakan RUU HIP adalah tidak tercantumnya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme, dalam draf RUU HIP.

Kedua, fenomena Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat oleh ketua umum partai politik. Dewan Pengarah BPIP memiliki posisi yang sangat strategis, karena bertugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa BPIP sebagai lembaga negara harus obyektif dan netral dalam merespon organized interests yang dapat memengaruhi lahirnya kebijakan yang salah. Kebijakan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu kebijakan BPIP dalam menangani radikalisme agama. Mengapa radikalisme agama? karena radikalisme diposisikan BPIP sebagai ancaman. Radikalisme dipahami sebagai salah satu fenomena gerakan yang disematkan kepada agama. Berbagai aksi radikalisme atas nama agama dalam dunia Islam memberikan kesan seakan-akan mewajibkan pemeluknya untuk melakukan kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan, sehingga memunculkan opini bahwa agama Islam identik dengan kekerasan. Padahal, menurut Azra (1996), memburuknya posisi negara-negara muslim dalam konflik utara-selatan menjadi penopang utama munculnya radikalisme. Secara historis konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat

kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah sosial-politik.

Sampai disini, penting ditegaskan kembali mengenai sikap obyektif dan netral dari BPIP dalam merespon radikalisme agama, mengingat Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Terhadap Kebijakan Dan Regulasi Yang Bertentangan Dengan Pancasila, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa kebijakan dan Regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila berasal dari: a) data dan informasi BPIP; atau b)permohonan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Pedoman ini, perlu diimplementasikan secara hati-hati, agar data, informasi dan laporan yang disampaikan betul-betul memiliki dasar yang kuat, dan dipastikan obyektif dalam kajian serta tinjauannya, agar kesetaraan diseluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam konteks hukum, dapat terwujud.

Dalam mengimplementasikan kebijakan, BPIP juga perlu memperhatikan strategi komunikasi. Hal ini dikarenakan kegiatan BPIP dan publikasinya kurang membumi dan kurang mendapatkan perhatian media. Oleh karena itu, dalam konteks strategi komunikasi, BPIP perlu mempertimbangkan untuk melibatkan secara optimal kekuatan masyarakat madani dan memanfaatkan media baru. Mengenai perlunya perlibatan kekuatan masyarakat madani atau civil society, Davis (2019) menjelaskan setidaknya ada dua alasan mengenai adanya komunikasi politik oleh kekuatan civil society, di luar lembaga formal dan pemerintahan. Pertama, negara dan partai politik tidak beroperasi dalam kekosongan sosial tetapi muncul dan mengembangkan kebijakan dalam menanggapi kepentingan terorganisir yang lebih luas. Kedua, organisasi tradisional dan media politik telah kehilangan legitimasi, dukungan dan kekuasaan di masyarakat. Hal ini, pada akhirnya menyebabkan berkembangnya organized interests yang mampu mengintervensi kebijakan, dan berdampak terhadap politik di semua tingkatan. Selain itu, dalam strategi komunikasi, BPIP juga perlu melibatkan

kekuatan media, khususnya media baru, agar kebijakan BPIP membumi dan dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak condong ke arah organized interests yang kuat.

Kebijakan dan strategi komunikasi BPIP yang tepat dalam upaya menangani radikalisme agama, saat ini menemukan urgensi, khususnya setelah aksi pelaku bom bunuh diri di Makassar, yang mengonfirmasi bahwa kelompok atau kekuatan radikalisme agama masih eksis. Lembaga negara seperti BPIP yang bertugas merumuskan arah pembinaan ideologi dari nilai-nilai Pancasila, BPIP dituntut memahami secara benar, mengingat Pancasila, menurut Latif (2011) merupakan falsafah negara, dan juga pandangan hidup, serta merupakan ideologi nasional dan ligatur dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dalam merumuskan kebijakan dan strategi komunikasinya, BPIP juga harus memahami apa yang disebut Latif (2011) sebagai historisitas, rasionalitas dan aktualitas Pancasila, karena sebagai landasan moral dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan yang kuat baik dari sisi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya.

### **Tanggapan Masyarakat Madani dalam Kebijakan Penanganan Radikalisme Agama**

Dalam menganalisis dan membandingkan organized interests di kekuasaan dan proses pembuatan kebijakan, Davis (2019) menekankan kekuatan civil society dalam melakukan komunikasi politik. Dalam penelitian ini masyarakat madani digunakan konsep sebagai definisi ulang dari konsep Davis tentang civil society yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid dalam konteks Indonesia. Meskipun perlu diakui bahwa terdapat hal-hal yang berbeda dari kedua konsep tersebut. Istilah Masyarakat Madani dikenalkan oleh Muhammad Naguib Al-Attas. Di Malaysia dipopulerkan oleh Anwar Ibrahim (Bakti, 2004). Sementara di Indonesia, istilah tersebut di populerkan oleh Nurcholish Madjid, dimana kata Madani pada frasa masyarakat madani merujuk pada kota Madinah pada masa nabi Muhammad, suatu city-state yang,

sehingga masyarakat madani bukanlah suatu konsep baru dalam Islam (Bakti, 2005).

Penggunaan istilah masyarakat madani di Indonesia kemudian banyak digunakan oleh pejabat pemerintahan pada masa Soeharto menjadi Presiden sekitar tahun 1990an, dan juga digunakan oleh para sarjana muslim, diantaranya B.J Habibie (Bakti, 2004). Dalam konteks penelitian ini, peneliti memahami masyarakat madani sebagai kelompok masyarakat yang memiliki serta menyampaikan gagasan dan pemikiran guna berkontribusi dalam menata dengan lebih baik kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya terkait kebijakan BPIP yang memosisikan radikalisme sebagai ancaman. Gagasan dan pemikiran tersebut bisa dalam bentuk kritik atau gagasan dan pemikiran secara umum.

Pandangan dari kelompok masyarakat madani dapat disampaikan melalui media maupun gerakan sosial kemasyarakatan, dan hal itu dapat dipandang efektif mengingat perkembangan media menunjukkan memiliki pengaruh dalam perubahan kebijakan. Diskusi tentang media seringkali dikaitkan dengan kekuasaan. Ishadi (2014) menjelaskan bahwa relasi media dan kekuasaan memiliki kecenderungan menjadikan media sebagai instrumen kekuasaan dari rezim yang berkuasa. Cara pandang ini merujuk kepada suatu analisis yang memosisikan fungsi ideologi media sebagai instrumen dalam melakukan rekayasa kesepakatan tatanan sosial politik (Herman dan Chomsky, 1989, dalam Ishadi, 2014). Dalam konteks kepentingan media ini, Davis (2019) menyampaikan bahwa media telah membuat perubahan politik yang substansial, dimana teknologi komunikasi telah membantu mengonfigurasi ulang lanskap politik, dan memungkinkan ide berganti serta aspirasi masuk. Dalam hal ini, Davis menyajikan mengenai gerakan sosial dalam bentuk media baru berbasis teknologi sebagai gerakan berpengaruh dalam mendorong suatu kebijakan.

Di Indonesia, media baru telah berkembang pesat. Bahkan media baru bisa dikatakan telah mampu menggeser media lama.

PricewaterhouseCoopers (PwC) dalam laporan "Perspective from the Global Entertainment and Media Outlook 2017" sebagaimana dikutip dari [www.techno.okezone.com](http://www.techno.okezone.com) (15/04/2019) menyebutkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan koran untuk lima tahun ke depan akan mengalami minus 8,3 persen. Angka ini merupakan yang terendah, mengingat perkiraan untuk media massa konvensional lainnya seperti televisi, radio, dan majalah juga mengalami pertumbuhan minus pada 3 - 6 persen. Di sisi lain, PwC memprediksi media berbasis internet tumbuh 0,5 sampai 6 persen. Fenomena stagnansi hingga penurunan global media cetak dan koran yang terjadi di Eropa dan Amerika sejak 2009, juga semakin nyata terjadi di Indonesia sejak 2015 hingga 2017, bahkan sampai saat ini. Hal ini bisa dilihat dari penutupan secara parsial atau total beberapa media cetak dari kelompok media besar.

Dari data tersebut atas, khususnya terkait kenaikan atau pertumbuhan media berbasis internet mendukung apa yang disampaikan Davis mengenai media baru berbasis teknologi sebagai gerakan berpengaruh dalam mendorong suatu kebijakan. BPIP pernah mendorong penguatan Lembaga dengan mengusulkan RUU BPIP. Dalam konteks mendorong penguatan lembaga memang diperlukan. Menurut Arifin (2003) memantapkan lembaga merupakan bagian dari langkah strategi komunikasi politik, bahkan dapat dikatakan sebagai faktor yang mendasar dalam komunikasi politik. Dalam kerangka teoritis Davis, usulan pembentukan RUU BPIP dapat dibaca adanya organized interests, karena dilakukan setelah RUU HIP yang sebelumnya mendapatkan penolakan publik. Mengenai keberadaan BPIP, sebagai lembaga yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila, dipandang beberapa tokoh tidak optimal dan tidak jelas ukurannya. Refly Harun, pakar hukum tata negara menilai bahwa BPIP tidak mempunyai fungsi dan tujuan yang jelas, serta tidak jelas juga indeks kinerja utamanya (Kompas.com, 15/07/2020).

Fenomena RUU HIP dan penolakan kelompok masyarakat madani terhadap RUU tersebut, apabila merujuk teori Davis mengenai organized interests status quo, menunjukkan telah

beroperasinya kelompok elit untuk mengusung kepentingan mereka dengan memanfaatkan kekuasaan. Kepentingan ini, apabila merujuk kepada pandangan kelompok masyarakat madani di atas, yaitu kekhawatiran adanya kepentingan untuk mereduksi Pancasila dan terbukanya pintu komunisme di Indonesia. Selain beberapa kepentingan tersebut di atas, Irman Putra Sidin, Pakar Hukum Tata Negara, dalam suatu talkshow di salah satu televisi swasta, edisi RUU HIP: Benarkah Melumpuhkan Pancasila? Menyampaikan bahwa kekhawatiran apabila RUU HIP disahkan, bukan melumpuhkan Pancasila dan terbukanya komunisme di Indonesia, melainkan adanya kekhawatiran mengembalikan tafsir Pancasila kepada penguasa (dikutip dari Youtube ILC, diakses tanggal 20 Juni 2021). Apabila ini terjadi, maka tentu saja akan melahirkan situasi yang mengantarkan tafsir sepah dari kekuasaan, dan bisa berdampak adanya reduksi nilai-nilai Pancasila, termasuk secara mudah menentukan kelompok radikal, anti-Pancasila dan lain-lain, sesuai tafsir kekuasaan.

Kekhawatiran sebagaimana pandangan Irman Putra Sidin tersebut, sebenarnya belum berakhir mengingat RUU HIP telah diganti menjadi RUU BPIP. Dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas tahun 2021, tercantum RUU BPIP dalam urutan ke 22, sebagaimana dilansir dalam <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas> yang peneliti akses pada tanggal 20 Juni 2021. Perubahan RUU HIP menjadi RUU BPIP ini, diusulkan oleh Pemerintah. Dalam diskusi yang berkembang di Baleg, RUU BPIP diusulkan sebagai penguatan lembaga, dan bertujuan agar seluruh kebijakan dan program lembaga-lembaga negara dipastikan berlandaskan Pancasila. Akan tetapi, sampai tanggal 30 Mei 2021, draf RUU BPIP secara resmi belum diterima oleh DPR RI.

### **Penanganan Radikalisme Agama dan Keberpihakan terhadap Kesetaraan**

Pada tingkat nasional, regional dan global, kesetaraan dan kesenjangan merupakan isu yang terus mengemuka. Dalam konteks penelitian ini, fenomena radikalisme agama yang terjadi di Indonesia seringkali dialamatkan kepada agama tertentu, dalam

hal ini Islam. Di Indonesia, menurut Bakti (2004) populasi muslim merupakan yang terbesar di dunia dan populasi penduduk Indonesia juga merupakan terbesar yang keempat, apabila dibandingkan dengan negara Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Indonesia adalah negara kaya baik dari sisi alam maupun budaya. Secara budaya, Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan besar. Islam dibawa dari Arab dan secara bertahap menjadi berakar kuat di Indonesia.

Sejarah umat Islam di Indonesia merupakan sejarah panjang. Oleh karenanya, isu radikalisme yang dialamatkan kepada Islam tentu sangat mengusik umat Islam. Bahkan radikalisme agama yang dialamatkan kepada Islam ini seringkali dihadapkan dengan Pancasila, yang pada akhirnya mempertentangkan Islam dan Pancasila. Pemberitaan media, juga ikut berkontribusi dalam menstigma Islam sebagai agama yang radikal. Kondisi ini pada akhirnya mengantarkan terjadinya kesenjangan, khususnya dalam hal pemberitaan, karena menyudutkan agama tertentu. Sebagai akibatnya, tidak jarang meminggirkan kelompok-kelompok Islam, dimana kesetaraan pada akhirnya menjadi sesuatu yang sulit terwujud.

BPIP sejauh ini belum secara jelas mengeluarkan kebijakan menangani radikalisme agama. Akan tetapi relevansi BPIP dalam konteks penelitian ini, karena BPIP memosisikan radikalisme sebagai ancaman dan kebijakan yang dilakukan BPIP adalah melakukan pembinaan ideologi sehingga nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila teraktualisasi pada kehidupan masyarakat. Selain itu, relevansi lainnya karena BPIP mengemban tugas untuk menyampaikan rekomendasi yang didasarkan atas hasil kajian regulasi atau kebijakan yang berlawanan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, organisasi sosial politik, pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, dan komponen lainnya dari unsur kemasyarakatan. Sampai disini, isu kebijakan terhadap radikalisme agama menemukan urgensinya. Mengapa? Radikalisme agama seringkali dihadapkan dengan Pancasila, dimana kelompok radikalisme agama sering dialamatkan kepada Islam, sehingga

pada akhirnya Pancasila di vis a vis kan dengan Islam. Dalam posisi ini, Ummat Islam sering tersudutkan, padahal Islam dengan seluruh ajaran dan nilai-nilainya sejalan dengan Pancasila. Tidak ada alasan apapun untuk mempertentangkan Pancasila dan Islam.

Lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas untuk menangani radikalisme agama harus benar-benar mengedepankan kesetaraan. Kesetaraan harus diejawantahkan dalam bentuk pengakuan terhadap berbagai perbedaan agama, kelompok, sosial dan budaya. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu, hanya karena adanya kelompok-kelompok lain yang dekat dengan kekuasaan. Fenomena tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama tentu bisa dilakukan oleh semua orang, tidak hanya oleh pengikut agama tertentu. Sampai disini, nilai-nilai Pancasila harus dibumikan dan pemegang kebijakan serta bentuk kebijakannya juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dengan mengedepankan kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan. Dalam perkembangan terakhir, mengenai kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, dikhawatirkan oleh Irman Putra Sidin, dengan menyampaikan bahwa jangan sampai Pancasila digunakan untuk meminggirkan ummat Islam di Indonesia (dikutip dari Youtube ILC).

## **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian terhadap penanganan radikalisme agama di Indonesia dengan menggunakan kerangka teoritis organized interests Aeron Davis, peneliti mendapatkan simpulan penanganan radikalisme agama di Indonesia masih dilakukan secara parsial dan belum menekankan keadilan, serta memiliki kecenderungan memperkuat posisi negara atas tafsir radikalisme agama. Selain itu cenderung mengabaikan pandangan kelompok masyarakat madani. Penelitian ini juga menunjukkan kebijakan dan program penguatan nilai-nilai Pancasila oleh lembaga negara seperti BPIP sering melahirkan polemik, khususnya dalam konteks penanganan radikalisme agama di Indonesia, yang memosisikan secara berlawanan Pancasila dan agama.

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti menyampaikan saran agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian mengenai penanganan radikalisme agama dengan secara khusus menggunakan konsep interest media, salah satu konsep dari teori organized interests Aeron Davis, dengan fokus kepada kecenderungan media dalam memberitakan penanganan radikalisme agama dari organized interests status quo atau dari kelompok masyarakat madani.

## **BAB 11**

### **Strategi Partai Politik di Indonesia dalam Mempengaruhi Perilaku Pemilih Muda Melalui Media Sosial**

Rd. Heri Solehudin, Novi Andayani Praptiningsih, Eko Diddoyo

#### **Abstrak**

Media sosial telah menjadi alat utama bagi partai politik di Indonesia dalam memengaruhi perilaku pemilih. Melalui berbagai platform digital seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, dan YouTube, partai politik menyebarkan pesan kampanye, membangun citra serta memobilisasi dukungan, munculnya istilah buzzer politik membuat ruang publik media social semakin bising oleh beragam konten kampanye baik yang secara spesifik ditujukan untuk kandidat calon tertentu maupun partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi yang digunakan partai politik dalam kampanye digital serta dampaknya terhadap perilaku pemilih. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis konten, penelitian ini menganalisis berbagai postingan kampanye, video politik, serta interaksi publik di media sosial. Data dikumpulkan melalui observasi media sosial, dokumentasi konten kampanye, serta wawancara mendalam dengan tim kampanye dan pakar komunikasi politik. Teknik analisis meliputi kategorisasi tema dalam strategi komunikasi, analisis wacana untuk memahami konstruksi pesan politik, serta analisis interaksi publik guna mengukur efektivitas kampanye digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik menggunakan berbagai strategi persuasif dalam kampanye digital, salah satunya adalah pencitraan kandidat yang berperan sebagai footgetter untuk menarik perhatian dan dukungan pemilih. Strategi ini diwujudkan melalui produksi beragam konten yang disesuaikan dengan arah kebijakan partai di tingkat pusat, mulai dari glorifikasi keberhasilan pemerintahan yang sedang berkuasa, penyampaian kekecewaan dan narasi perubahan, hingga kritik tajam terhadap kebijakan yang dianggap

tidak berpihak pada rakyat. Partai politik yang mendukung pemerintahan cenderung menampilkan konten yang menyoroti pencapaian dan stabilitas, sementara partai oposisi lebih banyak mengusung isu ketidakpuasan publik serta menawarkan alternatif kebijakan. Selain itu, penggunaan bahasa yang emosional dan retorika populis sering kali dimanfaatkan untuk membangun keterikatan emosional dengan pemilih, terutama melalui media sosial yang memungkinkan interaksi langsung antara partai, kandidat, dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, partai politik tidak hanya berusaha membentuk opini publik tetapi juga membangun loyalitas pemilih dengan menciptakan narasi yang menggugah dan sesuai dengan aspirasi kelompok sasaran.

Kata kunci: komunikasi politik; media sosial; perilaku pemilih; konten kampanye digital.

## **PENDAHULUAN**

Media sosial telah menjadi alat yang sangat penting dalam strategi komunikasi politik di Indonesia, terutama dalam memengaruhi perilaku pemilih. Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan lanskap politik, di mana kampanye politik tidak lagi bergantung pada media konvensional seperti televisi, radio, dan baliho, tetapi juga memanfaatkan platform digital seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, dan YouTube. Melalui media sosial, partai politik dapat menyebarluaskan pesan kampanye dengan lebih cepat dan luas, serta membangun citra kandidat secara interaktif (Priyanto et al., 2021);(Fadhlurrohman & Purnomo, 2020); (Febrianto, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun opini publik dan mengarahkan wacana politik sesuai dengan kepentingan partai (Maharani & Nurafifah, 2020).

Namun, penggunaan media sosial dalam politik juga membawa tantangan, seperti penyebaran informasi yang salah dan polarisasi opini (Cantarella et al., 2020). Dalam konteks ini,

penting untuk memahami bagaimana media sosial dapat digunakan secara efektif untuk mempromosikan partisipasi politik yang positif dan mengurangi dampak negatif dari informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran media sosial dalam strategi komunikasi politik di Indonesia dan dampaknya terhadap perilaku pemilih, dengan fokus pada bagaimana platform digital ini membentuk interaksi antara partai politik, kandidat, dan pemilih (Munardin Hadma & Dwi Anggoro, 2021).

Kehadiran media sosial memungkinkan partai politik dan kandidat untuk berkomunikasi secara langsung dengan pemilih, yang memperkuat keterlibatan dan partisipasi politik (Fransisca & Ningsih, 2023);(Khasabu et al., 2023). Dalam konteks pemilu, media sosial telah terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat mempengaruhi keputusan pemilih dengan cara yang signifikan, baik melalui penyebaran informasi yang tepat maupun melalui interaksi langsung antara kandidat dan pemilih (Rahim et al., 2024). Selain itu, media sosial juga berperan dalam mengedukasi pemilih mengenai isu-isu politik dan meningkatkan literasi politik di kalangan pemilih pemula (Satria M et al., 2023).

Namun, fenomena ini juga melahirkan dinamika baru dalam komunikasi politik, salah satunya adalah munculnya buzzer politik yang berperan dalam menyebarkan beragam konten kampanye (Wahyu Mahesa Miarta, 2024). Keberadaan buzzer sering kali membuat ruang publik media sosial menjadi semakin bising dengan berbagai narasi politik, baik yang mendukung kandidat atau partai tertentu maupun yang bertujuan untuk melemahkan lawan politik (Sellita, 2023). Fenomena buzzer politik ini menciptakan tantangan baru dalam komunikasi politik, di mana pemilih dihadapkan pada beragam narasi yang dapat memengaruhi preferensi mereka secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa konten yang disebarluaskan oleh buzzer politik

dapat menciptakan polarisasi opini di kalangan pemilih, serta memengaruhi persepsi mereka terhadap kandidat dan partai tertentu (Febrianto, 2023). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh buzzer politik dapat membentuk opini publik dan memengaruhi perilaku pemilih dalam pemilu (Maharani & Nurafifah, 2020).

Dinamika yang ditimbulkan oleh keberadaan buzzer politik ini juga menciptakan polarisasi di kalangan pemilih. Berbagai narasi yang disebarluaskan sering kali bersifat provokatif dan dapat memicu perdebatan yang sengit di media sosial. Hal ini terjadi karena pelaku toxic tidak menyadari bahwa sikap dan perilakunya berdampak negatif terhadap orang lain (Praptiningsih et al, 2024). Hal ini berpotensi menciptakan ruang publik yang tidak sehat, di mana diskusi politik menjadi semakin emosional dan kurang berbasis pada fakta (Fransisca & Ningsih, 2023). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana buzzer politik beroperasi dan dampaknya terhadap perilaku pemilih serta kualitas komunikasi politik di Indonesia.

Media sosial telah menjadi komponen integral dalam strategi komunikasi politik di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran media sosial dalam strategi komunikasi politik dan dampaknya terhadap perilaku pemilih, dengan fokus pada bagaimana platform digital ini membentuk interaksi antara partai politik, kandidat, dan pemilih (Ramkita & Muslim, 2023). Dalam era digital, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai arena interaksi yang dinamis di mana berbagai narasi politik dapat disebarluaskan dan diperdebatkan secara langsung oleh publik (MAJID, 2023).

Keberadaan media sosial memungkinkan partai politik dan kandidat untuk menjangkau pemilih dengan cara yang lebih langsung dan personal. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik dapat meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih muda yang lebih akrab dengan teknologi digital (Mas'amah et al.,

2023). Melalui platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, partai politik dapat menyebarkan pesan kampanye, membangun citra kandidat, dan memobilisasi dukungan dengan lebih efektif (Gayatri & Satwika, 2022). Namun, fenomena ini juga membawa tantangan, seperti munculnya disinformasi dan polarisasi opini yang dapat memengaruhi keputusan pemilih secara signifikan (Lukman Ismail et al., 2024).

Salah satu aspek penting dari penggunaan media sosial dalam komunikasi politik adalah bagaimana konten yang disebarluaskan dapat membentuk persepsi dan sikap pemilih. Penelitian menunjukkan bahwa konten yang dihasilkan oleh buzzer politik dan influencer dapat menciptakan ruang gema yang memperkuat pandangan tertentu, sehingga memengaruhi preferensi pemilih (Gunawan, 2024);(Jannah et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana interaksi di media sosial dapat memengaruhi dinamika politik dan perilaku pemilih dalam konteks pemilu yang semakin kompetitif di Indonesia(H. Solehudin et al., 2024).

Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi politik di era digital dengan menyoroti peran media sosial sebagai alat utama dalam memengaruhi perilaku pemilih. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas kampanye politik secara konvensional atau sekadar menganalisis tren penggunaan media sosial oleh partai politik, penelitian ini secara spesifik mengkaji bagaimana strategi komunikasi digital dirancang dan diterapkan oleh partai politik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran buzzer politik dalam membentuk opini publik serta dampaknya terhadap preferensi dan keputusan pemilih. Dengan menggunakan metode analisis konten, penelitian ini memberikan gambaran lebih mendalam mengenai pola pesan politik yang disampaikan melalui berbagai platform digital bagaimana strategi komunikasi yang digunakan partai politik di Indonesia dalam memengaruhi perilaku pemilih melalui media sosial? Dan sejauh mana peran buzzer politik dalam membentuk opini publik dan preferensi pemilih dalam kampanye politik digital di Indonesia?

## **METODOLOGI**

### **Desain**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten (content analysis), tujuannya adalah untuk menggambarkan fenomena dalam bentuk konseptual(Elo, S., & Kyngäs, 2008). untuk memahami bagaimana partai politik di Indonesia menggunakan media sosial dalam memengaruhi perilaku pemilih. Analisis konten dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, makna, dan strategi komunikasi dalam materi kampanye digital yang diproduksi oleh partai politik dan kandidat.

### **Pengumpulan Data**

1. Observasi Media Sosial : Peneliti memantau berbagai platform digital seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, dan YouTube untuk mengidentifikasi strategi komunikasi yang digunakan partai politik dalam kampanye digital. Observasi dilakukan terhadap konten yang mencakup unggahan teks, gambar, video, serta interaksi seperti komentar, like, dan share.
2. Dokumentasi Konten Kampanye : Pengumpulan data berupa arsip digital dari materi kampanye yang dipublikasikan di media sosial. Termasuk analisis unggahan resmi dari akun partai politik dan kandidat serta konten yang dibuat oleh buzzer atau pendukung tidak resmi.
3. Wawancara Mendalam : Wawancara dilakukan dengan tim kampanye partai politik untuk memahami strategi komunikasi digital yang mereka gunakan. Pakar komunikasi politik juga diwawancara untuk mendapatkan perspektif akademis tentang efektivitas strategi kampanye digital dalam membentuk opini publik.

### **Teknik Analisis Data**

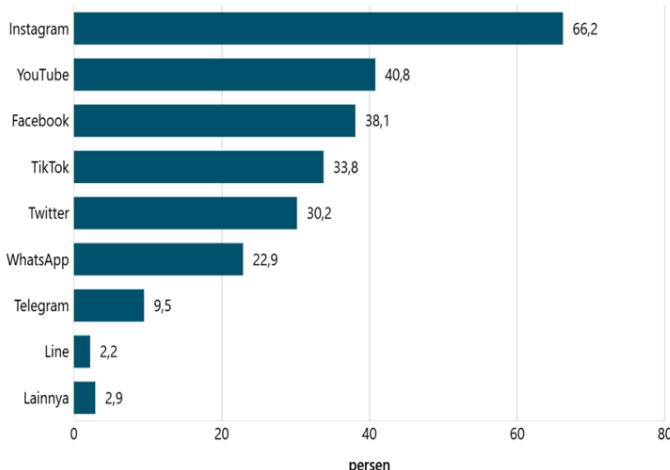
1. Kategorisasi Tema dalam Strategi Komunikasi : Postingan kampanye diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, seperti pencitraan kandidat, propaganda kebijakan, serangan terhadap lawan politik, serta mobilisasi pemilih. Tujuannya

adalah untuk mengidentifikasi pola komunikasi yang digunakan oleh partai politik dalam membentuk preferensi pemilih.

2. Analisis Wacana : Digunakan untuk memahami bagaimana pesan politik dikonstruksi dan disampaikan dalam kampanye digital. Analisis ini berfokus pada pilihan kata, gaya bahasa, serta narasi yang digunakan untuk menarik emosi dan keterlibatan pemilih.
3. Analisis Interaksi Publik : Mengukur efektivitas kampanye digital dengan melihat tingkat keterlibatan pemilih, seperti jumlah komentar, tingkat respons kandidat atau partai terhadap diskusi publik, serta tren opini yang berkembang dari interaksi tersebut. Analisis ini juga mempertimbangkan sentimen publik terhadap konten kampanye, apakah mayoritas tanggapan bersifat positif, netral, atau negatif.

## PEMBAHASAN

### Media Sosial yang Sering Diakses Generasi Z



**Sumber:**  
Katadata Insight Center (KIC)

**Informasi Lain:**

## Grafik 1. Media Sosial yang Sering Digunakan Responden untuk Mengakses Informasi Politik (Oktober 2023)

Hasil survei Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan bahwa Instagram menjadi platform media sosial utama yang digunakan oleh anak muda Indonesia dalam mengakses informasi politik. Temuan ini terangkum dalam laporan bertajuk Politik di Mata Anak Muda: Persepsi dan Kecenderungan Gen Z & Milenial terhadap Capres, Parpol, dan Kampanye Pemilu 2024. Berdasarkan survei yang melibatkan 1.005 responden, sebanyak 66,2% di antaranya memilih Instagram sebagai sumber utama informasi politik. Sementara itu, 40,8% responden mengakses informasi politik melalui YouTube, disusul Facebook (38,1%), TikTok (33,8%), dan Twitter (30,2%). Adapun media sosial berbasis aplikasi pesan seperti WhatsApp, Telegram, dan Line digunakan oleh lebih sedikit responden, sebagaimana ditampilkan dalam grafik survei.

Survei ini melibatkan responden yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 60,6% laki-laki dan 39,4% perempuan. Mayoritas responden berasal dari Pulau Jawa (54,4%), diikuti Sumatra (22,5%) dan Sulawesi (7,8%), sementara responden dari Kalimantan, Bali-Nusa, serta Maluku-Papua berkisar antara 3,6% hingga 6,4%. Dari segi kelompok usia, 50,4% responden berasal dari generasi Z (17-26 tahun) dan 49,6% dari generasi milenial (27-42 tahun). Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui tSurvey pada 11-17 Oktober 2023 dengan metode non-probability sampling.

Tabel 1. Penggunaan Media Sosial untuk Akses Informasi Politik oleh Anak Muda Indonesia

Media Sosial	Percentase Pengguna (%)	Jenis Konten Politik yang Banyak Diakses
Instagram	66,2%	Infografis, video pendek, story, dan reels
YouTube	40,8%	Video analisis, debat politik, wawancara tokoh
Facebook	38,1%	Berita politik, diskusi di grup komunitas
TikTok	33,8%	Video pendek tentang opini dan edukasi politik
Twitter	30,2%	Trending topic, diskusi politik real-time
WhatsApp	20,5%	Forwarded messages, grup diskusi keluarga & teman
Telegram	12,7%	Channel berita politik, grup diskusi terbatas
Line	8,4%	Artikel singkat, infografis dalam Line Today

Penggunaan media sosial sebagai sumber informasi politik berperan signifikan dalam membentuk preferensi politik anak muda Indonesia, khususnya Generasi Z dan Milenial. Tingginya angka pengguna Instagram (66,2%) dan YouTube (40,8%) dalam mengakses informasi politik menunjukkan bahwa visualisasi konten memiliki dampak besar dalam membentuk opini dan persepsi terhadap partai politik.

Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menggunakan algoritma berbasis minat yang menyajikan konten sesuai dengan preferensi pengguna. Hal ini menyebabkan anak muda lebih sering terpapar informasi dari sumber yang sejalan dengan pandangan politik mereka, yang berpotensi memperkuat bias politik. Misalnya, seorang pemilih yang sering menonton konten dari tokoh atau partai tertentu akan semakin banyak menerima informasi serupa, memperkuat afiliasi mereka terhadap partai tersebut.

Partai politik dan calon legislatif kini semakin aktif memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih muda. Strategi kampanye melalui video pendek di TikTok, infografis di Instagram, serta diskusi terbuka di Twitter dan YouTube berhasil menarik perhatian anak muda. Konten yang dikemas dalam bentuk ringan, interaktif, dan berbasis tren lebih mudah diterima dibandingkan kampanye tradisional. Misalnya, partai politik yang menggunakan influencer atau figur publik populer dalam kampanye digital cenderung lebih mudah mendapatkan perhatian

dan simpati dari pemilih muda. Influencer dengan jutaan pengikut dapat memengaruhi opini politik pengikutnya, baik secara langsung maupun tidak langsung(H. Solehudin et al., 2024).

Meskipun media sosial memberikan kemudahan dalam mengakses informasi politik, terdapat tantangan berupa penyebaran hoaks dan misinformasi. Banyak anak muda yang masih kesulitan membedakan informasi valid dengan berita palsu, terutama di platform seperti WhatsApp dan Facebook, yang kerap digunakan untuk menyebarkan informasi secara viral. Akibatnya, persepsi terhadap partai politik bisa terbentuk berdasarkan informasi yang belum tentu akurat. Sebagai contoh, beberapa partai mungkin mendapat keuntungan dari kampanye hitam atau propaganda yang menyebar luas di media sosial. Sebaliknya, partai yang kurang aktif dalam mengelola citra digitalnya bisa mengalami penurunan dukungan di kalangan pemilih muda(R. H. Solehudin et al., 2023).

Survei menunjukkan bahwa generasi muda yang aktif di media sosial lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam diskusi politik, baik secara online maupun offline. Mereka lebih kritis dalam menilai rekam jejak partai politik dan calon pemimpin, sehingga keputusan dalam memilih partai politik tidak hanya berdasarkan faktor tradisional seperti latar belakang keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh informasi yang mereka dapatkan di media sosial. Namun, di sisi lain, paparan informasi politik yang berlebihan juga bisa menimbulkan kejemuhan dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Beberapa anak muda menjadi apatis dan merasa bahwa politik hanya sebatas pertarungan citra di media sosial, tanpa adanya perubahan nyata di lapangan.

**Tabel 2. Tingkat Kepercayaan Anak Muda terhadap Sumber Informasi Politik di Media Sosial**

Sumber Informasi Politik	Persentase Kepercayaan (%)	Karakteristik & Dampak
Akun resmi partai politik	50,3%	Cenderung menampilkan informasi yang menguntungkan partai tersebut.
Influencer politik di media sosial	47,8%	Bisa membentuk opini publik tetapi sering kali subjektif.
Media berita mainstream yang dibagikan di media sosial	44,6%	Lebih dipercaya dibanding sumber lain, tetapi tetap bergantung pada framing berita.
Grup diskusi di WhatsApp & Telegram	33,5%	Rentan terhadap penyebaran hoaks dan informasi bias.
Opini publik melalui komentar & trending topic	29,4%	Memengaruhi persepsi politik tetapi sering kali kurang berbasis data valid.

Tabel ini menggambarkan tingkat kepercayaan anak muda terhadap berbagai sumber informasi politik yang mereka akses di media sosial. Akun resmi partai politik (50,3%) menjadi sumber yang cukup dipercaya, meskipun cenderung menampilkan informasi yang menguntungkan partai tersebut. Influencer politik (47,8%) juga memiliki pengaruh besar, karena mereka sering kali menyampaikan opini yang lebih personal dan relatable. Media berita mainstream yang dibagikan di media sosial (44,6%) tetap memiliki kredibilitas, tetapi framing berita bisa memengaruhi opini publik. Di sisi lain, grup diskusi di WhatsApp & Telegram (33,5%) lebih rentan terhadap penyebaran hoaks, sementara opini publik melalui komentar dan trending topic (29,4%) sering kali membentuk persepsi politik yang kurang berbasis fakta.

**Tabel 3. Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Anak Muda**

Jenis Aktivitas Politik di Media Sosial	Persentase Partisipasi (%)	Dampak terhadap Pemilihan Partai
Mengikuti akun politik di media sosial	64,7%	Meningkatkan kesadaran dan ketertarikan terhadap partai politik.
Membaca dan membagikan berita politik	58,2%	Bisa membentuk opini dan memperkuat pilihan partai tertentu.
Berpartisipasi dalam diskusi politik online	45,6%	Meningkatkan pemahaman kritis terhadap berbagai partai politik.
Menggunakan tagar politik (contoh: #GantiPresiden, #TetapJokowi, dll.)	39,1%	Dapat menciptakan tren opini publik yang memengaruhi pilihan partai.
Menonton debat politik atau konten analisis politik di YouTube/TikTok	36,8%	Membantu memahami visi-misi partai dan calon pemimpin.
Ikat serta dalam gerakan digital (petisi online, kampanye sosial, dll.)	29,5%	Meningkatkan kepedulian politik tetapi tidak selalu berpengaruh langsung pada pilihan partai.

Tabel ini menunjukkan berbagai bentuk keterlibatan anak muda dalam aktivitas politik di media sosial dan dampaknya terhadap pilihan partai. Mengikuti akun politik (64,7%) merupakan aktivitas paling umum, karena memberikan akses langsung ke informasi terkait partai dan calon pemimpin. Membaca dan membagikan berita politik (58,2%) juga berperan penting dalam membentuk opini publik. Sementara itu, berpartisipasi dalam diskusi politik online (45,6%) dapat meningkatkan pemahaman kritis, tetapi tidak selalu mengarah pada keputusan politik yang objektif. Aktivitas lain seperti penggunaan tagar politik (39,1%) dan menonton debat politik di YouTube/TikTok (36,8%) membantu membangun opini, sedangkan partisipasi dalam gerakan digital (29,5%) lebih mencerminkan kepedulian politik tanpa selalu berujung pada partisipasi dalam pemilu.

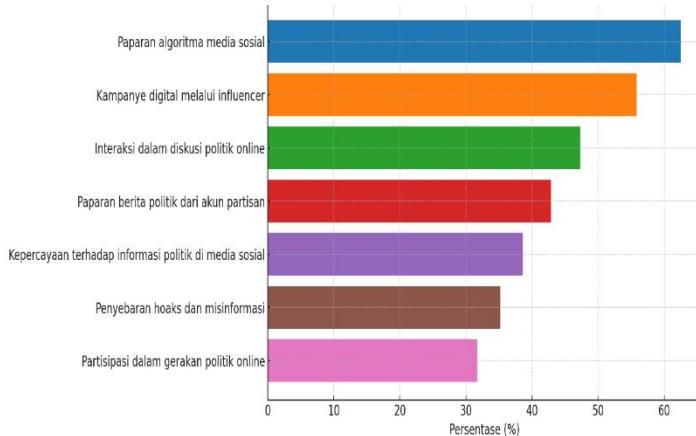
## **Pengaruh Media Sosial terhadap Preferensi Politik Generasi Z**

**Tabel 4. Pengaruh Media Sosial terhadap Preferensi Politik Anak Muda**

Faktor Pengaruh	Persentase (%)	Dampak terhadap Pilihan Partai Politik
Paparan algoritma media sosial	62,5%	Memperkuat preferensi politik berdasarkan konten yang sering dilihat.
Kampanye digital melalui influencer	55,8%	Meningkatkan daya tarik partai tertentu di kalangan pemilih muda.
Interaksi dalam diskusi politik online	47,3%	Mendorong anak muda untuk lebih kritis dalam memilih partai politik.
Paparan berita politik dari akun partisian	42,9%	Dapat membentuk opini berdasarkan narasi yang belum tentu objektif.

Faktor Pengaruh	Persentase (%)	Dampak terhadap Pilihan Partai Politik
Kepercayaan terhadap informasi politik di media sosial	38,6%	Bisa memperkuat pilihan partai atau justru menimbulkan skeptisme.
Penyebaran hoaks dan misinformasi	35,2%	Berpotensi memengaruhi persepsi negatif atau positif terhadap partai tertentu.
Partisipasi dalam gerakan politik online (petisi, tagar, dll.)	31,7%	Meningkatkan kesadaran politik tetapi tidak selalu berujung pada keterlibatan dalam pemilu.

Tabel ini menunjukkan berbagai faktor yang memengaruhi pilihan partai politik anak muda Indonesia melalui media sosial. Algoritma platform digital (62,5%) menjadi faktor utama, karena pengguna cenderung melihat konten politik yang sesuai dengan preferensi mereka, memperkuat bias politik. Selain itu, kampanye digital melalui influencer (55,8%) juga berpengaruh besar, karena anak muda lebih mudah menerima informasi politik dari tokoh yang mereka percayai. Meskipun interaksi dalam diskusi politik online (47,3%) dapat meningkatkan kesadaran politik, paparan terhadap berita partisian (42,9%) dan hoaks (35,2%) juga berisiko membentuk opini yang kurang objektif.



Grafik 2. Pengaruh Media Sosial terhadap Preferensi Politik Anak Muda

Hasil survei Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan bahwa Instagram menjadi platform utama bagi anak muda Indonesia dalam mengakses informasi politik. Sebanyak 66,2% responden menggunakan Instagram sebagai sumber utama, diikuti oleh YouTube (40,8%), Facebook (38,1%), TikTok (33,8%), dan Twitter (30,2%). Sementara itu, media sosial berbasis aplikasi pesan seperti WhatsApp, Telegram, dan Line memiliki persentase lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa anak muda cenderung mengakses informasi politik melalui platform yang mengutamakan konten visual dan interaktif.

Tingginya penggunaan Instagram dan YouTube untuk mendapatkan informasi politik mencerminkan pergeseran preferensi konsumsi informasi dari format teks ke format visual. Infografis, video pendek, dan diskusi interaktif lebih mudah diterima oleh anak muda dibandingkan berita tertulis yang panjang. Hal ini juga menunjukkan bagaimana algoritma media sosial berperan dalam menyajikan konten yang sesuai dengan minat pengguna, yang pada akhirnya dapat memperkuat preferensi politik mereka.

Tingkat kepercayaan anak muda terhadap berbagai sumber informasi politik juga bervariasi. Akun resmi partai politik menjadi sumber yang paling dipercaya (50,3%), meskipun cenderung hanya menampilkan informasi yang menguntungkan partai tersebut. Influencer politik di media sosial memiliki tingkat kepercayaan sebesar 47,8%, menunjukkan bahwa anak muda lebih mudah menerima informasi dari figur publik yang mereka ikuti. Sementara itu, media berita mainstream yang dibagikan melalui media sosial memiliki tingkat kepercayaan 44,6%, tetapi framing berita tetap dapat memengaruhi opini publik.

Di sisi lain, grup diskusi di WhatsApp dan Telegram lebih rentan terhadap penyebaran hoaks dan informasi bias, dengan tingkat kepercayaan hanya 33,5%. Opini publik yang terbentuk melalui komentar dan trending topic di media sosial juga memiliki pengaruh, meskipun sering kali kurang berbasis data yang valid (29,4%). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial memberikan akses luas terhadap informasi politik, terdapat tantangan dalam memastikan validitas informasi yang diterima oleh pengguna.

Kegiatan politik yang dilakukan anak muda di media sosial juga memiliki dampak signifikan terhadap pilihan partai politik. Mengikuti akun politik di media sosial menjadi aktivitas paling umum (64,7%), yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketertarikan terhadap partai tertentu. Membaca dan membagikan berita politik (58,2%) juga berperan dalam membentuk opini dan memperkuat preferensi terhadap partai tertentu.

Selain itu, partisipasi dalam diskusi politik online (45,6%) mendorong anak muda untuk lebih kritis dalam menilai partai politik, sementara penggunaan tagar politik (39,1%) dapat menciptakan tren opini publik yang berpengaruh pada pemilih. Menonton debat politik atau konten analisis di YouTube dan TikTok (36,8%) juga menjadi sumber penting dalam memahami visi-misi partai dan calon pemimpin. Namun, partisipasi dalam gerakan

digital seperti petisi online dan kampanye sosial (29,5%) lebih mencerminkan kesadaran politik tanpa selalu berujung pada keputusan memilih dalam pemilu.

Beberapa faktor utama yang memengaruhi pilihan partai politik anak muda melalui media sosial antara lain paparan algoritma media sosial (62,5%), kampanye digital melalui influencer (55,8%), dan interaksi dalam diskusi politik online (47,3%). Algoritma media sosial berperan besar dalam membentuk preferensi politik karena pengguna cenderung terus terpapar konten yang sejalan dengan pandangan mereka. Hal ini dapat memperkuat bias politik dan mempersempit ruang untuk mengeksplorasi perspektif lain.

Kampanye digital yang dilakukan oleh influencer juga memiliki pengaruh signifikan, karena anak muda lebih tertarik pada informasi politik yang dikemas secara menarik oleh figur publik yang mereka ikuti. Interaksi dalam diskusi politik online memungkinkan pemilih muda untuk lebih kritis dalam menilai partai politik, meskipun paparan terhadap berita partisan (42,9%) dan penyebaran hoaks (35,2%) juga menjadi tantangan dalam memperoleh informasi yang objektif.

Dengan semakin berkembangnya media sosial sebagai sumber informasi politik, penting bagi anak muda untuk memiliki literasi digital yang baik agar dapat menyaring informasi dengan kritis. Media sosial, sebagai platform yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, sering kali menjadi sarana bagi penyebaran berita palsu dan propaganda politik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang literasi digital menjadi krusial bagi generasi muda untuk membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak (Nanda & Budimansyah, 2020);(Aminulloh et al., 2023); (Goddy Uwa & Christianah Ronke, 2023).

Literasi digital mencakup kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif(Budiarti, 2024). Hal ini melibatkan pengembangan keterampilan berpikir

kritis yang memungkinkan individu untuk menganalisis dan menilai konten digital, serta memahami konteks sosial di balik informasi tersebut (Reyna et al., 2018);(Salman Salleh Abdul Latif et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan literasi digital yang baik dapat membantu siswa dalam mengidentifikasi dan mengatasi informasi yang menyesatkan, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi politik (Sabrina, 2019); (Suryani, 2023); (Rianto et al., 2024).

Selain itu, penting untuk diingat bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai arena di mana propaganda politik dapat dengan mudah disebarluaskan(Praptiningsih & Putra, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna media sosial, terutama di kalangan remaja, tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk menilai keakuratan informasi yang mereka terima (Andiyansari & Sukmawati, 2021). Oleh karena itu, pendidikan literasi media yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang isu-isu ini (Sherlyanita & Rakhmawati, 2016); (Chen et al., 2021).

Dalam konteks semacam ini maka pengembangan program pelatihan literasi digital menjadi kebutuhan yang mendesak. Program ini harus dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan kritis dalam menavigasi informasi yang mereka temui setiap hari(R. H. Solehudin et al., 2025). Salah satu aspek penting yang perlu ditekankan adalah kemampuan mengenali berita hoaks, di mana peserta diajarkan cara mengidentifikasi tanda-tanda berita palsu, memahami teknik manipulasi informasi, serta menggunakan berbagai alat untuk memverifikasi kebenaran suatu berita(Praptiningsih et al., 2020). Dengan demikian, mereka dapat menghindari penyebarluasan informasi yang tidak akurat dan lebih selektif dalam mengonsumsi berita(R. H. Solehudin, 2023).

Selain itu, pemahaman terhadap bias media juga menjadi bagian krusial dalam program pelatihan ini. Media sering kali memiliki perspektif atau kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi cara suatu berita disajikan(R. H. Solehudin, 2024).

Oleh karena itu, peserta pelatihan perlu belajar cara mengidentifikasi bias dalam pemberitaan, membandingkan berbagai sumber, serta mengembangkan sudut pandang yang lebih objektif terhadap suatu isu. Dengan keterampilan ini, mereka dapat menjadi konsumen informasi yang lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan.

Lebih jauh, program literasi digital yang efektif akan membantu anak muda dalam mengevaluasi sumber informasi dengan lebih cermat(Budiarti & Yasmin Adar, 2023). Mereka diajarkan untuk menilai kredibilitas suatu sumber berdasarkan reputasi, kejelasan data, serta bukti yang mendukung informasi yang disajikan(Budiarti, 2023). Dengan bekal ini, mereka tidak hanya lebih siap menghadapi tantangan informasi yang semakin kompleks tetapi juga mampu berkontribusi secara positif dalam diskusi politik dan sosial. Kesadaran akan pentingnya informasi yang akurat dan objektif akan menjadikan mereka agen perubahan yang dapat menyebarkan pemahaman yang lebih rasional dan bertanggung jawab di masyarakat.

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk preferensi politik anak muda Indonesia, khususnya Generasi Z dan Milenial. Instagram menjadi platform utama dalam mengakses informasi politik, diikuti oleh YouTube, Facebook, TikTok, dan Twitter. Visualisasi konten yang menarik serta algoritma media sosial berkontribusi dalam memperkuat preferensi politik pengguna dengan menampilkan konten yang sesuai dengan minat mereka. Selain itu, kampanye digital yang dilakukan oleh partai politik dan influencer berpengaruh besar terhadap daya tarik suatu partai di kalangan pemilih muda. Diskusi politik online juga turut meningkatkan kesadaran dan sikap kritis anak muda terhadap isu-isu politik.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah penyebaran hoaks dan misinformasi, yang dapat membentuk opini

publik berdasarkan informasi yang tidak selalu akurat. Tingkat kepercayaan anak muda terhadap sumber informasi politik juga bervariasi, dengan akun resmi partai politik dan influencer menjadi sumber utama, sementara grup diskusi di platform pesan lebih rentan terhadap bias dan hoaks. Aktivitas politik di media sosial, seperti mengikuti akun politik, berbagi berita, hingga berpartisipasi dalam gerakan digital, berdampak pada kesadaran politik, meskipun tidak selalu berujung pada keterlibatan dalam pemilu.

## **BAB 12**

### **Komunikasi Keluarga di Era Digital dalam Pembentukan Karakter Anak**

Rita Pranawati

#### **Abstrak**

Perubahan teknologi komunikasi di abad ke-21 membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, termasuk pola komunikasi dalam keluarga. Di era digital ini, keluarga dihadapkan pada tantangan besar dalam membentuk komunikasi yang efektif dan penguatan karakter anak. Teknologi digital, meskipun bersifat netral, memiliki dua sisi yaitu positif dan negatif, terhadap proses komunikasi keluarga. Sisi positifnya mencakup peningkatan keterhubungan dan akses informasi, sementara sisi negatifnya dapat mengurangi interaksi langsung, menimbulkan kesalahpahaman, dan mengganggu kualitas komunikasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana komunikasi keluarga di era digital dapat terus menguatkan pendidikan karakter anak, meskipun ada beragam tantangan seperti budaya instan dan konten negatif di dunia maya. Melalui komunikasi yang baik dan peran aktif orang tua dalam mendampingi anak, karakter anak dapat dibentuk melalui berbagai strategi, seperti pengarahan, pelatihan, dan pembiasaan. Selain itu, literasi digital juga menjadi aspek penting yang perlu ditanamkan untuk memastikan anak-anak memanfaatkan teknologi dengan bijaksana. Dengan demikian, meskipun teknologi berpotensi mengganggu, pemanfaatan yang tepat dapat memperkuat komunikasi keluarga dan mendukung pendidikan karakter anak di tengah tantangan era digital.

Kata kunci: komunikasi keluarga; era digital; pembentukan karakter; anak

## **PENDAHULUAN**

Perubahan teknologi komunikasi di abad 21 menjadi tonggak perubahan sosial yang cepat dan ada kecenderungan berdampak disruptif. Pola kehidupan sehari-hari mengalami perubahan yang revolusioner sebagai dampak hadirnya teknologi komunikasi. Keluarga merupakan salah satu institusi sosial yang terdampak dari perubahan pola komunikasi di era digital. Keluarga menjadi bagian tak terpisahkan dari institusi penting dalam membangun komunikasi keluarga yang baik agar dapat tetap menjalankan fungsinya dalam mewujudkan pendidikan karakter anak.

Beragam tantangan dalam kehidupan era digital mewarnai kehidupan anak-anak kita. Mulai dari adanya 80ribu anak yang menjadi pemain judi online (PPATK, 2024), angka anak sebagai korban pancabulan, pengeroikan, kekerasan psikis, kekerasan seksual pemerksaan/persetubuhan, dan kejahatan pornografi dari dunia maya masih menjadi lima kasus kekerasan tertinggi pada tahun 2024 yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2025). Beragam tantangan juga menjadi PR era digital, mulai dari budaya instan, beragam konten negatif hingga kekerasan seksual. Pada masa pandemi covid, sebanyak 1% anak atau sekitar 250 anak diminta membuat dan mengirim video tidak sopan, ada 2% anak yang diminta mengirim foto tidak sopan, ada 7% anak yang diperlihatkan atau dikirim gambar tidak sopan (Pranawati & Maemunah, 2020). Selain itu, hanya 79% orang tua yang memiliki pengaturan dalam penggunaan gawai. Hal ini menggambarkan bahwa banyak orang tua yang belum memiliki pengetahuan tentang aspek positif dan negatif pengaruh teknologi komunikasi digital.

Sebenarnya teknologi bersifat netral yang tetap saja memiliki dua sisi yaitu positif dan negatif. Sisi positif yang dapat diambil dari penggunaan teknologi dalam hal ini gawai dalam komunikasi diantaranya adalah sebagai media komunikasi, meningkatkan keterhubungan (connectedness), meluaskan informasi, serta meluaskan sumber informasi. Namun disisi lain,

ada potensi mengurangi interaksi langsung, meningkatkan konflik, menimbulkan kesalahpahaman, serta mengurangi kualitas komunikasi. Upaya memaksimalkan sisi positif dan meminimalisir dampak negatif harus terus diupayakan, termasuk dalam konteks komunikasi keluarga untuk membangun karakter anak.

Dari gambaran tantangan terhadap kehidupan anak di era digital, komunikasi keluarga menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah dari beragam kondisi negatif. Keluarga masih menjadi instansi sosial yang mengajarkan nilai dan karakter bagi anak. Komunikasi keluarga menjadi salah satu kunci keberhasilan pengasuhan dan pembangunan karakter anak. Di sisi lain, menguatkan karakter anak menjadi hal yang penting agar anak memiliki sikap dan perilaku yang positif, menjadi individu yang bertanggung jawab dan berintegritas. Tulisan ini akan mengupas bagaimana tantangan komunikasi keluarga di era digital dalam pembentukan karakter.

## **PEMBAHASAN**

Bagian ini akan menggambarkan bagaimana sebenarnya komunikasi keluarga terjadi di era digital agar fungsi keluarga sebagai tempat menyemai norma dan sikap dapat terus terjaga. Selain itu, bagian ini juga akan menggambarkan bagaimana karakter dibentuk, serta bagaimana strategi dalam komunikasi keluarga untuk membangun karakter anak.

### **Membangun komunikasi keluarga**

Sudah semestinya orang tua memiliki peran yang besar dalam membangun komunikasi untuk membangun kelekatan anak serta bersama-sama tumbuh kembangnya. Kemampuan komunikasi anak dipengaruhi oleh banyak faktor, namun orang tua memiliki peran yang penting dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berbahasa (Suparno & Hendariningrum, 2014). Kata kunci dari pengembangan kompetensi berbahasa dan berkomunikasi diantaranya dilakukan dengan cara interaksi. Keterlibatan interaksi dan komunikasi anak dan orang tua serta relasi ketergantungan mereka akan membawa pada kelekatan yang memungkinkan anak mencontoh dan meneladani

kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Hal ini akan berdampak pada ketrampilan komunikasi anak.

Dalam beberapa pertemuan penulis dengan guru Bimbingan Konseling dan guru Sekolah Dasar dalam pelatihan-pelatihan Bimbingan Konseling dan Ke-BK-an yang dilakukan oleh Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada lebih dari 2000 guru selama bulan November-Desember 2024, penulis menanyakan, siapa sebenarnya pengasuh anak? Sebagian besar mereka menjawab bahwa anak belajar dan diasuh oleh gawai dan sosial media. Kita bisa membayangkan bagaimana anak dari balita bahkan dari bayi belajar banyak hal dari gawai dan sosial media. Anak-anak belajar banyak hal tanpa tersaring, alias diterima begitu saja, maka hal ini akan menjadi pekerjaan rumah yang besar pada masa tumbuh kembang anak selanjutnya. Dampaknya misalnya anak secara fisik mengalami keterlambatan bicara, namun secara tumbuh kembang anak juga menjadi belajar hal-hal yang tidak baik, misalnya kata-kata yang tidak sopan. Anak juga belajar kekerasan sebagai suatu hal yang lumrah. Anak-anak juga menyerap kata-kata negatif yang tidak sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Nilai-nilai negatif diperoleh saat berinteraksi dengan dunia maya sekaligus karena lemahnya keterlibatan orang tua.

Orang tua seharusnya secara berkesinambungan membangun komunikasi dengan anak. Komunikasi orang tua dengan anak juga dalam rangka memberikan pemahaman tentang hal baru yang mungkin baru pertama kali mereka dengar. Orang tua perlu secara aktif menjelaskan apa yang dimaksud dengan sebuah kata atau sebuah fenomena. Kadang anak-anak menyebut sebuah kosakata kasar tetapi mereka tidak mengerti maksud dari kata tersebut. Pemahaman orang tua terhadap usia tumbuh kembang anak menjadi sangat penting. Seiring dengan usia tumbuh kembangnya, orang tua perlu memahami fase tumbuh kembang anak, termasuk saat mereka memasuki usia remaja yang tentu mengalami perubahan baik dalam hal cara berkomunikasi maupun substansi berkomunikasi. Orang tua perlu menyelami

dunia anak remaja dan mengupayakan menjadi sahabat anak-anak mereka.

Seringkali kita dengar bahwa gawai menjadi komunikasi yang sistemnya mendekatkan yang jauh, namun menjauhkan yang dekat. Hal ini wajar karena seringkali anak dan orang tua atau anggota keluarga lainnya terlihat dalam satu ruang dan memiliki jarak yang dekat, namun mereka tidak berkomunikasi dan bertemu secara psikis. Kadang mereka tertawa atau tersenyum sendiri, yang artinya mereka sedang berkomunikasi dengan orang lain yang tidak berada di dekatnya. Hanya fisik mereka yang bersama, namun kontak sosial dan komunikasi yang mendalam tidak terjadi.

Era digital mengubah budaya komunikasi yang sebelumnya menggunakan cara konvensional ke penggunaan media baru. Dalam hal ini, terjadi perubahan komunikasi dari face to face atau bertatap muka langsung menjadi computer mediated communication atau komunikasi yang dilakukan melalui perantara perangkat komputer (Fauzi, 2018). Lebih jauh, budaya komunikasi di era new media bagi digital natives menguatkan budaya teksting (dengan teks) untuk membangun kodekatan emosional, kemudahan meneruskan informasi, dan memiliki sifat cepat, menghibur, sesuai dengan kepribadian (custom, bisa memilih), serta kebebasan (Fauzi, 2018). Literasi digital menjadi hal yang penting bagi anak-anak dan orang tua sudah semestinya memberikan edukasi. Sayangnya tidak semua orang tua memiliki kemampuan mengajarkan literasi digital agar gawai dan beragam aplikasi lainnya dapat menjadi sarana komunikasi keluarga, khususnya antara orang tua dan anak.

Kekhawatiran akan terus minimnya kontak tradisional antar anggota keluarga terus mengemuka. Orang tua seringkali menyuruh anak menggunakan gawai dan mengirim pesan melalui whastapp misalnya. Komunikasi digital seharusnya dapat memperkuat komunikasi tradisional dan bukan menggantikan bentuk-bentuk kontak tradisional. Temuan di Finlandia, sisi positif berkomunikasi secara digital yang diantaranya dapat dilakukan melalui whatsapp, video call, email, ternyata kontak melalui digital

tidak mengurangi frekuensi kontak tradisional yang dilakukan melalui bertemu langsung, telepon dan mengirim kartu pos (Danielsbacka et al., 2023). Kontak digital membantu menghubungkan beragam generasi, kakek-nenek dengan cucu, saudara kandung, serta paman-bibi-dan keponakan, serta keluarga besar lainnya. Pada dasarnya kontak dengan keluarga besar, teman, dan kerabat juga menjadi penguat agar individu tidak lagi terisolasi ataupun mengalami masalah sosial (Barrie et al., 2019). Jika teknologi digital dapat dimanfaatkan dengan baik, maka gawai juga dapat dimanfaatkan secara positif untuk menguatkan hubungan antar anggota keluarga inti maupun dengan keluarga besar.

Di Indonesia sendiri, hadirnya teknologi komunikasi berdampak pada tipe komunikasi keluarga tetapi tidak berdampak pada face to face communication (Rumata, 2017). Hal ini bermakna bahwa komunikasi konvensional tidak banyak mengalami perubahan. Baik di perkotaan maupun di pedesaan, lama waktu berkomunikasi dengan anggota keluarga melalui computer mediated communication ternyata rendah, artinya budaya komunikasi keluarga dengan menggunakan gawai lebih jarang dirasakan. Sedangkan di kota, durasi dan frekuensi komunikasi tatap muka dalam kategori tinggi sedangkan di desa dalam kategori rendah. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat perkotaan memiliki tingkat adaptasi yang baik dalam menggunakan teknologi digital untuk komunikasi keluarga, termasuk dengan anak. Namun demikian, desa dan kota memiliki kesamaan tipe komunikasi yaitu konsensual. Komunikasi konsensual merupakan komunikasi yang mendorong proses komunikasi dan dialog serta memiliki konformitas tinggi (Rumata, 2017). Hal ini tentu menjadi modal yang baik bagi komunikasi keluarga yang mendorong terjadinya dialog antara anak dan orang tua, suami dan istri, maupun antar anggota keluarga lainnya.

Beragam praktik komunikasi digital terus terjadi. Penggunaan whatsapp dan beragam sosial media setidaknya menggambarkan terjadinya proses komunikasi. Kehadiran anggota

keluarga secara digital setidaknya menjadi alternatif dari perkembangan dunia dalam globalisasi saat ini. Konsep staying touch atau tetap terhubung yang digunakan dalam dunia kerja dengan asisten mesin AI atau mesin penjawab sebenarnya penting untuk diterapkan dalam komunikasi keluarga (Simpson, 2017). Konsep kehadiran digital yang merupakan “social presence” anggota keluarga menjadi bagian penting dalam keluarga walaupun pertemuan langsung juga tidak kalah penting. Karena sentuhan langsung masih sangat dibutuhkan dalam masa tumbuh kembang anak.

Ke depan, kita akan semakin mengalami perubahan komunikasi keluarga yang sangat dinamis sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Hadirnya teknologi komunikasi berdampak pada perubahan yang revolusioner dalam hubungan interpersonal dan dalam kehidupan keluarga (Barrie et al., 2019). Hal ini tidak lagi hanya soal bagaimana menggunakan teknologi tetapi juga hadirnya aplikasi “pengganti orang tua” seperti akun-akun Siri dan Alexa yang dengan setia menemani dan menjawab pertanyaan anak-anak, hingga melakukan hal yang kecil. Akun pengganti orang tua dikhawatirkan menjadi sebuah kenyamanan baru yang menggantikan peran orang tua. Anak-anak juga memiliki ketrampilan sebagai native digital dalam mengeksplorasi media baru, termasuk alat “speaker canggih”. Alat seperti “speaker canggih” juga akan menjadi tantangan karena bisa menjadi disruptif bagi tumbuh kembang anak yang didampingi oleh “baby sister digital” tersebut (Mascheroni, 2024).

### **Strategi Membangun Karakter Anak Melalui Komunikasi Keluarga**

Peran penting keluarga sangat fundamental karena sejatinya keluarga adalah institusi sosial yang paling kecil namun fungsinya bagi pengembangan kepribadian anak-anak sangat besar. Anak-anak belajar tentang norma yang hidup di masyarakat, mana yang baik dan buruk, pantas tidak pantas, serta belajar bersosialisasi dari orang tua. Orang tua memiliki peran sentral bagi anak untuk belajar tentang keterlibatan sosial dan orang tua

bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar mereka (Suparno & Hendariningrum, 2014).

Beragam strategi untuk membentuk pertahanan diri dan karakter anak yang kuat diantaranya dapat dilakukan melalui pengarahan, pelatihan, penugasan, pembiasaan, pengawalan, pemberian contoh keteladanan (Agustina et al., 2019). Semua strategi tersebut sangat bermanfaat pagi proses penenaman dan penguatan karakter. Dalam hal pengarahan, orang tua penting memberikan gambaran arah rutinitas sehari-hari, termasuk bagaimana bersikap kepada orang lain. Orang tua perlu memberikan pengarahan dalam fase tumbuh kembang anak, bagaimana potensinya agar dapat dikembangkan. Orang tua juga perlu memberikan literasi digital agar media digital dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang positif (Wahyudi, 2019).

Literasi digital bermakna sangat luas, mulai dari menanamkan pemahaman tentang gawai, dua sisi gawai antara manfaat dan madharatnya, mengenal lingkungan dunia maya, beserta sifat medianya. Belajar etika dalam komunikasi digital bagi anak sangatlah penting. Anak-anak perlu belajar norma di ruang digital. Seringkali karena ketidaktahuannya, anak-anak menggunakan kata-kata yang lazim mereka lihat dan dengar dan dianggap sebagai hal yang lumrah, padahal kata-kata tersebut tidak sopan. Masing-masing keluarga perlu mengajarkan norma berkomunikasi digital agar anak memahami apakah komunikasi tersebut pantas dan beretika atau tidak. Hal ini mengingat bahwa banyak perundungan dan kekerasan terjadi di dunia maya.

Orang tua perlu melakukan pelatihan dan penugasan agar anak memiliki karakter yang baik, Pelatihan agar misalnya berjabat tangan ketika bertemu orang lain, menghormati orang yang lebih tua adalah hal sederhana yang terus perlu dipupuk. Begitu juga misalnya memberikan tugas menyambangi orang yang lebih tua. Penugasan ini sekaligus proses pembiasaan agar anak memiliki karakter yang baik, terbuka, menghargai, serta bersikap dan

berperilaku sopan. Namun, dalam proses pelatihan dan penugasan sangat membutuhkan komunikasi mendalam anak dan orang tua.

Pembiasaan adalah bagian dari proses pendidikan yang paling sederhana untuk membangun karakter. Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat, adalah contoh proses membangun kebiasaan agar anak-anak memiliki kebiasaan yang baik yang pada akhirnya membangun karakter anak. Namun konsep 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tersebut sangat membutuhkan komunikasi yang mendalam baik dari guru maupun orang tua. Komunikasi antara orang tua kepada anak untuk menyampaikan pentingnya tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat sangatlah penting, sekaligus melalui proses pengarahan, pelatihan, penugasan, pembiasaan, pengawalan, dan pemberian contoh keteladanan. Contoh keteladanan orang tua dalam membangun karakter sekaligus komunikasi yang mendalam tentang makna tindakan keteladanan orang tua sangat penting. Sehingga anak tidak hanya melihat namun mengerti maknanya.

Komunikasi keluarga tetap harus memiliki panduan agar komunikasi keluarga khususnya dalam membangun karakter berjalan efektif dan efisien. Pemanfaatan komunikasi melalui digital harus dilakukan dengan bijaksana dengan tetap mengutamakan komunikasi langsung. Komunikasi digital dilakukan untuk menguatkan kehadiran dan melengkapi komunikasi langsung saat sedang tidak bersama. Komunikasi digital dapat dilakukan kepada keluarga inti maupun keluarga besar. Pemahaman orang tua tentang substansi komunikasi sesuai dengan usia tumbuh kembang anak dan waktu yang tepat menjadi hal yang penting. Memperlakukan anak dengan komunikasi dialogis atau tipe konsensual sangatlah penting sehingga anak nyaman bercerita.

Peran kedua orang tua baik bapak maupun ibu sangat penting dalam membangun komunikasi keluarga. Pembentukan

karakter juga merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Sayangnya, pada era digital yang menghadirkan fungsi teknologi sangat besar, peran perempuan menjadi lebih besar dan tidak proporsional dalam mengambil peran komunikasi digital dalam keluarga (Hu & Qian, 2024). Perempuan mengalami 'beban ganda digital' dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam komunikasi keluarga di era digital. Hal ini juga pernah dibahas dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada masa pandemic covid 19, perempuan bahkan dianggap memiliki beban triple, atau tiga kali lebih berat, termasuk dalam mendampingi proses pembelajaran anak dan tambahan beban domestik efek dari semua anggota keluarga beraktivitas di rumah (Komnas Perempuan, 2020). Begitu pula dalam mendampingi belajar, mendampingi beraktivitas selain belajar, mengajak beribadah, mengajak membantu orang lain, mendengarkan pendapat anak, serta mengajarkan membantu orang tua lebih banyak dilakukan oleh Ibu (Pranawati & Maemunah, 2020). Peran bapak dan ibu dalam membangun komunikasi orang tua dan anak serta antar anggota keluarga sama pentingnya. Padahal seharusnya komunikasi keluarga sekaligus menguatkan karakter anak harus dilakukan bersama antara kedua orang tua.

## **SIMPULAN**

Perubahan sosial sebagai dampak hadirnya teknologi digital adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Dampak hadirnya teknologi juga berpengaruh pada komunikasi keluarga, antara orang tua dan anak. Anak-anak yang native digital lebih banyak ditemani oleh gawai. Padahal peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak. Keluarga tetaplah memiliki peran dan fungsi yang fundamental dalam penanaman nilai dan penguatan karakter anak di tengah tantangan kondisi anak hari ini.

Teknologi sejatinya bersifat netral, namun teknologi selalu ada sisi negatif dan positif. Dalam konteks komunikasi keluarga, gawai bisa menjadi sarana digital untuk merepresentasikan kehadiran dan keterhubungan dengan orang tua, meskipun demikian bertemu langsung masih sangat dibutuhkan untuk

menguatkan kelekatan. Kualitas komunikasi saat bertemu yang dimanfaatkan untuk penguatan karakter anak melalui proses pengarahan, pelatihan, penugasan, pembiasaan, pengawalan, dan pemberian contoh keteladanan. Gawai juga memiliki sisi positif dalam hal menjaga keterhubungan antar keluarga inti, keluarga besar, maupun teman. Tantangan kehadiran media digital juga perlu diantisipasi agar tidak menjadi disruptif dalam tumbuh kembang anak dan menguatkan pendidikan karakter. Kehadiran kecanggihan teknologi seperti “speaker canggih”, aplikasi siri dan alexa, yang menjadi pengasuh anak perlu diantisipasi agar tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Literasi digital kepada anak-anak juga menjadi hal yang penting untuk menjadi bahan komunikasi keluarga agar anak-anak mendapatkan sisi baik dari teknologi untuk penguatan karakter anak-anak di era digital. Perbaikan komunikasi keluarga akan membantu menguatkan pendidikan karakter anak melalui keluarga.

## BAB 13

### Peran Komunikasi Keluarga dalam Mencegah Kenakalan Remaja pada Era Digital

Sri Mustika, Tellys Corliana, Rita Pranawati

#### Abstrak

Kenakalan remaja sejak zaman dulu hingga sekarang masih terus terjadi. Bedanya pada era digital seperti sekarang, kenakalan remaja salah satunya dipicu oleh konten-konten di media sosial. Ketika melakukan kenakalan mereka mengunggah aksinya melalui video di media sosial, bahkan ada yang sengaja life. Tindakan ini dapat mendorong remaja lain melakukan hal yang sama. Penelitian ini mengkaji tentang peran komunikasi keluarga dalam mencegah kenakalan remaja pada era digital. Peneliti menggunakan paradigma konstruktivis dan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi keluarga yang baik mampu mencegah anak melakukan kenakalan. Komunikasi keluarga ini dilakukan dengan penuh ketelatenan, kesabaran, dan kasih sayang. Ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus melakukan komunikasi secara lebih hati-hati. Hasilnya, anak-anak tidak pernah terlibat dalam kenakalan remaja.

Kata kunci: kenakalan remaja; komunikasi keluarga; pengungkapan diri; era digital

#### PENDAHULUAN

Kasus kenakalan remaja di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan sebanyak 2,41% desa/kelurahan di Indonesia mengalami perkelahian massal pada 2024, 0,68% di antaranya melibatkan remaja. Kenakalan remaja ini berupa perilaku negatif, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran hukum, dan tindakan anti-sosial lainnya. Meningkatnya jumlah kenakalan remaja tentu sangat memprihatinkan.

Penyebab kenakalan remaja ada beberapa hal. Di antaranya pengaruh dari lingkungan keluarga, sekolah, dan media sosial. Anak yang dalam tumbuh kembangnya terbiasa dengan paparan kekerasan akan menganggap hal itu wajar dan biasa. Akibatnya, dia melampiaskan ketidaksesuaian dari keinginannya dalam bentuk kekerasan. Pergaulan di sekolah dengan anak-anak yang terbiasa dengan kekerasan juga dapat memicu perilaku kekerasan. Demikian pula paparan konten kekerasan di media sosial dan pergaulan lewat media sosial dapat menimbulkan pengaruh buruk.

Tumbuh kembang anak idealnya diisi dengan aktivitas bermain dan belajar. Sayangnya, terdapat banyak permasalahan yang membuat anak tidak dapat bertumbuhkembang di lingkungan yang baik. Kekerasan oleh anak juga dapat disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan emosional anak. Padahal anak membutuhkan kasih sayang, rasa aman, penghargaan diri, dan gambaran diri yang sehat dari lingkungan sekitarnya.

Di kota besar, seperti Jakarta, kebanyakan orang tua sibuk bekerja. Sekalipun orang tua dan anak memiliki sama-sama telepon genggam untuk berkomunikasi, namun kesibukan masing-masing membuat mereka justru tidak sempat berkomunikasi. Setibanya di rumah orang tua sudah lelah, sehingga tidak ada bisa berkomunikasi dengan anak. Akibatnya, anak tidak mendapat kesempatan berkomunikasi untuk melakukan self disclosure pada orangtuanya. Setiap individu memiliki informasi pribadi (private information). Jika informasi pribadi ini disampaikan kepada orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal, maka tindakan ini disebut sebagai pengungkapan pribadi atau self disclosure (Petronia. dalam West, Richard dan Lynn H. Turner, 2020).

Barker dan Gaut (1996) menjelaskan pengungkapan diri merupakan informasi diri meliputi pikiran, pendapat, keinginan, perasaan atau perhatian. Pengungkapan diri memiliki beberapa keuntungan, seperti meningkatkan kepercayaan diri, membantu mengatasi masalah, memperbaiki hubungan, meningkatkan dukungan sosial, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan mengurangi tekanan batin (stres), memperkuat hubungan

antarribadi, mempermudah orang lain memahami diri kita, dan meningkatkan kesadaran diri.

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Komunikasi Keluarga dalam Mencegah Kenakalan Remaja pada Era Digital. Komunikasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Untuk berinteraksi dengan sesamanya orang harus berkomunikasi. Melalui komunikasi, manusia dapat menyampaikan keinginan, pesan, dan tujuan-tujuan lain yang diinginkan. Dalam konteks keluarga, komunikasi merupakan satu aspek penting untuk saling memahami dan melindungi anggota keluarga. Terlebih ketika di dalam keluarga terdapat anak remaja yang mengalami kesulitan atau masalah yang pelik. Banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak remaja terhadap teman, pacar, atau orang lain penyebabnya antara lain tidak sehatnya komunikasi dalam keluarga. Untuk itu, guna membantu anak-anak dalam menjalani masa peralihan dari remaja menjadi dewasa orang tua perlu melakukan komunikasi secara intensif. Tujuannya tidak lain untuk menumbuhkan keakraban di antara keduanya. Adanya komunikasi ini membuat anak merasa diperhatikan dan dilindungi keberadaannya.

Devi (2015) meneliti tentang proses komunikasi interpersonal ibu dalam pembentukan sikap konatif anak. Hasil penelitian ini menunjukkan, cara pengomunikasian pesan oleh seorang ibu yang aktif di organisasi kepada anak sulung perempuannya dalam membentuk sikap konatif. Sikap konatif merupakan tahapan sikap ketika seseorang melakukan hal yang diketahuinya. Melalui komunikasi ibu-anak, ibu memberikan pengertian tentang aktivitasnya di organisasi. Tujuannya agar anak dapat memahami aktivitas ibunya sekaligus ingin melatih tanggung jawab anak sulungnya. Disamping itu, ibu juga memberikan kebebasan anak berpendapat, mengajari anak agar selalu bersyukur, mendukung prestasi anak, dan membina hubungan dekat dengan anak.

Ibu mendidik ketiga anak perempuannya yang berbeda karakteristik ini secara berbeda-beda pula sesuai dengan

karakteristik setiap anak. Ibu lebih memfokuskan komunikasi dengan sulungnya (10 tahun). Kepada anak sulungnya ia memberikan tanggungjawab dan kepercayaan yang besar. Harapannya, agar anak sulung dapat menjadi wakil ibunya dalam mengasuh dua adiknya. Dengan komunikasi yang intensif ini ibu berhasil menjadikan anak sulung sebagai kakak yang bertanggung jawab pada kedua adiknya.

Penelitian lain dilakukan oleh Sabarua dan Mormene (2020) tentang peran komunikasi keluarga sebagai tempat utama pembentukan karakter anak SD di Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah. Komunikasi orang tua berfungsi sebagai pengarah dan pembentuk pola dan perilaku anak, karena pada usia tersebut komunikasi antara orang tua dengan anak akan menjadi contoh bagi anak yang kemudian secara otomatis membentuk karakternya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pola komunikasi yang digunakan oleh orang tua sama dengan pola komunikasi yang digunakan oleh anak pada saat ia berkomunikasi di sekolah.

Penelitian lain yang dilakukan Thoyibah, Nurjannah, dan Sumarni (2017) tentang korelasi antara pola komunikasi keluarga dengan kenakalan remaja SMP menggunakan metode: desain cross-sectional dengan pendekatan deskripsi korelasi. Sebanyak 243 siswa yang dipilih secara simple random sampling merupakan siswa kelas 7 dan 8 SMP. Peneliti menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan uji Chi Square. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas kategori kenakalan remaja rendah (65%) dan mayoritas pola komunikasi berada pada kategori fungsional (73,3%). Terdapat hubungan yang signifikan antara pola komunikasi keluarga dengan kenakalan remaja ( $p<0,05$ ).

Vegas (2024) meneliti tentang hubungan antara fungsi keluarga dan agresi di kalangan remaja Spanyol. Sampel sebanyak 1.196 terdiri dari remaja berusia antara 14 dan 18 tahun (50 persen perempuan). Mereka dipilih dari 23 pusat pendidikan, 10

universitas, dan 18 fasilitas khusus remaja. Kepada mereka diberikan kuesioner Agresi Buss dan Perry (BPAQ) dan Skala Evaluasi Kohesi dan Adaptasi Keluarga (Paket FACES IV).

Hasilnya menunjukkan bahwa permusuhan remaja merupakan dimensi agresi yang paling kuat terkait dengan fungsi keluarga yang buruk. Faktor risiko fungsi keluarga bagi agresi adalah keterlepasan, kekacauan, dan kekakuan, sedangkan komunikasi keluarga merupakan faktor perlindungan yang penting. Keterikatan tidak berkorelasi secara signifikan dengan agresi, namun menjadi faktor risiko agresi pada akhir masa remaja. Variabel fungsi keluarga yang paling terkait dengan agresi remaja dalam keluarga multi-bermasalah adalah pelepasan diri, sementara itu tidak adanya kekakuan di antara pelaku remaja. Hasilnya jika dibahas dengan mempertimbangkan konteks budaya, menyimpulkan pentingnya orang tua Spanyol menggabungkan kasih sayang dan kepemimpinan, serta meningkatkan komunikasi keluarga yang positif.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kparadigma konstruktif. Penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui data yang sedetail mungkin (Kriyantono, 2010), tidak diperoleh melalui prosedur statistik, mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia serta tidak mengkuantifikasikan data (Afrizal, 2019).

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Tujuannya, menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan obesrvasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka.

Partisipan penelitian ini terdiri atas empat orang ibu dan empat anak remaja. Partisipan penelitian merupakan perempuan yang bekerja penuh waktu, berusia 35-46 tahun, sedangkan anak-anaknya yang remaja berusia 13-19 tahun. Mereka berdomisili di

Jakarta. Penelitian ini dilakukan di Jakarta selama enam bulan sejak Oktober 2023-April 2024.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Komunikasi Keluarga**

Komunikasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Untuk berinteraksi dengan sesamanya orang harus berkomunikasi. Melalui komunikasi, manusia dapat menyampaikan keinginan, pesan, dan tujuan-tujuan lain yang diinginkan. Dalam konteks keluarga, komunikasi merupakan satu aspek penting untuk saling memahami dan melindungi anggota keluarga. Terlebih ketika di dalam keluarga terdapat anak remaja yang mengalami kesulitan atau masalah yang pelik. Banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak remaja terhadap teman, pacar, atau orang lain penyebabnya antara lain tidak sehatnya komunikasi dalam keluarga. Untuk itu, guna membantu anak-anak dalam menjalani masa peralihan dari remaja menjadi dewasa orang tua perlu melakukan komunikasi secara intensif.

Pada dasarnya komunikasi keluarga merupakan cara untuk memahami keluarga dan membina relasi di dalamnya. Terdapat tiga alasan yang dikemukakan para ahli tentang fokus kajian komunikasi keluarga. Seperti dijelaskan dalam *Handbook of Family Communication* (ed Vangelisti, 2004) bahwa pertama, keluarga menjadi tempat untuk sosialisasi pengalaman yang paling awal. Dengan mengamati dan berinteraksi dengan anggota keluarga orang belajar berkomunikasi dan yang lebih penting, mereka belajar untuk memikirkan komunikasi. Kedua, komunikasi adalah sarana yang dimanfaatkan anggota keluarga untuk menjalin, menjaga, atau memutuskan hubungan intim mereka. Orang-orang membentuk keluarga mereka melalui interaksi sosial. Komunikasi memungkinkan pasangan kencan untuk bertemu dan mengevaluasi status hubungan mereka (e.g., Berger, Gardner, Clatterbuck, & Shulman, 1976). Ketiga, komunikasi

keluarga adalah komunikasi yang mencerminkan hubungan antarribadi di antara para anggota keluarga.

Dengan demikian, komunikasi ini menawarkan kepada para peneliti dan ahli teori cara memprediksi kualitas dan jalannya hubungan keluarga. Misalnya, seorang peneliti sudah lama mengemukakan bahwa komunikasi merupakan salah satu indikator kualitas hubungan perkawinan. Pasangan yang tertekan umumnya memberikan pengaruh yang lebih negatif dan lebih sedikit pengaruh positifnya, serta lebih banyak pengaruh negatif timbal balik daripada mereka yang tidak tertekan. (Margolin & Wampold, 1981; Noller, 1984; Notarius & Johnson, 1982)"

Komunikasi keluarga secara berasal dari sejumlah disiplin akademik dan didasarkan pada berbagai metodologi. Studi tentang komunikasi keluarga bukan hanya domainnya ilmu komunikasi. Hal ini dikarenakan perhatian terhadap keluarga dan komunikasi juga dilakukan oleh sejumlah disiplin akademik, seperti perkembangan anak, psikologi sosial dan sosiologi. Itu sebabnya terdapat banyak teori yang berbeda berkenaan dengan komunikasi keluarga.

Penelitian ini menggunakan teori Pola Komunikasi Keluarga (Family Communication Patterns Theory) yang dikembangkan oleh Koerner dan Fitzpatrick (dalam Griffin, 2023). Asumsi teori ini bahwa penciptaan realitas sosial bersama adalah fungsi dasar dari komunikasi keluarga. Fitzpatrick mempercayai bahwa percakapan di dalam suatu keluarga akan mempengaruhi cara anggota keluarga menjalani hidup. Pembicaraan inilah yang disebut sebagai pola komunikasi keluarga.

Ada empat tipe berkenaan dengan teori pola komunikasi keluarga, yaitu keluarga konsensual, keluarga pluralistik, keluarga protektif, dan keluarga laissez-faire. Pola komunikasi keluarga diasosiasikan dengan sejumlah proses dalam keluarga, seperti konflik, konfirmasi, dan afeksi, ritual

keluarga, dan pemahaman. Juga diasosiasikan dengan kegiatan anak, seperti pemahaman, komunikasi dengan pacar, ketabahan dan kesehatan fisik serta mental anak. (Littlejohn dan Foss, 2014)

Keluarga berperan penting dalam menumbuhkan kekuatan anak guna menghadapi problema kehidupan. Keluarga juga berperan dalam mewujudkan stabilitas, pemeliharaan, kesetiaan dan dukungan bagi anggotanya (Herawati et al., 2020). Jika fungsi komunikasi keluarga baik, maka hal ini dapat mewujudkan stabilitas, pemeliharaan, kesetiaan dan dukungan bagi anggotanya. Jika fungsi keluarga tidak berfungsi maksimal, maka akan timbul berbagai hal negatif bagi anggota keluarga atau warga di sekitarnya. Jika fungsi keluarga berjalan baik, maka anggota keluarga akan mudah dalam menyelesaikan masalah, saling mendukung, berkomunikasi efektif, dan menghadapi bersama tantangan keluarga.

## **B. Remaja**

Secara umum para ahli mendefinisikan remaja sebagai masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Menurut WHO, remaja adalah anak yang rentang usianya antar 10-19 tahun.

Kata remaja berasal dari bahasa Latin, adoloscere yang berarti bertumbuh atau bertumbuh menjadi matang. DeBrun (dalam Rice, 1990) mendefinisikan remaja sebagai pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Ahli psikologi perkembangan mengatakan remaja merupakan masa transisi (peralihan) dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada saat itu terjadi perubahan fisik, emosional, sosial, dan kognitif yang signifikan.

## **C. Kenakalan Remaja**

Para ahli menyebut kenakalan remaja adalah perilaku yang melanggar aturan dan norma yang berlaku di

masyarakat. Ada juga yang menyebut sebagai perilaku yang tidak diterima secara sosial. Kenakalan remaja biasanya merupakan perilaku jahat yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, seperti aturan keluarga, orang tua, dan adat-istiadat.

Penyebab kenakalan remaja seperti disebut Jamisari (2009) ada tiga kondisi keluarga, yaitu keluarga tidak harmonis. Ketidakharmonisan ini dapat disebabkan kondisi orangtua yang bercerai, minimnya komunikasi antar keluarga, dan konflik dalam keluarga, serta pengasuhan yang salah. Hetherington dan Parke (dalam Jamisari, 2009) menyatakan pola pengasuhan orang tua mencakup aspek: pemenuhan kebutuhan, penerapan disiplin/aturan/kontrol dan cara berkomunikasi. Anak yang ditolak. Penolakan orangtua terhadap anak yang sering ditunjukkan dalam bentuk pengabaian dan kurangnya perhatian pada anak. Penolakan ini sering memunculkan ciri-ciri agresivitas dan tingkah laku bermusuhan pada anak tersebut. Ini disebabkan anak merasa tidak disayangi, tidak dihargai, dan ditolak, sehingga menimbulkan kemarahan dan dendam pada anak

Ada empat pola asuh anak yang memberikan dampak berbeda pada anak remaja (Syahraeni, 2021). Pengasuhan otoriter sering kali membuat remaja kurang memiliki inisiatif dan keterampilan komunikasi yang buruk. Pola asuh demokratis di mana orang tua tidak banyak ikut campur dalam kehidupan anak membuat remaja anak bertumbuh wajar dan dapat memberikan masukan pada orangtua dalam membuat keputusan. Pola pengasuhan yang mengabaikan anak melahirkan anak merasa tidak diperhatikan dan cenderung berbuat negatif. Pola pengasuhan memanjakan membiarkan anak berbuat semaunya. Pola asuh ini mengakibatkan anak kompetensi sosialnya rendah.

## D. Profil Partisipan Penelitian

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Jumlah Anak
1.	R.A.K.	44 tahun	HRD perusahaan swasta	1 (16 tahun)
2.	NI	44 tahun	PNS di Kecamatan Jakarta Selatan	3 (17 tahun, 15, tahun, 13 tahun)
3.	ES	46 tahun	Karyawan swasta	2 (19 tahun, 14 tahun)
4.	N	45 tahun	ASN di Pemda DKI	4 (18 tahun, 15 tahun, 13 tahun dan 11 tahun)

Partisipan penelitian terdiri atas empat ibu yang berusia antara 44-46 tahun dengan jumlah anak berkisar antara 1-4 orang. Terdiri atas anak laki-laki dan juga perempuan. Para ibu ini merupakan perempuan bekerja penuh waktu. Keempatnya merupakan sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Anak-anaknya berusia antara 11 tahun-20 tahun. Satu di antaranya ada yang berusia 20 tahun dan sudah kuliah pada semester 6.

## E. Komunikasi Ibu-Anak

Dari hasil wawancara dengan para partisipan penelitian, peneliti memperoleh data sebagai berikut:

RAK adalah seorang manager HRD di sebuah perusahaan otomotif. Ibu berusia 44 tahun ini bekerja penuh waktu, lima hari dalam seminggu. Sesekali ia melakukan dinas keluar kota untuk jangka waktu seminggu bahkan lebih.

Kendati sibuk ia selalu berusaha berkomunikasi dengan anak tunggalnya yang laki-laki. Melalui telepon atau WA ia secara rutin menanyakan kabar anaknya dari kantor. Terkadang ia menanyakan, anaknya ingin makan apa. Setelah si anak menentukan pilihan, ia segera memesankan makanan tersebut melalui layanan ojek online.

“Tidak ada maksud memanjakan dia yang sudah duduk di kelas satu SMA, tetapi kalau dia memilih sendiri saya khawatir berdampak kurang baik pada pencernaannya. Untuk memesan ojek online sepulang sekolah, saya juga yang melakukan,” ungkap ibu yang putranya mengalami Attention Defisit Hyperactivity Disorder (ADHD). ADHD merupakan gangguan kesehatan yang membuat anak sulit memfokuskan perhatian dan juga hiperaktivitas.

Di rumah mereka tidak ada pembantu, hanya ada orang yang seminggu sekali datang untuk bersih-bersih. Suaminya bekerja di luar kota dan pulang pada akhir pekan. “Demi keamanan dia, saya yang memesankan ojek agar bisa saya pantau,” ujar ibu yang juga memonitor kegiatan anaknya di rumah dengan CCTV.

Agar memiliki waktu lebih banyak untuk anaknya, menggunakan waktunya secara efisien. Ia berusaha mengurangi kegiatan yang dinilainya membuang waktu. Untuk itu setiba di kantor ia langsung berkonsentrasi pada tugas-tugasnya. Ia membatasi mengobrol dengan kawan, kecuali saat istirahat makan siang. Tujuannya, agar ia bisa cepat pulang. Setiba di rumah, ia berusaha mengoptimalkan waktu untuk berkomunikasi dengan anaknya. Untuk mendapatkan attensi anaknya, ia memulai pembicaraan dengan topik kegemaran anaknya. Dengan demikian, ia lebih mudah untuk menggali topik lainnya.

“Anak saya sangat menggemari game, segala hal tentang sejarah Perang Dunia, dan pesawat. Jika obrolan diawali dengan topik tersebut, saya lebih mudah bicara

tentang topik lainnya, seperti kegiatan di sekolah, pergaulannya, hal yang paling disukai dan tidak disukai hari itu, kegiatan les dan ekskulnya. Dia mengikuti beberapa les, seperti les mata pelajaran sekolah, taekwondo, piano, dan coding," ujar ibu yang di rumah biasa mengecek email, menelepon, atau melakukan hal lain ketika anaknya tidur ini.

Melihat kondisi anaknya, tidak mudah baginya menjelaskan tentang fenomena kenakalan remaja saat ini. Ia berusaha menjelaskan secara sederhana bahwa setiap orang akan menerima sanksi dari perbuatannya.

"Saya jelaskan apa artinya kenakalan remaja, termasuk kenakalan yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum, disertai contoh konkretnya. Setelah itu saya perhatikan reaksinya dan selami perasaannya," tutur ibu yang mengikutkan anaknya dalam beberapa kegiatan, seperti mengaji, ekskul, kursus piano, dan taekwondo. Selain itu, ia juga memberikan pendidikan seksual dengan bahasa sederhana agar dapat dipahami anaknya. Dengan ketelatenan, kesabaran, dan kasih sayang, ia berusaha menjalin komunikasi yang intensif dengan anak semata wayangnya.

Partisipan penelitian kedua, ibu berusia 44 tahun mengungkapkan,

"Sepulang kerja selalu mencari waktu mengobrol dengan anak-anaknya. Jika mereka longgar, saya bisa tanya macam-macam hal, terutama kegiatan di sekolah. Kalau mereka antusias bercerita, obrolan bisa dilanjut. Mereka itu pendiam dan tertutup, tapi kalau hatinya sedang lega, biar tidak ditanya mau bercerita panjang lebar," ungkap pegawai negeri sipil (PNS) di kantor Kecamatan di Jakarta Selatan ini.

Obrolan dengan anak-anaknya lebih banyak tentang hobi dan minat mereka. "Saya berusaha memahami minat dan bakat mereka. Tapi namanya ibu, sesekali saya saranin

mereka ikut kegiatan yang menurut saya bagus. Sayangnya, mereka kurang tertarik. Itulah tantangan saya," tuturnya seraya berharap agar suatu saat gadisnya mau menerima sarannya.

Sesekali mereka membahas mengenai kejadian-kejadian di lingkungan sekitar, seperti kenakalan remaja. "Si sulung sudah mampu mencerna berita di TV atau media sosial. "Saya coba jelaskan hal itu sejauh pemahaman mereka. Si sulung sudah agak dewasa, jadi lebih paham. Nah, yang bungsu perlu dijelaskan dengan lebih sederhana," ungkapnya.

Saat makan malam merupakan waktu yang biasa digunakan partisipan penelitian 3. Sambil makan, ia memancing dua anak laki-lakinya untuk bercerita tentang kegiatan mereka. Selesai makan kebersamaan masih berlanjut dengan menonton teve bersama di ruang keluarga. Suasana pun menjadi ramai jika mereka berkomentar pada tontonan yang seru atau konyol.

"Saya berusaha menanggapi komentar-komentar mereka. Si abang yang sudah mahasiswa pemikirannya berbeda dengan adiknya yang SD. Biarpun begitu si abang tidak pernah meremehkan adiknya. Demikian pula saya, kalau ada yang kurang dipahami si kecil, saya berusaha menjelaskannya," tutur ibu yang sering mengajak anak-anaknya bercanda ini.

Mengenai kenakalan remaja di sekitarnya, si sulung yang sudah mahasiswa sudah lebih mengerti dibandingkan adiknya. Hanya ibunya sering khawatir, karena bila ada "keributan" dia malah keluar mengamati keadaan. "Kalau dilarang dia bilang, 'Mama nggak usah khawatir, abang kan sudah besar. Sudah bisa jaga diri.' Ya , sudah saya diam," ungkap ibu yang Sarjana Hukum ini.

Partisipan penelitian 4 juga selalu berusaha mengobrol dengan anak-anaknya saat makan malam atau setelah anak-anak di kamar untuk belajar atau bermain game. Obrolannya seputar kegiatan di sekolah, soal teman-teman mereka, kadang soal pelajaran. Sesekali mereka menceritakan kenakalan temannya. "Kalau mereka cerita kenakalan temannya, saya langsung jelaskan dampak buruknya. Juga saya jelaskan bahwa kenakalan tersebut bisa menghambat masa depan pelaku," ungkap ibu empat anak ini. Menurutnya, berkomunikasi dengan anak-anak membuat mereka merasa dihargai, diterima, dan dipahami sebagai pribadi dengan kelebihan dan kekurangannya. Bahkan mereka menganggap orang tua sebagai sahabat mereka.

Masa remaja merupakan masa yang rawan, karena pada saat itu anak berada pada masa peralihan dari anak-anak hendak menuju dewasa. Dari wawancara di atas, para partisipan penelitian menyadari pentingnya komunikasi keluarga, karena menumbuhkan kedekatan antara orang tua dan anak. Dari komunikasi ini orang tua dapat memahami aktivitas anak-anaknya di sekolah, tugas-tugas yang harus dikerjakan, teman-teman mereka, dan hal-hal yang membuat mereka suka atau tidak suka. Pada kesempatan pula ini anak-anak bisa melakukan self disclosure (pengungkapan diri). Seperti kata Petronia dkk (1986) bahwa pengungkapan diri mengenai hal-hal yang sebelumnya terpendam untuk diri sendiri memiliki manfaat bagi yang bersangkutan. Salah satu manfaatnya adalah membantu seseorang untuk melakukan komunikasi dengan orang lain dengan cara yang lebih baik.

Dalam konteks hubungan orang tua anak, pengungkapan diri selain dapat melegakan hati si anak, bagi orang tua pun bermanfaat karena dapat mengetahui hal yang dipendam anaknya selama ini. Keterbukaan diri juga dapat membangun hubungan antarpribadi dengan lebih baik, sebab diri sendiri akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Dengan rasa percaya diri tersebut, hubungan diri dengan

lingkungan sekitar menjadi lebih akrab, harmonis, dan kondusif, terutama hubungan dengan orang tuanya.

Melalui pengungkapan diri anak, orang tua juga dapat orang mengetahui pertemanan anaknya, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Pertemanan anak dengan seseorang dapat membawa pengaruh baik atau buruk. Anak-anak yang masih belum dewasa perilakunya masih mudah dipengaruhi. Karena itu, jika dia berteman dengan anak yang baik perilakunya bisa berubah, karena pengaruh temannya. Seorang teman yang baik dapat mempengaruhi seorang anak untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, teman yang perangainya buruk dapat mempengaruhi anak yang semula baik menjadi buruk.

Dari pengungkapan diri pula orang tua mengetahui perasaan anaknya selama ini. Bisa jadi anak selama ini mengalami tekanan batin akibat bullying oleh teman sekolahnya. Tekanan batin tersebut terus dirasakannya sendiri, karena dia tidak berani mengungkapkan pada orang tuanya. Bahkan bullying ternyata tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada pelaku, dan anak yang menyaksikan. Selain itu dampaknya tidak hanya sementara melainkan bisa dalam jangka panjang.

Menyimak hasil wawancara dengan partisipan penelitian di atas, tampak bahwa untuk mencapai kedekatan dengan anak terkadang orang tua mengalami kendala. Misalnya, jika anak mengalami misalnya. Orang tua memerlukan strategi tersendiri untuk mendekati anaknya. Ia harus terlebih dahulu melakukan probing (teknik menggali informasi secara mendalam dengan mengajukan pertanyaan berkelanjutan).

Demikian pula dalam menghadapi anak yang introvert (tertutup). Anak perlu dipuji dan diapresiasi agar merasa dihargai. Apresiasi dapat meningkatkan kepercayaan dirinya, sehingga memotivasinya untuk mencoba hal-hal baru.

Terhadap anak yang tertutup orang tua sebaiknya juga tidak membandingkannya dengan anak lain, karena hal ini dapat menurunkan harga dirinya.

Mengenai kenakalan remaja, para partisipan penelitian berusaha menjelaskan secara sederhana kepada anak-anaknya. Orang tua yang anaknya ADHD lebih sulit dalam menjelaskan. Namun dengan bahasa yang sederhana bahwa semua perbuatan buruk akan membawa dampak bagi diri kita, maka anak dapat memahami dampak kenakalan yang dilakukan.

Pada anak yang sudah besar pun untuk menjelaskan mengenai kenakalan remaja memerlukan strategi tersendiri. Biasanya anak ini sudah memiliki pengalaman tersendiri dalam menghadapi kenakalan di lapangan. Memberikan kepercayaan kepada mereka dalam menghadapi situasi di luar lebih baik daripada menghalangi. Anak-anak yang sudah lebih dewasa memiliki pemahaman tersendiri terhadap kenakalan remaja lainnya. Alih-alih mencegah mereka keluar, lebih baik membekali diri dengan olah raga bela diri, seperti karate, taekwondo, silat, dan kempo.

## **SIMPULAN**

Remaja merupakan suatu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi proses kematangan fisik dan psikologis. Pada masa ini pula remaja mulai mencari jati dirinya. Keinginan mencari jati diri ini ada kalanya menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tatanan di sekitarnya. Akibatnya, mereka sering dianggap melakukan penyimpangan dalam wujud kenakalan. Tidak semua remaja melakukan kenakalan. Biasanya anak yang melakukan kenakalan dipicu oleh kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Akibatnya, kebutuhan fisik dan psikis anak tidak terpenuhi.

Peneliti menemukan bahwa komunikasi keluarga dapat mencegah terjadinya kenakalan remaja. Anak yang mendapat cukup perhatian dan kasih sayang orangtuanya biasanya

bertumbuh dengan baik dan terhindar dari perbuatan kenakalan remaja. Komunikasi keluarga yang baik juga dapat menjadi sarana pembentukan karakter anak. Komunikasi orang tua anak dapat berfungsi sebagai pengarah dan pembentuk pola dan perilaku anak saat dewasa.

Untuk menjalin komunikasi keluarga tidak selalu mudah, terutama bila orang tua terlalu sibuk, anak memiliki sifat tertutup, atau kondisi Attention Defisit Hyperactivity Disorder (ADHD). Orang tua yang memiliki anak introvert dan ADHD memerlukan strategi tersendiri dalam menghadapi anak-anak seperti ini. Yang pasti bahwa perhatian, kasih sayang menjadi kuncinya.

**BAB 14**  
**Media Dan Opini Publik dalam Membentuk Propoganda**  
**Politik**  
Syaiful Rohim

**Abstrak**

Media berperan penting dalam membentuk opini publik dan menjadi alat propaganda politik di Indonesia. Perkembangan teknologi digital mempercepat penyebaran informasi, mempengaruhi persepsi masyarakat, dan memicu polarisasi politik. Penulisan artikel ini mencoba menganalisis interaksi media dan opini publik dalam propaganda, dimana media massa memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam konteks politik, media bisa menjadi alat yang kuat untuk menyebarkan propaganda dan mempengaruhi persepsi serta perilaku masyarakat. Meskipun media memiliki potensi untuk menjadi alat demokratisasi informasi, penyalahgunaan media untuk tujuan propaganda dapat merusak fondasi demokrasi itu sendiri, memecah belah masyarakat, dan mengurangi kepercayaan pada institusi-institusi politik. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap informasi yang disebarluaskan, serta mendorong transparansi dan tanggung jawab dalam penyampaian informasi oleh media.

Kata kunci: media; opini publik; propaganda politik; komunikasi politik

**PENDAHULUAN**

Media massa memiliki peran krusial dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi dinamika komunikasi politik dalam suatu negara (Muhammad Raihan et.al, 2025). Dalam era digital yang semakin maju, media tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai alat propaganda yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan

pemerintah (Nuraliza et al., 2024). Komunikasi politik yang efektif memerlukan tata kelola manajemen yang baik agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan tepat oleh masyarakat (Indrawan, 2017). Opini publik merupakan refleksi dari sikap dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu yang berkembang dalam kehidupan sosial dan politik (Manjdusri, 2023). Media berperan sebagai kanal utama dalam membentuk opini publik dengan menyoroti isu-isu tertentu, memberikan interpretasi, dan mempengaruhi sudut pandang masyarakat (Arsyad et al., 2024). Dalam perspektif teori agenda-setting, media memiliki kekuatan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik dengan memberikan porsi pemberitaan yang lebih besar terhadap suatu topik (Alen, 2023).

Media memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik, terutama dalam konteks politik di Indonesia, di mana media tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai alat propaganda yang digunakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang (Arsyad et al., 2024). Sejak reformasi, kebebasan pers di Indonesia mengalami perkembangan pesat, tetapi di sisi lain, kebebasan ini juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk menggunakan media sebagai alat propaganda politik guna membangun citra atau menjatuhkan lawan politik (Indrawan, 2017).

Dalam perspektif teori agenda-setting, media memiliki kekuatan dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat dengan cara menyoroti berita tertentu dan mengesampingkan berita lainnya (Nuraliza et al., 2024). Dalam praktiknya, strategi ini banyak digunakan dalam politik untuk membentuk persepsi publik terhadap tokoh politik atau kebijakan tertentu. Media yang dikuasai oleh kelompok tertentu dapat memainkan peran aktif dalam membentuk wacana politik dan membangun narasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara pihak lain dapat dikonstruksi sebagai aktor yang negatif (Jayus et al., 2024).

Opini publik dalam konteks ini sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi informasi yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam era digital, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi dari media arus utama seperti televisi dan surat kabar, tetapi juga dari media sosial yang sering kali menjadi arena pertempuran propaganda politik (Fatika, 2025). Algoritma media sosial yang cenderung memperkuat informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna menyebabkan fenomena echo chamber, di mana individu hanya terpapar pada sudut pandang yang mendukung keyakinan mereka, sehingga memperkuat polarisasi politik (Zaky et al., 2024). Di Indonesia, propaganda politik sering kali digunakan dalam berbagai bentuk, seperti kampanye hitam (black campaign), berita palsu (hoaks), serta penggunaan buzzer politik yang bertugas untuk menyebarkan narasi tertentu guna membangun atau merusak citra politik seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana media dan opini publik saling berinteraksi dalam membentuk propaganda politik, serta bagaimana dampaknya terhadap stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia.

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, media telah menjadi instrumen utama dalam membentuk opini publik serta mengarahkan persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik yang ada dalam kehidupan sehari-hari, di mana interaksi antara media, pemerintah, dan masyarakat menjadi semakin kompleks serta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencerminkan bagaimana komunikasi politik dijalankan oleh aktor politik dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem demokrasi modern (Arsyad et al., 2024). Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah platform media yang tersedia bagi masyarakat luas, baik dalam bentuk media konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar, maupun media digital seperti situs berita daring dan media sosial, maka terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam cara individu menerima, mengolah, serta merespons informasi yang disampaikan oleh berbagai sumber yang tersedia dalam ruang publik (Alen, 2023).

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, peran media sosial dalam komunikasi politik semakin signifikan karena mampu menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi secara langsung dengan aktor politik serta berpartisipasi dalam diskusi publik yang lebih dinamis dan terbuka dibandingkan dengan model komunikasi politik yang bersifat satu arah melalui media konvensional (Nurfajri et al., 2025). Dengan adanya media sosial, masyarakat dapat mengekspresikan pendapat mereka dengan lebih bebas, namun di sisi lain, tantangan berupa penyebaran misinformasi dan disinformasi juga semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat mengaburkan batas antara informasi yang faktual dan propaganda politik yang bertujuan untuk memanipulasi opini publik (Evendi & Arinanda Kurnia, 2020). Oleh karena itu, tata kelola manajemen komunikasi politik yang efektif harus mencakup strategi dalam menghadapi tantangan digital serta upaya untuk meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat guna memastikan bahwa informasi yang dikonsumsi oleh publik memiliki tingkat akurasi dan kredibilitas yang tinggi (Alen, 2023).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Media dalam Propaganda Politik di Indonesia**

Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi politik masyarakat, baik melalui media massa konvensional maupun media digital yang semakin berkembang pesat (Arsyad et al., 2024). Dengan kontrol terhadap arus informasi, media dapat mengarahkan opini publik ke arah tertentu yang sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Di Indonesia, fenomena ini telah berlangsung sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi dan digital saat ini (Susilawati & Kurnia, 2024).

Propaganda politik merupakan upaya sistematis untuk memengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap suatu isu politik (Hanhan, 2023). Propaganda dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pemberitaan media, kampanye politik, hingga penggunaan media sosial untuk membentuk narasi tertentu (Fatika, 2025). Pada masa

pemerintahan Presiden Soekarno, media digunakan sebagai alat untuk menyebarkan ideologi nasionalisme dan anti-kolonialisme (Evendi & Arinanda Kurnia, 2020). Surat kabar dan radio banyak digunakan untuk menggalang dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Berbeda halnya di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, media dikendalikan secara ketat oleh pemerintah (Faradis et al., 2023). TVRI dan RRI menjadi corong utama propaganda negara. Pemberitaan dikontrol untuk memastikan stabilitas politik dan ekonomi, serta membatasi suara oposisi. Dengan runtuhan Orde Baru pada tahun 1998, kebebasan pers mulai berkembang (Aryadillah & Fitriansyah, 2022). Namun, media tetap menjadi alat propaganda, kali ini bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh berbagai kelompok politik dan pemilik modal (Alen, 2023). Media massa memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik melalui pemberitaan yang cenderung berpihak kepada kelompok tertentu. Pemilik media yang memiliki afiliasi politik sering kali menggunakan medianya untuk mendukung kandidat tertentu dalam pemilu atau untuk menyerang lawan politik (Nuraliza et al., 2024).

Di era hari ini dengan perkembangan teknologi, media digital telah menjadi alat utama dalam propaganda politik (Sampurna et al., 2024). Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain: Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok menjadi lahan subur bagi penyebaran propaganda politik (Alen, 2023). Banyak aktor politik yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang menguntungkan mereka dan merugikan lawan (Salsabila et al., 2024). Pada aspek lainnya penggunaan hoaks dan berita palsu sering kali digunakan untuk membentuk opini publik terhadap isu tertentu (Fatika, 2025). Kampanye disinformasi ini bisa dibuat oleh individu, kelompok, atau bahkan aktor negara.

## B. Pendekatan Teoritik

Salah satu teori yang relevan dalam memahami bagaimana media mempengaruhi opini publik adalah teori

agenda-setting, yang menegaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu-isu apa saja yang dianggap penting oleh masyarakat melalui pemberitaan yang intens dan berulang-ulang, sehingga pada akhirnya isu tersebut menjadi prioritas utama dalam diskusi publik serta menjadi faktor yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan politik yang dilakukan oleh aktor politik maupun masyarakat umum yang memiliki hak dalam sistem demokrasi (Zaky et al., 2024). Dalam konteks ini, media bukan hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kekuatan untuk membentuk kesadaran kolektif dalam suatu masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu tertentu serta mengabaikan isu lain yang dianggap kurang relevan atau tidak menarik bagi khalayak luas (Fatika, 2025).

Selain agenda-setting, teori framing juga menjadi sangat penting dalam menjelaskan bagaimana media dapat mempengaruhi opini publik melalui cara penyajian informasi yang dilakukan dengan berbagai strategi framing yang bertujuan untuk mengarahkan pemahaman serta interpretasi masyarakat terhadap suatu peristiwa atau isu tertentu (Nuraliza et al., 2024). Dalam praktiknya, framing dilakukan dengan memilih kata-kata, gambar, atau sudut pandang tertentu dalam pemberitaan sehingga audiens akan memahami informasi tersebut dengan perspektif yang telah dibentuk oleh media, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sikap serta tindakan politik yang diambil oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Misalnya, dalam pemberitaan mengenai kebijakan pemerintah terkait subsidi bahan bakar, media dapat membingkai isu tersebut sebagai kebijakan yang pro-rakyat dengan menyoroti manfaatnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, atau sebaliknya, sebagai kebijakan yang tidak efektif dengan menyoroti dampak negatifnya terhadap anggaran negara serta ketergantungan masyarakat terhadap subsidi (Hanhan, 2023).

Lebih lanjut, teori lain yang juga relevan memotret suatu gejala dan fenomena diskursus media dalam opini

publik adalah spiral of silence yang dikemukakan oleh Elisabeth Noelle-Neumann juga relevan dalam memahami bagaimana opini publik terbentuk dalam suatu masyarakat yang dipengaruhi oleh tekanan sosial serta dominasi media dalam menentukan pandangan yang dianggap sebagai mayoritas atau diterima secara luas oleh masyarakat (Hidayati, 2021). Dalam teori ini, dijelaskan bahwa individu cenderung untuk menyesuaikan pandangan mereka dengan opini yang dominan di ruang publik karena adanya ketakutan akan isolasi sosial jika mereka mengungkapkan pendapat yang berbeda dengan opini mayoritas yang telah dibentuk oleh media dan aktor politik (Susilawati & Kurnia, 2024). Oleh karena itu, media memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan wacana publik yang diterima oleh masyarakat serta bagaimana individu berpartisipasi dalam diskusi politik yang terjadi dalam ruang sosial mereka.

### C. Propaganda Politik dan Media Sosial dan Dampaknya Bagi Masyarakat

#### 1. Dampak Propaganda Politik terhadap Masyarakat

Propaganda politik yang intensif dapat menyebabkan polarisasi di masyarakat (Fatika, 2025). Masyarakat menjadi lebih terfragmentasi berdasarkan afiliasi politik mereka dan sulit menerima perspektif yang berbeda (Muhammad Raihan et.al, 2025). Ketika media terus-menerus digunakan untuk propaganda, kepercayaan masyarakat terhadap media menurun. Hal ini menyebabkan meningkatnya skeptisme dan ketergantungan pada sumber informasi alternatif yang belum tentu kredibel (Hanan, 2023). Dalam sistem demokrasi, media seharusnya berfungsi sebagai pilar keempat yang mengawasi kekuasaan. Namun, jika media digunakan sebagai alat propaganda, maka demokrasi dapat terancam karena informasi yang disampaikan tidak lagi objektif (Jayus et al., 2024).

Untuk mengatasi pengaruh negatif propaganda politik, beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi

literasi Media, Dimana masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai bagaimana mengidentifikasi berita yang objektif dan bagaimana memahami bias dalam pemberitaan (Hanan, 2023). Pemerintah dan lembaga independen harus memastikan bahwa media tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik semata (Zaky et al., 2024) Regulasi yang ketat terhadap penyebaran berita hoaks juga perlu diperkuat (Hidayati, 2021)

Publik harus mengetahui siapa yang memiliki media dan bagaimana afiliasi politik mereka memengaruhi pemberitaan yang disampaikan (Alen, 2023). Peran media dalam propaganda politik di Indonesia sangat signifikan dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi (Arsyad et al., 2024). Dari media konvensional hingga media digital, berbagai strategi digunakan untuk memengaruhi opini publik (Evendi & Arinanda Kurnia, 2020). Meskipun demikian, penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran akan bagaimana media digunakan untuk kepentingan politik dan bagaimana mereka dapat menjadi konsumen informasi yang lebih kritis.

## 2. Opini Publik sebagai Target Propaganda Politik

Opini publik adalah elemen yang terus berkembang dalam dinamika politik, yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh propaganda yang terstruktur dan sistematis (Manjusri, 2023). Menurut penelitian terbaru, opini publik dapat dibentuk melalui eksposur berulang terhadap narasi tertentu dalam media massa dan media sosial (Fatika, 2025). Dalam konteks politik modern, propaganda telah berkembang dengan memanfaatkan big data dan algoritma untuk menargetkan kelompok masyarakat tertentu (Indrawan, 2017). Hal ini memperlihatkan bahwa propaganda tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi politik, tetapi juga sebagai strategi manipulasi persepsi publik yang efektif (Nainggolan et al., 2024).

Media memiliki peran penting dalam menyebarluaskan propaganda politik yang dapat membentuk dan mengarahkan opini publik (Arsyad et al., 2024). Dengan adanya perkembangan teknologi digital, penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan luas, sehingga dampak propaganda semakin signifikan terhadap kesadaran politik masyarakat (Alen, 2023). Menurut kajian terbaru, framing berita yang dilakukan oleh media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami suatu isu politik. Selain itu, keberadaan algoritma media sosial memungkinkan personalisasi informasi yang membuat individu hanya terpapar pada sudut pandang tertentu. Hal ini memperkuat efek echo chamber, di mana individu hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sebelumnya (Zaky et al., 2024).

### 3. Strategi Propaganda dan Dampak Politik dalam Opini Publik

Dalam propaganda politik, strategi yang digunakan terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi dan perilaku audiens (Fatika, 2025). Salah satu strategi yang banyak digunakan adalah micro-targeting, di mana pesan politik disesuaikan dengan preferensi individu berdasarkan data perilaku mereka di internet (Dwitama et al., 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa propaganda berbasis emosional lebih efektif dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan propaganda berbasis fakta (Aryadillah & Fitriansyah, 2022). Selain itu, penggunaan disinformasi telah menjadi metode yang semakin umum digunakan untuk memanipulasi opini publik dan menciptakan polarisasi (Alen, 2023). Dengan adanya keterlibatan kecerdasan buatan, produksi dan distribusi propaganda menjadi lebih efisien dan sulit untuk dideteksi (Hidayati, 2021).

Propaganda politik dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi suatu negara

(Dohamid et al., 2025). Dalam banyak kasus, propaganda digunakan untuk melemahkan institusi demokratis dan membentuk persepsi masyarakat agar mendukung kebijakan otoriter (Fatika, 2025). Sebuah studi terbaru menemukan bahwa negara dengan tingkat penyebaran propaganda yang tinggi cenderung mengalami penurunan kepercayaan terhadap media independen dan lembaga pemerintah (Jayus et al., 2024). Selain itu, propaganda juga dapat menyebabkan disinformasi massal yang menghambat proses pengambilan keputusan yang rasional dalam pemilu (Rico et al., 2024). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi media yang baik agar dapat mengenali dan menyaring informasi yang mereka terima (Aryadillah & Fitriansyah, 2022).

Opini publik merupakan target utama propaganda politik karena sifatnya yang dinamis dan mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor (Indrawan, 2017). Dengan perkembangan teknologi dan media digital, propaganda semakin canggih dalam memanipulasi persepsi masyarakat (Alen, 2023). Untuk menjaga kualitas demokrasi, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi media dan memiliki pemahaman yang lebih kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi (Evendi & Arinanda Kurnia, 2020). Media sosial telah menjadi platform utama dalam penyebaran informasi politik, termasuk propaganda. Dengan jangkauan luas dan kecepatan distribusi informasi yang tinggi, media sosial memungkinkan berbagai aktor politik untuk memengaruhi opini publik. Penelitian terbaru di tahun 2024 menunjukkan bahwa strategi propaganda politik semakin kompleks dengan penggunaan kecerdasan buatan dan algoritma personalisasi (Nainggolan et al., 2024). Strategi digital dalam kampanye politik melibatkan penggunaan algoritma untuk menargetkan audiens tertentu dengan pesan yang sudah disesuaikan (Arsyad et al., 2024). Ini sering kali dilakukan melalui: iklan berbayar yang menyasar kelompok demografis tertentu, penggunaan

data pengguna untuk menciptakan kampanye yang lebih efektif (Alen, 2023). dan mobilisasi relawan digital untuk menyebarkan narasi politik (Zaky et al., 2024).

#### D. Media Sosial dan Relevansinya Terhadap Pembentukan Opini Publik

Media sosial memainkan peran signifikan dalam membentuk opini publik. Menurut penelitian tahun 2024, media sosial dapat menciptakan "filter bubble" yang memperkuat preferensi politik pengguna (Faradis et al., 2023). Hal ini menyebabkan individu lebih rentan terhadap propaganda yang sesuai dengan keyakinan mereka. Selain itu, efek viral dari informasi politik di media sosial membuat masyarakat lebih cepat terpapar narasi yang dapat memengaruhi pandangan politik mereka (Dwitama et al., 2022). Studi lain menunjukkan bahwa interaksi di media sosial, seperti komentar dan diskusi dalam grup politik, dapat memperkuat polarisasi politik (Faradis et al., 2023). Fenomena ini berkontribusi pada pembentukan opini yang semakin ekstrem dan memperlemah diskusi politik yang sehat. Lebih lanjut, algoritma media sosial yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna sering kali memprioritaskan konten yang memicu emosi, termasuk propaganda politik (Manjusri, 2023).

Para aktor politik menggunakan berbagai strategi dalam menyebarkan propaganda di media sosial. Salah satu metode yang paling umum adalah penggunaan "bot politik" dan akun palsu untuk menyebarluaskan informasi yang mendukung agenda tertentu (Jayus et al., 2024). Selain itu, penggunaan iklan politik berbayar yang ditargetkan secara spesifik kepada kelompok demografi tertentu menjadi semakin efektif dalam memengaruhi pemilih (Faradis et al., 2023). Strategi lain yang banyak digunakan adalah manipulasi trending topic, di mana narasi tertentu dibuat viral melalui koordinasi kelompok atau penggunaan bot (Alen, 2023). Selain itu, teknik "deepfake" dan konten berbasis kecerdasan buatan telah digunakan untuk menciptakan informasi politik

yang tampak otentik namun sebenarnya menyesatkan (Hidayati, 2021). Ini menimbulkan tantangan besar dalam mendekripsi dan menangkal propaganda yang tersebar luas.

### 1. Algoritma dan Kecerdasan Buatan dalam Menyebarluaskan Informasi Politik

Algoritma media sosial berperan dalam menentukan informasi apa yang dilihat pengguna. Penelitian terbaru di tahun 2024 menunjukkan bahwa algoritma berbasis machine learning dapat memprediksi preferensi politik pengguna dan menyajikan konten yang sesuai dengan kecenderungan tersebut (Nurfajri et al., 2025). Hal ini menyebabkan efek penguatan opini, di mana individu semakin tertutup dari pandangan politik yang berbeda. Kecerdasan buatan juga digunakan dalam pembuatan konten politik yang sangat disesuaikan dengan audiens tertentu. Chatbot berbasis AI, misalnya, dapat digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna media sosial guna membentuk opini politik mereka secara halus (Salsabila et al., 2024). Selain itu, teknologi AI juga dimanfaatkan dalam analisis data besar untuk mengidentifikasi tren politik dan merancang strategi kampanye yang lebih efektif (Rico et al., 2024).

Media sosial telah menjadi alat utama dalam penyebarluasan propaganda politik, dengan dampak yang signifikan terhadap opini publik. Dengan adanya strategi penyebarluasan yang semakin canggih dan penggunaan algoritma serta kecerdasan buatan, tantangan dalam menangkal propaganda politik menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk memiliki literasi digital yang baik serta bagi regulator untuk mengembangkan kebijakan yang dapat meminimalkan dampak negatif dari propaganda politik di era digital ini.

Perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah propaganda yang disebarluaskan melalui berbagai media komunikasi politik.

Perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah propaganda yang disebarluaskan melalui berbagai media komunikasi politik (Nuraliza et al., 2024). Propaganda merupakan strategi komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi opini, sikap, dan tindakan masyarakat dalam konteks politik. Dalam era digital saat ini, propaganda semakin mudah disebarluaskan melalui media sosial, televisi, surat kabar, serta platform daring lainnya (Hanhan, 2023). Propaganda dapat membentuk opini publik dengan cara menggiring persepsi masyarakat terhadap suatu isu politik tertentu. Melalui penggunaan bahasa yang persuasif dan pengulangan pesan, masyarakat cenderung menerima informasi tersebut sebagai kebenaran. Penyebaran propaganda yang bias dapat menyebabkan polarisasi di masyarakat, di mana kelompok-kelompok dengan pandangan politik berbeda menjadi semakin terpecah. Masyarakat harus dibiasakan untuk berdiskusi secara terbuka dan kritis mengenai isu-isu politik tanpa terpengaruh oleh narasi propaganda yang manipulatif. Propaganda memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku politik masyarakat. Jika digunakan secara positif, propaganda dapat membangun kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi publik. Namun, jika disalahgunakan, propaganda dapat menyesatkan opini publik dan memperparah polarisasi politik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran kritis dalam menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang bersifat manipulatif.

## 2. Strategi Kampanye Politik dan Penggunaan Media

Kampanye politik saat ini tidak hanya dilakukan melalui tatap muka dan debat publik, tetapi juga melalui pemanfaatan media untuk membangun citra dan popularitas kandidat (Jayus et al., 2024). Strategi

kampanye politik saat ini tidak hanya dilakukan melalui tatap muka dan debat publik, tetapi juga melalui pemanfaatan media untuk membangun citra dan popularitas kandidat (Jayus et al., 2024). Media sosial, televisi, radio, serta platform digital lainnya menjadi sarana utama dalam menyampaikan pesan politik secara luas dan cepat. Kandidat dan tim kampanye memanfaatkan algoritma media sosial untuk menargetkan pemilih potensial berdasarkan preferensi dan perilaku daring mereka. Selain itu, iklan berbayar dan strategi pemasaran digital seperti optimasi mesin pencari (SEO) serta pemasaran berbasis data semakin sering digunakan untuk memperkuat pesan kampanye. Namun, di sisi lain, tantangan seperti penyebaran disinformasi dan berita palsu juga menjadi perhatian, karena dapat memengaruhi opini publik dan menciptakan polarisasi politik. Oleh karena itu, strategi kampanye modern harus mencakup tidak hanya promosi yang efektif, tetapi juga upaya untuk menangkal misinformasi dan menjaga kredibilitas kandidat.

Regulasi yang mengatur penyebaran propaganda politik menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga demokrasi tetap sehat dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Regulasi yang mengatur penyebaran propaganda politik menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga demokrasi tetap sehat dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu (Nainggolan et al., 2024). Propaganda politik merupakan strategi komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Dalam konteks demokrasi, penyebaran propaganda harus diatur agar tidak menimbulkan disinformasi atau manipulasi politik yang merugikan masyarakat secara luas (Faradis et al., 2023). Artikel ini akan membahas regulasi yang mengatur propaganda politik serta prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam penggunaannya.

Penyalahgunaan propaganda politik dapat merusak demokrasi dengan menyebarkan informasi yang tidak akurat, menciptakan perpecahan sosial, dan meningkatkan polarisasi politik (Hanhan, 2023). Oleh karena itu, regulasi yang efektif dan penerapan etika yang ketat diperlukan untuk mencegah dampak negatif tersebut (Fatika, 2025). Regulasi dan etika dalam penyebaran propaganda politik sangat penting untuk menjaga transparansi dan integritas demokrasi. Dengan adanya regulasi yang ketat serta penerapan etika yang kuat, penyebaran propaganda politik dapat dikontrol agar tidak merugikan masyarakat dan tidak merusak proses demokrasi yang sehat (Zaky et al., 2024).

Propaganda politik yang tidak terkontrol dapat memberikan dampak negatif terhadap stabilitas politik dan demokrasi, terutama jika informasi yang disebarluaskan mengandung hoaks atau bertujuan untuk memecah belah masyarakat (Nainggolan et al., 2024). Propaganda yang mengandung informasi menyesatkan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan, media, dan sistem demokrasi secara keseluruhan. Ketika masyarakat terus-menerus terpapar narasi yang menyudutkan atau meragukan legitimasi pemerintah, pemilu, atau kebijakan publik, mereka dapat menjadi apatis atau bahkan bersikap anti-demokrasi.

Propaganda sering digunakan untuk memperkuat perbedaan ideologi dan menciptakan kesenjangan yang lebih dalam antara kelompok politik. Hal ini dapat memperburuk konflik sosial, menghambat dialog yang konstruktif, dan mencegah kompromi dalam proses politik. Misalnya, dalam Pemilu AS 2016, propaganda digital dan berita palsu yang tersebar melalui media sosial terbukti memperkuat polarisasi antara pendukung kandidat yang berbeda (Fatika, 2025). Dalam beberapa kasus, propaganda yang menyebarkan ujaran kebencian atau informasi yang memanipulasi fakta dapat memicu konflik sosial.

Contohnya adalah kasus genosida di Rwanda tahun 1994, di mana propaganda radio digunakan untuk menghasut kebencian etnis yang berujung pada pembantaian massal (Aryadillah & Fitriansyah, 2022). Hal ini menunjukkan betapa berbahayanya propaganda jika digunakan untuk kepentingan politik yang destruktif. Propaganda dapat menghalangi diskusi politik yang berbasis fakta dan memperlemah partisipasi warga negara dalam demokrasi. Jika masyarakat hanya terpapar pada narasi yang manipulatif, mereka cenderung membuat keputusan politik berdasarkan emosi dan bukan pertimbangan rasional. Akibatnya, pemilu dan kebijakan yang dihasilkan bisa kurang mencerminkan kepentingan rakyat secara objektif.

Di negara-negara dengan kontrol propaganda yang ketat, kebebasan pers sering kali ditekan untuk memastikan narasi politik yang menguntungkan penguasa tetap dominan. Ini menghambat keberagaman informasi dan mempersempit ruang bagi perbedaan pendapat, yang pada akhirnya mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Propaganda politik yang tidak terkontrol memiliki dampak serius terhadap stabilitas politik dan demokrasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan edukasi literasi media bagi masyarakat, kebijakan yang mendukung transparansi informasi, serta regulasi yang mengawasi penyebaran propaganda di media sosial dan platform digital lainnya. Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang kritis dan memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan tidak bias.

## **SIMPULAN**

Media dan opini publik memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk propaganda politik di Indonesia. Melalui teori agenda-setting dan framing, dapat disimpulkan bahwa media bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga alat yang digunakan untuk mengarahkan opini publik sesuai dengan kepentingan aktor politik tertentu. Dalam konteks digital,

media sosial semakin mempercepat penyebaran propaganda politik, baik dalam bentuk kampanye positif maupun negatif. Fenomena echo chamber dan filter bubble semakin memperparah polarisasi politik di masyarakat, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap stabilitas politik dan demokrasi.

Selain itu, penggunaan propaganda dalam politik sering kali dilakukan dengan memanfaatkan berbagai strategi komunikasi, seperti penggunaan buzzer politik, penyebaran berita palsu, dan manipulasi opini publik melalui media digital. Regulasi dan kebijakan komunikasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa media tetap berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang sehat, bukan sebagai alat manipulasi politik yang merugikan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran media dan opini publik dalam propaganda politik, diharapkan berbagai pihak dapat bekerja sama dalam membangun ekosistem informasi yang lebih transparan, akurat, dan mendukung demokrasi yang stabil.

## **BAB 15**

### **Peneguhan Peran Domestik Perempuan melalui Meme Internet Berbasis Gender**

Tellys Corliana, Sri Mustika, Andys Tiara

#### **Abstrak**

Permasalahan gender di Indonesia masih belum tuntas, meskipun gender sendiri sudah cukup lama dikenal di Indonesia. Banyak faktor yang menjadi penyebab belum sepenuhnya kesetaraan gender terwujud. Faktor sosial dan budaya yang begitu kuat dipegang teguh masyarakat secara turun temurun menjadi salah satu penyebabnya. Masih banyak upaya peneguhan pembagian peran domestik-publik yang kaku antara laki-laki dan perempuan yang seringkali dibakukan menjadi kodrat berdasarkan jenis kelamin. Proses peneguhan dan pengkonstruksian ini antara lain melalui media massa. Perkembangan media massa dengan jaringan internetnya semakin mempermudah dan memperluas proses peneguhan tersebut. Salah satunya melalui meme internet. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis semiotika. Penelitian ini menemukan ada empat meme internet berbasis gender yang meneguhkan peran domestik perempuan sebagai kodrat. Perempuan dianggap salah ketika tidak bisa masak dan perempuan dianggap tidak cocok menjadi seorang politisi atau pekerja publik yang lain, perempuan dianggap lebih baik berada diranah domestik dengan berbagai tugasnya seperti memasak, mengasuh anak, mengurus suami, dan berbagai tugas rumah tangga. Perempuan dianggap tidak layak berada diranah publik. Penggunaan meme internet menjadi hal yang perlu dicermati karena proses pengkonstruksian peran gender secara sosial budaya yang timpang yang selama ini semakin diteguhkan. Menggunaan media baru dengan jaringan internetnya semakin memperluas pengkonstruksian peran gender yang bias tersebut.

Kata kunci: analisis kritis; meme; peran domestik; perempuan

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan tehnologi media massa merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Khususnya perubahan dalam perkembangan tehnologi komunikasi. Perkembangan yang paling baru dari komunikasi massa elektronik yaitu hadirnya bentuk komunikasi baru yaitu komunikasi melalui jaringan online atau yang biasa disebut dengan internet.

McQuail dalam Cangara (2013: 127), menjelaskan ada beberapa karakteristik dari media berbasis internet ini atau yang sering disebut dengan media baru, yaitu : Pertama, interaktif dan koneksi kurasinya cukup tinggi; Kedua, terjadi digitalisasi dan konvergensi dengan semua aspek media; Ketiga, pengirim dan penerima informasi mobilitasnya cepat; Keempat, terjadi penyesuaian peran khalayak baik sebagai pembuat, penyebar dan juga konsumen atau pengguna konten; Kelima, tidak ada institusi media yang dilembagakan seperti pada media massa konvensional.

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Jasa Pengguna Internet Indonesia (AJPII), pengguna internet mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Survey tahun 2024 terdapat 221 juta pengguna internet dengan rincian 50,9% pengguna dengan jenis kelamin laki-laki dan 49,1 persen pengguna perempuan. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia. Hal ini dikarenakan berkembangnya jaringan internet memunculkan situs-situs layanan yang memudahkan komunikasi bagi para penggunanya. Sebut saja situs-situs jejaring sosial semacam Facebook ataupun Twitter, Instagram dan lainnya. Situs-situs tersebut pun silih berganti pernah menjadi sebuah fenomena di dunia internet.

Jejaring sosial internet saat ini merupakan satu media komunikasi yang banyak diminati berbagai kalangan, dari mulai anak SD hingga pekerja dan berbagai status sosial. Kondisi ini diper mudah lagi dengan kemudahan mengakses internet pada berbagai provider yang ada sehingga dapat dilakukan secara mobile. Realitas dunia nyata sudah sepenuhnya masuk dalam realitas dunia maya. Fenomena baru di internet yang mulai marak

di awal tahun 2010 dan berkembang pesat hingga kini dikenal dengan sebutan Internet Meme.

Internet meme sebenarnya muncul dari sebuah konsep yang lebih luas yang disebut dengan Memetika. Penggunaan istilah Meme pertama kali diperkenalkan oleh Richard Dawkins dalam bukunya *The Selfish Gene* edisi anniversary tahun 2006. Menurutnya (dalam buku tersebut), meme adalah neologi yang dikenal sebagai karakter dari sebuah budaya, yang termasuk didalamnya yaitu gagasan, perasaan, ataupun perilaku (tindakan). Meme dapat bereplikasi dengan sendirinya dan membentuk suatu budaya. Brunello lebih lanjut menjelaskan meme merupakan ide yang ditiru yang kemudian menyebar dari orang ke orang dalam suatu budaya atau subkultur melalui transmisi berupa tulisan, interaksi maupun media digital. (2012). Melalui media digital meme dimungkinkan dapat tersebar lebih cepat dengan berbagai situs jaringan yang ada.

Shifman (2014:11-12) dalam bukunya yang berjudul *Memes in Digital Culture* menjelaskan ada dua kontroversi seputar meme yaitu yang dilebelkan sebagai "biological analogies" and "who's the boss". Analogi biologi menyamakan meme dengan virus dan gen. Analogi ini menyamakan meme dengan virus flu yang gampang menular. Bila virus flu ditularkan melalui bersin, maka meme sebagai sebuah budaya ditularkan atau disebarluaskan melalui komunikasi. Dalam budaya internet ini yang sering disebut sebagai konten yang viral. Namun demikian Hendri Jenkins dan rekannya menegaskan bahwa dalam hal ini manusia dikonsepkan sebagai mahluk yang pasif dan sangat rentan terhadap dominasi media. Metafora biologi dan gen banyak mendapat kritikan karena meme sangat berbeda dengan perilaku gen dan menyempitkan budaya manusia yang kompleks seperti halnya biologi.

Kontroversi memetika yang kedua "who's the boss" berkaitan dengan manusia sebagai agen penyebar meme. Terkait hal ini Susan Blackmore dalam buku *The Meme Machine* mengatakan bahwa manusia adalah perangkat yang dioperasikan oleh banyaknya meme yang terus menyebar. Dari berbagai pro

kontra dibidang memetika, Rosaria Conte menyarankan agar memberlakukan manusia tidak sebagai vektor transmisi budaya tetapi sebagai aktor dibalik sebuah proses. Menurutnya agen sengaja menyebarkan meme berdasarkan kekuatan pengambilan keputusan : norma sosial, persepsi, dan preferensi sangat penting dalam proses seleksi meme.

Apa yang dikemukakan diatas menjelaskan bahwa meme merupakan informasi yang dapat berupa ide, ideologi, gambar, video atau susunan kata berupa hastag yang menyebar cepat dan menjadi populer dan mudah diingat masyarakat serta menular seperti halnya virus. Apalagi dengan internet sebagai wahananya. Meme umumnya diunggah berbarengan dengan berita atau isu yang sedang berkembang hangat di masyarakat. Muatan pesannya beragam, tidak hanya sekedar candaan terapi bisa juga sebagai bentuk sindiran, kritikan bahkan fitnahan terhadap kelompok tertentu, politisi atau lembaga tertentu. Sebuah meme seringkali juga akan diikuti oleh meme yang lain yang dengan tema yang sama dari kreator yang berbeda. Intinya fenomena ini akan mudah menyebar dan berkembang dari satu kreator ke kreator yang lain selama isunya masih hangat di masyarakat. Bentuk meme sangat bervariasi bisa dalam bentuk gambar, video, tulisan, komik dan karikatur.

Salah satu meme yang menarik dan perlu dicermati yaitu meme yang berkaitan dengan gender. Banyak meme gender yang berseliweran di jejaring internet, yang pesannya sangat beragam, ada yang berupa stereotipe atau pelebelan perempuan, diskriminasi, kekerasan dan sebagainya. Penelitian yang dilakukan Yanti Dwi Astuti (2017), perempuan (dalam hal ini ibu- ibu atau emak-emak) seringkali dilebelkan sebagai tidak tertib, tidak punya aturan, ugal- ugalan, emosional dianggap sebagai ancaman di jalan raya. Penelitian ini dilakukan terhadap 14 meme internet ibu- ibu berkendaraan motor. Meskipun pada realitanya tidak semua perempuan demikian.

Di media sosial seringkali dijumpai perempuan sebagai obyek seksual atau obyek cyberporn melalui tayangan meme yang

sensual dan seksi. Foto-foto seksi ini seringkali diposting tanpa sepengetahuan si pemilik. (Fitria dan Monika, 2018). Meme perempuan sensual ini menjadi konsumsi masyarakat luas ketika sudah diposting di media sosial. Hal ini secara tidak langsung menjadi pemberian atau konstruksi bagi masyarakat bahwa perempuan menjadi obyek sex yang bisa diperlakukan sesukanya.

Stereotipe tubuh perempuanpun menjadi isu para kreator meme. Masalah tubuh dan standar kecantikan perempuan seringkali tidak menjadi milik perempuan, tetapi ditetapkan oleh laki-laki, dalam hal ini patriarkhi yang bergandengan dengan kapitalis. Perempuan dikatakan cantik ketika berdandan sesuai standar pasar, sementara laki-laki tidak demikian. Perempuan selalu dituntun untuk tampil sempurna sesuai dengan standar yang berlaku.(Febi dan Muhammad, 2023).

Bagaimana perempuan dikonstruksikan dalam media menjadi hal yang sangat menarik untuk dibincangkan. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat, peran media menjadi sangat penting mengingat media memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi masyarakat termasuk dalam hal relasi gender. UN Women dengan perwakilan beberapa anggota berhasil menyusun Deklarasi di Beijing pada tahun 1995 yang berisi 12 bidang utama yang menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Salah satu poin deklarasi tersebut yaitu perempuan dan media. Media memiliki peran penting dalam menentang norma- norma sosial yang mendukung diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. UN Women bekerjasama dengan beberapa media memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Selain itu juga memfasilitasi liputan mendalam tentang hak-hak perempuan, termasuk juga riset bagaimana representasi perempuan di dalam berita dan industri hiburan.

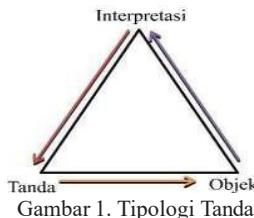
Terkait dengan peran media dalam mengkonstruksikan suatu pesan, fenomena meme menjadi satu tantangan tersendiri bagi penggiat kesetaraan gender karena pesan yang mudah ditangkap dari meme tersebut. Seperti yang dikemukakan Paul (2009) dalam penelitiannya bahwa meme merupakan piranti yang

ampuh dan juga fleksibel dalam upaya menangkap dan menampilkan berbagai informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Hal penting lainnya meme mudah dipelajari dan diaplikasikan. Oleh karena itu munculnya fenomena meme di media sosial menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender karena pesan yang disampaikan sangat menarik secara visual terutama kalangan muda yang seharusnya menjadi sasaran potensial bagi perbaikan relasi laki-laki perempuan yang masih bias gender.

Dalam konteks pengkonstruksian kesetaraan gender, media bagai pisau bermata dua. Pesan yang disampaikan bisa berdampak positif bagi relasi laki-laki perempuan tetapi juga dapat berdampak negatif sehingga semakin memperkuat bias gender yang ada dalam masyarakat. Beberapa waktu lalu banyak beredar meme yang sangat bias gender yang memperteguh peran domestik perempuan sebagai kodrat yang tidak bisa diubah. Terkait hal tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis beberapa meme yang mengandung pesan bias gender yang akan dapat mengkostruksi masyarakat terkait peran gender yang timpang.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotik. Analisis semiotik merupakan teknik analisis data kualitatif yang tujuannya untuk menemukan makna pada suatu simbol atau tanda. Ada beberapa jenis analisis semiotik yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu fenomena sosial yang disimbolkan. Untuk menganalisis meme bias gender, peneliti menggunakan alat analisis semiotika Charles Sanders Pearce. Semiotika Pearce menggunakan model segi tiga makna (triangle meaning) yang terdiri dari tanda (sign), objek (object), dan interpretasi (interpretant). Tanda sesuatu yang fisikal yang dapat ditangkap indra manusia dan merujuk atau mempresentasikan hal lain diluar tanda itu sendiri.(Tinarbuko, 2009). Berikut penggambaran bagan segi tiga makna.



Gambar 1. Tipologi Tanda

Sumber : John Fiske, *Cultural and Communication Studies*

## PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis empat meme internet yang menkonstruksikan pembagian peran gender. Secara sosial dan budaya dikenal ada tiga peran gender, yaitu peran Produktif (publik), peran Reproduktif (domestik), dan peran Sosial Kemasyarakatan. Seringkali pembagian peran ini dianggap sebagai kodratnya perempuan atau laki-laki yang tidak dapat diubah. Pembagian peran yang sewenang ini tentu saja akan berdampak pendiskriminasian bagi pihak-pihak tertentu. Berikut empat meme internet yang meneguhkan peran domestik perempuan.



Gambar. Meme internet 1

Meme internet 1 menggunakan kebijakan penenggelaman kapal pada masa jabatan mentri Martitim dipegang oleh Susi Pudjiastuti sebagai konten meme nya. Pada masa itu kapal-kapal illegal fishing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin resmi sesuai ketentuan undang- undang yang berlaku dikenakan sanksi penenggelaman. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang ampuh

dan ditakuti bagi para illegal fishing yang berasal dari negara lain. Meme internet 1 menampakkan gambar Susi Pudjiastuti yang mengacungkan telunjuknya dan tulisan pada meme tersebut "Punya Istri Nggak Bisa Masak Tenggelamkan". Meme ini menyampaikan pesan yang cukup keras bahwa seorang perempuan (istri) yang tidak bisa masak sebaiknya diberi sanksi yang keras (tenggelamkan). Hal ini mengisyaratkan bahwa seorang perempuan hukumnya wajib harus bisa masak karena tugas ini dianggap sebagai kodrat seorang perempuan (dalam hal ini istri). Perempuan (istri) yang tidak bisa masak dianggap menyalahi "kodrat"nya. Dalam konteks istri maka kata "tenggelamkan" bisa saja dimaknai diceraikan atau suami dapat menikah lagi karena istrinya tidak dapat berperan sesuai kodratnya.



Gambar. *Meme internet 2*

Meme internet 2 menggunakan ibu-ibu petani yang sedang melakukan demo sebagai isi kontennya dan wajah seorang artis ternama Dian Sastrowardoyo dengan tulisan " ibunya lepas dong dari politik.....kembali ke urusan domestik.....Cinta jangan ngartis donk. Masak aja..". Kreator meme melalui konten ini menyampaikan pesan bahwa seorang perempuan apalagi statusnya ibu tidaklah pantas berpolitik, tidak pantas bersuara menyampaikan pendapatnya. Berpolitik bukan tugas perempuan, bukan tugas ibu. Tugas perempuan (ibu) menyangkut urusan domestik saja seperti masak, mencuci, mengurus rumah,

mengasuh anak yang menjadi kewajiban bahkan kodratnya. Pada bagian lain, artis Dian Sastro yang merupakan artis papan atas dan pernah hit pada masanya memerankan tokoh Cinta dalam film "Ada Apa Dengan Cinta (AADC)" yang notabene seorang perempuan juga dianggap tidak pantas menjadi seorang pekerja seni, seorang perempuan ya harusnya mengurus urusan rumah tangga saja seperti memasak. Peran sebagai pekerja seni merupakan peran publik yang harusnya menjadi kodratnya laki-laki bukan perempuan. Pekerja seni adalah pekerjaan yang menghasil upah sehingga selayaknya menjadi pekerjaan laki-laki.



Gambar. Meme internet 3

Meme internet 3 menggambarkan seorang anak laki-laki yang sedang duduk dan terdapat opini (pendapat) "Yang Bagus Betina Sekarang Kembali Ke Dapur " dengan tulisan huruf kapital. Konten ini menyampaikan pesan bahwa langkah perempuan ke ranah publik adalah sebuah kesalahan, maka sudah seharusnya perempuan kembali ke urusan dapur urusan masak memasak (domestik). Penggunaan huruf kapital menegaskan bahwa ini merupakan masalah yang penting yang tidak dapat diabaikan perempuan harusnya mengurus dapur bukan urusan lain di luar rumah. Penggunaan istilah "betina" yang biasanya digunakan untuk menyebut pemilihan kelamin hewan juga dapat dimaknai bahwa perempuan mahluk yang tidak terlalu penting jadi sudah seharusnya mengurusi hal-hal remeh seperti urusan dapur.

Urusan domestik (dapur) selama ini dianggap sebagai urusan yang remeh yang tidak berharga seperti halnya urusan publik yang berupah. Perempuan dianggap hanya mampu dan pantas mengurusi urusan domestik saja terutama urusan perdapur. Urusan masak dianggap sebagai bagian dari kodrat perempuan yang tidak bisa diubah.



Gambar. Meme internet 4

Meme keempat menampilkan seorang musisi Cak Nan yang kondang dengan lagu campursarinya. Gambar tersebut menunjukkan wajah Cak Nan yang memelas seperti orang kelaparan dan gambar tersebut menjelaskan ada lampu yang menyala yang menggambarkan suasana malam hari dengan tulisan dalam bahasa Jawa "..Kok yo mesakne men to mas...mas yahne mbok kon masak...(kok ya kasihan sekali mas...sudah hari gini..disuruh masaklah)". Meme ini menyampaikan pesan Cak Nan yang notabene seorang laki-laki sudah malam hari kelaparan menjelaskan bahwa dia belum makan karena istrinya tidak masak. Hal ini dapat dimaknai seorang perempuan (istri) yang mengabaikan kodratnya sebagai pekerja domestik memasak maka akan menyebabkan anggota keluarga yang lain (suami) kelaparan. Perempuan disalahkan ketika ada anggota keluarga yang kelaparan hanya karena dia tidak masak. Memasak dianggap sebagai kewajiban seorang istri, yang apabila dilanggar akan membuat anggota keluarga lain menderita.

Dalam kehidupan sosial pembagian peran sosial berdasarkan gender seringkali memunculkan konflik sosial karena

seolah-olah dianggap sebagai peran yang bersifat kodrat. Dalam fenomena meme internet hal ini semakin dikekalkan secara sosial dengan simbol-simbol dalam bentuk gambar maupun tulisan seperti beberapa meme diatas. Dalam perspektif sosialisasi apa yang ditayangkan melalui jejaring sosial internet ini semakin meneguhkan pembagian peran secara sosial budaya antara laki-laki dan perempuan, terutama peran-peran perempuan di ranah domestik. Kondisi ini akan semakin mempersulit upaya perubahan persepsi masyarakat terhadap peran sosial yang berlaku atau yang telah dibudayakan sejak kanak-kanak.

Penyosialisasian peran-peran gender terutama yang berkaitan dengan perempuan melalui jejaring sosial internet dalam bentuk meme merupakan sesuatu yang baru muncul beberapa tahun belakangan ini. Namun demikian, media ini justru mempermudah proses pembelajaran dan penginternalisasian peran gender terutama kepada para remaja yang umumnya banyak mengaksesnya. Penggunaan simbol dalam bentuk gambar dan kata-kata yang dipilih cukup komunikatif bagi kelompok usia muda seperti remaja dan dewasa awal.

Pada dasarnya peran gender yang di-meme-kan merupakan peran-peran yang memang telah disosialisasikan atau dikenal secara sosial budaya, hanya saja apa yang dilakukan dalam meme menjadi kendala dalam proses sosialisasi kesetaraan gender yang menjadi program pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Apa yang diperjuangkan dalam proses penyetaraan gender mendapatkan tantangan dengan semakin ditegukhannya peran gender laki- laki dan perempuan dalam masyarakat melalui meme internet tersebut.

Dari perspektif komunikasi, munculnya fenomena meme internet merupakan satu bentuk pengemasan pesan yang komunikatif, apapun isi pesan yang akan disampaikan. Efektifitas merupakan satu tujuan dari setiap bentuk komunikasi dalam berbagai proses termasuk proses sosialisasi. Oleh karenanya isi pesan menjadi penting. Munculnya meme internet yang merupakan bentuk sosialisasi peran gender akan sangat

bermanfaat apabila memang mendukung responsif gender dalam hal pembagian peran. Namun demikian yang disayangkan ternyata justru apa yang terdapat dalam meme tentang gender lebih bernuansa patriarkhi bahkan seringkali lebih keras dan diskriminatif baik dari sudut pandang laki-laki maupun perempuan.

Pada dasarnya media tidak bebas nilai, artinya media tidak hanya mewakili media itu sendiri tetapi memuat berbagai kepentingan didalamnya termasuk ideologi yang dianut oleh media tersebut atau oleh pelaku medianya. Hal ini misalnya terjadi pada media massa baik cetak maupun elektronik. Dalam konteks media baru seperti internet dengan berbagai jejaring sosialnya seringkali ideologi yang disampaikan bukan ideologi lembaga tetapi ideologi yang disampaikan secara perorangan yang seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Artinya suatu ideologi dapat tersebar luas atau ditularkan melalui kegiatan yang tidak terorganisir seperti halnya suatu tayangan pada media massa seperti TV atau film. Meme patriarkhi merupakan salah satu fenomena yang berkembang di jejaring sosial internet yang bermuatan penyebaran ideologi yang bisa disebarluaskan secara perorangan.

## **SIMPULAN**

Fenomena meme internet berbasis gender merupakan satu bentuk sosialisasi bernuansa gander yang lebih mudah diterima oleh kalangan muda karena pesan dikemas dengan kemasan yang lebih komunikatif dengan gaya bahasa yang mudah difahami. Penggunaan simbol dalam bentuk gambar maupun teks menjadikan proses sosialisasi lebih mudah diterima bila dibandingkan sosialisasi dalam bentuk formal seperti seminar, workshop dan sebagainya. Satu hal yang harus dicermati para pengamat perempuan dan gender adalah kesadaran semakin maraknya media massa dan semakin gencarnya persaingan ideologi dalam mempersuasi masyarakat. Era informasi saat ini, memungkinkan orang berekspresi secara lebih bebas dan terbuka, sehingga secara tidak langsung akan terjadi persaingan dalam penghegemonian suatu ideologi melalui media.

Dengan demikian, untuk dapat mengkaunter gencarnya pengukuhan peran gender secara sosial budaya yang dikukuhkan melalui fenomena komunikasi yang patriarkhi, harus dilakukan pengubahan strategi yang lebih terbuka sesuai dengan fenomena yang ada. Minimal pada lembaga yang paling kecil seperti keluarga sudah harus dapat melakukan pembiasaan terhadap peran laki-laki dan perempuan yang lebih fleksibel sehingga berbagai sosialisasi informal yang terjadi diberbagai media komunikasi tidak dapat menggoyahkan kesetaraan gender yang sudah terbangun.

## **BAB 16**

### **Cyberkids: Penggunaan Media Digital dalam Kajian Komunikasi Keluarga**

Vilya Dwi Agustini

#### **Abstrak**

Komunikasi keluarga menjadi sebuah kajian yang manarik bila berkaitan dengan massivenya perkembangan media baru. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh orang tua dengan anak yang lahir dan besar pada era media baru membuat sebuah pekerjaan rumah bagi komunikasi dan pola asuh yang perlu disesuaikan dengan teknologi. Berbagai istilah baru bermunculan seperti cyberkids, tehnopanik, sosiodigital bukan hanya sekedar istilah tetapi esensi setiap permasalahan yang mungkin dihadapi anak-anak. Ketika mengkonsumsi dan melakukan konstruksi konten media. Secara kognitif cyberkids memiliki kemampuan luar biasa dalam hal akses media, tetapi belum memiliki literasi yang mumpuni dalam melakukan konstruksi realitas media digital, disinal peranan orang tua dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap media digital yang digunakan anak-anaknya.

Kata kunci: komunikasi keluarga; cyberkids; media digital

#### **PENDAHULUAN**

Komunikasi sejatinya bagaimana usaha seorang komunikator membangun hubungan dengan cara berbagi ide, gagasan atau perasaanya kepada komunikan. Berbagai ahli komunikasi menyepakati bahwa komunikasi merupakan sebuah proses yang didalamnya memiliki berbagai tantangan dan dilakukan secara continue atau terus menerus. Bertolak dari pemabahan komunikasi sebagai sebuah proses pertukaran pesan, komunikasi keluarga menurut Muller & Keitner, 2008) diartian sebagai proses pertukaran pesan yang disampaikan secara verbal maupun nonverbal antar anggota keluarga. Komunikasi keluarga

dipahami sebagai suatu proses pertukaran pesan yang disampaikan secara verbal maupun nonverbal untuk menciptakan saling pengertian agar terjalin kehangatan, rasa kasih sayang, rasa percaya, kejujuran, keterbukaan dan keharmonisan antarsesama anggota keluarga. Dalam konteks makro, komunikasi keluarga bisa berlangsung antara keluarga inti (nuclear family) dengan keluarga dalam arti luas (extended family). Meskipun penggambaran konsep keluarga bervariasi, namun cenderung memiliki satu kesamaan yaitu, keluarga yang dibentuk dan dipertahankan memiliki satu kesamaan yaitu, keluarga yang dibentuk dan dipertahankan melalui komunikasi (Korner & Fitzpatrick dalam (Hafied Cangara, 2023)

Di Indonesia sendiri penelitian yang berkaitan dengan pengaruh cyberbullying dengan hubungan keluarga memiliki relasi signifikan. Penelitian yang dilakukan pada keluarga di lingkungan SD di Kecamatan Sidoarjo dengan Teori Fitzpatrick dan Ascan Koerner memiliki pengaruh yang kuat antara konformitas dan komunikasi keluarga yang mempengaruhi cyberbullying pada anak. Anak yang memiliki komunikasi keluarga yang baik didukung dengan aturan dan nilai dalam kehidupan sehari-hari serta kedisiplinan menunjukkan sikap anak yang tidak melakukan atau menjadi korban cyberbullying (Uldafira & Rochmaniah, n.d.).

Kemudian muncul berbagai efek negatif penggunaan media digital yang dikwatirkan seperti Konten Ilegal (illegal content) merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum dan atau melanggar ketertiban hukum ke internet. Kejahatan ini juga bisa berupa penggunaan data milik orang lain untuk kepentingan pribadi dan atau Perusahaan serta juga bisa disebarluaskan kepada orang lain atau Perusahaan lain. Beberapa kejahatan yang mungkin timbul bila kurang dalam pengawasan keluarga;

1. Pornografi, yakni dengan sengaja mengunggah, menampilkan, mendistribusikan dan mengunduh gambar-

- gambar tidak senonoh (porno) melalui media siber yang dapat diakses oleh pengguna internet.
2. Pelanggaran hak cipta (copyright), yakni aktivitas pengcopyan atau penggandaan hak cipta yang dilakukan dengan tidak sah dan menyebarluaskan melalui internet atau menjual kepada pihak lain.
  3. Terorisme virtual, yakni Tindakan yang dengan sengaja melakukan ancaman kepada pihak lain.
  4. Perjudian dengan menggunakan media siber (Nasrullah, 2021)

## **PEMBAHASAN**

### **Pola Asuh Di Media Digital**

Kecemasan kolektif yang dirasakan orang tua tentang hubungan antara anak-anak dengan media dan teknologi telah berlangsung lebih dari beberapa decade sejak kemunculan media digital. Terdapat sebuah pola Ketika kemunculan dan perkembangan teknologi akan memberikan kepanikan kepada orang tua berkaitan dengan perkembangan moral anak. Perasaan cemas Cohen, 2002) tentang anak-anak tidak pernah benar-benar hilang. Berbagai diskusi kontemporer tentang anak-anak mengambil bentuk resiko yang berkelanjutan namun multidimensi tentang berbagai praktik digital anak-anak. Lokus perhatian yang spesifik berubah seiring waktu-meningkat dan kemudian surt sebagai respon terhadap berbagai berita yang muncul. Berbagai fenomena yang diberitakan menimbulkan kekhawatiran seperti kejadian bunuh diri akibat dari perundungan siber atau munculnya mode teknologi baru yang menimbulkan semacam ancaman bagi anak-anak. Beberapa contoh seperti permainan daring, mobile legend yang berkaitan dengan senjata dan kekerasan, platform sosial media Titok yang dengan cepat naik menjadi salah satu sosial media paling popular di kalangan remaja, yang menimbulkan banyak kekhawatiran mulai dari, pelanggaran privasi, kurasi konten algoritmik, serta paparan terhadap konten yang menyakiti diri sendiri atau bunuh diri (Catherine Page Jeffery, 2025).

Pola komunikasi keluarga dianggap memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Pola sistem melihat karakteristik yang menggambarkan bagaimana sistem keluarga berfungsi sebagai satu kesatuan (Bochner & Einseberg, 1987). Berdasarkan tori sistem dalam keluarga proses jalannya sebuah sistem miminal memiliki enam prinsip dasar, yakni; (1) Saling bergantung, utuh dan saling mempengaruhi, teori sistem keluarga melihat ada sebuah proses dinamis dalam keluarga yang saling mempengaruhi satu sama lain, dan proses ini tidak pernah berakhir ;(2) Stabilitas dan mengatur diri sendiri (stability and self regulation), dari perspektif komunikasi keluarga, keteraturan membawa predikabilitas yang memungkinkan kelancaran fungsi keluarha. Kecenderungan untuk mencari stabilitas disebut morfotasis. Semua keluarga selalu berusaha mencari Tingkat keteraturan dalam hidup mereka. Pola, rutinitas, dan aturan yang dikenakan dalam rumah tangga akan memungkinkan keluarga berfungsi dengan Tingkat stabilitas tertentu; (3) Keterbukaan (Openess) dalam konteks keluarga maka keterbukaan sebuah sistem dimaksudkan untuk bisa menerima dan menyesuaikan diri dengan perkembangan eksternal, sehingga ia tetap dinamis; (4)Perubahan (Change), perubahan adalah evolusi alami yang tak bisa dihindari. Perubahan disini dimaksudkan adalah kemajuan. Sebuah keluarga yang ingin maju harus siap berubah dan berusaha mencari perubahan. Kecenderungan ini dikenal sebagai morfogenesis. Morfogenesis adalah kecenderungan untuk mengatur ulang dan berkembang dari waktu ke waktu; (5) Kompleksitas interaktif dan umpan balik, istilah ini menyiratkan bahwa setiap Tindakan memicu perilaku baru serta merespons perilaku sebelumnya. Dalam kompleksitas demikian, proses umpan balik terus berjalan secara interaktif dengan mengawasi terpiharanya keseimbangan dalam mencapai Tingkat homeostasis; (6) Kesetaraan (kesejajaran), komunikasi adalah atribut kunci dari sistem manusia, di mana sistem keluarga ada didalamnya. Ia terbentuk karena adanya proses komunikasi menciptakan, memelihara dan mengubah sistem. Individu dalam sistem keluarga sesuai dengan makna yang mereka berikan satu sama lain, keluarga dan aspek lingkungan (Hafied Cangara, 2023)

## **Level Realitas Di Media Sosial**

Realitas sosial siber Gidved menunjukkan bahwa ada skema yang kompleks dalam melihat sebuah realitas di media sosial. Realitas yang tidak sekedar peristiwa belaka, namun setidaknya memiliki hubungan bahwa terjadi negosiasi antara offline dan online. Sebuah realitas yang terjadi di media sosial bisa dilihat melalui dua konsep, yakni konten dan bentuk (form) media sosial. Lebih jauh, sebuah aksi dari komunikasi dan interaksi yang terjadi di internet harus dilihat pula dari apa yang membawa (site) komunikasi itu dan apa yang tampak dari apa yang disampaikannya (surface). Berdasarkan hal tersebut, realitas sosial siber yang ada di media sosial bisa dibagi ke dalam dua kerangka besar, yakni level mikro maupun makro. Level mikro berada dan merujuk pada teks yang dikonstruksi oleh pengguna, sedangkan level makro merujuk pada konteks yang mengelilingi teks (Nasrullah, 2021)

Anak-anak yang tumbuh dengan komputer dan menggunakannya setiap hari sudah tidak asing dengan berbagai hal yang ditawarkan dalam internet. Peningkatan pesar akses internet anak-anak menimbulkan banyak kekhawatiran. Meskipun menyadari potensi Pendidikan dan informasinya, para orang tua tetap mengkhawatirkan penggunaan internet oleh anak-anak mereka. Mereka khawatir tentang akses konten yang tidak pantas, berjam-jam di depan layar dan potensi terisolasi dari teman dan anggota keluarga. Sebuah studi dari Annenberh Public Policy Center menemukan bahwa 78% orang tua di Amerika serikat mengkhawatirkan secara khusus tentang akses ke pornografi melalui internet, meski demikian, 75% orang tua yang disurvei percaya bahwa internet memberikan dampak positif bagi anak-anak sebagai alat pembelajaran (Turrow,1999). Secara keseluruhan. Peningkatan akses ke internet telah menyoroti pentungnya mediasi orang tua dalam penggunaan dan sikap anak-anak dapat memainkan peranan penting dalam memidiasi potensi dampak negative dari media (Austin,2001). Perilaku kekhawatiran, sikap dan gaya komunikasi orang tua dapat menjadi sangat penting dalam membentuk pengalaman “netgeneration” secara

langsung atau tidak langsung di wab. Berbagau penelitian yang melakukan kajian bagaimana mediasi internet dari perspektif orang tua dan anak. Menemukan bagaimana tantangan orang tua dalam fase era informasi, untuk menyeimbangkan keluarag tetap sehat secara psikologis dan layak secara sosiologis. Kekhawatiran orang tua mengenai internet bergantung pada pola mediasi orang tua, persepsi anak-anak terhadap mediasi orang tua, lingkungan media di rumah, motivasi anak dan demografi (Alison Alexander, n.d.). Media sosial merupakan medium digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang-waktu para penggunanya berinteraksi. Nilai-nilai yang ada di Masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Skema segitiga realitas sosial siber memberikan arahan bagaimana aspek-aspek sosial saling terhubung dengan pengguna sebagai human agency. Hubungan ini akan membantu untuk melihat bagaimana transformasi dari realitas yang merupakan hasil jalinan tersebut di ruang virtual (Nasrullah, 2014)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada April 2021, dengan jumlah responden 571 di Ingris menemukan pengalaman penggunaan media sosial untuk menghilangkan kesepian. Dengan kata lain orang yang bermain video game atau media sosial dilakukan untuk mengurangi kesepian mereka di dunia nyata. Dalam penelitian ini, partisipan yang ikut serta dalam kegiatan daring dengan orang lain atau bermain video game dengan orang lain secara online cenderung tidak terlalu kesepian. Secara keseluruhan, 9% peserta secara khusus menyebutkan hal tersebut (Caton et al., 2024)

Terdapat sebuah istilah Teknopenik merujuk antara kepanikan orang tua dan teknologi baru. Teknopenik mengontekstualisasikan kepanikan moral sebagai respons terhadap ketakutan terhadap modernitas sebagaimana diwakili oleh teknologi baru. Warwick, 2008 mengidentifikasi tiga karakteristik teknopenik. Pertama, mereka berfokus pada bentuk medi baru, yang saat ini mengambil alih teknologi yang termediasi. Kedua, teknopenik pada umumnya mejadikan penggunaan media

baru sebagai patologi kaum muda (sebagai contohnya peretasan, berbagi berkas, tautan atau bermain video game yang mengandung kekerasan. Tetapi contoh perilaku yang lebih baru yang dianggap patologis mungkin mencangkup penggunaan yang "berlebihan", meniru perilaku yang digambarkan dalam konten media sosial, dan praktik seksual untuk merepresentasikan diri sendiri). Ketiga, dia mencatat bahwa kecemasan budaya uni terwujud dalam Upaya untuk mengubah atau mengatur perilaku kaum muda dengan mengendalikan teknologi yang digunakan kaum muda(Catherine Page Jeffery, 2025)

### **Sikap Orangtua Terhadap Media Digital Dan Dampaknya Pada Anak**

Paparan dini terhadap perangkat digital menjadi dilema bagi keluarga baru, mereka ragu apakah harus memaparkan media digital atau tidak kepada anaknya pada usia dini. Akan tetapi, faktor utama pemaparan media digitak dengan tujuan menyediakan akses hiburan kemudian diikuti dengan tujuan Pendidikan dan kenyamanan dalam nagivasi perangkat. Media digital dianggap oleh orangtua baru sebagai wadah bersosialisasi dengan teman sebaya melalui saluran media yang berbeda. Bagi orang tua, media digital memenuhi kebutuhan anak akan perhatian dari orang tua, Ketika orang tua sibuk dengan pekerjaan pribadi dan pekerjaan rumah. Pada akhirnya, kesiapan orang tua untuk memperkenalkan waktu layar untuk anak-anak menjadi lebih awal. Pada Sebagian besar anak mulai terpapar layar pada usia antara 18-36 bulan. Sebagai kelanjutan penelitian yang dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Sikap orang tua terhadap media digital, penelitian ini menemukan bahwa orang tua memiliki pandangan positif terhadap media digital karena memiliki fungsi multifungsi seperti Pendidikan, hiburan dan ikatan keluarga. Barta- Rojas, Aierbe-Barandriaran dan Oregui Gonzales (2018) dalam penelitian mereka melaporkan bahwa orang tua memandang media digital secara negative terutama yang memiliki fungsi internet. Perbedaan ini didasari oleh kelompok usia anak yang berbeda yang diteliti dalam penelitian tersebut. Penelitian menemukan anak-anak yang lebih tua lebih cenderung memiliki perebutan kekuasaan dengan

orang tua karena pembatasan dalam mengakses media digital ditemukan pada kelompok usia 2-6 th yang belum mendapatkan otonomi penuh dari orang tua. Dengan demikian, kekhawatiran orang tua dalam penelitian ini relative lebih rendah dibandingkan dengan orang tua yang memiliki anak yang lebih besar. Orang tua yang memiliki anak kecil, secara umum menyatakan komentar yang lebih positif tentang media digital terutama Ketika anak-anak mengakses aktivitas media dan konten media yang sesuai dengan usia mereka. Namun, para orang tua mengeluhkan potensi resiko yang terpapar pada perkembangan fisik dan psikososial anak. Sikap orang tua terhadap media digital dan startegi intervensi orang tua. Nikken dan Schols (2015) menyebutkan bahwa waktu layar orang tua sendiri berkontribusi pada jenis strategi intervensi orang tua. Semakin banyak waktu yang dihabiskan orang tua dalam penggunaan media, semakin mediasi aktif dan aktif dan terbatas yang akan mereka terapkan pada anak-anak mereka. Mediasi restriktif merupakan startegi intervensi orang tua yang paling sering dan konsisten diterapkan. Hal ini bertindak sebagai Tindakan pencegahan yang dapat mengatasi masalah perilaku buruk anak kapan saja atau memang menunjukkan keaktifannya dalam beberapa kasus. Meskipun demikian, ada tantangan dalam melaksanakan strategi pembatasan waktu terlepas dari kemudahannya dalam penerapannya karena persepsi waktu anak kecil belum berkembang. Anak-anak sering kali mencoba tawar-menawar dengan orang tua untuk memperpanjang waktu penggunaan media. Fenomena ini juga sesuai dengan pernyataan "Detradisionalisasi Keluarga" yang terdiri dari meningkatnya kepercayaan dan negosiasi antara orang tua dan anak. Pembatasan konten menerima kepatuhan mutlak dari anak-anak. Anak yang masih berusia muda, akan menunjukkan rasa hormat terhadap otoritas orang tua. Mereka masih bergantung dan menghabiskan Sebagian besar waktunya dengan orang tua. Oleh karena itu, orang tua cenderung menerima lebih banyak konformitas dari anak-anak mereka yang masih kecil. (Vian & Arts, 2021). Media sosial merupakan medium digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang-waktu para penggunanya berinteraksi. Nilai-nilai yang ada di Masyarakat maupun komunitas juga muncul

bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Skema segitiga realitas sosial siber memberikan arahan bagaimana aspek-aspek sosial saling terhubung dengan pengguna sebagai human agency. Hubungan ini akan membantu untuk melihat bagaimana transformasi dari realitas yang merupakan hasil jalinan tersebut di ruang virtual (Nasrullah, 2014)

Sehingga dapat dilakukan berbagai pencegahan yang dapat dilakukan oleh orang tua dengan membangun keintiman dalam keluarga membutuhkan komunikasi yang intensif. Banyak orang menilai kualitas hubungan mereka berdasarkan keintiman dan sejauh mana mereka merasa dekat dengan pasangannya atau saudara-saudaranya. Keintiman dapat membantu seseorang merasa lebih dicintai dan merasa tidak sendirian dalam hidup. Bagaimana Tingkat keintiman dalam keluarga dapat dilihat pada level keintiman komunikasi, apakah hal itu pada level jurang, bagus atau bagus sekali, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini

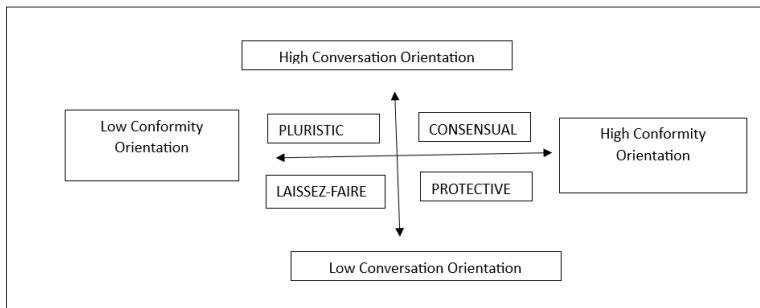
<b>Kemampuan</b>	<b>Level Komunikasi</b>		
	<b>Kurang</b>	<b>Bagus</b>	<b>Sangat Bagus</b>
Keterampilan Mendengar ( <i>Listening Skills</i> )	Kurang	Terluhat Aktif mendengarkan, tetapi umpan balik terbatas	Memberikan umpan balik dan menunjukkan keterampilan mendengarkan yang baik
Keterampilan Bicara ( <i>Speaking Skills</i> )	Sering berbicara dengan orang lain	Lebih banyak bocara dengan dirinya sendiri daripada bocara dengan orang lain	Mengutamakan bicara dengan dirinya sendiri daripada bicara dengan orang lain
Pengungkapkan diri ( <i>Self Disclosure</i> )	Berbagi perasaan rendah	Berbagi perasaan sedang dengan orang lain	Berbagi perasaan tinggi dengan orang lain

	dengan orang lain		
Kejelasan ( <i>Clarity</i> )	Pesan tidak konsisten	Pesan yang disampaikan jelas	Pesan yang disampaikan sangat jelas
Tetap pada topik yang dibicarakan ( <i>Stay on Topic</i> )	Tidak konsistem dengan topik yang dibicarakan	Lebih banyak pada topik yang dibicarakan	Fokus dan konsistensi dengan topik yang dibicarakan
Sikap hormat dan penghargaan pada orang lain ( <i>Respect and Regard</i> )	Sikap hormat dan penghargaan pada orang lain rendah	Sikap hormat dan penghargaan pada orang lain sedang	Sikap hormat dan penghargaan pada orang lain tinggi

Tingkat Komunikasi Pasangan dan Keluarga (Hafied Cangara, 2023)

### **Pencegahan Dalam Komunikasi Keluarga**

Pola komunikasi keluarga mencerminkan bagaimana komunikasi berlangsung dalam keluarga. McLeod dan Chaffe dalam Comstock (1985) mencoba mengembangkan dua dimensi utama pada pola komunikasi keluarga, pertama berorientasi sosial dan kedua berorientasi konsep. Keluarga yang berorientasi sosial adalah keluarga yang otoritatif dan mengontrol. Anak-anak dalam jenis keluarga ini harus tunduk pada otoritas orang tua, menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari konflik dengan orang tua atau orang lain. Sebaliknya, komunikasi berorientasi konsep menekankan ide, keyakinan dan perasaan individu. Jenis keluarga ini mendorong anak untuk mengungkapkan ide secara terbuka dan menantang pandangan orang lain. Berdasarkan dimensi tersebut kemudian dibagi menjadi empat tipe yang berbeda. Kemudian akan digambarkan sebagai berikut;



### Pola Komunikasi Keluarga (Hafied Cangara, 2023)

Kehadiran smartphone menjadi sumber dari teknopanik, berbagai sumber menemukan hubungan antara kecemasan tentang anak muda yang menggunakan smartphone dan persepsi peran yang memperkuat atau melemahkan hubungan dengan Masyarakat. Berkaitan dengan anak muda yang semakin mengisolasi diri dari Masyarakat, hal ini menjadi distribusi norma dan nilai baru yang disesuaikan dengan media sosial. Tidak mengherankan kekhawatiran tentang televisi, sinema dan musik yang dibayangi internet dan teknologi digital terkait smartphone menjadi tempat kecemasan bermula. Terpaan dari media dalam berbagai konteks dan kombinasi kekhawatiran tentang efek dan keterlibatan, pergeseran Lokasi dengan kedekatan layar menimbulkan tantangan tambahan bagi orang tua. Layar televisi dan bioskop dicirikan oleh Lokasi yang biasanya publik dan dikonsumsi dibawah pengawasan. Hal ini bila dibandingkan dengan paparan smartphone yang lebih banyak berada dalam ranah pribadi jauh dari pengawasan (Catherine Page Jeffery, 2025).

Orang tua memikul tanggung jawab utama untuk meminimalkan resiko yang ditimbulkan oleh media digital terhadap anak-anak mereka, di Australia (Scott, 2019) Tingkat potensi Pendidikan yang ada di media digital memberikan peluang berbahaya seperti cyberbullying dan paparan konten tidak pantas. Artikel ini menggambarkan posisi kelas menengah Australia, di mana orang tua melakukan navigasi antara dua lintasan

perkembangan; perkembangan sosiobiologis di mana anak-anal berkembang dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan dewasa, dan perkembangan teknologi yang dibentuk secara sosial dalam hal Pendidikan, koneksi dan ekspresi diri. Dalam konteks di Australia orang tua menghadapi tekanan tambahan karena keharusan nasional seputar eSafety dan penggunaan teknologi Pendidikan, temuan ini dapat dijadikan Pelajaran dan wawasan penting Ketika negara lainnya mengadopsi penggunaan teknologi di sekolah. Temuan ini menunjukkan implikasi Upaya praktis orang tua yang meminimalkan resiko negative media digital. Media orang tua yang tidak statis dan digerakan oleh autran, merupakan proses dinamis, proses yang digerakan oleh konteks yang fleksibel, sesuai situasi dan melalui negosiasi antara orang tua dan anak. Media antara orang tua dan anak dalam konteks komunikasi keluarga yang memiliki anak remaja yang sedang mengembangkan otonomi dan kemandirian mereka sendiri (Jeffery, 2021)

## **SIMPULAN**

Perubahan secara epistemologis bertujuan untuk menggeser perdebatan tentang hubungan antara anak-anak dan media digital dari posisi yang deterministik dan terpolarisasi baik dalam hal media digital, baik yang berkaitan dengan pandangan bahwa anak hanya sebagai korban dalam bahaya (penerima pasif) atau sebagai pihak yang mungkin berbahaya (karena diberdayakan oleh media). Sejauh ini, kita berpikir penggunaan media digital secara massif merupakan fenomena sosial yang relatif baru, yang belum menjadi bagian dari masa kecil. Sebagian besar orang tua dan guru-guru saat ini, dapat dipahami saat ini kita menghadapi tantangan untuk mengartikulasikan simbolik anak-anak dengan konten yang ada di media digital. Kita perlu memahami bahwa media digitak dan internet tidak hanya dianggap sebagai alat atau sumber daya tambahan untuk Pendidikan anak-anak, tetapi sebagai ruang sosial, Dimana mereka beredar. Tantangan yang kini dihadapi bagaimana anak-anak dapat menggunakan media digital untuk Pendidikan juga menumbuhkan kegiatan kolaboratif tentang bagaimana anak-anak dapat memproduksi dan menyebarkan konten (I, n.d.). seperti mata pisau, kehadiran media digital

terutama bagi anak-anak yang lahir di era digital tidak mungkin dihindari, berbagai penelitian telah membuktikan peranan orang tua dalam pemanfaatan media digital menjadi hal yang urgent dilakukan, bukan hanya pada pembatasan waktu tetapi juga pada proses pembuatan dan konsumsi konten media digital. Sejatinya, perubahan secara sosial menemukan bahwa media digital bukan hanya berperan pada media informasi dan Pendidikan, juga sudah menjadi ruang bagi anak-anak berekspresi dan bersosialisasi.

## BAB 17

### **Komunikasi Partisipatoris Dalam Penguatan Modal Sosial Masyarakat Adat Untuk Pelestarian Lingkungan**

Yulia Rahmawati

#### **Abstrak**

Masyarakat adat merupakan kelompok sosial yang memiliki keterikatan historis, budaya, dan geografis dengan wilayah tertentu, serta mempertahankan sistem nilai dan hukum adat secara turun-temurun. Modal sosial dan komunikasi partisipatoris memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pelestarian kearifan lokal dalam komunitas masyarakat adat. Modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, norma, dan jaringan sosial mendukung praktik pelestarian melalui solidaritas dan kerja sama komunitas. Sementara itu, komunikasi partisipatoris yang mengedepankan dialog setara dan pemberdayaan memungkinkan masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam. Studi kasus Kampung Naga dan Kampung Kuta menunjukkan bahwa integrasi modal sosial, komunikasi partisipatoris, dan kearifan lokal mampu menciptakan model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Artikel ini menegaskan pentingnya penguatan komunikasi partisipatoris sebagai strategi untuk memperkuat modal sosial dan melestarikan kearifan lokal dalam menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial.

Kata kunci: komunikasi partisipatoris; penguatan; modal sosial; masyarakat adat; pelestarian lingkungan

#### **PENDAHULUAN**

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, hukum, dan budaya yang khas, yang

diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat adat biasanya memiliki hubungan erat dengan lingkungan sekitarnya dan seringkali mempertahankan sistem ekonomi serta politik yang berbeda dari masyarakat umum. United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) sebagai salah satu organisasi masyarakat adat global, menyebutkan bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah yang berkesinambungan, kelekatan dengan wilayah geografis tertentu, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, Bahasa dan kpercayaan khas dengan kesadaran identitas sebagai masyarakat adat.

Di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat adat disebut sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, hukum adat, dan kelembagaan adat yang masih diakui oleh masyarakat dan negara. Masyarakat adat ini memiliki hubungan erat dengan alam, memiliki sistem hukum adat, identitas budaya yang kuat, dan kelembagaan sosial berbasis kolektivitas.

Masyarakat adat memainkan peran penting dalam pelestarian lingkungan, keberlanjutan sosial, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Beberapa studi menunjukkan bahwa wilayah adat memiliki tingkat deforestasi yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah non-adat karena adanya praktik pengelolaan berbasis kearifan lokal. Namun demikian, di era digital sekarang ini masyarakat adat menghadapi konflik lahan akibat ekspansi industri atau proyek Pembangunan, keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya dan pergeseran nilai dan hilangnya bahasa serta tradisi lokal.

## **PEMBAHASAN**

### **Modal Sosial Masyarakat Adat**

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterikatan sejarah, budaya, dan wilayah tertentu, serta mempertahankan sistem sosial dan ekonomi berbasis kearifan lokal. Masyarakat adat sebagai komunitas sosial yang melakukan

aktivitas kelompok masyarakat yang bekerja sama berdasarkan nilai dan norma-norma dan nilai sosial yang mengakar dan disepakati dapat disebut sebagai modal sosial (Rijal & Noer, 2013). Dalam kehidupan masyarakat adat, modal sosial memainkan peran kunci dalam menjaga harmoni sosial, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial.

Modal sosial (social capital) adalah konsep yang menggambarkan sumber daya yang berasal dari hubungan sosial, norma, dan kepercayaan di dalam komunitas. Modal sosial memiliki peran penting dalam mendorong kerja sama, membangun solidaritas, dan mencapai tujuan bersama. Putnam menyebutkan modal sosial yang dikutip oleh Sumardjo mencakup kepercayaan (trust), norma (norms), dan jaringan (networks) yang menopang kerja kolektif (Putnam, 2000). Modal sosial menjadi landasan bagi pelestarian hutan larangan melalui penguatan solidaritas komunitas.

Modal sosial ini terdiri dari tiga tipe, yaitu bonding, bridging, dan linking (Putnam, 2000), yaitu bonding social capital sebagai modal sosial di dalam kelompok yang homogen, seperti keluarga atau komunitas adat, bridging social capital sebagai modal sosial yang menghubungkan kelompok yang berbeda, seperti hubungan masyarakat adat dengan kelompok lain di luar komunitas mereka, dan linking social capital sebagai modal sosial yang menghubungkan komunitas dengan institusi formal, seperti pemerintah atau donor.

Modal sosial memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan, karena dapat mobilisasi sumber daya lokal untuk proyek bersama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan mendukung penerapan norma yang menjaga keseimbangan ekologi dan sosial. Dalam konteks pelestarian hutan larangan, modal sosial mendukung praktik tradisional yang berkontribusi pada keberlanjutan ekologi. Misalnya, norma adat melarang eksplorasi berlebihan hutan,

sementara jaringan sosial memperkuat kerja sama dalam menjaga kawasan tersebut.

Modal sosial adalah sumber daya yang berasal dari hubungan sosial, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Putnam, 2000). Dalam masyarakat adat, modal sosial memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial, mempertahankan identitas budaya, serta mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Modal sosial dalam masyarakat adat dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu 1) jaringan sosial. Masyarakat adat memiliki hubungan sosial yang kuat, baik dalam keluarga besar (kinship) maupun komunitas luas. Jaringan sosial ini berfungsi sebagai sistem dukungan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ekonomi gotong royong hingga bantuan dalam keadaan darurat. 2) Norma dan Nilai. Adat istiadat dan aturan sosial mencerminkan norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keseimbangan dengan alam menjadi dasar kehidupan sosial dan ekonomi. 3) Kepercayaan. Kepercayaan antaranggota masyarakat adat tinggi karena adanya hubungan kekerabatan dan nilai solidaritas yang kuat. Kepercayaan ini menjadi dasar bagi kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan pengambilan keputusan kolektif. Demografi dan modal sosial masyarakat memilih pengaruh terhadap perspektif seseorang berdasarkan persepsi dan partisipasi masyarakat (Wulandari et al., 2021). Putnam (Putnam et al., 1993) menjelaskan modal sosial sebagai bagian organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi dengan modal kapital lainnya.

Modal sosial masyarakat adat diperkuat oleh komunikasi partisipatoris. Melalui pendekatan ini, masyarakat adat dapat saling berbagi pengetahuan, memperkuat solidaritas, dan bersama-sama menjaga hutan larangan dari ancaman modernisasi dan

eksploitasi. Namun, implementasi komunikasi partisipatoris sering menghadapi tantangan, seperti kurangnya pengakuan terhadap hak-hak adat dan masuknya kepentingan ekonomi modern yang merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran komunikasi partisipatoris dalam menguatkan modal sosial masyarakat adat.

### **Komunikasi Partisipatoris untuk Meningkatkan Kearifan Lokal**

Komunikasi partisipatoris merupakan salah satu pendekatan ilmu komunikasi yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses komunikasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan serta aspirasi komunitas lokal. Komunikasi partisipatoris menurut Freire (Freire, 1970) melibatkan dialog setara dan pemberdayaan. Prinsip ini penting dalam membangun kepercayaan dan solidaritas komunitas.

Komunikasi partisipatoris didefinisikan sebagai proses komunikasi yang menempatkan komunitas sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi aktivitas komunikasi. Pendekatan ini menghindari pola komunikasi top-down yang bersifat instruktif dan menggantinya dengan dialog yang setara dan interaktif (Aminah et al., 2014).

Cangara (Cangara, 2020) mengutip Bessette (2004) dalam komunikasi partisipatoris memiliki empat prinsip, yaitu dialog setara yang semua pihak memiliki hak untuk didengar dan berkontribusi dalam diskusi; pemberdayaan yang fokus pada penguatan kapasitas komunitas lokal untuk memahami, mengatasi, dan mengambil tindakan terhadap isu yang dihadapi; pengakuan terhadap pengetahuan lokal dengan penghormatan terhadap kearifan lokal sebagai dasar dari solusi yang relevan dan kontekstual; dan keberlanjutan sosial dengan hasil dari proses komunikasi partisipatoris harus dapat dipertahankan oleh komunitas tanpa ketergantungan pada aktor eksternal.

Komunikasi partisipatoris sering dikaitkan dengan komunikasi pembangunan partisipatoris, karena dapat dilihat pada pendekatan teori dialog Paulo Freire, yaitu dialog adalah elemen inti dalam proses pembebasan. Dalam komunikasi partisipatoris, dialog berfungsi untuk menciptakan hubungan horizontal antara pihak yang berkomunikasi (Freire, 1970).

Komunikasi partisipatoris juga dapat dilihat pada teori komunikasi untuk perubahan sosial, yang menekankan bahwa komunikasi bukan sekadar alat penyampaian informasi, tetapi juga sarana untuk menciptakan perubahan sosial. Komunikasi partisipatoris berperan dalam mengidentifikasi masalah, menyusun solusi bersama, dan mengimplementasikan perubahan (Servaes, 2008).

Komunikasi partisipatoris juga dapat ditinjau pada teori pembangunan berbasis partisipasi, yaitu partisipasi masyarakat dianggap sebagai elemen utama untuk menciptakan program yang relevan dan berkelanjutan (Sangian et al., 2018). Cangara mengutip Uphoff yang menyebutkan empat bentuk partisipatif, yaitu pelaksanaan, evaluasi, menarik manfaat dan pengambilan keputusan (Cangara, 2020). Komunikasi pembangunan partisipatif harus mampu menempatkan semua pihak sebagai partisipan yang setara sehingga tidak ada dominasi dalam arus informasi dari salah satu pihak. Setiap pihak seperti pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat sama-sama memposisikan dirinya sebagai aktor komunikasi (Muchtar, 2016).

Komunikasi partisipatoris adalah pendekatan komunikasi yang berfokus pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan (Servaes, 1999). Dengan demikian, maka komunikasi partisipatoris dalam konteks masyarakat adat dan pelestarian lingkungan menunjukkan pada membuka dialog antara masyarakat adat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah; mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan pelestarian sumber daya alam; dan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat adat terhadap hak-hak mereka dan tantangan ekologis yang mereka hadapi.

Dengan demikian, modal sosial masyarakat adat sebagai bentuk kepercayaan terhadap pemimpin adat untuk memperkuat kepatuhan terhadap aturan masyarakat adat. Mengikuti norma adat seperti larangan berburu atau menebang pohon sembarangan menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif. Membangun jaringan sosial antara komunitas adat, LSM, dan pemerintah dapat menciptakan kolaborasi yang lebih luas untuk pelestarian lingkungan.

Kearifan lokal merujuk pada pengetahuan, praktik, dan nilai yang dimiliki oleh komunitas lokal atau masyarakat adat yang berkembang dalam interaksi dengan lingkungan mereka selama berabad-abad. Kearifan lokal ini sering kali mencakup sistem pengetahuan mengenai alam, sumber daya alam, dan cara-cara hidup yang berkelanjutan. Dalam konteks ekologi, kearifan lokal berperan penting dalam pelestarian sumber daya alam, karena prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mendorong pengelolaan yang harmonis antara manusia dan alam. Kearifan ekologis dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar yang digali dari budaya lokal masyarakat tradisi (Holilah, 2016).

Kearifan lokal, dalam konteks ekologi, mencakup pengetahuan tradisional yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, baik yang bersifat praktis (seperti teknik bertani atau berburu) maupun filosofis (seperti nilai-nilai yang mendasari hubungan manusia dengan alam). Kearifan lokal ini biasanya diwariskan turun-temurun dan bersifat kontekstual, sesuai dengan kondisi geografis dan budaya masing-masing komunitas (Holilah, 2016).

Prinsip dasar kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam meliputi berkelanjutan (sustainability), keberagaman (biodiversity), kesatuan alam-manusia (holistic view). Kearifan lokal seringkali memainkan peran kunci dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem local, hutan larangan (sacred forests).

Di tengah arus globalisasi dan perubahan iklim, kearifan lokal sering menghadapi tantangan. Pengenalan teknologi modern, perubahan pola konsumsi, dan kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan pengetahuan lokal sering kali melemahkan kearifan lokal. Komunitas lokal di wilayah Asia tropis telah mengembangkan beragam metode pengelolaan lahan secara tradisional dengan menerapkan etika lingkungan yang membimbing mereka dalam berinteraksi kepada alam (Ahmada Arif Fakhruddin, 2024). Banyak studi juga yang menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan alam dapat meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas pelestarian sumber daya alam.

### **Komunikasi Partisipatoris dalam Pelestarian Lingkungan**

Dalam konteks pelestarian lingkungan, komunikasi partisipatoris dan modal sosial berperan penting dalam memperkuat kearifan lokal yang mendasari upaya konservasi sumber daya alam, terutama di komunitas masyarakat adat atau masyarakat lokal. Penelitian Darusman (Darusman, 2015) tentang Kampung Naga (Kabupaten Tasikmalaya) dan Kampung Kuta (Kabupaten Ciamis) menunjukkan adanya integrasi antara komunikasi partisipatoris, modal sosial, dan kearifan lokal menjadi dasar pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Komunikasi partisipatoris adalah pendekatan yang mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya alam. Pada kedua kampung ini komunikasi partisipatoris digunakan untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan melalui dialog terbuka antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya.

Prinsip komunikasi partisipatoris pada kedua kampung adat tersebut dengan adanya 1) dialog setara, yaitu masyarakat di Kampung Naga dan Kampung Kuta terlibat aktif dalam diskusi terkait pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya. Mereka

berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk membangun kesepakatan bersama. 2) pemberdayaan masyarakat, yaitu dalam kedua kampung tersebut, masyarakat diberdayakan untuk menjaga kawasan hutan, dengan pemahaman bahwa keberlanjutan alam berhubungan erat dengan keberlanjutan sosial mereka. 3) keberagaman pendekatan, yaitu dengan pengelolaan hutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang ada, serta diadaptasi dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Penerapan komunikasi partisipatoris di Kampung Naga adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan adat yang mengatur penggunaan sumber daya alam, seperti larangan menebang pohon di masyarakat hutan adat. Komunikasi ini terjadi secara informal melalui pertemuan-pertemuan rutin masyarakat, serta melalui ritus adat yang berfungsi untuk menjaga kelestarian alam.

### **Modal Sosial Masyarakat Adat dalam Pelestarian Lingkungan**

Modal sosial merujuk pada hubungan sosial yang ada dalam suatu komunitas, serta kepercayaan dan norma-norma sosial yang mengikat anggota komunitas tersebut. Dalam konteks Kampung Naga dan Kampung Kuta, modal sosial sangat berperan dalam membangun kerja sama untuk pelestarian lingkungan. Komponen modal sosial yang terkait dengan pelestarian lingkungan, yaitu 1) kepercayaan, yaitu dengan kepercayaan antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah lokal sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelestarian sumber daya alam. 2) jaringan sosial, yaitu pada kedua kampung tersebut ada jaringan sosial kuat yang memungkinkan masyarakat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pelestarian alam, seperti pengelolaan hutan secara berkelanjutan. 3) norma sosial, pada Kampung Naga dan Kampung Kuta ada norma adat yang mengatur larangan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan memperkuat solidaritas komunitas dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Kampung Kuta terletak di wilayah yang kaya akan hutan dan sumber daya alam lainnya, masyarakat memiliki tradisi yang serupa dengan Kampung Naga, yakni sistem pengelolaan hutan adat yang diatur oleh norma dan hukum adat. Modal sosial yang terjalin antara masyarakat setempat, termasuk dengan generasi muda, memungkinkan pengelolaan hutan secara partisipatif dan berkelanjutan. Modal sosial yang terjalin melalui jaringan sosial yang kuat dan kepercayaan terhadap pemimpin adat memungkinkan pengelolaan hutan dan lahan pertanian yang tidak hanya produktif tetapi juga ramah lingkungan. Kearifan lokal yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam di kampung ini berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan air secara berkelanjutan.

Kearifan lokal di Kampung Naga dan Kampung Kuta sangat penting dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Kearifan ini meliputi pengetahuan tradisional tentang pertanian, pengelolaan hutan, serta hubungan manusia dengan alam. Masyarakat di kedua kampung ini percaya bahwa alam harus dihormati dan dilindungi agar kehidupan mereka dapat berlanjut dengan baik. Prinsip kearifan lokal yang diterapkan dengan adanya larangan pemanfaatan berlebihan. Di Kampung Naga, misalnya, ada sistem larangan menebang pohon di area hutan tertentu sebagai bagian dari ritual adat untuk menjaga keseimbangan alam.

Masyarakat Kampung Naga memiliki adat yang melarang pemanfaatan sumber daya alam secara sembarangan, termasuk larangan menebang pohon di hutan adat. Aturan adat ini diwariskan turun-temurun dan berlaku dengan ketat. Komunikasi partisipatoris antara masyarakat adat dan pemangku kepentingan eksternal juga memperkuat pelestarian hutan dan sumber daya alam lainnya.

Berdasarkan riset Darusman (Darusman, 2016), keberhasilan pelestarian lingkungan di Kampung Naga dan Kampung Kuta tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara komunikasi partisipatoris, modal sosial, dan kearifan lokal. Masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi yang setara dan

dialogis (komunikasi partisipatoris) dapat memperkuat solidaritas sosial (modal sosial) yang kemudian mendukung implementasi aturan adat yang bersifat pelestarian alam. Komunikasi partisipatoris membantu dalam penyebaran pengetahuan tentang pentingnya pelestarian alam, sementara modal sosial memberikan dukungan sosial untuk menjaga agar peraturan adat dapat diterapkan secara efektif. Kearifan lokal menjadi landasan bagi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Komunikasi partisipasi dalam modal sosial masyarakat adat memiliki penting, terutama dalam kearifan lokal dan pelestarian lingkungan. Dalam hal ini sebagai bentuk modal sosial masyarakat adat dengan meningkatkan dialog antara pihak internal dan eksternal dengan mengadakan forum rutin yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan pihak eksternal lainnya. Pemanfaatan media tradisional dan digital dengan membuat dokumentasi audiovisual tentang tradisi lokal. Membangun kepercayaan dan solidaritas antargenerasi untuk menyebarkan kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- [BKKBN] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ed ke-1. Jakarta (ID): Biro Perencanaan.
- [BKKBN] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2023. Rekap Data per Menu [internet]. [diakses pada 14 November 2023]. Tersedia dari: [https://morena.bkkbn.go.id/basisDAK/index.php/Admin/list\\_data](https://morena.bkkbn.go.id/basisDAK/index.php/Admin/list_data).
- [BKKBN] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2023. Tahun 2023, BKKBN Kembali Mutakhirkan Data Keluarga di Indonesia [internet]. [diakses pada 14 November 2023]. Tersedia dari: <https://www.bkkbn.go.id/berita-tahun-2023-bkkbn-kembali-mutakhirkan-data-keluarga-di-indonesia>.
- Abdullah, Taufik (Ed). 1983. Agama dan Perubahan Sosial. Jakarta: Rajawali
- Abel, J. P., Buff, C. L. and Burr, S. A. (2016). Social media and the fear of missing out: scale development and assessment. *Journal of Business & Economics Research*, 14(1), 33.
- Achmad, Nur. 2001. Pluralitas Agama, Kerukunan dalam Keragaman. Jakarta: Kompas
- Afrizal. 2017. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin (Cet.Ke-4). Jakarta: Rajawali Pers.
- Agasta, Gentar V. & Praptiningsih, Novi A. (2025). Pengaruh Musik Video Girl Group Korea Selatan "ILLIT" Terhadap Cara Berpakaian Remaja Komunitas Friday Noraembang Di Instagram. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10(1), 278-289.
- Agustina, M., Aini, I., Zaina, L., & Anwar, S. (2019). Pembentukan Pertahanan Diri Anak Dalam Penggunaan Gadget: Strategi

Ibu di Era Digitak Untuk Membentuk Anak Yang Handal. 5(2).

Ahmad Sampurna, Najwa Ulfia Rahmi, Dhea Aftariza, H. E. P. (2024). Implementasi Media Massa Dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Humaniora Revolusioner*, 8(6), 104–111.

Ahmada Arif Fakhruddin, Y. (2024). Sumber Daya Kearifan Lokal untuk Konservasi Lingkungan Hidup. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 5(1), 100–108. <https://doi.org/10.55448/xg63eb94>

Alen, N. P. (2023). Transformasi Media Sosial Dalam Kompetensi Komunikasi Politik. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(1), 5101–5109. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Alfian K, S. D. N. (2024). Analisis Pengaruh Iklan Judi Slot Online pada Situs Tokyo99 terhadap Masyarakat Kabupaten Sumbawa. *YASIN*, 4(4), 694–712. <https://doi.org/10.58578/yasin.v4i4.3318>

Alfian, Y., Haromin, & Wahyudi, U. (2021). Peranan kepala unit pelaksana teknis pengendali program keluarga berencana (UPT PPKB) dalam upaya meningkatkan akseptor baru di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 139-158.

Alison Alexander, S. K. & Y. K. (n.d.). Cyberkids: The Influence of Mediation and Motivation on Children's Use of and Attitudes toward the Internet. <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781452233024.n17>

Aminah, S., Sumardjo, Lubis, D., & Susanto, D. (2014). Perubahan Model Komunikasi Dan Pergeseran Paradigma Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah. *Paramita: Historical Studies Journal*, 24(1), 92–103.

Aminulloh, A., Artaria, M. D., Surya, Y. W. I., Qorib, F., & Hakim, L. (2023). Firehose of Falsehood Propaganda Model in the 2019 Indonesian Presidential Election. In Mediator (Jurnal

- Komunikasi).  
<https://doi.org/10.29313/mediator.v15i2.10573>
- Amoore, L. ed. (2005) The Global Resistance Reader, London:Routledge.
- Andayani, D. (2024). Kominfo Blokir 1,9 juta Konten Judi Online Sejak Juli 2023-22 Mei 2024. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-7355672/kominfo-blokir-1-9-juta-konten-judi-online-sejak-juli-2023-22-mei-2024>
- Anderson, A. (1997) Media, Culture and the Environment, London:UCL Press.
- Andiyansari, P., & Sukmawati, A. I. (2021). Impacts of Media Literacy Levels on Human Trafficking (Tppo) Content. In Profetik Jurnal Komunikasi. <https://doi.org/10.14421/pjk.v14i2.2059>
- Andreassen, C. S., Billieux, J., Griffiths, M. D., Kuss, D. J., Demetrovics, Z. and Mazzoni, E. (2016). The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study. *Psychology of Addictive Behaviors*, 30(2): 252-62.
- Antaranews.com. (2024, Desember 31). Pemerintah tetapkan PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah. <https://www.antaranews.com/berita/4558206/pemerintah-tetapkan-ppn-12-persen-hanya-berlaku-untuk-barang-mewah>
- Arifin, Anwar. (2003) Komunikasi Politik, Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia, Jakarta: Balai Pusata, 152-153.
- Arsyad Arsyad, Rifma Ghulam Dzaljad, Mia Nurmiarani, & Safutra Rantona. (2024). Media Sosial sebagai Agen Transformasi Politik: Analisis Pengaruh terhadap Proses Komunikasi Politik. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(2), 240-251. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1593>

- Aryadillah, A., & Fitriansyah, F. (2022). Strategi Kampanye Politik Anies Baswedan dalam Membangun Citra Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 3(1), 87–92. <https://doi.org/10.31294/jpr.v3i1.1150>
- Auer, M., & Griffiths, M. D. (2022). Gambling Before and During the COVID-19 Pandemic Among Online Casino Gamblers: An Empirical Study Using Behavioral Tracking Data. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 20(3), 1722–1732. <https://doi.org/10.1007/s11469-020-00462-2>
- Aulia, Guruh Ryan. 2023. Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam. *JURNAL USHULUDDIN* Volume 25 Nomor 1 Tahun 2023
- Azad, V. & Sing, M. (2024). Effect Of Fear of Missing Out (FOMO) On Different Personality Types And Loneliness Among Young Adults. *Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities*, 7(5), 24–28. <https://doi.org/10.53555/jrtdd.v7i5.284>
- Azra, Azyumardi, (1996) Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme, Jakarta: Paramadina, 18-19.
- Babiker, A. et al. (2023) 'Need for affect, problematic social media use and the mediating role of fear of missing out in European and Arab samples', *Psychology Research and Behavior Management*, Volume 16, pp. 5025–5039. doi:10.2147/prbm.s435437.
- Bachrach, P and Baratz, M. (1962) 'Two Faces of Power', *American Political Science Review*, 56 (4):947-52.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2019) Laporan Kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Tahun 2019, Jakarta: BPIP.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah. 1999. Maluku Tengah dalam Angka. Masohi: BPS

- Bagader, Abu Baker A. 1983. Islam dalam Perspektif Sosiologi Agama. Yogyakarta: Titian Ilahi Press
- Bakar, Abu. 2015. Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama. *Jurnal TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No.2 Juli-Desember 2015
- Bakti, A.F. (2004) Communication and Family Planing in Islam in Indonesia, South Sulawesi Muslim Perceptions of a Global Development Program, Jakarta: INIS, 81-82
- Bakti, A.F. (2004) Paramadina and Its Approach to Culture and
- Bakti, A.F. (2004) Paramadina and Its Approach to Culture and Communications An Engagement In Civil Society, Paris: Archipel 68:319
- Bakti, A.F. (2005) Islam and Modernity: Nurcholish Madjid's Interpretation of Civil Society, Pluralism, Secularization, and Democracy, Leiden: Koninklijke Brill NV; 486-505
- Bakti, A.F. (2018) Membumikan Nilai-nilai Filosofis Pancasila, Jakarta: Cehuria Press.
- Barrie, C. K., Bartkowski, J. P., & Haverda, T. (2019). The Digital Divide among Parents and Their Emerging Adult Children: Intergenerational Accounts of Technologically Assisted Family Communication. *Social Sciences*, 8(3), 83. <https://doi.org/10.3390/socsci8030083>
- Barry, C.T. and Wong, M.Y. (2020) 'Fear of missing out (FOMO): A generational phenomenon or an individual difference?', *Journal of Social and Personal Relationships*, 37(12), pp. 2952–2966. doi:10.1177/0265407520945394.
- Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and Simulation*. University of Michigan Press.
- Bennet,W.L. (2016) 'Toward a Theory of Press-State Relations in the United States', *Journal of Communication*, 40 (2): 103-25.

- Bennet,W.L. (2016) 'Toward a Theory of Press-State Relations in the United States', *Journal of Communication*, 40 (2): 103-25.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. Dalam *The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139198752>
- Berger, J. (2016). *Contagious: How to Build Word of Mouth in The Digital Age*. Simon & Schuster.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Bloeman, N. and De Coninck, D. (2020) 'Social Media and fear of missing out in adolescents: The role of family characteristics', *Social Media + Society*, 6(4), p. 205630512096551. doi:10.1177/2056305120965517.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. California University Press.
- boyd, d. (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. Yale University Press.
- Brunello, Juliana.2012. Internet-memes and everyday-creativity Agency, sociability and the aesthetics of postmodernism. Erasmus University Rotterdam
- Budiana, H. R., Sjafirah, N. A., Bakti, I. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran bagi para guru SMPN 2 Kawali Kabupaten Ciamis. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 4(1), 59-62.

- Budiarti, E. (2023). Efektifitas Penggunaan Smartphone oleh Orang Tua dalam Membantu Pembelajaran Anak Usia Dini. 7(5), 5553–5563. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.5165>
- Budiarti, E. (2024). THE INFLUENCE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT ON THE. 41–48.
- Budiarti, E., & Yasmin Adar, S. (2023). Impact of Digital Media on Social-Emotional Development in Early Childhood: A Case Study at TK Kartika XX-46 Kendari. Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, 8(2), 89–98. <https://doi.org/10.14421/jga.2023.82-04>
- Buglass, S. L., Binder, J. F., Betts, L. R., and Underwood, J. D. (2017). Motivators of online vulnerability: The impact of social network sites use and FOMO. Computer Human Behavior, 66, 248–255.
- Cangara H. 2020. Komunikasi Pembangunan, Telaah untuk Memahami Konsep, Filosofi, serta Peran Komunikasi terhadap Pembangunan dan Pembangunan Komunikasi dalam Era Digital.
- Cangara, H. (2020). *KOMUNIKASI PEMBANGUNAN Telaah untuk Memahami Konsep, Filosofi, serta Peran Komunikasi terhadap Pembangunan*. Raja Grafindo Persada.
- Cangara, Hafied 2013 . Jakarta: Rajawali press Shifmen, Limor. 2014. Memes in Digital Culture. MIT Press essensial Knowledge
- Cantarella, M., Fraccaroli, N., & Volpe, R. (2020). Does Fake News Affect Voting Behaviour? In SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3629666>
- Carr, N. (2020). *The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains*. W.W. Norton & Company.
- Catherine Page Jeffery. (2025). Parenting in Digital Word (Beyond Media Panics Towards a New Theory of Parental Mediation). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003346708>

- Caton, S., Hatton, C., Gillooly, A., Bradshaw, J., & Marriott, A. (2024). Online social connections and Internet use among people with intellectual disabilities in the United Kingdom during the COVID-19 pandemic. X. <https://doi.org/10.1177/14614448221093762>
- Cerny, P., Menz, G. and Soderberg, S (2005) 'Different Roads to Globalization Neo-Liberalism, the Competition State, and Politics in a More Open World' in Soderberg, S., Menz, G and Cerny, G. eds. Internalizing Globalization: The Rise of Neo-Liberlism and the Decline of National Varieties of Capitalism, Houndsmill, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 1-30.
- Chen, C., Wang, N., Tu, Y., & Lin, H. J. (2021). Research Trends From a Decade (2011–2020) for Information Literacy in Higher Education: Content and Bibliometric Mapping Analysis. In Proceedings of the Association for Information Science and Technology. <https://doi.org/10.1002/pra2.435>
- Chitty N. 2010. Mapping Asian international communication. *Asian J Commun.* 20(2):181–196. doi:10.1080/01292981003693377.
- Cialdini, R. B. (2001). Influence: Science and Practice (4th ed.). Allyn & Bacon.
- Civikly, J. (1986), Humor and the Enjoyment of College Teaching, Jossey Bass, San Fransisco.
- Colleman, James S. 2008. Dasar-Dasar Teori Sosial, (Terj. Imam Muttaqien, Derta Sri Widowtie dan Siwi Purwandari). Bandung: Nusa Media Crapps
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2008). Business Research Methods. 10th Edition. McGraw Hill. Jakarta (ID): Penerbit PPM.
- Coser, R. (1960), Laughter Among Collogues: A study of social function of humor among the staff of mental hospital.
- Crook, Christina. (2015). The Joy Of Missing Out: Finding Balance In A Wired World. Canada: New Society Publishers

- Crouch, C. (2011) The Strange Npn-Death of Neo-Liberalism, Cambridge: Polity.
- Crouch, C. (2011) The Strange Npn-Death of Neo-Liberalism, Cambridge: Polity.
- Dahl, R. (1961) Who Governs? Democracy and Power in an American City. New Haven, CT: Yale University Press.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa Konflik. Jakarta: Rajawali
- Dandy, A. (2019). Feminisme Radikal: Peran Mahasiswi Menekan Tingkat Praktik Prostitusi di Kampus Surabaya. *Jurnal Lentera (Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Bahasa Indonesia)*, 2(2), 175-182.
- Danesi, M. (2017). The Semiotics of Emoji: The Rise of Visual Language in The Age of The Internet. Bloomsbury.
- Danielsbacka, M., Tammisalo, K., & Tanskanen, A. O. (2023). Digital and traditional communication with kin: Displacement or reinforcement? *Journal of Family Studies*, 29(3), 1270–1291. <https://doi.org/10.1080/13229400.2022.2040575>
- Darmayansyah. (2010). Strategi Pembelajaran Menyenangkan Dengan Humor. Jakarta:Bumi Aksar.
- Darusman, Y. (2015). *KEARIFAN LOKAL DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN (Studi Kasus di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya dan di Kampung Kuta, Kabupaten Ciamis)*. 1(1), 6.
- Darusman, Y. (2016). Kearifan Lokal Kerajinan Bordir Tasikmalaya Sebagai Ekonomi Kreatif Terbuka Untuk Modern (Studi di Kota Tasikmalaya Jawa Barat). *Journal of Nonformal Education*, 2(2), 107–119.
- Davis, A (2013) Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding, Cambridge: Polity.

- Davis, A. (2002) *Public Relation Democracy: Public Relation, Politics and the Mass Media in Britain*, Manchester: Manchester University Press.
- Davis, A. (2019) *Political Communication, A New Introduction for Crisis Times*, Cambridge: Polity Press, 130-149.
- Davis, A. ed., (2017b) *The Death of Public Knowledge?* London: Goldsmiths Press.
- Dawkins, Richard. 2006. *The Selfish Gene*. Oxford University Press.
- De Schattschneider, E.E. (1961) *The Semi-Sovereign People: A Realist's View of Democracy in America*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Delfabbro, P., King, D., & Griffiths, M. D. (2014). From Adolescent to Adult Gambling: An Analysis of Longitudinal Gambling Patterns in South Australia. *Journal of Gambling Studies*, 30(3), 547–563. <https://doi.org/10.1007/s10899-013-9384-7>
- Departemen Agama RI. 2003. *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Intermassa
- Devi, Lisa. 2015. Proses Komunikasi Interpersonal Ibu yang Bekerja dalam Pembentukan Sifat Konatif Anak. *Jurnal E-Komunikasi*. Vol.3 No. 1.
- Dewi, F. A. M., Sariman, P. N. A., Ramadhan, A. R., Muhammad, F., & Tugimin, S. (2024). Judi Online Dan Watak Kriminal Perspektif Psikologi Kriminal. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2(3), 58–62. <https://doi.org/10.61132/observasi.v2i3.456>

Dini, A. U. (2020). Edukasi Pendampingan Orangtua Mengenai Penggunaan Gadget Pada Anak Usia Dini. *Ellya Rakhmawati, Tri Suyati*, 179–189.

Diop L. 2016. Television Content Regulation in a Developing Country : A Case Study of Senegal . Drexel University.

Dohamid, A. G., Pertahanan, U., & Indonesia, R. (2025). Komunikasi Strategis dan Propaganda : Peran Media dalam Dinamika Perang Gagasan di Konflik Asimetris. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 1545–1553.

DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i1>

DOI:10.1016/j.chbr.2021.100070.

Downes, S. (2012). Connectivism and Connectivist MOOCs. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 9(3), 7–10. [https://www.itdl.org/Journal/Mar\\_12/Mar12.pdf](https://www.itdl.org/Journal/Mar_12/Mar12.pdf)

Dunleavy, P. and O' Leary, B. (1987) Theories of the State, London: Macmillan.

Dwitama, M. I., Hakiki, F. A., Sulastri, E., Usni, U., & Gunanto, D. (2022). Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(1), 53. <https://doi.org/10.24853/independen.3.1.53-66>

Dwivedi, A. and Lewis, C. (2020). How millennials life concerns shape social media behaviour, *Behaviour Information Technology*, 40(14), pp. 1467–1484. doi:10.1080/0144929x.2020.1760938.

Ehrenberg, A., Juckes, S., White, K. M., and Walsh, S. P. (2008). Personality and selfesteem as predictors of young people's technology use. *Cyberpsychology & Behavior*, 11(6), 739–741

Elhai, J. D., Dvorak, R. D., Levine, J. C., and Hall, B. J. (2016). Problematic smartphone use: A conceptual overview and

- systematic review of relations with anxiety and depression psychopathology. *Journal of affective disorders*, 207, 251-259.
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. " *Journal of Advanced Nursing*, 62((1), 107–115).
- Enginer, Asghar Ali. 2004. Liberalisasi Teologi Islam, Membangun Teologi Damai dalam Islam (Terj. Rizqon Khamami). Yogyakarta: Alenia
- Eriyanto. 2007. *Teknik Sampling: Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKIS
- Evelina, L. W., & Handayani, F. (2018). Penggunaan Digital Influencer dalam Promosi Produk (Studi Kasus Akun Instagram @bylizzieparra). *Warta ISKI*, 1(01), 71. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v1i01.10>
- Evendi, F., & Arinanda Kurnia, D. (2020). Strategi Kampanye Politik Pemilihan Kepala Desa Dalam Upaya Menggiring Opini Publik. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 9(2), 12–23. <https://doi.org/10.35457/translitera.v9i2.965>
- Fadhlurrohman, M. I., & Purnomo, E. P. (2020). The Role of Online Mass Media as a Tool for the 2019 Political Campaign in Indonesia. In *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*. <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i2.2182>
- Fajriani, Nurul. (2016). *PENGARUH SENSE OF HUMOR TERHADAP KOMUNIKASI INTERPERSONAL PADA ANGGOTA KOMUNITAS STAND UP COMEDY INDONESIA REGIONAL MAKASSAR*. Universitas Negeri Makassar
- Faradis, N., Ainya, N., Fauzah, A., Ichsan, M., & Anshori, A. (2023). Media Sosial dan Persepsi Publik: Analisis Strategi Kampanye Digital Calon Presiden Indonesia 2024. *Prosiding Seminar Nasional*, 643–652.

- Farshad Ghodoosi. (2016). The Concept of Public Policy in Law: Revisiting the Role of the Public Policy Doctrine in the Enforcement of Private Legal Arrangements. *Nebraska Law Review*.
- Fatika, R. (2025). Pengaruh Propaganda dan Disinformasi Terhadap Opini Publik. *Jurnal Komunikasi, Sosial, Dan Ilmu Politik*, 7482, 75–82.
- Fatwa, Achmad Fajruddin. 2007. Jembatan Hukum Islam Menyikapi Kekerasan Atas Nama Agama, dalam Qualita Ahsana Vol. IX No. 1. April 2007. Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Fauzi, R. (2018). Perubahan Budaya Komunikasi pada Pengguna Whatsapp di Era Media Baru. *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 1(1). <https://doi.org/10.32534/jike.v1i1.44>
- Fealy, Greg. and Virginia Hooker (ed.), (2006) Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook, Singapore: ISEAS, 4-5
- Febi Debora Marie Simaremare dan Muhammad Badar Izabuna. 2023. Male Gaze dan Visualisasi Tubuh dalam Meme "Perbandingan Wanita dan Pria setelah Mandi". Seminar Nasional Desain dan Media, 2023.
- Febrianto, A. (2023). A, The, of ANALYSIS INSTAGRAM CONTENT IN THE POLITICAL COMMUNICATION STRATEGIES OF THE 2024 INDONESIA PRESIDENTIAL CANDIDATES. In *Sociae Polites*. <https://doi.org/10.33541/sp.v24i2.5403>
- Fiske, John. 1990. Cultural and communication studies: Sebuah pengantar paling komprehensif. Penerjemah Yosal Iriantara Yogyakarta: Jalasutra.
- Fitria Dwi Lestari dan Monika Sri Yuliarti. 2018. Representasi Wanita dalam Meme pada AkunMedia Sosial Instagram (Analisis Semiotika Representasi Wanita dalam
- Fitriani, Shofiah. 2020. Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 20, No. 2,

- Tahun 2020. P-ISSN 2088-9046, E-ISSN 2502-3969  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis> DOI:  
<http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.5489>
- Fitzpatrick. 2023. Family Communication Patterns Theory dalam Griffin, EM. *A First Look at Communication Theory*. New York: Mc. Graw Hill.
- Franchina, V., Vanden Abeele, M., van Rooij, A., Lo Coco, G., and De Marez, L. (2018). Fear of Missing Out as a Predictor of Problematic Social Media Use and Phubbing Behavior among Flemish Adolescents. *International journal of environmental research and public health*, 15(10)
- Fransisca, V., & Ningsih, W. (2023). The Advancement of Technology and Its Impact on Social Life in Indonesia. In Devotion Journal of Research and Community Service. <https://doi.org/10.36418/devotion.v4i3.445>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum Books.
- Fuster, H., Chamarro, A., and Oberst, U. (2017). Fear of missing out, online social networking and mobile phone addiction: A latent profile approach. *Revista de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport*, 35, 23–30.
- Gayatri, S., & Satwika, I. B. C. (2022). Peran Media Sosial Sebagai Media Sarana Informasi Politik. *Anubhava Jurnal Ilmu Komunikasi Hindu*, 2(1), 273–282. <https://doi.org/10.25078/anubhava.v2i1.1050>
- Gerbner, G., & Gross, L. (1976). Living With Television: The Violence Profile. *Journal of Communication*, 26(2), 172–194. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1976.tb01397.x>
- Giddens, Anthony. 1987. Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik. Jakarta: Rajawali
- Ginting, Z. C., & Ginting, B. (2023). Faktor Penyebab Meningkatnya Pe'laku Judi Online pada Pelajar di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Mangga). *SOSMANIORA: Jurnal*

Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(1), 20–25.  
<https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i1.1717>

Glenn, Phillip. (2003). *Laughter in Interaction*. UK. Cambridge University Press

Goddy Uwa, O., & Christianah Ronke, A. (2023). Social Media and Political Propaganda: A Double-Edged Sword for Democratic Consolidation in Nigeria. 01(02), 11–15.  
<https://doi.org/10.61421/ijssmer.2023.1201>

Goleman, D. (2006). *Social Intelligence: The New Science of Human Relationships*. Bantam.

Grant, A. E., & Meadows, J. H. (2022). *Communication Technology Update and Fundamentals*: 17th Edition. [www.tfi.com](http://www.tfi.com).

Griffin E, Ledbetter A, Sparks GG. 2018. *A First Look At Communication Theory*, 10th Edition.  
<http://www.amazon.com/First-Look-Communication-Theory/dp/0072291532>.

Gunawan, T. (2024). Adaptasi Logika Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik Gerindra Menjelang Pemilu 2024. In Jurnal Ilmu Komunikasi.  
<https://doi.org/10.31315/jik.v22i1.7914>

Hadisaputro, Muhda. 2002. Peranan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Dalam Ketahanan Masyarakat.lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=6666, diakses tanggal 19 Oktober 2012.

Hafied Cangara. (2023). *Komunikasi Keluarga (Family Communication)*. Kencana. Prenadamedia.

Hafzah. (2014). Hubungan sense of humor guru dalam mengajar di kelas dengan motivasi belajar siswa di SMAN1 Sangatta. *eJournal Psikologi*, 2(1).

Hakim, L. (2018). Pelaksanaan program keluarga berencana di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Paradigma*, 7(2), 65-75.

- Halim, Ilim Abdul. 2021. Toleransi Beragama Sebagai Pemicu Hak Berbudaya pada Masyarakat Heterogen. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*. 5, 3 (2021): 463-474 ISSN: 2528-7249 (online) ISSN: 2528-7230 (print). DOI: 10.15575/rjsalb.v5i3.12652 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/>
- Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J. and Roberts, B. (1978) *Policing the Crisis – Muging, the State, and Law and Order*, London: Macmillan.
- Hamelink CJ. 2015. *Global Communication*. London: SAGE Publications Ltd.
- Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif-Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Pres
- Hanan, A. (2023). Propaganda politik pascakebenaran (posttruth) menjelang pemilu 2024 dan ancaman terhadap demokrasi di Indonesia kontemporer. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 6(1), 51–83.
- Harrigan, Meredith Marko; Iris Benz; Christopher Hauck; Emily La Rocca; Rachel Renders & Stephanie Roney. (2021). The dialectical experience of the fear of missing out for U.S. American iGen emerging adult college students. *Journal of Applied Communication Research* 49(4), 424-440.
- Hay, C. (2007) *Why We Hate Politics*, Cambridge: Polity.
- Held,D. (2006) *Models of Democracy*, 3rd edn, Cambridge: Polity.
- Herawati, T., Pranaji, D. K., Pujihastuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu*
- Hermawati, Paskarina, dan Runiawati. (2016). Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. *UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology*. Volume 1 (2) Desember 2016 eISSN 2528-1569 pISSN 2528-2115

- Hidayat, W., Setyabudi, D., & Ulfa, N. S. (2024). Pengaruh Terpaan Iklan Judi Online Dan Intensitas Komunikasi Dengan Teman Sebaya Terhadap Minat Bermain Judi Online. *Interaksi Online*, 12(4), 637–647.
- Hidayati, F. R. (2021). Komunikasi Politik dan Branding Pemimpin Politik Melalui Media Sosial: A Conceptual Paper. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5(2), 145–161. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i2.2385>
- Hing, N., Lamont, M., Vitartas, P., & Fink, E. (2015). Sports-Embedded Gambling Promotions: A Study of Exposure, Sports Betting Intention and Problem Gambling Amongst Adults. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 13(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11469-014-9519-9>
- Holilah, M. (2016). Kearifan Ekologis Budaya Lokal Masyarakat Adat Cigugur Sebagai Sumber Belajar Ips. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24(2), 163. <https://doi.org/10.17509/jpis.v24i2.1453>
- Holloway, D., Green, L., & Livingstone, S. (2021). *Digital Playgrounds: Children's Media Culture in The Digital Age*. Springer.
- homophobia scale in religious-based university students in Indonesia. *Acta Psychologica*, 249, 104474. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104474>  
<https://doi.org/10.30935/ojcmt/14292>
- Hu, Y., & Qian, Y. (2024). Gendering digital labor: Work and family digital communication across 29 countries. *Community, Work & Family*, 27(5), 588–611. <https://doi.org/10.1080/13668803.2024.2373852>
- I, C. C. L. (n.d.). *Children and Digital Media: a dialogue with researchers*. 1–21.
- Ihsan, Bakir. 2009. *Menebar Toleransi Menyemai Harmoni*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- IMDB. Plot The Danish Girl. Accessed from [https://www.imdb.com/title/tt0810819/plotsummary?ref\\_=tt\\_stry\\_pl#synopsis](https://www.imdb.com/title/tt0810819/plotsummary?ref_=tt_stry_pl#synopsis)
- Inayah, N., Indah, M. F., & Ariyanto E. (2021). Hubungan pengetahuan dan peran petugas dengan penggunaan alat kontrasepsi pada PUS di balai penyuluhan KB di Wilayah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020. [Disertasi]. Banjarmasin (ID): Universitas Islam Kalimantan.
- Indrawan, R. M. J. (2017). Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat. WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 16(2), 171. <https://doi.org/10.32509/wacana.v16i2.14>
- Irawan P. 2014. Internet Dan Fenomena Bangkitnya Peran Aktor Non Negara. J Komun Univ Tarumanagara. 6(03):59–73.
- Ishamuddin. 1996. Sosiologi Agama, Pluralisme Agama dan Interpretasi Sosiologis. Malang: UMM Press
- Izziyana, W. V. (2017). Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam. Istawa: Jurnal Pendidikan Islam, 2(1), 139-158.
- Jalin. (2024). Indonesia Darurat Judi Online: Simak Penyebab dan Solusi yang Dapat Diterapkan. [Www.Jalin.Co.Id](https://www.jalin.co.id/id-id/berita/blog/indonesia-darurat-judi-online-simak-penyebab-dan-solusi-yang-dapat-diterapkan). <https://www.jalin.co.id/id-id/berita/blog/indonesia-darurat-judi-online-simak-penyebab-dan-solusi-yang-dapat-diterapkan>
- Janco, R. (1984), Aristotle on Comedy. University of California Press, Berkeley.
- Jannah, A. M., Sholekhah, N. B., Amalin, K., & Prakosa, F. A. (2024). Analisis Sentimen Partai PKS Dalam Media Sosial Di Era Pemilu. <https://doi.org/10.61902/analogi.v2i2.1015>
- Jasmisari, Mutiara dan Ari Ginanjar Hendriansyah. 2022. Kenakalan Remaja di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas di Bandung: Studi Pendahuluan. Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional Special Edition September 2022 h:137-145. Keluarga dan Konsumen, 13(3).

- Jaya, I. A. I., & Prawiradiredja, S. (2017). Analisis Semiotika Transgender dalam Karakter Einar Wegener pada Film Danish Girl. *Jurnal Kajian Media*, 1(2).
- Jayanthi, R., & Dinaseviani, A. (2022). Kesenjangan digital dan solusi yang diterapkan di Indonesia selama pandemi COVID-19. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 24(2), 187-200.
- Jayus, Sumaiyah, Mairita, D., & Abdullah, A. (2024). Media Sosial sebagai Media Kampanye Politik Menjelang Pemilu 2024 Social Media as a Political Campaign Media Ahead of the 2024 Elections. *Jurnal Simbolika*, 10(1), 72–81. <https://doi.org/10.31289/simbolika.v10i1.11468>
- Jeffery, C. P. (2021). Parenting in the digital age : Between socio-biological and socio-technological development. <https://doi.org/10.1177/1461444820908606>
- Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. NYU Press.
- John Benjamin Publsh.
- Jordan, G. and Moloney, W. (2007) *Democracy and Interest Groups*, Hounds Mills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Kaldor, M., Moore, H. and Selchow, S. eds (2012) *Global Civil Society 2012: Ten Years of Critical Reflection*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Kaloeti, D.V., Kurnia S, A. and Tahamata, V.M. (2021) 'Validation and psychometric properties of the Indonesian version of the fear of missing out scale in adolescents', *Psicología: Reflexão e Crítica*, 34(1). doi:10.1186/s41155-021-00181-0.
- Kamalipour YR. 2021. *Global Media: Perceptions of The United States*. New York: Rowman & Littlefield.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>

- Khasabu, S., Pawito, P., & Rahmanto, A. (2023). Social Media Preference to Reach Young Indonesian Voters. In Journal of Social and Political Sciences. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.06.01.399>
- Kholil, M. (2016). FEMINISME DAN TINJAUAN KRITIS TERHADAP KONSEP GENDER DALAM STUDY ISLAM. Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman, 3(1), 116-128.
- Kim, J., Seo, M., and David, P. (2015). Alleviating depression only to become problematic mobile phone users: Can face-to-face communication be the antidote? Computers in Human Behavior, 51, 440-447.
- King, D., Delfabbro, P., & Griffiths, M. (2010). The Convergence of Gambling and Digital Media: Implications for Gambling in Young People. Journal of Gambling Studies, 26(2), 175–187. <https://doi.org/10.1007/s10899-009-9153-9>
- Kircaburun, K., Jonason, P. K., and Griffiths, M. D. (2018). The Dark Tetrad traits and problematic social media use: The mediating role of cyberbullying and cyberstalking. Personality and Individual Differences, 135, 264-269.
- Koentjaraningrat. 1975. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan
- Komnas Perempuan. (2020). Siaran Pers Hasil Kajian Komnas Perempuan tentang Perubahan Dinamika Rumah Tangga dalam Masa Pandemi Covid 19 (3 Juni 2020). Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-hasil-kajian-komnas-perempuan-tentang-perubahan-dinamika-rumah-tangga-dalam-masa-pandemi-covid-19-3-juni-2020>
- Kompas.id. (2024, Desember 24). Perang Tagar #TolakPPN12Persen Vs #PPNMemperkuatEkonomi. [https://www.kompas.id/artikel/perang-](https://www.kompas.id/artikel/perang-tagar-tolakppn12persen-vs-ppnmemperkuatekonomi?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/perang-)

- Konwles, S., Phillips, G. and Lidberg, J. (2017) 'Reporting the Global Financial Crisis: A Longitudinal Tri-Nation Study of Mainstream Financial Journalism', *Journalism Studies*, 18 (3): 322-40.
- Koswara, A. (2024). Digitalisasi Ekonomi di Pedesaan: Mengkaji Kesenjangan Infrastruktur Digital di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(3), 180-187.
- KPAI. (2025). Data Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2024. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Kriyantono. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai contoh praktis riset media, public relations, komunikasi organisasi & pemasaran*. Jakarta: Prenada.
- Kuntowijoyo. 1985. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*. Yogyakarta: Salahuddu Press – Pustaka Pelajar
- Latif, Yudi. (2011) *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 41-41
- Lee C. 2011. *International Communication Research: Critical Reflections and a New Point of Departure*.
- Lerner D. 1958. *The Passing of Traditional Society: Modernizing The Middle East*. London: The Free Press of Glencoe.
- Li M. 2020. Highlights, trends and patterns in Asian international communication research in the twenty-first century. *J Int Commun.* 0(0):238–259.  
doi:10.1080/13216597.2020.1780461.
- Li, J. et al. (2024). Profiles of fear of missing out and their social media use among young adults: A six-month longitudinal study, *Addictive Behaviors*, 149, 107899.  
doi:10.1016/j.addbeh.2023.107899.
- Li, Li; Mark D. Griffiths; & . (2020). Fear of Missing Out (FoMO) and Gaming Disorder among Chinese University Students:

Impulsivity and Game Time as Mediators. Issues and Mental Health 41(12), 1104-1113.

Lim, W. M., Rasul, T., & Ahmad, A. (2022). A unified theory of open government and social mediatization. *Business Information Review*, 39(3), 98–106. <https://doi.org/10.1177/02663821221104393>

Lindblom, C. (1977) Politics and Markets: The World's Political Economics Systems, New York: Basic Books

Lindblom, C. (1977) Politics and Markets: The World's Political Economics Systems, New York: Basic Books

Lisnawati, Praptiningsih, Novi A., Heryanto, Gun G., Bakti, Andi F., Hayat, H. (2024). Representation of Women Leadership in Nussa and Rara Animation from the Question of representation Perspective. *Communicare: Journal of Communication Studies* 11(2), 134-144. DOI: <https://doi.org/10.37535/101011220241>

Littlejohn SW, Foss KA. 2009. Encyclopedia of Communication Theory. California: SAGE Publications, Inc.

Littlejohn, Stephen W. and Karen A. Foss (ed). 2014. Ensiklopedia Teori Komunikasi jilid 1.

Liu, X. et al. (2023) 'The effect of fear of missing out on mental health: Differences in different Solitude Behaviors', *BMC Psychology*, 11(1). doi:10.1186/s40359-023-01184-5.

Livingstone, S., & Blum-Ross, A. (2020). Parenting for a Digital Future: How Hopes and Fears About Technology Shape Children's Lives. Oxford University Press.

Livingstone, S., Mascheroni, G., & Staksrud, E. (2018). Children's Rights in The Digital Age: A Comparative Study. Oxford University Press.

Lubis, D. P. (2010). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. In Proceedings of IPB's seminars.

- Lukes, S. (2005) Power: A Radical View, 2nd edn, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Lukman Ismail, N., Egi Regita, N., Jusfira Yuniar, N., Devia Ananda Umar, N., Muh. Ali fikri Subair, N., & Agung Indra Wijaya, N. (2024). Pertarungan Ideologi: Konflik Politik Dalam Dinamika Masyarakat Modern. *Aksiologi Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1). <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i1.194>
- Lynch.O. (2002), Humorous Communication: Finding a Place for Humor in Communication Research Communication Theory. University of Arizona.
- M. Marhaeni Saleh. 2020. Toleransi Umat Beragama di Indonesia (Perspektif Nurchalish Madjid). *Jurnal Aqidah-Ta* Vol. VI No. 1 Thn. 2020
- Ma'arif, Ahmad Syafii. 1987. Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante. Jakarta: LP3ES
- Madjid, Nurcholish. 1992. Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina
- Maharani, P. S., & Nurafifah, N. L. (2020). Political Communication: Social Media Strengths and Threats in the 2019 General Election. In *Politik Indonesia Indonesian Political Science Review*. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v5i2.21522>
- Maharani, R. P., Rahmawati, U., & Sari, D. N. (2022). Hiperrealitas Pengguna Tiktok. *Jurnal Komunikasi Dan Budaya*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.54895/jkb.v3i1.861>
- Mair, P, (2013) Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy, London: Verso.
- MAJID, N. (2023). Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum Di Era Digital. <https://doi.org/10.62238/perseptifjurnalilmusosialdanhumaniora.v1i2.34>

- Maletzke G. 2016. Participation in mass communication. *Media Asia*. 2(3):165–168. doi:10.1080/01296612.1975.11725854.
- Manjdusri, A. (2023). Opini Publik Tentang Nuansa Islam Dalam Praktik Periklanan Di Indonesia. *Jurnal CommLine*, 08(01), 55–70.
- Manukily, Anggelia Dea, Julia Pantow, Lingkan E. Tulung. 2016. Peran Komunikasi Keluarga dalam Mencegah Tindak Kekerasan Anak di Lingkungan Masyarakat Kelurahan Klabala Kota Sorong. *e-jurnal "Acta Diurna"* Vol 5 no 3.
- Mao, Jian & Bin Zhang. (2023). Differential Effects of Active Social Media Use on General Trait and Online-Specific State-FoMO: Moderating Effects of Passive Social Media Use. *Psychology Research & Behavior Management* 16, 1391-1402.
- Marchand, R. (1998) Creating the Coporate Soul, Berkeley, LA: University of California Press.
- Martin, R. A. (2007). The Psychology of Humor Integrative Approach. Canada: Elsevier Academic Press.
- Mas'amah, M., Nafie, J. A., Leuape, E. S., & Adu, A. A. (2023). Komunikasi Pendidikan Melalui Pemanfaatan Media Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Universitas Nusa Cendana. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(2), 274. <https://doi.org/10.31315/jik.v21i2.7647>
- Mascheroni, G. (2024). A New Family Member or Just Another Digital Interface? Smart Speakers in the Lives of Families with Young Children. *Human-Machine Communication*, 7, 45–63. <https://doi.org/10.30658/hmc.7.3>
- Maulani, Rayfan Ade, Ismatul Maula, Meutya Vianda Sari, Bakti Fatwa Anbiya. 2024. Penguatan Nilai-Nilai Toleransi Beragama Melalui Kegiatan Peace Camp. *Jurnal Riset Agama* Vol. 4, No. 2 (Agustus 2024): 125-136 DOI: 10.15575/jra.v4i2.34718 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>

- Maulida, U. (2022). Pergeseran Makna Kata Pada Komunikasi Generasi Alpha Sebagai Kontestasi Identitas. *Jurnal Bahasa*, 11(Maret), 38–49.
- McCombs, M. (2014). Setting the Agenda: Mass Media and Public Opinion.
- McLuhan, M. (1964). Understanding media: The extensions of man. MIT Press.
- McPhail TL. 2009. Development Communication Reframing the Role of Media. Blackwell Publishing.
- McPhail TL. 2014. Global Communication: Theories, Stakeholders, and Trends. West Sussex: Willey Blackwell.
- Melkote SR, Steeves HL. 2015. Communication for Development, Theory and Practice for Empowerment and Social Justice. New Delhi.
- Meyer, J. (1990). Ronald Reagan in Humor: A politician's velvet weapon. *Communication Studies*.
- Mil, Silvie & Praptiningsih, Novi A. (2025). Bookchapter Peran Generasi Muda dalam Pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup (Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022). ISBN: 978-634-206-839-7
- Miliband, R. (1969) The State in Capitalist Society, London: Weidenfeld and Nicolson
- Miller, D. and Dian, W. (2008) A Century of Spin: How Public Relayions Became the Cutting Edge of Corporate Power, London: Pluto Press.
- Mirowski, P. and Plehwe, D. eds. (2009) The Road from Mont Pelerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Mizrichi, M. (2013) The Fracturing of the American Corporate Elite, Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Morgan, M., Shanahan, J., & Signorielli, N. (2015). Growing Up With Television: The Cultivation Perspective. In Media Effects: Advances in Theory and Research (pp. 34–49). Routledge.
- Morisan. (2019) Riset Kualitatif, Jakarta: Prenadamedia Group, 15-16.
- Mowlana H. 1996. Global Communication in Transition: The End of Diversity? California: SAGE Publications, Inc.
- Muchtar, K. (2016). Penerapan komunikasi partisipatif pada pembangunan di Indonesia. *Jurnal Makna.*, 1(1), 20–32. <https://doi.org/10.33558/makna.v1i1.795>
- Muhammad Raihan et.al. (2025). Dinamika Opini Publik dan Perubahan Sosial. *Jurnal Komunikasi, Sosial, Dan Ilmu Politik*, 7482, 62–66.
- Muhid, H. K., & Juliansyah, R. (2024). Kasus-kasus Kriminal Akibat Judi Online, Termasuk Polwan Bakar Suami dan Pembunuhan Ibu Kandung. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/kasus-kasus-kriminal-akibat-judi-online-termasuk-polwan-bakar-suami-dan-pembunuhan-ibu-kandung-46082>
- Mulia, Musdah. 2006. Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender. Yogyakarta: Kibar Pres
- Muljono, P. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bogor (ID): IPB Press.
- Munardin Hadma, A., & Dwi Anggoro, J. (2021). Political communication in the age of social media. *Commicast*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.12928/commicast.v3i1.5114>
- Mustiawan, M., & Pranawukir, I. (2024). Hyperrealites Online Gambling Wins on The “Pola Gacor” Content Youtube. *ETTISAL: Journal of Communication*, 9(2), 267–283. <https://doi.org/10.21111/ejoc.v9i2.12451>
- Mustiawan. (2024). Hyperrealites Online Gambling Wins On Gacor Pattern Youtube Content. *ETTISAL: Journal of*

- Nabilah, O., Praptiningsih, Novi A., Hermansah, T., Fanshoby, M., Hayat, H. (2024). Young Generation Perceptions of Marriage: Analizing the #MarryIsScary Hashtag on Tik Tok. *Communicare: Journal of Communication Studies* 11(2), 168-176. DOI://<https://doi.org/10.37535/101011220244>
- Naim, M. (2013) The End of Power: From Boardrooms to Battlefields and Churches to States, Why Being in Change Isn't What is Used to Be, New York: Basic Books.
- Nainggolan, E. T., Godliebe, G., & Hadi, W. (2024). Analisis Penggunaan Bahasa dalam Propaganda Politik di Media Sosial. *Jurnal Bahasa Daerah Indonesia*, 1(3), 8. <https://doi.org/10.47134/jbdi.v1i3.2606>
- Nanda, V. S., & Budimansyah, D. (2020). Strengthening of Digital Media Literacy-Based Character Education on Hoax News Spreading to Students (Case Study on Citizenship Education Learning in SMP Negeri 2 Bandung). In *Journal of International Conference Proceedings*. <https://doi.org/10.32535/jicp.v2i4.804>
- Nasrullah, R. (2014). Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia) (1 ed.). Kencana Media Grup.
- Nasrullah, R. (2021). Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi). Simbiosa Rekatama Media.
- Nasution, Harun. 1983. Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan. Jakarta: UI Press
- Nasution, Muhammad Mahmud. 2021. Tinjauan Batasan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Islam. *Jurnal FORUM PAEDAGOGIK*. Vol. 12, No. 1 (2021) P-ISSN: 2086-1915 | E-ISSN 2721-8414
- Nazsir, Nasrullah. 2008. Teori-Teori Sosiologi. Bandung: Widya Padjadjaran

- Neuman, W. L. (2018). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi ke-7. Jakarta (ID): Indeks.
- Nihayah, I., & Suharto, Y. (2020). FEMINISME DAN KRITIK IDEOLOGI TERHADAP ILMU PENGETAHUAN. EMPIRISMA: JURNAL PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN ISLAM, 29(2).
- Noer, Deliar. 1996. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES
- Nolan, Katherine. (2021). Fear of missing out: performance art through the lens of participatory culture. International Journal of Performance Arts and Digital Media 17(2), 234-252.
- Norrick, Neal, Dalia, Chairo. (2009). Humor in Interaction. Amsterdam,
- Nuraliza, V., Andhi Nur Rahmadi, Alvan Mubaroq, Kristiyono Kristiyono, Alisyia Putri Melani, & Anila Ifana. (2024). Peran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik Menghadapi Pemilu 2024. CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan, 4(1), 245–261. <https://doi.org/10.55606/cendikia.v4i1.2514>
- Nurfajri, I., Teguh, E., Pratama, H., Tupamahu, G. S., Saputra, R., & Erwina, Y. (2025). Dampak Algoritma AI terhadap Komunikasi Publik: Memahami Manipulasi Informasi dan Realitas. CONVERSE: Journal Communication Science, 1(3), 1–13.
- O'Day, E.B. and Heimberg, R.G. (2021) 'Social media use, social anxiety, and loneliness: A systematic review', Computers in Human Behavior Reports, 3, p.100070.
- Oberst, U., Wegmann, E., Stodt, B., Brand, M., and Chamarro, A. (2017). Negative consequences from heavy social networking in adolescents: The mediating role of fear of missing out. Journal of Adolescence, 55, 51–60.
- Odacı, H., and Çirkırkıç, Ö. (2014). Problematic internet use in terms of gender, attachment styles and subjective well-being in

- university students. *Computers in Human Behavior*, 32, 61-66.
- Offe, C. (1984) *Contradictions of the Welfare State* (ed. Keane, J.) Cambridge, MA: MIT Press.
- Offe, C. (1984) *Contradictions of the Welfare State* (ed. Keane, J.) Cambridge, MA: MIT Press.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble, What the Internet Is Hiding from You*.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What The Internet is Hiding from You*. Penguin Books.
- Parreira, P., Thorson, J. A. & Allwardt, D. (2007). A Factor-Analytic Study of the Multidimensional Sense of Humor Scale with a Portuguese Sample. *Journal of Psychology*, 9 (3), 595-610.
- Paul, John .2009. Meme Maps: A Tool for Configuring Memes in Time and Space. *European Journal of Scientific Research* ISSN 1450-216X Vol.31 No.1 (2009), pp. 11-18.
- Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 – 2024.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Petronia, Sandra. 2017. *Teori Managemen Privasi dalam West, Richard dan Lynn H. Turner*. 2017. *Pengantar Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Philo, G. (1995) *Glasgow Media Group Reader*, Vol. 2: *Industry, Economy, War and Politics*, London: Routledge.
- Piketty, T. (2014) *Capital in the 21st Century*, Cambridge, MA: Harvards University Press.

- Praptiningsih, N. A., Tarmini, W., & Marsinun, R. (2020). Communication and Motivation Coming Out Gay as Self Identity in Indonesia. *Jurnal ISKI*. 5(1), 90 – 100.
- Praptiningsih, N.A., Mil, S., Hayat, H. (2024). Violence Against Women and Children in The Context of Toxic Communication. *Jurnal SUHANAH* 1(1), 13-21.
- Praptiningsih, Novi A., Mulyono, H., Mil, S., Rohim, S., Setiawan, B. (2024). Evaluation of the psychometric properties of the homophobia scale in religious-based university students in Indonesia. *Acta Psychologica*, 249, 104474. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104474>
- Praptiningsih, Novi A., Mulyono, H., Setiawan, B. (2024). Toxic relationship in youth communication through self-love intervention strategy. *Online Journal of Communication and Media Technologies* 14(2), 1-10. <https://doi.org/10.30935/ojcmt/14292>
- Praptiningsih, Novi A., Putra, G.K. (2021). Toxic Relationship Dalam Komunikasi Interpersonal Di Kalangan Remaja. *Communication Journal* 12(2), 139-149
- Prasanti, Dhita. 2017. Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Perilaku Bullying bagi Anak. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* (1): 23
- Prasetya, hendri (2024). Pemanfaatan Humor Dalam Komunikasi Relasional Sebagai Upaya Membangun Sense of Immediacy Dikalangan Pengajar Pada Pembelajaran Melalui Media Online. *Innovatieve: Jurnal of Social science Research*. Vol 4 No.3 2024.
- Priyanto, A., Purnomo, E. P., Fadhlurrohman, M. I., fahamsyah, H., & Khairina, E. (2021). The Influence of Social Media (Instagram) of Bantul's General Election Commissions on Voters Participation in the 2019 Elections. In *Journal of Government and Civil Society*. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i1.2924>

- Przybylski, Andrew K., Kou Murayama., Valerie Gladwell., & Cody R DeHan. (2013). Motivational, Emotional and Behavioral Correlates of Fear of Missing Out. Computer in Human Behavior 29,1841-1848. doi: 10.1016/j.chb.2013.02.014
- Putnam, R. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Putnam, R., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. In *A Century in Books: Princeton University Press 1905–2005*. <https://doi.org/10.2307/2620793>
- Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan, 20(2), 282–290. <https://doi.org/10.46781/al-mutharrahah.v20i2.763>
- Ragin, Nagel & White. (2004) Introduction to Communication Research, Mc Graw-Hill, 12.
- Rahadian, A. (2019). Bagian II — Feminisme Liberal, Radikal, Marxist, dan Sosialis. Medium.com. Accessed from <https://medium.com/@ariefism/bagian-ii-feminisme-liberal-radikal-marxist-dan-sosialis-1909b57a8386>
- Rahim, S. N., Shabrina, H. N., Salsabila, R., Hanum, S., Zemlya, N. A.-R., & Rahman, A. (2024). Peran Buzzer Di Media Sosial Dalam Membentuk Opini Kebijakan Publik Di Masyarakat Pada Pemilu 2024. PubBis : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis, 8(2), 147–158. <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v8i2.1051>
- Rahmanadji, D. (2007). Sejarah, Teori, Jenis, dan Fungsi Humor. Jurnal Bahasa dan Seni, 35 (2), 213-221
- Rajab, Budi. 2004. Negara Orde Baru: Beridid di Atas Sistem Ekonomi dan Politik yang Rapuh. Jurnal Sosiohumaniora, vol 3 (3). hlm. 190-201.

- Rajagukguk, T. P., & Sofianto, K. (2020). Simulakra Hiperrealitas Dan Reproduksi Tanda Gim Pubg. *Metahumaniora*, 10(1), 118–136.
- Ramkita, M., & Muslim, M. (2023). Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik (Studi Kasus Sosial Media Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Selatan). In *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1009>
- Raskin, Victor, Ruch, Willibald. (2008). *The Primer of Humor Research*. Berlin, Mouton de Gruyter.
- Reicher, S. D., Spears, R., & Postmes, T. (2010). A Social Identity Model of Deindividuation Phenomena. *European Review of Social Psychology*, 2(1), 161–198. <https://doi.org/10.1080/14792779443000004>
- Reuters. (2017) *Reuters Institute Digital News Report*, Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.
- Reyna, J., Hanham, J., & Meier, P. (2018). A Framework for Digital Media Literacies for Teaching and Learning in Higher Education. In *E-Learning and Digital Media*. <https://doi.org/10.1177/2042753018784952>
- Rezillah, A. A., Siswoyo, M., & Nariyah, H. (2018). Implementasi kebijakan program bina keluarga balita di balai penyuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. *Jurnal Ilmiah Publika*, 6(1), 1-14.
- Rianto, P., Sofia, N., & Murtafi'ah, B. (2024). Peningkatan Literasi Digital Untuk Budaya Partisipasi Di Media Sosial Untuk Siswa SMA. In *Pengabdianmu Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i4.7057>
- Rico, R., Susanto, D., & Fatimah, S. (2024). Komunikasi Sebagai Alat Kontrol Sosial: Analisis Kritis Berdasarkan Pemikiran

Friedrich Pollock. Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial, 6(1), 137. <https://doi.org/10.31602/jt.v6i1.14293>

Rijal, M., & Noer, S. (2013). Peran modal sosial dalam pelestarian hutan. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(2), 20–36.

Risdyanti, K.S., Faradiba A.T., Syihab, Aisyah. (2019). Peranan Fear Of Missing Out Terhadap Problematic Social Media Use. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 3(1), 276-282. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3527>

Riyanto, A. D. (2024). Hootsuite (We are Social): Data Digital Indonesia 2024. [Www.Andi.Link.Com](http://www.Andi.Link.Com). <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/>

Robert W. 1993. Dialog Psikologi dan Agama (Terj. A.M. Hardjana). Yogyakarta: Kanisius Sardar, Ziauddin. 1988. Tantangan Dunia Islam Abad 21 Menjangkau Informasi (Terj. A. E. Priyono dan Ilyas Hasan). Jakarta: Mizan

Roberts, J.A. and David, M.E. (2019). The Social Media Party: Fear of missing out (FOMO), social media intensity, connection, and well-being, *International Journal of Human–Computer Interaction*, 36(4), pp. 386–392. doi:10.1080/10447318.2019.1646517.

Rogers EM, Kincaid DL. 1982. Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research. Volume ke-61.

Rosana, Ellya. (2015). Modernisasi dalam Perpektif Perubahan Sosial. *Al-Adyan Jurnal Studi Lintas Agama*. Vol. X, N0.1/Januari-Juni/2015 UIN Raden Intan Lampung

Rumata, V. M. (2017). Komunikasi Keluarga Kota dan Desa di Era Teknologi Komunikasi. 2(1), 43–54.

Sabarua, Oxianus dan J. Mornene. 2020. Komunikasi Keluarga dalam Membentuk Karakter Anak. *International Journal of Elementary Education*. (2020) 4 (1) 83.

- Sabrina, A. R. (2019). Literasi Digital Sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax. In Communicare Journal of Communication Studies. <https://doi.org/10.37535/101005220183>
- Sahara, K. D., Lukitasari, R., & Maulana, S. (2024). Pola Komunikasi Generasi Alpha Di Tengah Pesatnya Transformasi Teknologi Digital. Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya 2024. Universitas Negeri Surabaya, 1120–1128.
- Salman Salleh @ Abdul Latif, A. S., Aqilah Megat Zambri, W. A., Abdul Latiff, D. I., & Kamal, S. (2023). Media Literacy and Digital Citizenship in the Era of Social Media. In International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i11/19392>
- Salmony, Rooy John. (2009). Kerusuhan Ambon sebagai Konflik Sosial, <http://www.suaramerdeka.com/harian/9908/11/kha2.htm> (10 Agustus 2009)
- Salsabila, T. H., Indrawati, T. M., & Fitrie, R. A. (2024). Meningkatkan Efisiensi Pengambilan Keputusan Publik melalui Kecerdasan Buatan. Journal of Internet and Software Engineering, 1(2), 21. <https://doi.org/10.47134/pjise.v1i2.2401>
- Sangian, D. A., Dengo, S., & Pombengi, J. D. (2018). Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. *E-Jurnal Unsrat*, 2(1), 1–10.
- Sari, A. K., Al-Fajrih, M., & Ahdiyanti, I. (2023). Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial. Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 3(2), 31–44. <https://doi.org/10.47945/al-hikmah.v3i2.1539>
- Satria M, D., Zulfadli, Z., & Zuhri, A. (2023). The Role of Social Media in Increasing Political Literacy of Beginning Voters. *Malikussaleh Social and Political Reviews*, 4(2), 77. <https://doi.org/10.29103/mspr.v4i2.11948>

- Schiller H. 2016. Herb Schiller - Communication and Cultural Domination. Volume ke-5.
- Schramm W. 1964. Who is to know? Mass Media and National Development: The Role of Information in the. *Am Behav Sci*. [https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=z16jAAAAIAA&J&oi=fnd&pg=PA1&dq=Mass+media+and+national+development.+The+role+of+information+in+the+developing+countries.+&ots=3Gnd3ES3od&sig=TScPQW3zUND\\_rrfID6UAFN5nL2Y](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=z16jAAAAIAA&J&oi=fnd&pg=PA1&dq=Mass+media+and+national+development.+The+role+of+information+in+the+developing+countries.+&ots=3Gnd3ES3od&sig=TScPQW3zUND_rrfID6UAFN5nL2Y).
- Scott, H. and Woods, H. C. (2018). Fear of missing out and sleep: Cognitive behavioural factors in adolescents' nighttime social media use. *J. Adolesc.*, 68, 61–65.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). Research Method for Business: a Skill Building Approach. Ed ke-5. New York (US): John Wiley and Sons Ltd.
- Sellita. (2023). THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ON PEOPLE'S POLITICAL PREFERENCES: EVIDENCE FROM THE INDONESIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS IN 2019. *JURNAL STUDI INTERDISIPLINER PERSPEKTIF*, 22(August).
- Servaes, J. (1999). *Communication\_for\_Development.\_One\_World.pdf*. Hampton Press.
- Servaes, J. (2008). *Communication for Development and Social Change*. SAGE Publications. SAGE Publications.
- Setiawan, N. (2007). Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin dan Tabel Krejcie-Morgan: Telaah Konsep dan Aplikasinya. Bandung (ID): Universitas Padjadjaran.
- Sherlyanita, A. K., & Rakhmawati, N. A. (2016). Pengaruh Dan Pola Aktivitas Penggunaan Internet Serta Media Sosial Pada Siswa SMPN 52 Surabaya. In *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*. <https://doi.org/10.20473/jisebi.2.1.17-22>

- Shi, G. et al. (2024) 'The double-edged sword effect of leaders' fear of missing out on leaders' creativity: An experience sampling method study', *Psychology Research and Behavior Management*, Volume 17, pp. 259–271. doi:10.2147/prbm.s449490.
- Shoemaker, P. J., & Vos, T. P. (2009). Gatekeeping Theory.
- Sibaweh, Nurdin; dan Rusadi, Udi (2021) Pemaknaan Radikalisme Agama Dalam Koran Kompas (Analisis Resepsi Pemberitaan Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral, Makasar), *Communication*, 12(2), 83-94.
- Sibaweh, Nurdin; dan Rusadi, Udi (2021) Pemaknaan Radikalisme Agama Dalam Koran Kompas (Analisis Resepsi Pemberitaan Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral, Makasar), *Communication*, 12(2), 83-94.
- Siegel, L.A. and Wang, D. (2018) 'Keeping up with the joneses: Emergence of travel as a form of social comparison among millennials', *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 36(2), pp. 159–175. doi:10.1080/10548408.2018.1499579.
- Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for The Digital Age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3–10. [https://www.itdl.org/Journal/Jan\\_05/article01.htm](https://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm)
- Simpson, J. E. (2017). Staying in Touch in the Digital Era: New Social Work Practice. *Journal of Technology in Human Services*, 35(1), 86–98. <https://doi.org/10.1080/15228835.2017.1277908>
- Siregar, Ridho Ella Wardani, Nova Fadilla, Ayu Septiani. Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Pandangan Generasi Milenial. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 16, No. 4 Juli - Agustus 2022. n <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam> P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i4.1094

- Siregar, S., & Suyanto, S. (2017). Representasi Identitas Seksual Transgender Dalam Film the Danish Girl (Doctoral dissertation, Riau University).
- SK, Ishadi. (2014) Media dan Kekuasaan, Televisi di Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto, Jakarta: Kompas, 28-29.
- Solehudin, H., Corliana, T., Chaidar, A., Puteh, A., Ridwan, W., & Budiarti, E. (2024). NARRATIVE OF IDENTITY POLITICS IN THE 2024 PRESIDENTIAL ELECTIONS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS a Rd . DA REPÚBLICA DA INDONÉSIA DE 2024: ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO. 1–30.
- Solehudin, R. H. (2023). Pengenalan Digital Citizenship di Lingkungan Sekolah Dasar. J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial), 9(2), 139–151.
- Solehudin, R. H. (2024). The Problematic of Digital Inequality in an Educational Political Policy Perspective. 5, 531–540.
- Solehudin, R. H. (2024). The Problematic of Digital Inequality in an Educational Political Policy Perspective. EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 5(1), 531–540. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.763>
- Solehudin, R. H., Budiarti, E., Hikmat, A., Gunawan, R., Yumirawati, E., Ahmad, N., Nahidl, A., & Anwar, S. (2023). The Effect of Family Economy on Education Opportunities ( Analysis of the Impact of Parents ' Irregular Income on Millennial Children ' s Educational Opportunities in the DKI Jakarta Area ). 5, 1095–1107.
- Solehudin, R. H., Budiarti, E., Saddhono, K., Digidoy, E., Chaidar, A., & Puteh, A. (2025). Middle East Conflict and Its Implications on the Indonesian Economy. 23, 4478–4489.
- Stephen W. Littlejohn, Foss KA, Oetzel JG. 2017. Theories of Human Communication Eleventh Edition. Eleventh. Long Grove, Illinois: Waveland, Press, Inc.

- Streeck, W. (2017) *Buying Time: The Delayed Crisis of Democracy* Capitalism, 2nd edn, London: Verso.
- SuaraMerdeka.com (2025). [/nasional/0414653471/darurat-kenakalan-remaja-apa-yang-harus-dilakukan-orang-tua#google\\_vignett](https://nasional/0414653471/darurat-kenakalan-remaja-apa-yang-harus-dilakukan-orang-tua#google_vignett)
- Sudibyo, Agus, Hamad, Ibnu, Qodari, Muhammad. (2001). *Kabar-kabar kebencian: prasangka agama di media massa*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Sugihono, C., Hariadi, S. S., & Wastutiningsih, S. P. (2024). Integrasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Layanan Penyuluhan Pertanian. *Jurnal Penyuluhan*, 20(02), 178-190.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sundar, S. S. (2008). The Main Effects of The Internet: A Tutorial. *Communication Research*, 35(2), 234–249. <https://doi.org/10.1177/0093650207313728>
- Suparno, B. A., & Hendariningrum, R. (2014). The role of family to enlarge an infan's capacity in communication development. *Humaniora*, 26(2), 203–212.
- Survey Asosiasi Jasa Pengguna Internet Indonesia (AJPII). 2024.
- Suryani, A. I. (2023). Socialization of the Use of Digital Literacy and Media Literacy for Students of SMPN 3 PAINAN. In *Asian Journal of Community Services*. <https://doi.org/10.55927/ajcs.v2i7.4941>
- Suseno, Franz Magnis. (2016) *Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 389-391.
- Susilawati, E., & Kurnia, H. (2024). Etika dalam Pendidikan Politik ( menghadapi bias dan propoganda ). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik (JPKP)*, 2(2), 93–112.
- Sussman, G. (2011) *The Propaganda Society: Promotional Culture and Politics in Global Context*, New York: Peter Lang.

- Sussman, G. (2011) *The Propaganda Society: Promotional Culture and Politics in Global Context*, New York: Peter Lang.
- Syahraeni, Andi. Peran Keluarga dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vo.8 No. 1, Mei 2021. h: 47-71.
- TafsirWeb. (n.d.-a). Surat Al-Mujadalah Ayat 11. *Tafsirweb.Com*. Retrieved March 22, 2025, from <https://tafsirweb.com/10765-surat-al-mujadalah-ayat-11.html>
- TafsirWeb. (n.d.-b). Surat Ali 'Imran Ayat 104. *Tafsirweb.Com*. Retrieved March 22, 2025, from <https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imran-ayat-104.html>
- TafsirWeb. (n.d.-c). Surat Ali 'Imran Ayat 110. *Tafsirweb.Com*. Retrieved March 22, 2025, from <https://tafsirweb.com/1242-surat-ali-imran-ayat-110.html>
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of Intergroup Relations* (pp. 7–24). Nelson-Hall.
- Tambunan, Liza Yosephine, dan Bakti, Andi Faisal (2016). Analysis Of Indonesia's National Cultural Image Representation On The Ministry Of Foreign Affairs Official Website, *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, (7) 1, 7-8.
- Tempo.co. (2024, November 26). Petisi Tolak PPN 12 Persen Menguat, Berikut Deretan Faktanya.<https://www.tempo.co/ekonomi/petisi-tolak-ppn-12-persen-menguat-berikut-deretan-faktanya-1173197>
- Thorson, J. A., Powell, F. C., Schuller, I. S., & Hampes, W. P. (1997). Psychological Health and Sense of Humor. *Journal of Clinical Psychology*, 53 (6), 605-619).
- Thoyibah, Zurriyatun, Intan Sari, dan Sumarni. 2017. Korelasi antara Pola Komunikasi Keluarga dengan Kenakalan Remaja SMPN, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat. Dikutip dari:

- Thussu DK. 2000. International Communication: Continuity and Change. Arnold (A member of the Hodder Headline Group) London.
- Tiffen, R. et al., (2014) 'Sources in the News: A Comparative Study', *Journalism Studies*, 15 (4): 374-91
- Tinarbuko, S. 2009. Semiotika Komunikasi Visual (Revisi). Yogyakarta: Jalasutra. Budiman, Kris.2011. Semiotika visual. Yogyakarta : Jalasutra
- Turcios, M. E., Agarwal, N., & Watkins, L. (2012). Library & information science literature: How much of it is research? *Proceedings of the American Society for Information Science and Technology*, 49(1), 1–4. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/meet.14504901320>
- Turkle, S. (2015). Reclaiming Conversation: The Power of Talk in A Digital Age. Penguin Press.
- Twenge, J. M. (2017). iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood. Atria Books.
- Twenge, J. M., Spitzberg, B. H., & Campbell, W. K. (2018). Less In-Person Social Interaction With Peers Among U.S. Adolescents in The 21st Century and Links to Loneliness. *Journal of Social and Personal Relationships*, 35(4), 540–561. <https://doi.org/10.1177/0265407517690969>
- Uldafira, A., & Rochmaniah, A. (n.d.). The Effect Of Using Social Media And Family Communication On Cyber bullying Behavior In Children [ Pengaruh Penggunaan Media Sosial Dan Komunikasi Keluarga Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Anak ]. 1–12.
- Umar, T. M. (2005). Propaganda Feminisme dan perubahan sosial. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 205-214.

- Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2013). The Effects of Online Media on Adolescent Well-Being. *Media Psychology*, 16(2), 85–113. <https://doi.org/10.1080/15213269.2013.778190>
- Van der Heijden ed. (2016) *Handbook of Political Citizenship and Social Movement*, Cheltenhem: Edward Elgar Publishing.
- Vangelisti, Anita L. (ed). 2004. *Handbook of Family Communication*. London: Lawrence Erlbaum Assosiates, Publisher.
- Vegas, Maria Isabel. 2024. Family Fucntionary and Aggresion among Spanish Adolesents.Examining the Role of Family Cohesion, Family Flexibility, Family Communication, and Family Satisfaction. *Journal of Family Therapy* 2-24.
- Vian, K., & Arts, L. (2021). Parental Attitude and Parental Intervention Strategies on Digital Media Usage Among Young Children Literature Review Parental Intervention Strategies. 6(9), 419–429.
- Wagner, Peter.(2007). *Let's Laugh; discovering how laughter will make you healthy*. USA, Destini Image Publish.
- Wahyu Mahesa Miarta. (2024). Voter Behavior and Social Media Influence: A Case Study of Indonesia's 2024 General Election. *Educational of History and Humanities*.
- Wahyudi, T. (2019). Paradigma Pendidikan Anak dalam Keluarga di Era Digital (Perspektif Pendidikan Islam). *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 4(01), 31. <https://doi.org/10.32332/riayah.v4i01.1489>
- Wardah, F. (2024, June 26). PPATK: Lebih 1.000 Anggota DPR dan DPRD Main Judi Online. [Www.Voaindonesia.Com.](https://www.voaindonesia.com/a/ppatk-lebih-1-000-anggota-dpr-dan-dprd-main-judi-online/7674973.html) <https://www.voaindonesia.com/a/ppatk-lebih-1-000-anggota-dpr-dan-dprd-main-judi-online/7674973.html>
- Wardatun, A. (2006). Pornografi Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Kajian Kritis Pandangan Feminisme Radikal). *Ulumuna*, 10(2), 215-236.

We are Social. (2025). Digital 2025 Global Overview Report. <https://wearesocial.com/id/blog/2025/02/digital-2025/> ps://www.pewresearch.org

Wegmann, E., Oberst, U., Stodt, B., and Brand, M. (2017). Addictive Behaviors Reports Online- specific fear of missing out and Internet-use expectancies contribute to symptoms of Internet-communication disorder. *Addictive Behaviors Reports*, 5, 33–42.

West, D. M. (2018). The Future of Work: Robots, AI, and Automation. Brookings Institution Press.

Wiratama, M. J., Darsono, N., & Putra, T. R. I. (2017). Pengaruh teknologi informasi dan modal intelektual terhadap efektivitas komunikasi serta implikasinya pada kinerja karyawan PT. Kurnia Purnama Jaya. *Jurnal Manajemen Inovasi*, 8(2), 51-69.

Wood, R. T. A., & Griffiths, M. D. (2007). A qualitative investigation of problem gambling as an escape-based coping strategy. *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice*, 80(1), 107–125. <https://doi.org/10.1348/147608306X107881>

Wridgh, Charles R. 1985. Sosiologi Komunikasi Massa (Terj. Lilawati Trimmo dan Jalaluddin Rahmat). Bandung: Remadja Karya

Wulandari, C., Budiono, P., & Iswandaru, D. (2021). Importance of social characteristic of community to support restoration program in protection forest. *Indonesian Journal of Forestry Research*, 8(2), 173–186. <https://doi.org/10.20886/ijfr.2021.8.2.173-186>

Wu-Ouyang, B. (2024). Boosting or limiting? examining how Fomo influences personal news curation through news fatigue in social media, *Digital Journalism*, 12(4), pp. 537–556. doi:10.1080/21670811.2024.2326629.

- Xu, Y., Chen, Q. and Tian, Y. (2024) 'The impact of problematic social media use on inhibitory control and the role of fear of missing out: Evidence from event-related potentials', *Psychology Research and Behavior Management*, Volume 17, pp. 117–128.
- Yanti Dwi Astuti. 2017. Kontruksi Perempuan dalam Media Baru: Analisis Semiotik Meme Ibu-Ibu Naik Motor di Media Sosial. Dalam jurnal Palestren: Vol. 10, No. 2, Desember.
- Yaputri, M.S., Dimyati, D. and Herdiansyah, H. (2022) 'Correlation between fear of missing out (FOMO) phenomenon and consumptive behaviour in millennials', *Eligible: Journal of Social Sciences*, 1(2), 116–124.
- Yue, Hao, & Goldman. (2010). Humor Styles, Dispositional Optimism, and Mental Health Among Undergraduates in Hong Kong and China. *Journal of Psychology in Chinese Societies*, 11 (2). 81-96.
- Zacharias, T. (2019). Efektivitas komunikasi organisasi pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi maluku. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 3(2), 92-116.
- Zaky, I., Fatih, A., & Putera, R. A. (2024). Peran Algoritma Media Sosial dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu Ismail. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* Volume, 7(1).  
<https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i1.10090>

# **PERAN MEDIA DAN KOMUNIKASI**

## **DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK DAN PERILAKU SOSIAL**

Di era informasi yang serba cepat dan terkoneksi, media dan komunikasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat penyampai pesan, tetapi telah menjadi kekuatan besar yang membentuk cara pandang masyarakat dan arah perilaku sosial. Dalam dunia yang semakin terhubung dan dinamis, peran strategis media dan komunikasi dalam membentuk arah pembangunan sosial dan budaya perlu disikapi secara kritis dan konstruktif.

Melalui kajian teoritis yang tajam dan contoh-contoh aktual yang relevan, buku ini menjelaskan bagaimana framing berita, viralitas di media sosial, dan narasi dalam komunikasi publik membentuk persepsi, sikap, bahkan kebijakan. Tidak hanya memotret fenomena, buku ini juga menawarkan perspektif kritis tentang etika media, hoaks, hingga tantangan dalam era *post-truth*.

Buku ini menyajikan berbagai gagasan dan perspektif yang saling berkaitan, sebagai kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Media dan komunikasi diposisikan sebagai instrumen penting dalam mendidik masyarakat, memperluas akses informasi yang inklusif, serta membangun kesadaran kolektif terhadap isu-isu penting seperti sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Lebih jauh, media juga berpotensi menjadi alat perjuangan untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.

Disusun dalam 14 tema besar, buku ini mengkaji keterkaitan antara media, komunikasi, dan perilaku sosial dalam konteks digitalisasi dan globalisasi. Beberapa tema utama meliputi perubahan perilaku sosial generasi muda di era digital, strategi komunikasi dalam menjaga budaya lokal, dinamika komunikasi keluarga dan pembentukan karakter anak, serta peran media massa dalam membentuk persepsi publik dan opini politik. Buku ini juga menyoroti pentingnya komunikasi politik dan antarbudaya dalam menjaga harmoni sosial, menyelesaikan konflik, dan mendorong partisipasi warga dalam pembangunan.



**UHAMKA Press**  
Jl. Gandaria IV, Kramat Pela, Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan  
e-mail: [press@uhamka.ac.id](mailto:press@uhamka.ac.id)

ISBN 978-623-7724-54-4



9 786237 724544